



LIPUTAN MEDIA

KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA



25-27 April 2017 M
28-30 Rajab 1438 H

Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamiy
Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Liputan Media
Kongres Ulama Perempuan Indonesia
25-27 April 2017 M/28-30 Rajab 1438 H
Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy
Babakan Ciwaringan Cirebon Jawa Barat

© **KUPI 2017**

Penyusun : Satori
Rosidin
Isma'il Hasani
Editor : Marzuki Wahid
Desain Grafis : Agus Munawir
Tata Letak : Agus Munawir

Cetakan Pertama, Juli 2017

Diterbitkan oleh:

Kongres Ulama Perempuan Indonesia

1. Sekretariat Jakarta:
Rahima, Jl. H. Shibi No. 70 RT 07 RW 01 Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta
12640. Telp. 021-78881272, Faks: 7873210. Website: www.rahima.or.id.
E-mail: rahima2000@cbn.net.id
2. Sekretariat Cirebon:
Jl. Swasembada 15 Majasem Karya Mulya Kota Cirebon Jawa Barat 45131
Telp./Fax 0231-8301548. Website: www.fahmina.or.id.
E-mail: fahmina@fahmina.or.id

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Liputan Media
Kongres Ulama Perempuan Indonesia **KUPI 2017**
Cetakan I-Cirebon: KUPI

xviii + 282 hal: 17x25 cm

ISBN:

1.

I. Judul

II. KUPI

LIPUTAN MEDIA
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA

25-27 APRIL 2017 M
28-30 RAJAB 1438 H

PONDOK PESANTREN KEBON JAMBU AL-ISLAMY
BABAKAN CIWARINGIN CIREBON JAWA BARAT

meneguhkan
nilai keislaman, kebangsaan
dan kemanusiaan

KATA PENGANTAR

“Sesungguhnya Allah akan mengutus (menghadirkan) bagi umat ini orang yang akan memperbaharui (urusan) agama mereka pada setiap akhir seratus tahun”
[Sunan Abu Dawud, 6/349]

Pada abad ke-21 ini, kita telah menyaksikan geliat kebangkitan ulama perempuan Indonesia. Kebangkitan ini ditandai dengan kongres yang mereka selenggarakan. Kongres ini bernama Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), digelar pada 25-27 April 2017 di Pondok Pesantren Jambu al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon. KUPI pertama ini melibatkan sekitar 700an peserta dan peninjau dari berbagai kalangan. Di antaranya ulama perempuan dari kalangan pesantren, ulama perempuan dari perguruan tinggi, ulama perempuan dari Ormas Islam, dan ulama perempuan dari lembaga swadaya masyarakat. Mereka berkumpul, berjumpa, berdiskusi, dan menyepakati sejumlah hal yang menjadi isu pokok yang menyangkut hajat perempuan pada abad ini.

Ada sejumlah isu pokok dibahas yang menjadi perhatian Kongres. Di antaranya adalah kekerasan seksual, pernikahan anak, perusakan alam, radikalisme agama, trafiking dan buruh migran, pendidikan ulama perempuan, pembangunan desa, serta konflik sosial dan krisis kemanusiaan. Inilah sejumlah isu penting yang muncul dan memengaruhi kehidupan umat manusia pada hari ini dan ke depan. Ulama perempuan Indonesia—dalam Kongres ini—memberikan perhatian, mengkaji, dan merumuskan pandangan dan sikapnya atas isu-isu tersebut.

Ada banyak hal yang menarik untuk dicatat dari hasil rumusan ‘fatwa keagamaan’ KUPI Cirebon kemarin. Misal saja, dalam musyawarah keagamaan, ulama perempuan Indonesia menetapkan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan sama, yakni 18 tahun. Artinya, mereka yang menikah di bawah usia 18 tahun disebut sebagai pernikahan anak. Tentu saja, ini keputusan yang sangat berbeda dengan ketentuan UU Perkawinan, ketentuan Kompilasi

Hukum Islam, fatwa MUI, dan banyak hasil bahtsul masa'il yang dilakukan ulama laki-laki. Pada umumnya mereka membedakan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan. UU Perkawinan Indonesia (UU Nomor 1 Tahun 1974) menetapkan usia minimal menikah bagi laki-laki 19 tahun, sementara bagi perempuan 16 tahun.

Kongres juga menetapkan bahwa perzinahan dan pemerkosaan adalah dua pidana (*jarimah*) yang berbeda, baik dari sisi definisi, unsur-unsur, maupun sanksi pidananya. Pemerkosaan memiliki sanksi yang lebih berat dari perzinahan, karena ada tambahan tindak pidana pemaksaan (*ikrah*) yang dilakukan pemerkosa. Dalam *jarimah* pemerkosaan, yang berdosa dan wajib dihukum adalah pemerkosa, sementara pihak yang diperkosa tidak berdosa dan tidak terkena sanksi apapun, malah wajib memperoleh perlindungan dan pemulihan. Ini juga ketentuan yang sangat baru, karena dalam banyak kitab fiqh tidak pernah dijelaskan perbedaan antara perzinahan dan pemerkosaan. Malah banyak pandangan fiqh menyamakan pemerkosaan dengan perzinahan, yang menghukum berdosa dan wajib diberi hukuman bagi keduanya, karena sama-sama diposisikan sebagai pelaku.

Tidak hanya isu perempuan, ulama perempuan juga membahas isu perusakan alam. Hukum perusakan alam—dalam keputusan KUPI—adalah haram mutlak, meskipun atas nama pembangunan. Pembangunan tidak boleh merusak alam (air, udara, tanah, flora, fauna, dan keseimbangan ekosistem). Apabila ada kerusakan akibat pembangunan, maka negara berkewajiban untuk memulihkannya (*ishlahiha*). Dalam fatwanya, negara wajib menghukum seberat-beratnya pihak-pihak yang merusak alam, utamanya korporasi, pengusaha besar, dan mereka yang merusak dengan menggunakan kekuasaan politik. Ini juga suatu keputusan yang sangat berani dan berbeda dengan pada umumnya fatwa keagamaan.

Itulah beberapa contoh, di antara keputusan KUPI, yang penting dan memperbarui pandangan keagamaan kita pada abad ini. Banyak lagi sikap dan pandangan ulama perempuan serta rekomendasi yang dirumuskan terkait dengan kekerasan seksual, pernikahan anak, perusakan alam, radikalisme agama, perlindungan buruh migran, dan pengembangan pendidikan ulama perempuan. Ulama perempuan Indonesia tidak saja peduli terhadap isu-isu tersebut, melainkan juga memberikan sumbangsih pemikiran yang penting untuk mengatasi problematika umat manusia dewasa ini.

Dalam sejarah Indonesia, baru sekarang ini di dalam kongres ini perempuan Indonesia sebagai ulama berani mengeluarkan 'fatwa' dan rekomendasi yang sangat berani, kritis, dan tajam. Tentu ini suatu prestasi dan capaian (*milestone*) yang gemilang dari sejarah gerakan perempuan Indonesia.

Selain isu dan hasil musyawarah keagamaan yang menghentakkan keasadaran keagamaan kita, yang menarik lagi untuk dicatat adalah partisipan kongres. Kongres ini menurut catatan panitia diikuti oleh 519 peserta dan 131

pengamat dari Indonesia dan mancanegara. 650 orang ini adalah hasil seleksi dari sekitar 1400an orang yang mendaftar, baik secara *online* maupun *offline*. Mereka berasal dari ragam latar belakang provinsi, budaya, etnik, bahasa, dan aliran keagamaan. Bahkan, sebagian pengamat berasal dari 13 negara, yakni Afghanistan, Bangladesh, Malaysia, Saudi Arabia, Pakistan, Nigeria, Kenya, Singapura, Thailand, Filipina, Australia, Amerika, dan Belanda. Mereka juga berasal dari tradisi keilmuan dan gerakan sosial yang berbeda. Di antara mereka, ada yang berasal dari pondok pesantren dan majlis ta'lim, ada yang berasal dari perguruan tinggi Islam, LSM Perempuan, Ormas keislaman, dan bahkan individu-individu yang memiliki konsen pada kesetaraan dan keadilan gender.

Walhasil, KUPI Cirebon ini adalah perjumpaan besar para ulama, aktivis, akademisi, dan peneliti dari ragam negara dan daerah, ragam etnik, ragam gender, dan ragam aliran keagamaan, yang menyatu ke dalam kesatuan isu kesetaraan dan keadilan gender. Lagi-lagi, momentum seperti ini langka terjadi. Mungkin peristiwa ini kali pertama terjadi dalam sejarah Indonesia. Mereka tidak mempersoalkan perbedaan yang melekat dalam identitas masing-masing, melainkan fokus membahas sejumlah isu yang menjadi konsen gerakan perempuan Indonesia selama ini.

Momentum penting dan langka ini tentu menjadi sorotan media massa, baik media cetak, elektronik, maupun media *online*. Baik sebelum, pada saat pelaksanaan, maupun sesudah Kongres diselenggarakan, media massa aktif meliput dan memberitakan terkait Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Media massa cetak, elektronik, dan *online* yang ada di Indonesia, baik yang berizin maupun yang tidak berizin, hampir semuanya meliput dan memberitakan KUPI pada laman-laman mereka, baik berupa berita, liputan, wawancara, maupun opini terkait KUPI dan keulamaan perempuan. Media massa asing berbahasa Inggris pun tidak ketinggalan turut serta mengabadikan momentum KUPI ini. Dengan ragam fokus, mereka memberitakan KUPI secara ekspresif.

Sayangnya, tidak semua liputan dan berita terkait KUPI yang dipublikasikan oleh media-media tersebut dapat didokumentasikan oleh panitia. Panitia—sebagaimana tersaji dalam buku ini—hanya mendokumentasikan liputan dan berita yang dipublikasikan secara *online* dan cetak saja. Karena, media inilah yang paling mudah diburu dan didapat untuk kemudian didokumentasikan. Oleh karena berbagai keterbatasan, publikasi media cetak dan *online* pun tidak seluruhnya dapat disajikan dalam buku ini.

Buku ini adalah kumpulan hasil seleksi liputan-liputan dan berita-berita media massa cetak dan *online* yang dapat dikumpulkan oleh panitia. Panitia telah memburu, mengumpulkan, dan menyeleksi liputan-liputan dan berita-berita yang tersebar pada laman-laman media massa, baik cetak maupun *online*. Apabila ada yang sama atau hanya *copy-paste*, panitia segera mengeluarkannya dari kumpulan berita ini. Dengan demikian, sesungguhnya terdapat banyak

berita dan liputan yang tidak diterbitkan dalam buku ini karena beberapa alasan; *pertama*, tidak ditemukan wujud fisiknya, *kedua*, berisi pengulangan dari berita dan liputan lain; dan *ketiga*, tidak jelas data publikasinya. Adapun publikasi media elektronik akan disajikan tersendiri dalam bentuk yang lain.

Walhasil, dengan terbit buku ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Faqihuddin Abd. Kodir, Satori, Rosidin, Muhammad Qoyum, dan Napoleon dari Fahmina-*institute* yang telah mengumpulkan, mengetik ulang, dan menstrukturisasikan liputan-liputan dan berita-berita ini sehingga dapat dibaca dengan renyah, juga kepada Saudara Ismail Hasani (*SETARA Institute*) yang juga mengumpulkan berita-berita dan liputan-liputan ini dan sejak awal hingga tuntas mengkomunikasikan KUPI ke semua media massa sehingga media massa dapat memahami KUPI dengan seluruh proses dan hasilnya, dan juga kepada Mbak Alissa Wahid (Jaringan Nasional Gusdurian) yang secara sukarela membantu tim media panitia KUPI.

Akhirnya, kami berharap semoga dokumentasi tentang KUPI ini semakin melengkapi data-data sejarah KUPI, sehingga dapat membantu siapapun yang hendak mengetahui, memahami, meneliti, atau menindaklanjuti hasil KUPI dalam sejarah perubahan sosial di negeri ini. KUPI adalah tonggak kebangkitan ulama perempuan Indonesia, tapak awal ulama perempuan untuk perubahan sosial yang setara, berkeadilan, dan bermartabat bagi semuanya.

Selamat membaca dan mencermati pemberitaan media massa!

Majasem Cirebon, 11 Juli 2017

Marzuki Wahid

Anggota SC KUPI

Pendiri Yayasan Fahmina Cirebon



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xi

Bagian Pertama

Liputan Media KUPI Berbahasa Indonesia

1. Kemenag Apresiasi Program KUP, <i>sumber: kemenag.go.id</i>	3
2. KUPI Gelar Kongres Ulama Perempuan Pertama di Indonesia, <i>sumber: rappler.com</i>	5
3. Ulama Perempuan Sedunia Bakal Berkumpul di Cirebon, <i>sumber: metrotvnews.com</i>	8
4. Ulama Perempuan Bakal Gelar Kongres Ulama di Cirebon <i>sumber: tempo.co</i>	10
5. Ulama Perempuan Indonesia akan Gelar Kongres di Cirebon, <i>sumber: cirebonsatu.com</i>	12
6. Akan Ada Kongres Ulama Perempuan Di Cirebon, <i>sumber: mediaharapan.com</i>	14
7. Ulama Perempuan Indonesia akan Gelar Kongres di Cirebon, <i>sumber: Detik.com</i>	15
8. Kongres Ulama Perempuan Segera Dihelat, <i>sumber: Imagologi.com</i>	17

9.	Ulama Perempuan Indonesia akan Menggelar Kongres di Cirebon, <i>sumber: Islampos.com</i>	19
10.	Peran Ulama Perempuan dalam Meneguhkan Nilai Keislaman, Tema KUPI Mendatang, <i>sumber: Globalnews.co.id</i>	20
11.	Kongres Ulama Perempuan Indonesia Dijamin Bebas Politik, <i>sumber: Metrotvnews.com</i>	21
12.	Ulama Perempuan Bakal Gelar Kongres Ulama di Cirebon, <i>sumber: Tempo.co</i>	23
13.	Ulama Perempuan Akan Keluarkan Fatwa, <i>sumber: Kompas</i>	25
14.	Komite Kongres Ulama Perempuan Indonesia: Kami Tak Berpolitik, <i>sumber: Islamindonesia.id</i>	27
15.	Kebangsaan: Ulama Perempuan Akan Keluarkan Fatwa, <i>sumber: Baranews.co</i>	29
16.	Kongres Ulama dapat Sambutan Meriah, <i>sumber: Kompas</i>	31
17.	Menag Apresiasi Kongres Ulama Perempuan Di Cirebon, <i>sumber: Fahmina.or.id</i>	32
18.	Temu Ulama Perempuan, <i>sumber: Kompas</i>	34
19.	Kongres Ulama Perempuan Indonesia Resmi Dibuka di Cirebon, <i>sumber: Republika.co.id</i>	36
20.	Kongres Ulama Perempuan Pertama di Indonesia Digelar di Cirebon <i>sumber: Bbc.com</i>	38
21.	Kongres Ulama Perempuan Indonesia Pertama Resmi Dibuka, <i>sumber: Voaindonesia.com</i>	40
22.	Hari Ini, Kongres Ulama Perempuan Indonesia Dibuka, <i>sumber: Fajarnews.com</i>	42
23.	Kongres Ulama Perempuan Pertama Siap Dibuka Malam Ini, <i>sumber: Mediasulsel.com</i>	44
24.	Tujuh Ratus Delapan Puluh Ulama Perempuan Kongres di Cirebon Hari ini, <i>sumber: RedaksiIslam.com</i>	45
25.	Alasan 780 Ulama Perempuan Berkongres di Cirebon, <i>sumber: Tempo.co</i>	47
26.	Cirebon Menjadi Tuan Rumah KUPI I, <i>sumber: Rmoljabar.com</i>	49
27.	KUPI Gelar Kongres di Cirebon, Sejumlah Ulama Perempuan Dunia Hadir, <i>sumber: Nu.or.id</i>	51
28.	Ulama Perempuan Sedunia Kongres di Pesantren Cirebon, <i>Sumber: Suara.com</i>	53
29.	Kongres Ulama Perempuan di Cirebon Dihadiri oleh 15 Negara, <i>Sumber: Detik.com</i>	55
30.	Ulama Perempuan Berbagai Negara Berbicara di Kongres Ulama Perempuan Pertama di Cirebon, <i>Sumber: Voaindonesia.com</i>	57

31.	Ulama Perempuan dan Perwakilan 16 Negara Kumpul di Cirebon, <i>sumber: Liputan6.com</i>	59
32.	Kongres Ulama Perempuan Dongkrak Semangat Kebangsaan dan Kemanusiaan yang Berkeadilan, <i>sumber: Cirebontrust.com</i>	61
33.	Kongres Ulama Perempuan Berkontribusi Mengisi Semangat Kebangsaan yang Berkeadilan, <i>sumber: Tribunnews.com</i>	63
34.	Kongres Ulama Perempuan se-Indonesia, Usung Isu Eksistensi Ulama Perempuan, <i>sumber: voaindonesia.com</i>	65
35.	Kongres Ulama Perempuan Indonesia: Ruang Perjumpaan Kerja Keislaman, Keindonesiaan dan Kemanusiaan, <i>sumber: sejuk.org</i>	67
36.	Kongres Para Perempuan Yang Bangkit, <i>sumber: linkis.com</i>	69
37.	Kongres Ulama Perempuan: Poligami Bukan Berasal dari Islam, <i>Sumber: rappler.com</i>	72
38.	Ulama Perempuan Malaysia: Indonesia Cukup Baik Soal Kesetaraan, <i>sumber: suara.com</i>	73
39.	Ulama Perempuan Malaysia Ingin CEDAW Diterapkan Berbagai Negara, <i>sumber: rmoljabar.com</i>	75
40.	Tantangan HAM Bagi Perempuan di Negara dalam OKI, <i>sumber: sumutmantap.com</i>	76
41.	Keberadaan Ulama Perempuan Masih Terpinggirkan di Ruang Publik, <i>sumber: radarcirebon.com</i>	78
42.	Kesetaraan Gender di Indonesia Cukup Baik, <i>sumber: pikiran-rakyat.com</i>	80
43.	Kongres Ulama Perempuan Indonesia Resmi Dibuka di Cirebon, <i>sumber: republik.co.id</i>	82
44.	Kongres Ulama Perempuan Indonesia Digelar di Cirebon, <i>sumber: jawapos.com</i>	84
45.	Cirebon jadi Tuan Rumah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), <i>sumber: matahationline.com</i>	86
46.	Ulama Perempuan Se-Dunia Berkumpul di Cirebon, <i>sumber: rakyat cirebon</i>	87
47.	KUPI, Kebangkitan Ulama Perempuan di Cirebon, <i>sumber: tribunnews.com</i>	89
48.	Ponpes Malnu Wakil Banten Ikuti Kongres Ulama Perempuan Indonesia, <i>sumber: radarbanten.co.id</i>	90
49.	Malnu Pusat Kirim Delegasi dalam Forum Kongres Ulama Perempuan Indonesia, <i>sumber: radarbangsa.com</i>	92
50.	Kongres Ulama Perempuan Indonesia Diikuti Peserta Asal Luar Negeri, <i>sumber: ayocirebon.com</i>	93

51.	IAIN Cirebon Jadi Bukti Sejarah Seminar Internasional Ulama Perempuan, <i>sumber: fajarnews.com</i>	95
52.	Mencari Eksistensi Keulamaan Perempuan, <i>sumber: sindo</i>	97
53.	KUPI Teguhkan Eksistensi Ulama Perempuan, <i>sumber: fajarnews.com</i>	98
54.	Eksistensi Ulama Perempuan Patut Dihargai, <i>sumber: kabar-cirebon.com</i>	101
55.	Menolak Eksistensi Ulama Perempuan adalah Tindakan Tidak Adil <i>sumber: mediaindonesia.com</i>	103
56.	Bangkitkan Kiprah Ulama Perempuan, <i>sumber: republika</i>	105
57.	Kongres Ulama Perempuan Indonesia dapat Apresiasi Aktivistis Perempuan Dunia, <i>sumber: gomuslim.co.id</i>	107
58.	Ulama Perempuan Indonesia Diperhitungkan dalam Sejarah, <i>sumber: nu.or.id</i>	109
59.	Menanti Kontribusi Alimat, <i>sumber: pikiran rakyat</i>	110
60.	Ulama Perempuan Menyerukan Islam Moderat, <i>sumber: mediaindonesia.com</i>	112
61.	Peran Ulama Perempuan di Arab Saudi dan Pakistan, <i>sumber: ayocirebon.com</i>	114
62.	Di Cirebon, Kongres Ulama Perempuan Rumuskan Fatwa Soal Isu Kontemporer, <i>sumber: islamindonesia.id</i>	116
63.	Kongres Ulama Perempuan Indonesia Ungkap Soal Peminggiran Wanita, <i>sumber: tempo.co</i>	118
64.	KUPI Perkenalkan Metodologi Studi Islam Berkeadilan bagi Perempuan, <i>sumber: cirebontrust.com</i>	120
65.	Kongres Ulama Perempuan Bahas Studi Islam yang Adil bagi Wanita, <i>sumber: hetanews.com</i>	122
66.	Ulama Perempuan Tangkal Radikalisme, <i>sumber: sejuk.org</i>	124
67.	Bangun Jejaring Lawan Radikalisme, <i>sumber: kompas</i>	127
68.	Kongres ulama perempuan: “Poligami Bukan Tradisi Islam”, <i>sumber: newsjs.com</i>	130
69.	Komisioner HAM OKI: Isu Hak Perempuan Jadi Tugas Bersama Muslimah, <i>sumber: liputan6.com</i>	133
70.	Indeks Ketidaksetaraan Gender Indonesia Tinggi, <i>sumber: fajarnews.com</i>	135
71.	Kisah Bushra Hyder, Perempuan Pembawa Misi Damai di Pakistan, <i>sumber: liputan6.com</i>	137
72.	Aktivistis Perempuan Dunia Apresiasi Kongres Ulama Perempuan Indonesia, <i>sumber: kemenag.go.id</i>	140

73.	Kongres Nasional Kuatkan Peran Ulama Perempuan, <i>sumber: republika</i>	142
74.	Menanti Fatwa Perempuan Ulama, <i>sumber: suaramerdeka.com</i>	144
75.	Konsolidasi dan Perluasan Peran, <i>sumber: pressreader.com</i>	147
76.	Perempuan Aktifis dan Ulama dari 17 Negara Bahas Soal Radikalisme, <i>sumber: liputan6.com</i>	149
77.	Isu Radikalisme Agama Paling Diminati Peserta KUPI, <i>sumber: fajarnews.com</i>	152
78.	KUPI Keluarkan Hasil Musyawarah Keagamaan, <i>sumber: mediaindonesia.com</i>	154
79.	KUPI Hasilkan Tiga Fatwa, <i>sumber: rmoljabar</i>	156
80.	Ini Tiga Fatwa Hasil Kongres Ulama Perempuan di Cirebon, <i>sumber: suaraislam</i>	158
81.	Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Hasilkan Sejumlah Rekomendasi, <i>sumber: radarbangsa.com</i>	160
82.	Ulama Perempuan Rekomendasikan Pernikahan Anak Dihapuskan, <i>Sumber: Bbc.com</i>	162
83.	Kongres Ulama Perempuan Usul Umur Minimal Perempuan Nikah 18 Tahun, <i>sumber: detik.com</i>	164
84.	KUPI Dorong Adanya Perubahan Batas Usia Menikah Perempuan, <i>sumber: RMOLJabar</i>	166
85.	Menteri Agama akan menutup Kongres Ulama Perempuan Indonesia, <i>sumber: Rappler.com</i>	168
86.	Menag Tutup Kongres Ulama Perempuan Indonesia 2017, <i>sumber: mediaindonesia.com</i>	170
87.	Menag Tutup Kongres Ulama Perempuan Indonesia, <i>sumber: republika.co.id</i>	172
88.	Menteri Agama Tutup Kongres Ulama Perempuan Indonesia di Cirebon, <i>sumber: detik.com</i>	175
89.	Tutup KUPI, Menag Sebut Tiga Hal Strategis Kongres Ulama Perempuan, <i>sumber: kemenag.go.id</i>	177
90.	Menag Hari Ini Resmikan Masjid MAN 2 Cirebon dan Tutup KUPI, <i>sumber: kemenag.go.id</i>	179
91.	Ini Tanggapan Menag Soal Rekomendasi KUPI, <i>sumber: republika.co.id</i>	181
92.	Unicef Sambut Rekomendasi Ulama Perempuan untuk Menghindari Perkawinan Usia Anak, <i>sumber: unicef.org</i>	183
93.	Resmi Ditutup, ini Rekomendasi Kongres Ulama Perempuan Indonesia 2017, <i>sumber: rappler.com</i>	185

94.	Ini Catatan Menteri Lukman Hakim soal Kongres Ulama Perempuan Indonesia, <i>sumber: radarcirebon.com</i>	187
95.	Perempuan Ulama Punya Peran Besar, <i>sumber: Kompas</i>	189
96.	Kebangkitan Perempuan di Ruang Publik, <i>sumber: Media Indonesia</i>	192
97.	Tantangan Ulama Perempuan di Negaranya, <i>Sumber: Republika</i>	195
98.	Perempuan Disyaratkan Menikah Minimal Usia 18 Tahun, <i>Sumber: Sindo</i>	197
99.	Rekomendasi KUPI, Usia Minimal Perempuan Menikah 18 Tahun, <i>sumber: fajarnews.com</i>	199
100.	Kongres Ulama Perempuan: Poligami Bukan Tradisi Islam, <i>sumber: tribunnews.com</i>	201
101.	Menag Sanggupi Upaya Mencetak Ulama Perempuan, <i>Sumber: Republika</i>	203
102.	Unicef Puji Sikap Ulama Perempuan Indonesia, <i>sumber: Jawa Pos</i>	206
103.	Tiga Fatwa Nampol soal Kekerasan Seksual dari Ulama Perempuan, <i>sumber: sobatask.net</i>	208
104.	Tiga Fatwa soal Pernikahan Anak dari Ulama Perempuan, <i>sumber: sobatask.net</i>	210
105.	Salam dari Kebon Jambu, <i>sumber: Kompas</i>	212
106.	Ulama Perempuan Melawan Radikalisme, <i>sumber: Gatra</i>	215
107.	Menunggu Kiprah Ulama Perempuan, <i>sumber: fiqihislam.com</i>	219
108.	Antara Ulama, Perempuan & Perempuan Ulama, <i>Sumber: Majalah Noor</i>	222
109.	Tiga Fatwa Hasil KUPI 2017, <i>sumber: Majalah Noor</i>	225

Bagian Kedua

Liputan Media KUPI Berbahasa Inggris

1.	International Seminar On Women Ulama “Amplifying Women Ulama’s Voices, Asserting Values Of Islam, Nationhood And Humanity”, <i>sumber: amanindonesia.org</i>	229
2.	Female Clerics Stage National Congress in Cirebon, <i>sumber: thejakartapost.com</i>	231

3. Getting in Same Boat on Gender Sensitivity, <i>sumber: pressreader.com</i>	232
4. Indonesia's First Female Clerics Congress to Feature International Speakers, <i>sumber: thejakartapost.com</i>	235
5. Indonesia's First Female Muslim Clerics Congress Aims to Strengthen Women's Roles, <i>sumber: thejakartapost.com</i>	236
6. Role of Women Seen as Vital to Resisting Islamic Extremism, <i>sumber: thejakartapost.com</i>	237
7. Female Muslim Clerics in Indonesia Issue Rare Fatwas, <i>sumber: thefrontierpost.com</i>	239
8. Female Muslim Clerics in Indonesia Issue Fatwas on Child Marriage, Women Sexual Abuse, <i>sumber: pakistaninewspapers.info</i>	241
9. Patriarchy Blamed for Domestic Violence, <i>sumber: pressreader.com</i>	243
10. Polygamy Not Part of Islamic Teachings: Muslim Clerics, <i>sumber: thejakartapost.com</i>	245
11. Sexual Violence Between Married Couples Haram, Clerics Say, <i>sumber: thejakartapost.com</i>	247
12. Female Clerics Declare Fatwa on Child Marriage in Indonesia, <i>sumber: freemalysiatoday.com</i>	249
13. Female Islamic Clerics in Indonesia Issue Rare Child Marriage Fatwa <i>sumber: bbc.com</i>	251
14. Avoiding Child Marriage 'Mandatory', <i>sumber: thejakartapost.com</i>	253
15. Feminine Islamic Clerics In Indonesia Challenge Uncommon Baby Marriage Fatwa, <i>sumber: currentnewsbulletin.com</i>	255
16. Indonesia: Female Clerics Issue Fatwas Against Child Marriage, Marital Rape, <i>sumber: asiancorrespondent.com</i>	257
17. Female Islamic Clerics Issue Rare Fatwa, <i>sumber: Bbctv.co.ke</i>	259
18. Women Ulema Struggle Amid Conservatism, <i>sumber: The Jakarta Post</i>	260
19. Female Ulama Voice a Vision for Indonesia's Future, <i>sumber: newmandala.org</i>	262
20. In Indonesia, Female Clerics Seek Recognition and Rights for Women, <i>sumber: Newsdeeply.com</i>	266
21. Indonesian Muslim Women Engage with Feminism, <i>sumber: theconversation.com</i>	269
22. Female Ulema Speak up Despite Obstacles, <i>sumber: The Jakarta Post</i>	272

23. Trauma Emboldens Female Clerics, *sumber: The Jakarta Post* 275
24. A Fatwa Against Sexual Violence: The Story of a Historic Congress of
Female Islamic Scholars, *sumber: Opendemocracy.net* 278



Bagian Pertama

Liputan Media

Kongres Ulama Perempuan Indonesia

Berbahasa Indonesia



KEMENAG APRESIASI PROGRAM KUPI

Kemenag.go.id, 11 Januari 2017

Kementerian Agama mengapresiasi program yang disampaikan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).

"Kami apresiasi dengan adanya KUPI yang konsen terhadap bagaimana perempuan diletakkan sesuai kodratnya, walau dalam konteks Indonesia masih banyak persoalan," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat menerima Kongres Ulama Perempuan Indonesia di Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta, Rabu (11/1).

Hadir mendampingi Menag Dirjen Pendis Kamaruddin Amin, Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Mohsen, Kapuslitbang Lektur dan pentashihan Alquran Khairul Fuad Yusuf, Sesmen Khairul Huda Basyir, Staff Khusus Ali Zawawi.

Dikatakan Menag, problem utama kita itu adalah cara pandang. Bagaimana dan seperti apa agama melihat perempuan. Setidaknya, kata Menag, kita memiliki cara pandang yang sama terkait perempuan.

Dikatakan Menag, dalam tradisi dan pada awamnya, banyak pandangan yang mendahulukan kaum laki-laki dari pada perempuan, apalagi dalam dunia pendidikan. Itu bisa disebabkan karena nilai tradisi lebih banyak disisipi nilai agama.

"Tradisi banyak membentuk mindsite kita, makanya satu keluarga itu lebih mendahulukan laki-laki dari pada perempuan dalam pendidikan," ujar Menag.

Padahal, Menurut Menag Lukman, perempuan harus lebih didahulukan daripada laki-laki. Karena, lanjut Menag menjelaskan, dasar pendidikan itu dimulai dari perempuan, generasi muda itu sejak dalam kandungan sudah dididik oleh perempuan.

"Generasi muda, sejak dalam kandungan, mau jadi apa, sangat tergantung oleh perempuan (Ibu)," kata Menag.

Sebelumnya perwakilan dari KUPI Maria Ulfa Anshor menyampaikan bahwa KUPI pertama akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Kebun Jambu Cirebon pada bulan April mendatang, dengan mengundang ulama-ulama perempuan se Indonesia.

Harapannya, lanjut Maria Ulfa, bahwa KUPI pertama ini nantinya akan menghasilkan Ijtima Jamai, dan juga langkah lanjutan rekomendasi tentang ulama perempuan, serta menjadikan KUPI gerakan yang lebih sistematis hingga membentuk jaringan pada tingkat internasional. (Arief/dm/dm).

Sumber: <https://www.kemenag.go.id/berita/443652/kemenag-apresiasi-program-kupi>

**KUPI GELAR
KONGRES ULAMA PEREMPUAN PERTAMA
DI INDONESIA**

Rappler.com, 9 April 2017

Kontribusi ulama perempuan di Indonesia dapat dikatakan jarang terdengar dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Karena itu, muncul gagasan dari sejumlah kalangan untuk menginisiasi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama di Indonesia.

“Kongres ini akan menjadi wadah bertukar pikiran sekaligus menunjukkan kalau ada ulama-ulama perempuan di Indonesia,” kata Steering Committee KUPI Badriyah Fayumi saat konferensi pers di Jakarta pada Ahad, 9 April 2017. Acara akan berlangsung selama 3 hari sejak 25-27 April di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Cirebon, Jawa Barat.

Alasan terpilihnya tempat ini pun lantaran pemiliknya seorang ulama perempuan, yang memiliki santri pria dan perempuan. Adapun, KUPI membuka slot untuk lebih dari 500 peserta –perempuan maupun laki-laki –dari seluruh Indonesia untuk ikut menyumbangkan gagasan mereka terkait nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Selama 3 hari, peserta kongres akan menghadiri seminar dengan pembicara mancanegara seperti Pakistan, Afghanistan, Malaysia, Saudi Arabia, Nigeria, dan Indonesia sendiri tentang peran ulama perempuan. Topik yang dibahas melingkupi sejarah, peran, tantangan, strategi dakwah, dan metode studi Islam untuk menjawab isu kontemporer di tanah air.

Setelahnya akan dilanjutkan dengan diskusi dan musyawarah yang akan menelurkan fatwa keagamaan dan juga rekomendasi berskala nasional.

Menjawab Permasalahan Masyarakat

Anggota panitia pelaksana KUPI Nur Rofiah mengatakan fatwa akan melingkupi 3 hal, yakni kekerasan seksual, pernikahan anak, dan kerusakan alam berbasis ketimpangan sosial. “Harapan KUPI, fatwa dapat digunakan masyarakat dalam menjawab problem langsung yang dihadapi dan menjadi pertimbangan lembaga lain untuk melihat persoalan perempuan dalam konteks agama,” kata dia.

Berdasarkan obrolan dengan masyarakat, maupun kajian masalah yang tengah berkembang, ketiga topik tersebut adalah yang cukup darurat untuk dibicarakan. Dengan keluarnya fatwa KUPI, masyarakat dapat memiliki pegangan untuk menuntaskan masalah tersebut.

Sekretaris penyelenggara KUPI Ninik Rahayu mengatakan fatwa seharusnya menjadi maslahat, atau kebaikan bagi masyarakat yang mempercayainya. Isu-isu yang disebutkan memang sudah memiliki pengaturan dalam hukum positif seperti undang-undang ataupun hukum adat.

Namun, seringkali apa yang dianggap penyelesaian malah menimbulkan masalah baru. Seperti misalnya, penanganan kasus perkosaan yang seringkali menikahkan korban dengan pelaku.

“Tidak dibedakan orang zina dan perkosaan, jadi korban malah dikawinkan dengan pelaku. Ini kan riil, persoalan, sehingga perlu dibahas secara intensif,” kata Ninik. Pernikahan berlandaskan sebab ini tidak bertahan lama.

Data dari Pengadilan Agama skala nasional pada 2015 lalu, 75 persen pernikahan yang disebabkan hamil luar nikah berakhir dengan perceraian. Ninik menilai, menikahkan korban dengan pelaku bukanlah solusi yang tepat karena justru menimbulkan polemik baru: cerai.

Terkait dengan kekuatan hukum fatwa, Nur mengatakan hal tersebut tergantung pada yang menggunakan. Karena, lanjut dia, fatwa sendiri tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali telah diadopsi menjadi hukum positif.

Ia tak dapat mengomentari bila akan ada fatwa serupa, atau malah kontra dari lembaga lainnya. “Otoritas (fatwa) kan menyebar. Yang penting itu pada penerimaan umat. Agama itu datang untuk menghadapi masalah sehingga proses paling penting dalam fatwa itu adalah mendengar suara korban, mereka yang sehari-hari bergelut dengan masalah itu,” kata Nur.

Untuk rekomendasi sendiri akan bersifat lebih umum, namun dalam lingkup kemanusiaan, keislaman, dan kebangsaan. Termasuk di dalamnya bagaimana menangkal radikalisme, perlindungan buruh perempuan, dan lain-lain.

Setelahnya, rekomendasi ini akan diserahkan ke institusi, korporasi, maupun tokoh perseorangan terkait untuk ditindaklanjuti. "Seperti perusahaan ataupun organisasi sosial, karena mereka juga luar biasa mengendalikan ruang publik untuk melakukan perubahan," kata Ninik.

Direktur Peneliti SETARA Institute Ismail Hasani mengatakan peran perempuan sangat penting dalam isu-isu sosial. Salah satunya adalah dalam hal radikalisme, entah sebagai pencegah atau justru penyebar.

Hal ini disebabkan, perempuan yang mayoritas bergelut dalam sektor domestik memiliki kedekatan lebih dengan anak-anaknya. "Kita lihat anak dan generasi muda lebih dekat dengan ibu. Mereka adalah penutur dan pendidik pertama," kata dia.

Selain itu, entah disadari atau tidak, perempuan juga sering dimanfaatkan dalam gerakan radikalisme. Ada yang dijadikan sebagai 'pengantin' atau diperintahkan untuk memproduksi anak sebanyak-banyaknya.

Dengan cara ini, maka kelompok radikal akan perlahan-lahan mendominasi statistik demografi dan menjadi dominan bila dibandingkan kelompok lainnya. Cara ini sudah diserukan oleh beberapa pemimpin, seperti Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan.

Meski tujuannya bukan untuk menyebarkan paham radikalisme, Erdogan meminta penduduk Turki yang tinggal di Eropa untuk memiliki banyak anak. Cara ini disebutnya efektif untuk memerangi sentimen anti-imigran dan anti-Turki yang tengah berkembang di benua tersebut.

"Ini kan luar biasa, pendangkalan peran perempuan," kata Ismail.

Meski demikian, kedekatan antara seorang anak dan ibunya juga dapat menjadi benteng pencegahan berkembangnya paham radikalisme. Seperti misalkan, saat pemberitaan banyaknya anak muda yang pergi ke Suriah untuk menjadi prajurit ISIS, ibu disebut sebagai tokoh terpenting untuk pencegahan. Karena itu penting sekali untuk mulai memperbanyak ruang bagi perempuan dalam penanggulangan isu-isu sosial.

Sumber: <http://www.rappler.com/indonesia/166507-kongres-ulama-perempuan>

ULAMA PEREMPUAN SEDUNIA BAKAL BERKUMPUL DI CIREBON

Metrotvnews.com, 09 April 2017

Sedikitnya 500 ulama perempuan dari berbagai negara di dunia akan berkumpul di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin, Cirebon, pada 25-27 April. Perkumpulan tersebut digelar dalam bentuk Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama.

"Sebuah perjumpaan lebih dari 500 ulama perempuan dari berbagai daerah di Indonesia dan berbagai negara dari Pakistan, Afghanistan, Malaysia, Saudi Arabia, dan Nigeria," ujar Ketua Steering Committee KUPI Badriyah Fayumi dalam konferensi pers di Ruang Bersama KeKini, Cikini, Jakarta 9 April 2017.

Badriyah menuturkan, latar belakang digelarnya kongres lantaran kiprah ulama perempuan dalam sejarah perkembangan Indonesia sangat kecil. Kehadiran dan peran penting ulama perempuan jarang sekali ditulis secara seimbang dan proporsional.

"Ulama perempuan Indonesia punya jejak sejarah yang patut dibanggakan sebagai penjaga nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan," ucap dia.

Menurut dia, perempuan memiliki peranan dalam dua kelembagaan NU dan Muhammadiyah serta menjadi ciri khas Islam moderat. "Mereka jadi pendidik terdepan, pendamping terdekat dan pembela di ruang-ruang publik atas praktik ketidakadilan dan ketidaksetaraan," ungkap pengasuh Pondok Pesantren Mahasina Bekasi itu.

Badriyah merasa perlu menegaskan kembali kerja-kerja sosial keulamaan perempuan dan meneguhkan nilai keislaman melalui kongres tersebut.

"Atas dasar itu segala upaya kultural dan struktural diperlukan untuk menggelar kongres," ucap dia.

Rangkaian kegiatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia dimulai dengan acara pra kongres, yakni lomba penulisan profil ulama perempuan Indonesia.

Kemudian seminar internasional dengan menghadirkan berbagai narasumber dari negara timur tengah.

Selanjutnya, menggelar 9 panel diskusi paralel, peluncuran karya keulamaan perempuan, musyawarah fatwa ulama perempuan, sidang rekomendasi, pentas seni budaya, hingga kegiatan sosial.

Peserta terdiri atas perempuan pemimpin/pengasuh/guru pesantren, pengajar lembaga pendidikan dan perguruan tinggi Islam, pemimpin organisasi keislaman, majelis taklim, ustazah, muballighah, dai'yah, aktivis perempuan, pakar, akademisi dan pemerhati isu-isu keislaman. (Desi Angriani)

Sumber: <http://news.metrotvnews.com/news/yKX8yzXK-ulama-perempuan-sedunia-bakal-berkumpul-di-cirebon>

ULAMA PEREMPUAN BAKAL GELAR KONGRES ULAMA DI CIREBON

Tempo.co, 09 April 2017

Ulama perempuan bakal menggelar Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Cirebon, Jawa Barat, pada 25-27 April 2017. Sebanyak 500 ulama perempuan diperkirakan hadir di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin, Cirebon, selama kongres.

Ketua panitia pengawas kongres, Badriyah Fayumi, mengatakan kongres ini mempertegas peran dan pengakuan ulama perempuan dalam persoalan kebangsaan yang aktual di ruang publik. "Tujuan kongres ini mengukuhkan keberadaan dan peran ulama dalam kesejarahan Islam di Indonesia," kata Badriyah di KiKine, Jakarta, Ahad, 9 April 2017.

Menurut dia, kongres ini sebagai ajang pertemuan ulama perempuan di Indonesia dalam menjawab berbagai isu. Nantinya, kongres akan memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan. Beberapa isu tersebut adalah masalah kekerasan seksual, pernikahan anak, perusakan alam, ketimpangan sosial, dan radikalisme.

Fasilitator kongres, Ninik Rahayu, mengatakan kongres bakal diisi dengan seminar internasional tentang ulama perempuan. Rencananya, beberapa narasumber bakal hadir dari Pakistan, Afganistan, Malaysia, Arab Saudi, dan Nigeria.

Ia juga menuturkan kongres ini bakal merumuskan fatwa ulama perempuan melalui musyawarah sebagai produk dalam kongres. "Pada saat yang sama akan diadakan sidang perumusan rekomendasi kongres," kata dia.

Ia menargetkan peserta kongres mencapai 500 peserta yang meliputi akademisi, peneliti, dan pemerhati isu-isu keislaman dan perempuan. Meski begitu, ia mengatakan kepesertaan tidak hanya diisi perempuan tapi juga laki-laki. "Nanti bisa kami klarifikasi lagi kepesertaan untuk perimbangan," katanya.

Sumber: <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/04/09/173864210/ulama-perempuan-bakal-gelar-kongres-ulama-di-cirebon>

ULAMA PEREMPUAN INDONESIA AKAN GELAR KONGRES DI CIREBON

Cirebonsatu.com, 09 April 2017

Ulama perempuan Indonesia akan menggelar Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Pondok Pesantren Kebun Jambu, Babakan Ciwaringin, Cirebon Jawa Barat pada 25-27 April 2017 mendatang.

Setelah hampir 72 tahun Indonesia merdeka, KUPI akan menjadi kongres Ulama Perempuan pertama di Indonesia. Berbeda dengan di negara-negara mayoritas Muslim lain yang memisahkan perempuan dengan laki-laki, di Indonesia sejak lama tidak ada pemisahan antara peran perempuan dan laki-laki baik dalam dunia ekonomi maupun politik. Bahkan di masa lalu pernah ada dua Sultana atau Pemimpin Kerajaan Perempuan di Indonesia, yaitu kerajaan Aceh dan Sulawesi. Sekitar 800 peserta sudah mendaftar untuk ikut serta dalam KUPI ini.

Steering Committee KUPI Hj. Badriyah Fayumi mengatakan, dipilihnya Pesantren Pondok Jambu sebagai lokasi KUPI dikarenakan pimpinan tertinggi di situ adalah seorang perempuan yang memimpin lebih dari 1000 santri.

“Dipilihnya Ponpes Kebon Jambu karena pimpinan di situ perempuan, pimpinan tertinggi, bukan istri kiyai atau istri ulama, tapi perempuan yang memimpin lebih dari 1000 santri di situ,” tandas Badriyah dalam konferensi pers di Kafe Kekini, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (09/04/2017).

Dari kongres ini akan dihasilkan sejumlah kebijakan terkait perempuan, anak, dan isu radikalisme. KUPI juga akan mengeluarkan fatwa yang berdasar pada Al Quran.

Badriyah juga mengatakan, kongres ini akan dihadiri lebih dari 500 ulama perempuan se-Indonesia. Dia menjelaskan, kongres ini memang gagasan dari ulama perempuan Indonesia.

“Acara ini sejak awal digagas partisipatoris. Kami tidak mengandalkan ketokohan tertentu, karena ulama perempuan punya ilmu semuanya dalam

berbagai level bahkan di tingkat komunitas terkecil pun sangat patut untuk dishare dengan ulama di daerah, dan patut untuk berpartisipasi pada khalayak,” kata Badriyah. (C101)

Sumber: <http://www.cirebonsatu.com/ulama-perempuan-indonesia-akan-gelar-kongres-di-cirebon.html>

**AKAN ADA
KONGRES ULAMA PEREMPUAN
DI CIREBON**

Mediaharapan.com, 9 April 2017

Sejumlah Ulama Perempuan Muslim yang tergabung di dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) akan mengadakan kongres Ulama Perempuan pada 25-27 April 2017 mendatang di Pondok Pesantren Kebun Jambu, Babakan Ciwaringin, Cirebon.

Setelah hampir 72 tahun Indonesia merdeka, KUPI akan menjadi kongres Ulama Perempuan pertama di Indonesia. Berbeda dengan di negara-negara mayoritas Muslim lain yang memisahkan perempuan dengan laki-laki, di Indonesia sejak lama tidak ada pemisahan antara peran perempuan dan laki-laki baik dalam dunia ekonomi maupun politik. Bahkan di masa lalu pernah ada dua Sultana atau Pemimpin Kerajaan Perempuan di Indonesia, yaitu kerajaan Aceh dan Sulawesi. Sekitar 800 peserta sudah mendaftar untuk ikut serta dalam KUPI ini.

Menurut salah satu Pembicara (Narasumber) KUPI Hj. Badriyah Fayumi dipilihnya Pesantren Pondok Jambu sebagai lokasi KUPI dikarenakan pimpinan tertinggi di situ adalah seorang perempuan yang memimpin lebih dari 1000 santri.

“Dipilihnya Ponpes Kebon Jambu karena pimpinan di situ perempuan, pimpinan tertinggi, bukan istri kiyai atau istri ulama, tapi perempuan yang memimpin lebih dari 1000 santri di situ” tandas Badriyah dalam konferensi pers di Kafe Ke: Kini, Jakarta Pusat jelang pelaksanaan KUPI, Minggu (9/4/17).

Dari kongres ini akan dihasilkan sejumlah kebijakan terkait perempuan, anak, dan isu radikalisme. KUPI juga akan mengeluarkan fatwa yang berdasar pada Al Quran. (Bams)

Sumber: <https://mediaharapan.com/akan-ada-kongres-ulama-perempuan-di-cirebon/>

ULAMA PEREMPUAN INDONESIA AKAN GELAR KONGRES DI CIREBON

Detik.com, 9 April 2017

Ulama perempuan Indonesia akan menggelar Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Cirebon, Jawa Barat pada (25/4) mendatang. Steering Committee KUPI, Badriyah Fayumi menegaskan tidak ada muatan politis dalam kegiatan ini.

"Tidak ada muatan politis sama sekali, tidak dan tidak akan. Tetapi kami akan memberikan rekomendasi, ada juga poin yang disampaikan saat mengambil kebijakan ketika ada kebijakan yang patut untuk dikritisi, yang patut untuk kami sampaikan," kata Badriyah di Kafe Kekini, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/4/17).

Badriyah mengatakan, dalam kongres nanti juga tidak akan ada pembentukan struktur dan pemilihan ketua untuk organisasi apa pun.

"Setelah ini tidak akan ada struktur, kemudian milih siapa milih orang, tidak demikian," kata dia.

Menurut Badriyah ini adalah ruang perjumpaan ulama perempuan dari berbagai latar belakang, pendidikan baik formal maupun pesantren. Selain itu, nantinya akan ada perjumpaan dengan masyarakat yang membutuhkan fatwa.

"Kemudian juga kita berjumpa dengan para aktivis dan korban yang masalahnya dimintakan fatwa pada ulama perempuan Indonesia ini. Jadi ini lebih pada forum silaturahmi dan silatul ilmi ya," ungkapnya.

Badriyah juga mengatakan, kongres ini akan dihadiri lebih dari 500 ulama perempuan se-Indonesia. Dia menjelaskan, kongres ini memang gagasan dari ulama perempuan Indonesia.

"Acara ini sejak awal digagas partisipatoris. Kami tidak mengandalkan ketokohan tertentu, karena ulama perempuan punya ilmu semuanya dalam berbagai level bahkan di tingkat komunitas terkecil pun sangat patut untuk

dishare dengan ulama di daerah, dan patut untuk berpartisipasi pada khalayak," kata Badriyah. (Akhmad Mustaqim – detikNews)

Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-3469544/ulama-perempuan-indonesia-akan-gelar-kongres-di-cirebon>

KONGRES ULAMA PEREMPUAN SEGERA DIHELAT

Imagologi.com, 09 April 2017

Bagi sebagian kawula muda yang dininabobokkan dengan momentum April Mop memang harus mulai dikikis. Apalagi momentum tersebut objeknya adalah perempuan yang akan dibanjiri dengan rayuan. Mengapa demikian? Pasalnya, perempuan yang dijadikan objek eksploitasi dan rayuan murahan hingga kekerasan akan mendapat sorotan di bulan April tahun ini.

Ulama Perempuan Bahas Beragam Isu

Ulama perempuan bakal menggelar Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Cirebon, Jawa Barat, pada 25-27 April 2017. Sebanyak 500 ulama perempuan diperkirakan hadir di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin, Cirebon, selama kongres.

Ketua panitia pengawas kongres, Badriyah Fayumi, mengatakan kongres ini mempertegas peran dan pengakuan ulama perempuan dalam persoalan kebangsaan yang aktual di ruang publik. "Tujuan kongres ini mengukuhkan keberadaan dan peran ulama dalam kesejarahan Islam di Indonesia," kata Badriyah, Jakarta, Ahad, 9 April 2017.

Selama 3 hari, peserta kongres akan menghadiri seminar dengan pembicara mancanegara seperti Pakistan, Afghanistan, Malaysia, Saudi Arabia, Nigeria, dan Indonesia sendiri tentang peran ulama perempuan. Topik yang dibahas melingkupi sejarah, peran, tantangan, strategi dakwah, dan metode studi Islam untuk menjawab isu kontemporer di tanah air.

Menepis Keraguan Umat

Nantinya akan ada musyawarah dengan hasil akhir menelurkan fatwa keagamaan dan juga rekomendasi berskala nasional. Anggota panitia pelaksana

KUPI Nur Rofiah mengatakan fatwa akan melingkupi 3 hal, yakni kekerasan seksual, pernikahan anak, dan kerusakan alam berbasis ketimpangan sosial.

Berdasarkan obrolan dengan masyarakat, maupun kajian masalah yang tengah berkembang, ketiga topik tersebut adalah yang cukup darurat untuk dibicarakan. Dengan keluarnya fatwa KUPI, masyarakat bisa mendapat pencerahan demi menuntaskan masalah tersebut.

Fasilitator kongres, Ninik Rahayu, mengatakan kongres bakal diisi dengan seminar internasional tentang ulama perempuan. Rencananya, beberapa narasumber bakal hadir dari Pakistan, Afganistan, Malaysia, Arab Saudi, dan Nigeria.

Target peserta kongres mencapai kisaran 500 peserta yang meliputi akademisi, peneliti, dan pemerhati isu-isu keislaman dan perempuan. Meski begitu, ia mengatakan kepesertaan tidak hanya diisi perempuan tapi juga laki-laki. "Nanti bisa kami klarifikasi lagi kepesertaan untuk perimbangan," katanya.

Kata "ulama" sudah disebutkan dalam al-Qur'an dan beberapa teks Hadis. Secara bahasa, kata "ulama" merupakan bentuk jamak dari kata "alim" yang berarti orang yang tahu atau sangat berilmu. Tanpa batasan disiplin ilmu tertentu. Ia juga tidak terbatas pada gender tertentu. Secara sosial, terminologi ulama sering dilekatkan kepada tokoh atau pemuka agama yang bisa memahami sumber-sumber Islam secara baik, berperilaku mulia, dan membimbing umat dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Sumber: <http://imagologi.com/kongres-ulama-perempuan/>

ULAMA PEREMPUAN INDONESIA AKAN MENGGELAR KONGRES DI CIREBON

Islampos.com, 10 April 2017

Ulama perempuan Indonesia akan menggelar Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Cirebon, Jawa Barat pada (25/4) mendatang. Steering Committee KUPI, Badriyah Fayumi menegaskan tidak ada muatan politis dalam kegiatan ini.

“Tidak ada muatan politis sama sekali, tidak dan tidak akan. Tetapi kami akan memberikan rekomendasi, ada juga poin yang disampaikan saat mengambil kebijakan ketika ada kebijakan yang patut untuk dikritisi, yang patut untuk kami sampaikan,” kata Badriyah di Kafe Kekini, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/4/17) seperti dikutip dari *detikcom*

Badriyah mengatakan, dalam kongres nanti juga tidak akan ada pembentukan struktur dan pemilihan ketua untuk organisasi apa pun.

“Setelah ini tidak akan ada struktur, kemudian milih siapa milih orang, tidak demikian,” kata dia. Menurut Badriyah ini adalah ruang pertemuan ulama perempuan dari berbagai latar belakang, pendidikan baik formal maupun pesantren. Selain itu, nantinya akan ada pertemuan dengan masyarakat yang membutuhkan fatwa.

“Kemudian juga kita berjumpa dengan para aktivis dan korban yang masalahnya dimintakan fatwa pada ulama perempuan Indonesia ini. Jadi ini lebih pada forum silaturahmi dan silatul ilmi ya,” ungkapnya.

Badriyah juga mengatakan, kongres ini akan dihadiri lebih dari 500 ulama perempuan se-Indonesia. Dia menjelaskan, kongres ini memang gagasan dari ulama perempuan Indonesia.[Ari Cahya Pujianto]

Sumber: <https://www.islampos.com/18446-18446/>

**PERAN ULAMA PEREMPUAN
DALAM MENEGUHKAN NILAI KEISLAMAN,
TEMA KUPI MENDATANG**

Globalnews.co.id, 09 April 2017

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) rencananya akan digelar pada 25-27 April mendatang di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin Cirebon.

Badriyah Lc, sebagai Ketua Steering Committee (SC) mengatakan KUPI merupakan forum silaturahmi ulama perempuan yang tidak mengandalkan ketokohan personal tertentu dan tidak untuk menghasilkan kepengurusan organisasi atau untuk menjadi ormas tetapi sebagai ruang perjumpaan dari berbagai latar belakang organisasi keislaman, latar belakang pendidikan baik perguruan tinggi formal maupun no formal. “Ulama perempuan akan berkumpul dari berbagai latar belakang organisasi keislaman, pendidikan tinggi formal maupun nonformal”, tuturnya.

Badriyah menambahkan Islam mencatat bahwa ulama perempuan telah menjadi bagian dari setiap perkembangan Islam, hal ini berawal dari sikap Nabi Muhammad SAW. yang menghormati perempuan dan member jalan kebebasan bagi mereka, “tetapi di Indonesia juga dipengaruhi oleh konteks geopolitik, budaya dan proses asimiliasi Islam dengan budaya lokal”, pungkasnya. (Soe)

Sumber: <http://globalnews.co.id/2017/04/09/peran-ulama-perempuan-meneguhkan-nilai-keislaman-tema-kupi-mendatang/>

KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA DIJAMIN BEBAS POLITIK

Metrotvnews.com, 09 April 2017

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama yang digelar di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin Cirebon dua pekan mendatang dipastikan bukan sebagai landasan pembentukan partai politik baru. Ketua Steering Committee KUPI Badriyah Fayumi mengatakan, kongres murni sebagai ruang pertemuan ulama perempuan dari berbagai latar belakang dan organisasi keislaman di Tanah Air.

"Kami tidak akan berpolitik kita jamin, tidak akan ada struktur kemudian milih siapa enggak akan," kata Badriyah dalam konferensi pers di Ruang Bersama KeKini, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 9 April 2017.

Kongres digelar untuk melegitimasi dan mengafirmasi kerja perempuan-perempuan ulama di Indonesia. Tujuan akhir kongres sama sekali bukan menjadi ormas atau organisasi perempuan tandingan.

"Untuk menyampaikan fakta kepada seluruh dunia bahwa ulama perempuan itu nyata, lho, di Indonesia. Mereka sudah melakukan berbagai peran dan level di berbagai tempat. Bukan untuk jadi ormas," tegas dia.

Pertemuan ratusan ulama perempuan ini bakal menghasilkan tawaran dan solusi bagi berbagai masalah terkait Islam dan perempuan. Khususnya, korban yang masalahnya dimintakan fatwa kepada ulama perempuan.

"Kita akan beri rekomendasi kepada para pengambil kebijakan yang patut kita kritisi tentu kita sampaikan. Juga menjawab berbagai persoalan perempuan," ujar dia.

Rangkaian kegiatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia dimulai dengan acara pra kongres, yakni lomba penulisan profil ulama perempuan Indonesia. Kemudian seminar internasional dengan menghadirkan berbagai narasumber dari negara timur tengah.

Selanjutnya, menggelar 9 panel diskusi paralel, peluncuran karya keulamaan perempuan, musyawarah fatwa ulama perempuan, sidang rekomendasi, pentas seni budaya, hingga kegiatan sosial.

Peserta terdiri atas perempuan pemimpin/pengasuh/guru pesantren, pengajar lembaga pendidikan dan perguruan tinggi Islam, pemimpin organisasi keislaman, majelis taklim, ustazah, muballighah, dai'yah, aktivis perempuan, pakar, akademisi dan pemerhati isu-isu keislaman.(Desi Angriani)

Sumber: <http://news.metrotvnews.com/news/VNxQGMdb-kongres-ulama-perempuan-indonesia-dijamin-bebas-politik>

ULAMA PEREMPUAN BAKAL GELAR KONGRES ULAMA DI CIREBON

Tempo.co, 09 April 2017

Ulama perempuan bakal menggelar Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Cirebon, Jawa Barat, pada 25-27 April 2017. Sebanyak 500 ulama perempuan diperkirakan hadir di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin, Cirebon, selama kongres.

Ketua panitia pengawas kongres, Badriyah Fayumi, mengatakan kongres ini mempertegas peran dan pengakuan ulama perempuan dalam persoalan kebangsaan yang aktual di ruang publik. "Tujuan kongres ini mengukuhkan keberadaan dan peran ulama dalam kesejarahan Islam di Indonesia," kata Badriyah di KiKine, Jakarta, Ahad, 9 April 2017.

Menurut dia, kongres ini sebagai ajang pertemuan ulama perempuan di Indonesia dalam menjawab berbagai isu. Nantinya, kongres akan memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan. Beberapa isu tersebut adalah masalah kekerasan seksual, pernikahan anak, perusakan alam, ketimpangan sosial, dan radikalisme.

Fasilitator kongres, Ninik Rahayu, mengatakan kongres bakal diisi dengan seminar internasional tentang ulama perempuan. Rencananya, beberapa narasumber bakal hadir dari Pakistan, Afganistan, Malaysia, Arab Saudi, dan Nigeria.

Ia juga menuturkan kongres ini bakal merumuskan fatwa ulama perempuan melalui musyawarah sebagai produk dalam kongres. "Pada saat yang sama akan diadakan sidang perumusan rekomendasi kongres," kata dia.

Ia menargetkan peserta kongres mencapai 500 peserta yang meliputi akademisi, peneliti, dan pemerhati isu-isu keislaman dan perempuan. Meski begitu, ia mengatakan kepesertaan tidak hanya diisi perempuan tapi juga laki-laki. "Nanti bisa kami klarifikasi lagi kepesertaan untuk perimbangan," katanya. (Arkhelas Wisnu)

Sumber: <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/04/09/173864210/ulama-perempuan-bakal-gelar-kongres-ulama-di-cirebon>

ULAMA PEREMPUAN AKAN KELUARKAN FATWA

Kompas, 10 April 2017

Sebanyak 500 ulama perempuan akan berkumpul membahas berbagai isu terkait perempuan di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat, 25-27 April 2017. Tiga isu utama yang dibahas adalah kekerasan seksual, pernikahan anak, serta perusakan alam dalam konteks ketimpangan sosial, migrasi, dan radikalisme. Kongres diharapkan menghasilkan rekomendasi, fatwa, dan ikrar keulamaan perempuan Indonesia. Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) tak hanya milik ulama perempuan, tetapi juga ulama (laki-laki) yang memiliki kesadaran substantif pada berbagai isu perempuan. Dalam jumpa pers, Minggu (9/4), Ketua Tim Pengarah KUPI Badriyah Fayumi mengatakan, kongres ini adalah sebuah ruang pertemuan para ulama perempuan yang ingin bersama-sama berbuat untuk bangsa. Tidak ada pembentukan organisasi baru dan pemilihan pengurus karena para peserta KUPI berasal dari berbagai organisasi, perguruan tinggi, dan pesantren. Para panitia pengarah membenarkan, KUPI bukan kongres yang berimplikasi politis. Panitia yang hadir, kemarin, meliputi komisioner KPPI, Maria Ulfah Anshor; pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Nur Rofiah; komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu; pengajar Universitas Nahdlatul Ulama, Neng Dara Affiah; dan pengajar di IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, Faqihuddin AK. Selain ikrar keulamaan yang dirumuskan sesuai kongres dan rekomendasi yang ditujukan utamanya bagi para pengambil keputusan, KUPI juga akan mengeluarkan fatwa. Fatwa mengenai tiga isu utama itu bersifat anjuran bagi umat yang penggodaannya melalui musyawarah fatwa dengan berbagai pertimbangan. Rofiah mengatakan, fatwa itu sebetulnya tidak tunggal, bisa fatwa perseorangan, kelompok, ataupun lembaga. Kekuatan fatwa terletak pada umat yang memanfaatkan fatwa itu. Fatwa memberikan arahan kepada umat, tapi tak mengikat atau memaksa, sebelum hal itu menjadi kekuatan hukum positif. Meski demikian, daya dorong fatwa itu sangat kuat karena dimusyawarahkan oleh banyak ulama.

Peran Penting

Kata ulama adalah bentuk jamak dari alim atau orang berilmu. Menurut Rofiah, ulama secara terminologis adalah orang berilmu mendalam, yang memiliki rasa takut kepada Allah (berintegritas), berkepribadian mulia, mengamalkan, menyampaikan, menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan bagi semesta. Ulama perempuan, seperti definisi tersebut, telah lama ada di Indonesia. Akan tetapi, peran mereka belum tercatat secara proporsional dalam sejarah. Ulama perempuan di dunia sejak dulu telah berjuang dan menjadi bagian dari setiap perkembangan peradaban Islam. Keberadaan ulama perempuan di Indonesia merupakan ciri sekaligus pembeda nyata wajah Islam Indonesia daripada negara-negara berpenduduk mayoritas Islam lain. Perempuan berperan penting dalam dua organisasi keislaman besar, yakni NU dan Muhammadiyah. Hal ini memastikan Islam Indonesia yang moderat, yang telah berlangsung sejak era kolonial. (IVV)

Sumber: Harian Kompas, 10 April 2017

**KOMITE
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA:
KAMI TAK BERPOLITIK**

Islamindonesia.id, 10 April 2017

Untuk yang pertama kalinya, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) akan digelar di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin Cirebon. Ketua Steering Committee KUPI Badriyah Fayumi menegaskan, kongres ini bukan langkah untuk membuat partai politik, tapi murni sebagai ruang perjumpaan ulama perempuan dari berbagai latar belakang dan organisasi keislaman di Tanah Air.

“Kami tidak akan berpolitik kita jamin, tidak akan ada struktur kemudian milih siapa enggak akan,” kata Badriyah dalam konferensi pers di Ruang Bersama KeKini, Cikini, seperti dilansir *metrotvnews.com*, 9/4.

Kongres digelar untuk melegitimasi dan mengafirmasi kerja perempuan-perempuan ulama di Indonesia. Tujuan akhir kongres sama sekali bukan menjadi ormas atau organisasi perempuan tandingan.

“Untuk menyampaikan fakta kepada seluruh dunia bahwa ulama perempuan itu nyata, lho, di Indonesia. Mereka sudah melakukan berbagai peran dan level di berbagai tempat. Bukan untuk jadi ormas,” tegas dia.

Menurut Badriyah ini adalah ruang perjumpaan ulama perempuan dari berbagai latar belakang, pendidikan baik formal maupun pesantren. Selain itu, nantinya akan ada perjumpaan dengan masyarakat yang membutuhkan fatwa.

“Kemudian juga kita berjumpa dengan para aktivis dan korban yang masalahnya dimintakan fatwa pada ulama perempuan Indonesia ini. Jadi ini lebih pada forum silaturahmi dan silatul ilmi ya,” katanya seperti dilaporkan *detik.com*.

Badriyah juga mengatakan, kongres ini akan dihadiri lebih dari 500 ulama perempuan se-Indonesia. Dia menjelaskan, kongres ini memang gagasan dari ulama perempuan Indonesia.

“Acara ini sejak awal digagas partisipatoris. Kami tidak mengandalkan ketokohan tertentu, karena ulama perempuan punya ilmu semuanya dalam berbagai level bahkan di tingkat komunitas terkecil pun sangat patut untuk dishare dengan ulama di daerah, dan patut untuk berpartisipasi pada khalayak,” kata Badriyah.[]

Sumber: <https://islamindonesia.id/berita/komite-kongres-ulama-perempuan-indonesia-kami-tak-berpolitik.htm>



ULAMA PEREMPUAN AKAN KELUARKAN FATWA

Baranews.co, 10 April 2017

Sebanyak 500 ulama perempuan akan berkumpul membahas berbagai isu terkait perempuan di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat, 25-27 April 2017. Tiga isu utama yang dibahas adalah kekerasan seksual, pernikahan anak, serta perusakan alam dalam konteks ketimpangan sosial, migrasi, dan radikalisme. Kongres diharapkan menghasilkan rekomendasi, fatwa, dan ikrar keulamaan perempuan Indonesia.

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) tak hanya milik ulama perempuan, tetapi juga ulama (laki-laki) yang memiliki kesadaran substantif pada berbagai isu perempuan. Dalam jumpa pers, Minggu (9/4), Ketua Tim Pengarah KUPI Badriyah Fayumi mengatakan, kongres ini adalah sebuah ruang pertemuan para ulama perempuan yang ingin bersama-sama berbuat untuk bangsa. Tidak ada pembentukan organisasi baru dan pemilihan pengurus karena para peserta KUPI berasal dari berbagai organisasi, perguruan tinggi, dan pesantren.

Para panitia pengarah membenarkan, KUPI bukan kongres yang berimplikasi politis. Panitia yang hadir, kemarin, meliputi komisioner KPAI, Maria Ulfah Anshor; pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Nur Rofiah; komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu; pengajar Universitas Nahdlatul Ulama, Neng Dara Affiah; dan pengajar di IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, Faqihuddin AK.

Selain ikrar keulamaan yang dirumuskan sesuai kongres dan rekomendasi yang ditujukan utamanya bagi para pengambil keputusan, KUPI juga akan mengeluarkan fatwa. Fatwa mengenai tiga isu utama itu bersifat anjuran bagi umat yang penggodokannya melalui musyawarah fatwa dengan berbagai pertimbangan.

Rofiah mengatakan, fatwa itu sebetulnya tidak tunggal, bisa fatwa perseorangan, kelompok, ataupun lembaga. Kekuatan fatwa terletak pada umat yang memanfaatkan fatwa itu. Fatwa memberikan arahan kepada umat, tapi tak mengikat atau memaksa, sebelum hal itu menjadi kekuatan hukum positif. Meski demikian, daya dorong fatwa itu sangat kuat karena dimusyawarahkan oleh banyak ulama.

Peran penting

Kata ulama adalah bentuk jamak dari alim atau orang berilmu. Menurut Rofiah, ulama secara terminologis adalah orang berilmu mendalam, yang memiliki rasa takut kepada Allah (berintegritas), berkepribadian mulia, mengamalkan, menyampaikan, menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan bagi semesta. Ulama perempuan, seperti definisi tersebut, telah lama ada di Indonesia. Akan tetapi, peran mereka belum tercatat secara proporsional dalam sejarah.

Ulama perempuan di dunia sejak dulu telah berjuang dan menjadi bagian dari setiap perkembangan peradaban Islam. Keberadaan ulama perempuan di Indonesia merupakan ciri sekaligus pembeda nyata wajah Islam Indonesia daripada negara-negara berpenduduk mayoritas Islam lain. Perempuan berperan penting dalam dua organisasi keislaman besar, yakni NU dan Muhammadiyah. Hal ini memastikan Islam Indonesia yang moderat, yang telah berlangsung sejak era kolonial. (IVV)/Harian KOMPAS

Sumber: <http://baranews.co/blog/2017/04/10/kebangsaan-ulama-perempuan-akan-keluarkan-fatwa/>

KONGRES ULAMA DAPAT SAMBUTAN MERIAH

KOMPAS, 11 April 2017

Berbagai elemen masyarakat di Tanah Air, bahkan di luar negeri, antusias menyambut Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang akan digelar di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 25-27 April 2017. Kongres yang diklaim sebagai yang pertama di dunia tidak hanya menjadi ajang silaturahmi para perempuan ulama, tetapi juga akan membahas berbagai isu terkait perempuan di sejumlah negara.

Menurut Wakil Ketua Panitia Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Faqihuddin AK, hingga Senin (10/4) yang merupakan batas akhir pendaftaran, 800 orang mendaftar untuk mengikuti acara tersebut. "Padahal, kuota peserta hanya 500 perempuan ulama. Nanti, kami lihat mana yang menjadi peserta dan pemantau," ujar Faqihuddin kepada Kompas, Senin, di kota Cirebon, Jabar.

Para pendaftar tersebut antara lain berasal dari Pulau Jawa, Sulawesi, bahkan Kalimantan. Tidak hanya perempuan ulama yang mendaftar, sejumlah aktivis perempuan dan akademisi juga ingin mengikuti kongres itu. Sementara peserta luar negeri tercatat 28 orang yang berasal antara lain dari Malaysia, India, Pakistan, dan Singapura.

Selain itu, silaturahmi antar perempuan ulama juga dinilai lebih terasa karena dilakukan di pondok pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren kebon Jambu, Hj Masriyah Amva, menyambut baik kongres tersebut. "Ini berkah luar biasa. Kami bisa saling belajar tentang bagaimana perempuan membuktikan bahwa kami tidak lemah," ujarnya.

Masriyah yang merupakan satu-satunya perempuan yang menjadi pimpinan tertinggi pondok pesantren di Cirebon. "Semoga KUPI menjadi ruang menyelesaikan berbagai masalah perempuan dan bangsa yang kompleks," ujarnya. (IKI)

Sumber: Harian KOMPAS, 11 April 2017

**MENAG APRESIASI
KONGRES ULAMA PEREMPUAN
DI CIREBON**

Fahmina.or.id, 14 April 2017

Menteri Agama Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan apresiasinya terhadap Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Menurutnya kongres ini merupakan kegiatan yang luar biasa, pertama kali digelar di Indonesia bahkan dunia.

“Saya pikir kegiatan ini (KUPI-red) sebuah kongres luar biasa. Bisa dikatakan kongres ulama perempuan pertama di Indonesia mungkin sedunia,” katanya, sesaat setelah meresmikan gedung SBSN IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Kamis (13/4).

Ia juga menyatakan ulama perempuan harus dikembangkan agar ulama tidak hanya domain laki-laki.

“Ini sesuatu yang mendasar karena memang ulama-ulama perempuan memang harus dikembangkan supaya ulama itu tidak hanya domain pria atau laki-laki,” katanya.

Menag juga menambahkan bahwa perempuan-perempuan memiliki potensi yang luar biasa untuk menguasai keilmuan keislaman. Ia juga berharap kongres ini dapat berkembang dan memunculkan ulama-ulama perempuan di masa depan.

“Perempuan juga punya potensi yang luar biasa dalam hal penguasaan wawasan keilmuan keislaman. Melalui kongres ini adalah sebuah forum yang sangat baik untuk pengembangan ulama perempuan ke depan,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu ia menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa menghadiri kegiatan kongres. Dikarenakan ada kegiatan di hari yang sama untuk membuka Pekan Ilmiah Olah Raga Seni dan Riset (Pioner) VIII PTKIN se-Indonesia di UIN Ar Raniry, Aceh.

“Saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir, karena saya harus berada di Aceh membuka acara pionir di aceh,” katanya.

Kongres Ulama Perempuan sedianya digelar selama tiga hari yakni tanggal 25 sampai 27 April 2017 di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al Islamy, Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. Serta akan dihadiri 500 perempuan se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

Sumber: <http://fahmina.or.id/menag-apresiasi-kongres-ulama-perempuan-di-cirebon/>

TEMU ULAMA PEREMPUAN

Kompas, 25 April 2017

Kerukunan Antarumat Beragama Jadi Modal Bangsa.

Lebih dari 700 perempuan ulama, akademisi, dan perempuan aktivis duduk bersama pada Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang dimulai Selasa (25/4) ini di Cirebon, Jawa Barat. Mereka akan bertukar pikiran tentang sejumlah persoalan.

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang akan berlangsung hingga Kamis (27/4) direncanakan menghasilkan ikrar keulamaan perempuan Indonesia, fatwa, dan rekomendasi.

Tiga isu utama adalah kekerasan seksual dan pernikahan anak, perusakan alam dalam konteks ketimpangan sosial dan migrasi serta radikalisme.

“Peserta akan bertukar pikiran tentang perjuangan perempuan ulama di beberapa negara dalam menghadapi masalah, seperti kekerasan terhadap perempuan hingga kemiskinan,” ujar sekretaris panitia KUPI, Ninik Rahayu, Senin di Cirebon.

Hingga kemarin panitia mencatat 1.270 pendaftar. Namun dengan pertimbangan keterwakilan wilayah dan ketersediaan tempat, hanya 574 peserta dan 185 pengamat, termasuk perempuan aktivis yang diterima, jumlah itu termasuk 35 peserta yang berasal dari 16 Negara, seperti Malaysia, Nigeria, dan Arab Saudi. Jumlah ini melebihi target awal panitia, yaitu 500 peserta termasuk pengamat.

Sejumlah peserta, antara lain dari Aceh, Sumatra Barat, dan Banten, kemarin tiba di pondok pesantren Kebon Jambu, Kecamatan Ciwaringin, Cirebon. Peserta akan tinggal di pondok pesantren yang dipimpin oleh Hj. Masriyah Amva.

“Masyarakat juga antusias. Ada enam pesantren di sekitar Cirebon yang sukarela menyediakan tempat bagi para peserta.” Lanjut Ninik.

KH. Husein Muhammad, pengasuh pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon mengatakan, KUPI merupakan peristiwa langka di Indonesia, bahkan di dunia, menurut dia, eksistensi perempuan ulama selama ini kerap diabaikan, padahal, perempuan ulama sudah banyak berbuat untuk pesantren, bahkan bangsa,”ujarnya

Pekan Kerukunan

Ketika membuka Pekan Kerukunan Nasional di Manado, Minggu (23/4) Wakil Presiden Yusuf Kalla mengingatkan, kerukunan antarumat beragama adalah modal bangsa Indonesia untuk maju. Tak ada bangsa yang maju jika selalu mengedepankan perbedaan masyarakatnya.

Pekan kerukunan yang digagas oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey itu diawali dengan perayaan Paskah Nasional di Tondano pada Jumat pekan lalu, pawai mobil hias kerukunan dan dialog tokoh antarumat beragama, serta terakhir perayaan Isra Mi’roj di Manado, Senin (24/4)

Dalam hikmah Isra Mi’raj yang dihadiri sejumlah tokoh agama nasional dan pemerintah di Manado, mantan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah Din Samsudin juga meyakini, dialog antarumat beragama yang dilakukan terus-menerus memiliki kekuatan membangun bangsa ini.

“Dialog yang dialogis, transparan dan terus terang menjadi kekuatan menyatukan bangsa dari rasa curiga”, katanya.

Dalam forum dialog, Sekjen Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Gomar Gultom menyatakan, kerukunan umat beragama merupakan budaya masyarakat Indonesia, oleh karena itu kerukunan umat beragama tak perlu diatur atur dalam tata peraturan. “esensi kerukunan adalah beragama secara cerdas menukik pada esensi agama itu sendiri, yakni kebaikan dan kedamaian”, ujarnya.

Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zoelva menyatakan tiga hal menyangkut kerukunan pertama, tradisi toleransi telah ada sejak zaman dahulu dalam masyarakat Indonesia. Kedua, memperkokoh landasan pemersatu bangsa, yakni Pancasila, dalam segala lini kehidupan berbangsa. Ketiga, menghidupkan dan memelihara tradisi gotong-royong untuk mengatasi perbedaan. (IKI/ODY/DIM/ZAL/HAR)

Sumber: Harian KOMPAS, 25 April 2017, hal 4

KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA RESMI DIBUKA DI CIREBON

Republika.co.id, 25 April 2017

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) resmi dibuka di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al Islamy, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Selasa (25/4) malam. Kegiatan itu diharapkan mampu menegaskan kembali peran ulama perempuan dalam meneguhkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan.

Pembukaan KUPI yang berlangsung semarak itu dilakukan dari peserta, oleh peserta, untuk peserta, dengan dipimpin delapan orang peserta. Kedelapan peserta itu mencerminkan keberagaman ulama dari lintas generasi, latar belakang pendidikan, organisasi keagamaan, dan bidang pengabdian dari berbagai wilayah di Indonesia.

Kedelapan peserta di antaranya perwakilan dari Papua yang memegang Alquran, generasi muda dari Ponpes Kebon Jambu Al Islamy yang memegang kumpulan hadis, dan perwakilan dari Jombang yang memegang kitab kuning. Selain itu, perwakilan dari Aceh yang memegang UUD 1945, perwakilan dari Kalimantan yang memegang tanaman segar, perwakilan dari Sulawesi Selatan membawa air dan tanah dan perwakilan dari Jakarta yang memegang kumpulan konvensi internasional yang sudah disepakati pemerintah Indonesia.

Hal tersebut menjadi tanda bahwa KUPI diselenggarakan dengan merujuk pada Alquran, hadis, kitab kuning, UUD 45, konvensi HAM internasional, kehidupan nyata dan alam semesta, sebagaimana Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ketua Panitia KUPI yang juga Pengasuh Pesantren Mahasina Bekasi, Badriyah Fayyumi, mengatakan, bahwa ulama perempuan telah menunjukkan kiprahnya dalam kehidupan bangsa dan negara. "Peran mereka melekat dalam kesejarahan bangsa," tegas Badriyah.

Badriyah mengungkapkan, kongres ulama perempuan tersebut merupakan yang pertama di Indonesia dan dunia. Dia mengatakan, salah satu tujuannya untuk mengafirmasi dan merekognisi keberadaan ulama perempuan. “Ulama perempuan menjadi pendidik terdepan, pembela ketidakadilan, dan pendamping yang melekat dengan korban-korban kekerasan,” kata Badriyah.

Dalam ajang KUPI, ratusan ulama perempuan itu akan mengadakan seminar internasional, seminar nasional, dan musyawarah fatwa tentang persoalan kebangsaan aktual di ruang publik dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk seminar internasional tentang ulama perempuan rencananya akan menghadirkan beberapa narasumber dari Indonesia dan sejumlah negara. Di antaranya, Pakistan, Afghanistan, Malaysia, Saudi Arabia dan Nigeria.

Sedangkan seminar nasional tentang ulama perempuan, akan diisi diskusi panel tentang sejarah, peran, tantangan, strategi dakwah dan metode studi Islam ulama perempuan dalam menjawab isu-isu kontemporer di Indonesia. KUPI akan berlangsung pada 25 - 27 April 2017 di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al Islamy. Rencananya, kegiatan itu akan ditutup oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. (Red: Andri Saubani)

Sumber: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/04/26/op01jo409-kongres-ulama-perempuan-indonesia-resmi-dibuka-di-cirebon>

KONGRES ULAMA PEREMPUAN PERTAMA DI INDONESIA DIGELAR DI CIREBON

Bbc.com, 25 April 2017

Ratusan perempuan ulama, aktivis dan akademisi akan hadir dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia KUPI pertama yang digelar di Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin Cirebon pada 25-27 April. Pertemuan ini disebut sebagai bentuk konsolidasi para ulama perempuan yang selama ini bekerja untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat sipil.

Ketua Tim Pengarah KUPI Badriyah Fayumi mengatakan sejumlah perempuan ulama yang hadir telah bekerja dalam isu-isu perempuan dan keislaman.

"Kongres ini bertujuan agar ulama perempuan dapat mengkonsolidasikan diri dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan," jelas dia.

Badriyah mengatakan selama ini perempuan ulama sudah banyak bekerja untuk menyelesaikan persoalan di masyarakatnya, tetapi kiprahnya jarang terdengar.

"Melalui KUPI ini kita ingin nyatakan bahwa ulama perempuan ada, eksis, dan sudah terbukti berkontribusi. Dan inilah saatnya kita mengakui keberadaan mereka, sekaligus memberikan apresiasi atas keberadaan dan kontribusi ulama perempuan tersebut," kata dia.

Kongres akan membahas tiga isu utama yang dihadapi perempuan dan anak-anak, yaitu perkawinan anak, kekerasan seksual dan kerusakan alam dalam konteks keadilan sosial, migrasi dan radikalisme.

"Semua tema ini berkaitan langsung dengan perempuan, seperti perkawinan anak di mana Indonesia berada di urutan kedua terbesar di Asia Tenggara setelah Kamboja, kekerasan seksual yang banyak terjadi, dan lain-lain. Jadi mesti ada solusi yang tidak hanya melibatkan perempuan, tetapi juga berbagai pihak," jelas Badriyah.

Tiga isu besar itu akan dibahas peserta dalam musyawarah keagamaan, yang nantinya akan menghasilkan sejumlah rekomendasi dan 'ikrar ulama perempuan.'

"Rekomendasinya akan meliputi tingkat keluarga, masyarakat, tokoh agama, ulama perempuan, pemerintah dan negara. Karena masalah di negeri ini tak mungkin diselesaikan oleh hanya satu pihak," kata Badriyah.

Dalam kongres ini juga hadir sejumlah peserta dan pemantau laki-laki, yang selama ini memiliki kepedulian terhadap isu-isu perempuan, antara lain KH Husein Muhammad dari Cirebon pendiri Fahmina dan pernah menjadi komisioner Komnas Perempuan.

Kata ulama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan orang yang ahli dalam hal atau pengetahuan agama Islam. Tetapi selain itu juga memiliki akhlak yang mulia, mengamalkan ilmunya untuk kebaikan dan kemajuan umat.

Kata ulama sebenarnya bisa digunakan untuk laki-laki ataupun perempuan. Tetapi di Indonesia kata ulama umumnya digunakan untuk laki-laki yang ahli agama.

Indonesia sebenarnya banyak memiliki ulama perempuan sejak beberapa abad lalu, tetapi peran mereka terpinggirkan di dalam catatan sejarah. Saat ini, ulama perempuan di Indonesia banyak yang berperan dalam masyarakat, sebagai pemimpin pesantren, ataupun pemimpin institusi pendidikan, dan melakukan pemberdayaan di masyarakat.

Meski begitu, ulama perempuan masih juga mendapatkan tantangan di tengah budaya patriarki yang masih dominan, seperti disampaikan pemimpin Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon, Nyai Hajah Masriyah Amva.

"Masih banyak yang menganggap perempuan tak bisa memimpin pesantren, dan ada yang menganggap mereka sukses itu karena dibantu oleh laki-laki, masih ada yang seperti itu," kata Masriyah yang ditemui di tengah persiapan kongres.

Selain memimpin pesantren, sehari-hari Masriyah juga banyak menerima pengaduan dan keluhan mengenai kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangga dari warga sekitar ataupun orang tua santri.

Dia berharap kongres ini dapat memperkuat peran ulama perempuan dalam menjalankan kerja untuk menyelesaikan masalah sosial dan agama di masyarakat.

Sumber: <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39701366>

**KONGRES ULAMA PEREMPUAN
INDONESIA PERTAMA
RESMI DIBUKA**

Voaindonesia.com, 25 April 2017

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang untuk kali pertama diadakan, dibuka secara resmi oleh kalangan ulama dan pimpinan daerah di Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Cirebon Jawa Barat.

Ketua Panitia Kongres Ulama Perempuan Indonesia Badriyah Fayumi dalam sambutannya pada malam pembukaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia Selasa malam (25/4) di Pesantren Kebon Jambu Babakan Cirebon Jawa Barat mengatakan, Kongres Ulama Perempuan Indonesia merupakan cita-cita bersama dari berbagai kalangan.

"Kongres Ulama Perempuan Indonesia ini akan menjadi ruang pertemuan para ulama, Pemerintah, dengan aktivis, para korban. Untuk saling berbagi pengetahuan, saling berbagi pengalaman," kata Badriyah Fayumi.

Badriyah yang merupakan Pemimpin Pesantren Mahasina di Bekasi dan pernah menjadi Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjelaskan Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang digelar 25-27 April itu, merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi peran-peran para ulama perempuan yang selama ini dipinggirkan dan dilupakan sejarah.

Sementara itu, Dewan Penasehat Kongres Ulama Perempuan Indonesia Masriyah Amva menyampaikan apresiasi kepada beberapa pendeta dan ibu-ibu pimpinan Jemaat Ahmadiyah (JAI) Pusat, Aisyah, Muhammadiyah dan sebagainya yang menghadiri Kongres Ulama Perempuan Indonesia.

"Juga terimakasih atas kedatangan beberapa pendeta yang jauh-jauh datang ingin menghormati kami yang berlainan keyakinan. Terima kasih juga kepada ibu istri dari pimpinan Ahmadiyah Pusat. Perbedaan adalah untuk saling menghormati," kata Masriyah Amva.

Acara Kongres Ulama Perempuan Indonesia ini mendapat dukungan dari aparat Pemerintah Daerah setempat dan organisasi masyarakat. Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra mengatakan, "Sangat bangga dan berterima kasih kabupaten Cirebon sebagai tempat lokasi kongres. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih."

Sementara itu Bupati Brebes Idza Priyanti berharap acara Kongres Ulama Perempuan Indonesia bisa menginspirasi aktivitas perempuan Indonesia.

"Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya yang pertama kali Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang juga dihadiri delegasi dari beberapa negara. Selamat dan sukses. Semoga ini semua bisa menginspirasi kaum perempuan dalam membangun Indonesia," ujarnya.

Netty Prasetyani, istri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, berharap Kongres Ulama Perempuan Indonesia mampu meningkatkan kualitas perempuan Indonesia serta menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan.

"Dan kita berharap, hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia akan mampu menghadirkan semangat belajar dan menuntut ilmu bagi kaum perempuan seluruh Indonesia. Untuk menjadi pendidik meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarganya. Serta menurunkan angka kekerasan yang hari ini marak terjadi di tengah masyarakat," kata Netty.

Kongres Ulama Perempuan Indonesia dihadiri lebih dari 500 orang peserta dari Aceh hingga Papua dan sekitar 200 orang pemantau dari berbagai negara. [aw/as,uh]

Sumber: <https://www.voaindonesia.com/a/kongres-ulama-perempuan-resmi-dibuka/3826018.html>

**HARI INI,
KONGRES ULAMA
PEREMPUAN INDONESIA DIBUKA**

Fajarnews.com, 25 April 2017

Sedikitnya 574 orang peserta ditambah 35 pengamat, 15 orang di antaranya berasal dari luar negeri, akan ikut ambil bagian dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), yang akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Selasa-Kamis (25-27/4).

Panitia pelaksana KUPI, Emy Fakhriyati mengatakan, dari 1.270 pendaftar yang diterima menjadi peserta kongres sebanyak 574 orang. Peserta merupakan ulama perempuan yang berasal dari sejumlah provinsi di Indonesia dengan rincian, Provinsi Aceh sebanyak 18 peserta, Bangka Belitung 1, Banten 19, Bengkulu 1, Jabar 110, Jakarta 116, Jambi 5, Jateng 59, Jatim 82, Kalbar 4, Kalsel 11, Kaltim 2, Lampung 18, Maluku 2, NTB 5, NTT 2, Papua 7, Sulsel 10, Sulteng 6, Sulut 5, Sultra 1, Sumbar 15, Sumsel 3, Sumut 6, dan Provinsi Yogyakarta 66 peserta.

“KUPI akan dihadiri juga 35 orang pengamat dan 15 di antaranya dari negara sahabat seperti Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Saudi Arabia, Mesir, Nigeria, Kenya, Australia, Amerika, Malaysia, Singapura, Filipina, Kanada, India, dan Belanda,” kata Emy.

Dikatakannya kongres akan dibuka langsung Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, Selasa (25/4) pukul 19.30 WIB, hari ini. Usai dibuka acara dilanjutkan pentas seni dan budaya hingga pukul 22.00 WIB. Sebelumnya pada pukul 13.00 WIB, para peserta melakukan taaruf (perkenalan).

“Para peserta KUPI yang terdiri dari perempuan pemimpin pesantren, pemimpin organisasi keislaman, pengasuh atau pengelola majlis taklim, ustazah, *muballighah* dan daiyah.

Semua akan mengikuti sesi perkenalan. Sesi ini ditekankan pada penguatan keahlian mengenali data diri, sebagai basis data keulamaan perempuan. Para

peserta juga akan dibagi enam kelompok. Per kelompok akan ditemani oleh seorang fasilitator,” ujar Emy.

Informasi yang berhasil dihimpun fajarnews.com menyebutkan, kongres tersebut akan membahas berbagai isu krusial seperti kekerasan seksual, perkawinan anak, kerusakan lingkungan, pesantren dan keulamaan perempuan, buruh migran, radikalisme agama, dan konflik kemanusiaan.

Kongres juga bakal diisi seminar internasional tentang ulama perempuan. Rencananya, beberapa narasumber bakal hadir dari Pakistan, Afganistan, Malaysia, Arab Saudi, dan Nigeria. Mereka juga akan menghadirkan para aktivis dan korban yang masalahnya dimintakan fatwa pada ulama perempuan Indonesia ini. Kongres ini bakal merumuskan fatwa ulama perempuan melalui musyawarah sebagai produknya.

Sebelumnya, Pengasuh Ponpes Kebon Jambu Babakan Ciwaringin, Hj Masriyah Amva kepada fajarnews.com mengatakan, saat ini masyarakat Indonesia hanya mengenal ulama dan fokus kepada para ulama laki-laki. Dengan kongres ini ulama perempuan ingin diakui dan dihargai karena sudah layaknya para ulama perempuan dimanapun keberadaannya dan perjuangannya dapat dihargai.

“Acara ini bisa saja diselenggarakan di hotel berbintang atau gedung mewah. Namun karena mereka sengaja mencari tempat yang lebih pas untuk ulama perempuan agar lebih merasakan dalam ponpes tradisional yang diasuh oleh seorang perempuan seperti di Ponpes Kebon Jambu ini,” katanya.

Dikatakannya, mereka akan melihat suasana pesantren tradisional lebih dekat, akan melihat bagaimana para santrinya tidur hanya beralas tikar karena tidak memakai fasilitas yang memadai.

Yang sangat berbeda dengan pesantren modern, sehingga kongres ulama perempuan ini agar bisa bermakna dan bisa bermanfaat dan bisa menjiwai keulamaannya. **(Adhe Hamdan)**

Sumber: <http://news.fajarnews.com/read/2017/04/25/15048/hari.ini.kongres.ulama.perempuan.indonesia.dibuka>

KONGRES ULAMA PEREMPUAN PERTAMA SIAP DIBUKA MALAM INI

Mediasulsel.com, 25 April 2017

Lebih dari 500 orang Ulama perempuan se Indonesia, berkumpul membicarakan peran ulama perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai Selasa (25/4) sampai dua hari ke depan mereka menggelar Kongres Ulama Perempuan di Pesantren Kebon Jambu dan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee) Kongres Ulama Perempuan Indonesia Badriyah Fayumi mengatakan ulama perempuan berkontribusi besar di masyarakat dalam isu kemanusiaan dan kebangsaan.

“Di antara tujuan kongres ini adalah bagaimana ulama perempuan tidak hanya memberikan kontribusinya untuk isu kebangsaan dan kemanusiaan, tetapi eksistensinya dihargai dan diakui,” kata Badriyah.

Badriyah Fayumi yang saat ini Wakil Ketua Pengurus Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PPLKNU) dan pernah menjadi Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mengatakan, dominasi budaya patriaki berakibat pada tenggelam dan terpinggirkannya ulama perempuan dalam mengisi ruang-ruang publik. Padahal lanjutnya, perempuan, punya banyak akademisi dan intelektual.

Kongres ini juga dihadiri ulama perempuan dari Pakistan, Mossarat Qadeem, Zainah Anwar (Malaysia), Hatoon Al-Fasi (Saudi Arabia), Sureya Roble-Hersi (Kenya), Fatima Akilu (Nigeria), dan Roya Rahmani the Ambassador of Afghanistan in Indonesia). (voa/4ld)

Sumber: <https://www.mediasulsel.com/kongres-ulama-perempuan-pertama-siap-dibuka-malam-ini/>

780 ULAMA PEREMPUAN KONGRES DI CIREBON HARI INI

RedaksiIslam.com, 25 April 2017

Sejarah Islam mencatat bahwa ulama perempuan telah menjadi bagian dari setiap perkembangan peradaban Islam, termasuk di Indonesia. Namun, catatan tentang kiprah ulama perempuan dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia sangat kecil akibat konstruksi sejarah yang sepihak.

Untuk itu, dibutuhkan upaya kultural dan struktural guna menegaskan kembali kerja-kerja sosial keulamaan perempuan dalam meneguhkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan. Atas dasar itulah, muncul gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).

“Ini adalah sebuah perjumpaan 780 ulama perempuan yang selama ini sudah berkiprah di masyarakat. Ini merupakan perjumpaan pertama,” ujar Sekretaris Umum Komite Pelaksana KUPI, Ninik Rahayu, dilansir ROL, Selasa (25/4).

Sebanyak 780 ulama perempuan itu terdiri dari 580 orang peserta dan 200 orang pengamat. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dan beberapa negara.

Kongres yang mengangkat tema ‘Peran Ulama Perempuan Dalam Meneguhkan Nilai Keislaman, Kebangsaan dan Kemanusiaan’ itu akan digelar di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, 25-27 April 2017.

Dalam kegiatan tersebut, ratusan ulama perempuan itu akan mengadakan seminar internasional, seminar nasional, dan musyawarah fatwa tentang persoalan kebangsaan aktual di ruang publik dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan.

Untuk seminar internasional tentang ulama perempuan rencananya akan menghadirkan beberapa narasumber dari Indonesia dan sejumlah negara. Di antaranya, Pakistan, Afghanistan, Malaysia, Saudi Arabia dan Nigeria.

Sedangkan seminar nasional tentang ulama perempuan, akan diisi diskusi panel tentang sejarah, peran, tantangan, strategi dakwah dan metode studi Islam ulama perempuan dalam menjawab isu-isu kontemporer di Indonesia. (Sumber: ROL)

Sumber: <http://redaksiislam.com/780-ulama-perempuan-kongres-di-cirebon-hari-ini/>

ALASAN 780 ULAMA PEREMPUAN BERKONGRES DI CIREBON

Tempo.co, 25 April 2017

Sebanyak 780 ulama perempuan dari berbagai daerah di Indonesia dan juga negara lain menghadiri Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Cirebon, Jawa Barat, 25-27 April 2017.

“Sejarah Islam mencatat bahwa ulama perempuan telah menjadi bagian dari setiap perkembangan peradaban Islam, termasuk Indonesia,” kata Sekretaris Umum Komite Pelaksana KUPI, Ninik Rahayu, Selasa, 25 April 2017. Namun sayangnya, catatan tentang kiprah ulama perempuan dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia sangat kecil akibat konstruksi sejarah yang sepihak.

Untuk itu, kata Ninik, dibutuhkan upaya kultural dan struktural untuk menegaskan kembali kerja-kerja sosial keulamaan perempuan dalam meneguhkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. “Atas dasar itulah muncul gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI),” kata Ninik.

Sebanyak 780 ulama perempuan itu terdiri dari 580 orang peserta dan 200 orang pengamat. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan sejumlah negara. Ada pun tema yang diangkat yaitu Peran Ulama Perempuan Dalam Meneguhkan Nilai Keislaman, Kebangsaan dan Kemanusiaan. Kongres tersebut akan digelar di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon mulai 25 hingga 27 April 2017.

Dalam kegiatan tersebut, ratusan ulama perempuan mengadakan seminar internasional, seminar nasional dan musyawarah fatwa tentang persoalan kebangsaan aktual di ruang publik dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan.

Untuk seminar internasional tentang ulama perempuan rencananya akan menghadirkan beberapa narasumber dari Indonesia dan sejumlah negara. Di

antaranya Pakistan, Afganistan, Malaysia, Saudi Arabia, dan Nigeria. Sedangkan seminar nasional tentang ulama perempuan akan diisi diskusi panel tentang sejarah, peran, tantangan, strategi dakwah dan metode studi Islam ulama perempuan dalam menjawab isu-isu kontemporer di Indonesia.

Sementara itu perwakilan dari Arab Saudi, Hatoon Al Fasi, pada seminar internasional ulama perempuan yang berlangsung di IAIN Syekh Nurjati, Selasa 25 April 2017 mengungkapkan jika ulama perempuan bertanggung jawab menyampaikan Islam moderat, kesetaraan serta kemanusiaan. “Di Arab Saudi, ulama perempuan atau alimat adalah para pendidik perempuan,” kata Hatoon.

Mereka ahli dalam studi agama yang memiliki kemampuan untuk memberikan fatwa dan ijtihad. Mereka juga memiliki pengetahuan tentang Islam yang dapat memberikan spirit kesetaraan dan keadilan. Sayangnya, di dunia Arab, para alimat tidak banyak.

Ketika berbicara tentang perempuan Arab Saudi, lanjut Hatoon, hal tersebut menjadi lebih kompleks karena perempuan harus memikul beban tradisi negara Islam yang menjadikannya sangat kaku dalam semua tingkatan. “Baik politik, ekonomi dan social,” katanya.

Sumber: <https://m.tempo.co/read/news/2017/04/25/173869405/alasan-780-ulama-perempuan-berkongres-di-cirebon>

CIREBON MENJADI TUAN RUMAH KUPI I

Rmoljabar.com, 25 April 2017

Hari ini, untuk pertama kalinya Indonesia menggelar Kongres Ulama Perempuan (KUPI). Cirebon dipilih oleh sebagai tuan Rumah pelaksanaan KUPI, yang digelar selama tiga hari, yakni dari Selasa hingga Kamis (25-27/4).

Kegiatan pembuka KUPI, yakni Seminar Internasional Ulama Perempuan yang digelar di gedung Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sejumlah ulama perempuan dari berbagai negara pun hadir, yakni Pakistan Mossarat Qadeem dari Pakistan, Zainah Anwar dari Malaysia, Hatooon Al-Fasi dari Saudi Arabia, Sureya Roble-Hersi dari Kenya, Fatima Akilu dari Nigeria, dan Roya Rahmani the Ambassador of Afghanistan in Indonesia.

Ketua Panitia Pengarah KUPI, Badriyah Fayumi menyampaikan, salah satu tujuan KUPI adalah membahas tentang kontribusi ulama perempuan, yang selama ini berkuat pada isu kebangsaan dan kemanusiaan. Badriyah mengatakan, eksistensi ulama perempuan tersebut sejatinya dihargai.

Penghargaan terhadap ulama perempuan, sambungnya, suatu keniscayaan, mengingat, budaya patriaki yang ada akan berakibat menenggelemkan dan meminggirkan peran ulama perempuan dalam mengisi ruang-ruang publik.

"Padahal kita punya banyak akademisi dan intelektual dari kalangan perempuan. Begitupun pesantren-pesantren yang memberikan ruang kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan. Ulama perempuan adalah mereka yang memiliki persepektif untuk memajukan masyarakat," kata Badriyah yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PPLKNU).

Ia juga mengatakan, KUPI diharapkan menghasilkan formula dan kontribusi untuk kemajuan para perempuan demi pencapaian kemanusiaan yang adil dan beradab. [nif]

Sumber: <http://www.rmoljabar.com/read/2017/04/25/41516/Cirebon-Menjadi-Tuan-Rumah-KUPI-I->

KUPI GELAR KONGRES DI CIREBON, SEJUMLAH ULAMA PEREMPUAN DUNIA HADIR

Nu.or.id, 25 April 2017

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menyelenggarakan Seminar Internasional Ulama Perempuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat, Selasa (25/4).

Acara seminar dan kongres yang bertemakan *Amplifying Woman Ulama's Voices, Asserting Values of Islam, National Hood, and Humanity* ini menghadirkan pembicara dari 7 negara di antaranya Indonesia, Malaysia, Paksitan, Kenya, Afghanistan, Nigeria, Saudi Arabia. Total ulama perempuan yang hadir sebanyak 780 ulama.

Ketua Steering Committee Badriyah Fayyumi mengatakan bahwa, kongres KUPI pertama ini merupakan puncak dari perjuangan ulama perempuan.

"Kami menegaskan bahwa ulama perempuan mempunyai kontribusi penting bagi negara dan umat manusia, tapi sering kali apa yang dilakukan itu tidak tercatat dengan baik," kata Badriyah.

Sementara itu, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurajti Cirebon H. Sumanta menyambut gembira atas diselenggarakannya Seminar internasional di kampus yang dipimpinnya ini.

"Saat ini, diruangan ini, kampus kami akan tercatat sejarah karena menyelenggarakan seminar internasional ulama perempuan," kata Sumanta.

Adapun nama-nama yang akan menjadi pembicara pada seminar ini ialah, Kamarudin Amin (Indonesia), Eka Srimulayani (Indonesia), Bushra Qadeem (Pakistan), Hatoon Al-Fassi (Saudi Arabia), Ulfat Hussein Masibo (Kenya), Rafatu Abdul Hamid (Nigeria), Zainah Anwar (Malaysia), Roya Rahmani (Afghanistan), Ruhaini Dzuhayatin (Indonesia).

Acara KUPI sendiri dibuka Selasa (25/4) malam oleh Hj Sinta Nuriyah Wahid di Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin, Cirebon. (Husni Sahal/Fathoni).

Sumber: <http://www.nu.or.id/post/read/77345/kupi-gelar-kongres-di-cirebon-sejumlah-ulama-perempuan-dunia-hadir>

ULAMA PEREMPUAN SEDUNIA KONGRES DI PESANTREN CIREBON

Suara.com, 25 April 2017

Ulama perempuan sedunia, Selasa (25/4/2017) sampai dua hari ke depan berkumpul di Pesantren Kebon Jambu dan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Mereka berkumpul membicarakan peran ulama perempuan di dunia.

Di sana mereka menggelar kongres Ulama Perempuan. Kongres ini berkontribusi dalam mengisi semangat kebangsaan dan kemanusiaan yang berkeadilan.

Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee) Kongres Ulama Perempuan Indonesia Badriyah Fayumi yang sekaligus memberikan Keynote Speech Seminar Internasional Ulama Perempuan. Badriyah Fayumi sekarang Wakil Ketua Pengurus Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PPLKNU) dan pernah menjadi Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

“Di antara tujuan kongres ini adalah bagaimana ulama perempuan tidak hanya memberikan kontribusinya untuk isu kebangsaan dan kemanusiaan, tetapi eksistensinya dihargai dan diakui,” kata Badriyah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Selasa siang.

Menurut dia, dominasi budaya patriarki berakibat pada tenggelam dan terpinggirkannya ulama perempuan dalam mengisi ruang-ruang publik. Padahal lanjutnya, perempuan, punya banyak akademisi dan intelektual.

“Begitupun pesantren-pesantren yang memberikan ruang kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan. Sebab, ulama perempuan adalah mereka yang memiliki perhatian pada perspektif untuk kesetaraan perempuan dalam memajukan peradaban Islam dan penguatan civil society,” tegasnya.

Kongres ini dihadiri ulama perempuan dari Pakistan, Mossarat Qadeem, Zainah Anwar (Malaysia), Hatoon Al-Fasi (Saudi Arabia), Sureya Roble-Hersi (Kenya), Fatima Akilu (Nigeria), dan Roya Rahmani the Ambassador of Afghanistan in Indonesia).

Sumber: <http://www.suara.com/news/2017/04/25/133404/ulama-perempuan-sedunia-kongres-di-pesantren-cirebon>

KONGRES ULAMA PEREMPUAN DI CIREBON DIHADIRI OLEH 15 NEGARA

Detik.com, 25 April 2017

Sedangkan seminar nasional tentang ulama perempuan, akan diisi diskusi panel tentang sejarah, peran, tantangan, strategi dakwah dan metode studi Islam ulama perempuan dalam menjawab isu-isu kontemporer di Indonesia. (Sumber: ROL)

Para ulama perempuan di Indonesia dan dunia menghadiri Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang digelar selama beberapa hari ke depan di Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon.

Tak kurang dari 1.200 peserta se-Nusantara dan 15 negara dunia berkumpul untuk merumuskan dan meneguhkan kembali peran ulama perempuan dalam syiar Islam yang selama ini didominasi oleh kaum adam.

Ketua KUPI Hj Badriyah Fayyaumi mengungkapkan, ada tiga tujuan utama digelarnya acara yang baru pertama kali di Indonesia bahkan dunia itu. Pertama adalah mengakui dan mengukuhkan keberadaan dan peran ulama perempuan dalam sejarah Islam dan Indonesia.

Kedua adalah membuka ruang ulama perempuan tanah air dan dunia untuk berbagi pengalaman tentang kerja pemberdayaan perempuan dan keadilan sosial dalam rangka membumikan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan," jelas Badriyah saat ditemui di acara perkongres KUPI di Kampus Pascasarjana IAIN Gunun Jati, Kota Cirebon, Selasa (25/4/2017).

Tujuan terakhir, adalah membangun pengetahuan mengenai ulama perempuan dan kontribusinya bagi kemajuan dan peradaban umat manusia. "Sekaligus merumuskan fatwa dan pandangan keagamaan ulama perempuan Indonesia tentang isu-isu kontemporer dalam perspektif Islam rahmatan lil alamin," ucapnya.

Selain tiga poin utama itu, KUPI juga akan mengeluarkan sebuah rekomendasi dalam menjawab permasalahan kekerasan seksual, pernikahan anak, perusakan alam, ketimpangan sosial, migrasi, hingga radikalisme.

Selama ini, kata Badriyah, peran ulama perempuan seolah tenggelam dan terpinggirkan. Padahal selama ini banyak kaum akademisi dan intelektual perempuan yang berkontribusi cukup besar untuk Islam dan negaranya.

Badriyah mengungkapkan, ulama sendiri dalam Al Quran dan Hadist merupakan bentuk jamak dari kata 'alim' bermakna orang yang tahu atau sangat berilmu. Sehingga tidak menunjukkan batasan disiplin ilmu tertentu atau gender.

Sementara itu ulama perempuan asal Malaysia, Zaenah Anwar, memiliki pandangan tersendiri. Menurutnya peran ulama perempuan di tengah hubungan antar sesama muslim dan negara adalah ingin membangun dan berbagi pengalaman yang baik dalam menginterpretasi ayat-ayat Al Quran dan menyelaraskannya dengan semangat kesetaraan.

"Kami ingin membangun kepercayaan perempuan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi, justru menjunjung tinggi peran perempuan," katanya.

Zaenal menilai sejauh ini tantangan kesetaraan perempuan sangat besar. Namun Indonesia dinilainya sudah cukup baik dalam soal kesetaraan. "Hanya saja Indonesia kurang menjual (kesetaraan) tersebut ke publik," tuturnya.

Hatoonn Al-Fasi, seorang ulama perempuan dari Arab Saudi, berpandangan jika di negaranya peran perempuan terlalu dimonopoli yang akhirnya menyudutkan. Sehingga dia sangat beruntung, Arab Saudi memberikan keistimewaan kepadanya dengan memberikan keleluasaan sebagai perempuan yang bisa berbicara mengenai keislaman.

"Ketika kita bicara tentang perempuan Arab Saudi hal yang menjadi lebih kompleks karena harus memikul beban tradisi negar Islam yang menjadikannya sangat kaku dalam semua tantangan. Sementara, perempuan Arab Saudi selama ini menjadi contoh bagi semua dunia Islam," ujarnya.

Untuk itu dia mendorong agar ulama perempuan memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan Islam moderat yang menyampaikan pesan kesetaraan dan kemanusiaan. "Menjadi seorang Alimat (ulama perempuan) di Arab Saudi bukanlah tugas mudah. Walau ada ribuan perempuan lulusan pendidikan Islam dan penghafal Al Quran tetapi kita tidak punya Alimat yang diakui sebagai imam yang bisa melakukan ijtihad dan diakui," pungkask Al-Fasi.

Selain dihadiri oleh para ulama perempuan Indonesia dan dunia, turut hadir pula dalam acara tersebut perwakilan Kementerian Agama, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Duta Besar Afganistan, Roya Rahmina. (ern/ern)

*Sumber: [https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3483496/kongres-
ulama-perempuan-di-cirebon-dihadiri-oleh-15-negara](https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3483496/kongres-ulama-perempuan-di-cirebon-dihadiri-oleh-15-negara)*

ULAMA PEREMPUAN BERBAGAI NEGARA BERBICARA DI KONGRES ULAMA PEREMPUAN PERTAMA DI CIREBON

Voaindonesia.com, 25 April 2017

Sedangkan seminar nasional tentang ulama perempuan, akan diisi diskusi panel tentang sejarah, peran, tantangan, strategi dakwah dan metode studi Islam ulama perempuan dalam menjawab isu-isu kontemporer di Indonesia. (Sumber: ROL)

Ulama Perempuan asal Pakistan, Mossarat Qadeem mengatakan, peran perempuan di Pakistan sangat berat dan tercerabut dari akarnya. Berbicara dalam Seminar Internasional Ulama Perempuan digelar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon Jawa Barat, Selasa (25/4), Qadeem menjelaskan bahwa perempuan di Pakistan sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dan menjadi korban bom bunuh diri.

"Mereka yang seharusnya bisa mengembangkan keluarga, kini harus merawat korban perang. Belum lagi menjadi korban bom bunuh diri. Dalam situasi ini mereka menjadi bingung. Lantas mereka bertanya kepada Maulananya (ulama). Tetapi tidak jarang maulana mereka justru menginfiltrasi mereka dengan paham radikal," ujarnya.

Sementara itu, Ulama Perempuan yang juga feminis asal Malaysia Zaenah Anwar menyatakan bahwa peran ulama perempuan di tengah hubungan antara komunitas Muslim dan negara adalah keinginan membangun pengalaman yang baik bagaimana menginterpretasi ayat-ayat Al-Quran dan menyelaraskannya dengan semangat kesetaraan.

"Kami ingin membangun kepercayaan perempuan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi, justru menjunjung tinggi peran perempuan. Karena itu kami juga mendorong penerapan CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - Konvensi Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi terhadap Perempuan) di beberapa negara yang masih memegang hukum syariah," katanya.

Seminar Internasional Ulama Perempuan digelar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat, Selasa (25/4). Acara ini merupakan rangkaian dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 25 - 27 April 2017 di Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Cirebon, Jawa Barat.

Adapun narasumber seminar ini selain dari ulama perempuan Indonesia, juga terlibat ulama perempuan dari Pakistan Mossarat Qadeem (Pakistan), Zainah Anwar (Malaysia), Hatoon Al-Fasi (Saudi Arabia), Sureya Roble-Hersi (Kenya), Fatima Akilu (Nigeria), dan Roya Rahmani (the Ambassador of Afghanistan in Indonesia). [aw/as]

Sumber: <https://www.voaindonesia.com/a/ulama-perempuan-dari-berbagai-negara-berbicara-di-kongres-ulama-perempuan-cirebon/3824496.html>

ULAMA PEREMPUAN DAN PERWAKILAN 16 NEGARA KUMPUL DI CIREBON

Liputan6.com, 25 April 2017

Banyak kaum perempuan pribumi yang berjasa dan memiliki kontribusi besar dalam mengawal perkembangan di negara Indonesia. Satu di antaranya kontribusi ulama perempuan dalam berjuang dan mempertahankan eksistensi membela Tanah Air.

Ketua Pengarah Kongers Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Badriah Fayyuni menyatakan akan meneguhkan eksistensi perempuan di Indonesia agar adil dan memberikan ruang untuk yang berjasa. Termasuk, memaknai sejarah perkembangan Islam di Nusantara yang diwarnai eksistensi raja Islam atau sultan, serta sultanah.

"Misalnya, raja Aceh yang disebutkan Sultan Iskandar Muda. Setelah itu, ada Sultan Iskandar Tsani. Nah, setelah itu, Sultanah Safiatuddin yang 34 tahun memerintah dan peninggalannya luar biasa," ucap Badriah usai menggelar konferensi pers KUPI di Cirebon, Selasa (25/4/2017).

Dia mengatakan, peran Sultanah Safiatuddin sangat besar, terlihat dari dibangunnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar Raniri dan Universitas Syiah Kuala. Dua universitas tersebut merupakan lembaga pendidikan yang mendapat dukungan besar dari Sultanah Safiatuddin dalam memajukan pendidikan berbasis Islam di Aceh.

Pengasuh Ponpes Mahasina, Bekasi, Jawa Barat ini menjelaskan, pentingnya penyelenggaraan KUPI agar masyarakat Indonesia tahu dan mengerti peran wanita dan ulama perempuan dalam mengawal perkembangan Indonesia.

Selain itu, KUPI menjadi ruang perjumpaan dengan para ulama lain, pemerintah, aktivis perempuan dari berbagai negara dan pengalaman mereka. "Kami juga akan membahas bersama yang aktual yang menjadi tantangan

perempuan maupun persoalan yang sedang dihadapi perempuan Indonesia pada umumnya."

Adapun kongres tersebut akan ditutup dengan mengucapkan ikrar keulamaan perempuan. Hasil musyawarah keagamaan akan dibagi menjadi tiga isu, yakni perkawinan anak, kekerasan perempuan, dan perusakan alam dalam konteks keadilan sosial.

Dari kongres ini, menurut Badriah, para ulama perempuan juga akan memberikan rekomendasi secara rinci ke pemerintah agar dijadikan pertimbangan dan ditindaklanjuti.

"Kami tegaskan kongres ini ingin meneguhkan eksistensi ulama perempuan yang sudah ada sejak zaman Rasulullah dan sampai sekarang ini berkontribusi. Hanya saja sejarah yang dikonstruksi secara sepihak keberadaannya, sehingga peran perempuan menjadi terpinggirkan," ujar dia.

Badriah Fayyuni menyebutkan, KUPI diikuti 570 peserta yang sebagian besar ulama perempuan, serta 35 perwakilan dari 16 negara di dunia.(Panji Prayitno)

Sumber: <http://regional.liputan6.com/read/2931836/ulama-perempuan-dan-perwakilan-16-negara-kumpul-di-cirebon>

KONGRES ULAMA PEREMPUAN DONGKRAK SEMANGAT KEBANGSAAN DAN KEMANUSIAAN YANG BERKEADILAN

Cirebontrust.com, 25 April 2017

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan para perempuan dalam pencapaian kemanusiaan yang adil dan beradab.

Ketua Panitia Pengarah KUPI, Hj. Badriyah Fayumi dalam Seminar Internasional Ulama Perempuan mengatakan, tujuan kongres tersebut adalah agar peran ulama perempuan lebih dihargai dan diakui eksistensinya untuk isu kebangsaan dan kemanusiaan.

“Sebab, dominasi budaya patriarki berakibat pada tenggelam dan terpinggirkannya ulama perempuan dalam mengisi ruang-ruang publik,” ujarnya saat memberikan materi di Seminar Internasional Ulama Perempuan di Gedung Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Selasa (25/04).

Badriyah mengatakan, Indonesia mempunyai banyak akademisi dan intelektual dari kalangan perempuan. Begitu pun pesantren-pesantren yang memberikan ruang kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan. Sebab menurutnya, ulama perempuan adalah mereka yang memiliki perhatian pada perspektif untuk kesetaraan perempuan dalam memajukan peradaban Islam dan penguatan civil society.

“Sehingga, kongres ini diharapkan memberikan kontribusi untuk kemajuan perempuan dalam pencapaian kemanusiaan yang adil dan beradab,” katanya.

Dalam Seminar Internasional Ulama Perempuan ini, ada beberapa narasumber dari berbagai negara terlibat di dalamnya, seperti ulama perempuan dari Pakistan, Mossarat Qadeem, Zainah Anwar dari Malaysia, Hatoon Al-Fasi dari Saudi Arabia, Sureya Roble-Hersi dari Kenya, Fatima Akilu dari Nigeria, dan Roya Rahmani dari Afghanistan.

Acara ini merupakan rangkaian dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 25-27 April 2017 di Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Cirebon, Jawa Barat. **(Iskandar)**

Sumber: <http://www.cirebontrust.com/kongres-ulama-perempuan-dongkrak-semangat-kebangsaan-dan-kemanusiaan-yang-berkeadilan.html>

KONGRES ULAMA PEREMPUAN BERKONTRIBUSI MENGISI SEMANGAT KEBANGSAAN YANG BERKEADILAN

Tribunnews.com, 25 April 2017

Ketua Panitia Pengarah (Steering Committe) Kongres Ulama Perempuan Indonesia Dra. Hj. Badriyah Fayumi, Lc MA memberikan Keynote Speech Seminar Internasional Ulama Perempuan.

Berikut Keynote Speech bertema "The Existance of Women Ulama in Islamic Civilization" oleh Badriyah Fayumi yang sekarang adalah Wakil Ketua Pengurus Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PPLKNU) dan pernah menjadi Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Di antara tujuan kongres ini adalah bagaimana ulama perempuan tidak hanya memberikan kontribusinya untuk isu kebangsaan dan kemanusiaan, tetapi eksistensinya dihargai dan diakui.

Sebab, dominasi budaya patriarki berakibat pada tenggelam dan terpinggirkannya ulama perempuan dalam mengisi ruang-ruang publik. Padahal kita punya banyak akademisi dan intelektual dari kalangan perempuan.

Begitu pun pesantren-pesantren yang memberikan ruang kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan.

Sebab, ulama perempuan adalah mereka yang memiliki perhatian pada perspektif untuk kesetaraan perempuan dalam memajukan peradaban Islam dan penguatan civil society.

Sehingga, kongres ini diharapkan memberikan kontribusi untuk kemajuan para perempuan dalam pencapaian kemanusiaan yang adil dan beradab.

Seminar Internasional Ulama Perempuan, Selasa 25 April 2017 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat.

Narasumber seminar ini selain dari ulama perempuan Indonesia juga terlibat di dalamnya ulama perempuan dari Pakistan Mossarat Qadeem (Pakistan), Zainah Anwar (Malaysia), Hatoon Al-Fasi (Saudi Arabia), Sureya Roble-Hersi (Kenya), Fatima Akilu (Nigeria), dan Roya Rahmani the Ambassador of Afghanistan in Indonesia).

Acara ini merupakan rangkaian dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 25 - 27 April 2017 di Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Cirebon, Jawa Barat.

Sumber: <http://www.tribunnews.com/tribunners/2017/04/25/kongres-ulama-perempuan-berkontribusi-mengisi-semangat-kebangsaan-yang-berkeadilan>

KONGRES ULAMA PEREMPUAN SE-INDONESIA, USUNG ISU EKSISTENSI ULAMA PEREMPUAN

Voaindonesia.com, 25 April 2017

Mulai Selasa (25/4) hingga dua hari ke depan, lebih dari 500 orang Ulama perempuan se-Indonesia berkumpul di Pesantren Kebon Jambu dan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan menyelenggarakan Kongres Ulama Perempuan se-Indonesia (KUPI). Para Ulama Perempuan ini hadir untuk membicarakan peran ulama perempuan dalam kehidupan masyarakat berbangsa.

Ketua Panitia Pengarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Badriyah Fayumi mengatakan ulama perempuan berkontribusi besar di masyarakat dalam isu kemanusiaan dan kebangsaan.

"Bahwa KUPI ini hadir, justru menjadi bagian dari penguatan untuk meneguhkan ke-Islaman ke Indonesiaan dan kemanusiaan kita," kata Badriyah Fayumi.

Badriyah menambahkan acara ini juga dihadiri ulama perempuan dari berbagai negara untuk berbagi pengalaman terkait eksistensi ulama perempuan.

"Kami kemudian *sharing* (berbagi) dengan berbagai negara, yang menyampaikan pengalaman-pengalamannya mengenai bagaimana (cara para) ulama perempuan di berbagai negara tersebut, dalam melakukan langkah-langkah baik berupa pemikiran maupun aksi, untuk penguatan eksistensi ulama perempuan. Dan sekaligus memberikan contoh kerja nyata, ulama perempuan menjalankan misi kemanusiaan dengan dorongan dan spirit Islam," lanjutnya.

Badriyah Fayumi yang saat ini Wakil Ketua Pengurus Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PPLKNU) dan pernah menjadi Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mengatakan, dominasi budaya patriaki mengakibatkan tenggelamnya dan terpinggirkannya

ulama perempuan dalam mengisi ruang-ruang publik. Padahal lanjutnya, perempuan, memiliki banyak kemampuan akademi dan intelektual.

Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bidang pendidikan Neng Dara Affiah kepada VOA menjelaskan isu besar yang menjadi perhatian di antaranya adalah kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan usia dini.

"Pertama soal kekerasan seksual yang dari hari ke hari itu bulan ke bulan semakin meningkat. Lalu perkawinan usia dini perempuan yang juga semakin meningkat. Dan soal lingkungan hidup dan kerusakan alam sehingga mereka bermigrasi ke luar negeri menjadi tenaga kerja wanita," kata Neng Dara Affiah.

Kongres ini juga dihadiri ulama perempuan Mossarat Qadeem dari Pakistan, Zainah Anwar (Malaysia), Hattoon Al-Fasi (Saudi Arabia), Sureya Roble-Hersi (Kenya), Fatima Akilu (Nigeria), dan Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia Roya Rahmani. [aw/ab]

Sumber: <http://www.voaindonesia.com/a/kongres-ulama-perempuan-seindonesia-usung-eksistensi-ulama-perempuan/3824658.html>

**KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA:
RUANG PERJUMPAAN KERJA KEISLAMAN,
KEINDONESIAAN DAN KEMANUSIAAN**

Sejuk.org, 25 April 2017

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) merupakan kulminasi cita-cita bersama dari berbagai pihak untuk menggelar perjumpaan ulama-ulama perempuan yang berasal dari berbagai ormas Islam, akademisi, dan pemimpin pesantren yang datang dari berbagai daerah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Dr. Hj. Badriyah Fayumi, Lc., MA dalam sambutannya di malam pembukaan KUPI Selasa malam, 25 April 2017, di Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Cirebon Jawa Barat.

“Kongres ini adalah perhelatan nasional pertama di Indonesia sekaligus yang pertama juga di dunia untuk di-follow-up dengan ruang-ruang perjumpaan untuk kerja-kerja keislaman, kebangsaan, keindonesiaan dan kemanusiaan” ungkap Badriyah.

Jadi KUPI yang digelar 25-27 April itu, sambung Badriyah yang merupakan Pemimpin Pesantren Mahasina di Bekasi dan pernah menjadi Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), merupakan konfirmasi atas dedikasi peran-peran para ulama perempuan yang selama ini dipinggirkan dan dilupakan sejarah.

Sebagai tuan rumah, pimpinan Pesantren Kebon Jambu Nyai Hj. Masriyah Amva tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada beberapa pendeta dan Ibu pimpinan Jemaat Ahmadiyah (JAI) Pusat, Aisyah, Muhammadiyah dan sebagainya (seperti perempuan-perempuan perwakilan Muslimat, Alwashliyah, dan Mathlaul Anwar) yang menghadiri KUPI. Hal ini ia sampaikan sebagai cara, “Aku menghormati makhluk Allah. Sebab aku adalah cinta yang tanpa melihat latar belakang. Itulah pluralis,” ungkapnya.

Perbedaan, bagi Ibu Nyai pencipta puluhan karya sastra yang terdokumentasi di berbagai penerbitan ini, bukan untuk menyalahkan dan

saling menghinakan, tetapi untuk saling menghormati. Menghormati perbedaan adalah kebutuhan manusia.

“Bagaimanapun perbedaan adalah realitas dan keniscayaan. Yang tidak bisa menghargai perbedaan adalah orang yang tidak cerdas,” pungkasnya.

Pembukaan KUPI 2017 pada sekitar pukul 22.00 ini dipercayakan kepada delapan perwakilan perempuan sebagai cermin keterwakilan lintas-generasi, pendidikan, ormas Islam, dan daerah –yang datang dari Papua, Sulawesi, Jawa sampai Aceh. Bentuk pembukaan tersebut merupakan perwujudan kongres yang tidak datang dari kepentingan politik kelompok ataupun partai tertentu, melainkan cita-cita bersama yang datang dari berbagai kalangan masyarakat sipil. Baru kemudian pemberian dukungan dari perwakilan-perwakilan ulama perempuan mancanegara, menyusul berikutnya pejabat Bupati Cirebon, Ibu Bupati Brebes, istri Gubernur Jawa Barat Netty Heryawan, serta pimpinan aparat kepolisian dan militer. (Rifah Zainani-SEJUK)

Sumber: <http://sejuk.org/2017/04/25/kupi-2017-ruang-perjumpaan-kerja-kerja-keislaman-dan-keindonesiaan/>

KONGRES PARA PEREMPUAN YANG BANGKIT

Linkis.com, 25 April 2017

Hatoon Al-Fassi memberikan penjabaran tentang kondisi perempuan di negaranya, Arab Saudi. Di hadapan ratusan peserta seminar internasional, aktivis yang identik dengan pakaian tradisional Arab itu mengatakan perempuan di Indonesia jauh lebih beruntung. Terselenggaranya Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang didukung banyak kalangan, termasuk pemerintah, adalah bukti suara perempuan sangat dihargai di sini.

Hal senada disuarakan Zainah. Perempuan asal negeri jiran Malaysia itu mengungkapkan kekagumannya pada gerakan perempuan di Indonesia. "Mengumpulkan lebih dari 400 perempuan ulama di sebuah forum adalah hal yang luar biasa," pujiannya. Ya, gaung suara perempuan kembali meletup setelah sekian lama tak terlalu terdengar. Ribut-ribut Pilkada DKI beberapa waktu silam membuat negeri ini seolah-olah sesempit Jakarta saja. Kongres ini mengawali bangsa Indonesia untuk memikirkan sesuatu yang jauh lebih kongkrit daripada pesta politik lima tahunan.

Badriyah Fayumi, tokoh agama, mengatakan kongres ini sebagai panggilan iman dan sejarah. Kongres ini bukan saja melantangkan suara perempuan untuk memperjuangkan keadilan baginya, tapi juga mengingatkan kepada banyak orang betapa Islam sangat menjunjung tinggi martabat perempuan. Di masa lampau pun sudah banyak perempuan yang menjadi ulama.

Masriyah Amva, pengasuh Pesantren Al-Islamy Kebon Jambu tempat diselenggarakannya KUPI, menambahi bahwa perempuan bukan makhluk terbelakang. Baik lelaki dan perempuan diciptakan dengan derajat yang sama. Masriyah sekaligus menjadi contoh betapa pesantren yang dikenal sangat patriarkis bisa dipimpin oleh seorang perempuan. Lebih dari 1000 santri berada di bawah naungan Bu Nyai yang puitis itu.

Ulama Perempuan

Banyak yang bertanya-tanya, mengapa nama kongresnya ulama perempuan? Kok, ada lelakinya? Bukankah ulama, secara etimologi, sudah mencakup laki-laki dan perempuan? Hal ini tidak lain adalah sebagai penegasan. Istilah ulama perempuan itu pun bukan berarti ulama berjenis kelamin perempuan, tetapi ulama, baik laki-laki atau perempuan, yang memiliki pandangan yang berpihak pada perjuangan hak-hak perempuan. Jika ulama itu perempuan maka disebut sebagai perempuan ulama.

Masriyah menjelaskan bahwa kongres ini terselenggara berkat perjuangan yang cukup melelahkan. Banyak pihak yang tidak menghendaki adanya kegiatan ini karena dianggap kebablasan. Padahal, acara ini murni untuk menyamakan persepsi banyak tokoh terkait pandangan Islam terhadap perempuan. Juga untuk merumuskan strategi besar peran perempuan dalam kehidupan.

Ketua Yayasan Fahmina, KH. Husein Muhammad mengatakan bahwa kongres ini adalah yang pertama diselenggarakan di dunia. Ia belum pernah mengetahui ada kongres serupa yang pernah diadakan di belahan dunia lain. Kata Kiai, Cirebon dipilih sebagai titik awal dan ia berharap akan ada kongres-kongres perempuan lain di kemudian hari. Tidak hanya Indonesia, tapi juga seluruh dunia.

Umi, salah satu peserta dari Aceh, mengaku mendapat banyak manfaat dari kegiatan ini. Perempuan bercadar yang memiliki majlis pengajian itu menyadari bahwa banyak hal bisa dilakukan oleh perempuan. 'Kita tidak hanya bekerja di dapur dan kasur, tapi bisa jauh lebih dari itu,' ujarnya. Ia menilai KUPI patut diselenggarakan di berbagai wilayah agar menimbulkan kesadaran bersama terkait peran perempuan. Terlebih bagi orang seperti yang juga bekerja di LBH bagian kekerasan seksual dan perlindungan anak.

Perempuan seringkali dipersepsikan sebagai kaum yang lemah dan dipersalahkan. Padahal kenyataannya perempuan itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Di kongres ini, dibahas pula peran perempuan dalam meningkatkan mutu pendidikan hingga menyoal ekologi, bukti bahwa perempuan bukanlah makhluk domestik yang hanya akrab dengan kasur, dapur, dan sumur.

Poligami Menurut Perempuan Sedunia

Acara ini bernama Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Walau secara nama skalanya nasional, tapi peserta kongres berasal dari berbagai negara. Tercatat ada 16 negara yang berpartisipasi di kegiatan ini.

Salah satu bahasan lama yang masih menarik ialah poligami. Beberapa orang menganggap poligami diperbolehkan karena di Al-Qur'an teksnya memperbolehkan seorang lelaki menikahi hingga empat isteri. Tetapi banyak pula yang mengatakan tidak diperbolehkan, sebab di Al-Qur'an ada syarat khusus bagi seseorang yang menghendaki poligami: adil.

Ulfat H Masibo, seorang perempuan ulama dari Nigeria menegaskan diperbolehkannya poligami hanya dalam satu kondisi, yaitu seorang suami bisa adil. Jika tidak, maka poligami tidak diperbolehkan. Sementara Rafatu Abdul Hamid (Kenya) menilai poligami acap kali melanggar hak-hak perempuan. Pun, bagaimana bisa berbuat adil kepada lebih dari satu orang?

Penolakan poligami pun disuarakan ulama asal Pakistan Bushra Qadeem Hyder. Ia mengkritik dalih diperbolehkannya poligami berdasar ayat suci. Tetapi para pelaku tidak mengetahui syarat dan kondisi diperbolehkannya poligami ini sehingga yang terjadi adalah eksploitasi pada perempuan. Kongres ini mengingatkan saya suatu kali disodori pertanyaan, bolehkah poligami? Dengan sedikit guyon saya pun menjawab, "Halah, satu saja belum berani kok mikir poligami." Ketika diburu dengan pertanyaan yang sama, jawabanku hanya, "Jika kau tanyakan padaku, maka jawabannya sama dengan lubuk hatimu. Bisakah adil kepada lebih dari satu orang?"

Bagi saya yang mengikuti kongres ini sejak hari pertama, saya terkesan dengan cara perempuan mendobrak stigma negatif yang ditujukan kepadanya. Tidak berlebihan jika Nyai Umdah (Jombang) mengatakan kongres ini lebih tepatnya sebagai hari kebangkitan yang menyejarah. Mereka menggunakan cara elegan untuk berteriak melalui KUPI.

Kongres yang awalnya banyak diragukan hingga dicibir perlahan mendapat tempat di hati banyak orang. Di hari penutupan, GKR Hemas dan Menteri agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan apresiasi luar biasa atas terselenggaranya kongres ini. Lukman sampai menyatakan kesiapannya mendirikan sebuah Ma'had Aliy yang diperuntukkan untuk mengader ulama perempuan.

Salah satu yang luar biasa di KUPI adalah ketiadaan batas peserta yang ikut di kongres ini. Mereka datang dari berbagai lintas organisasi dan mazhab. Perbedaan cara pandang fikih disingkirkan demi mengkaji hal-hal pokok yang bertujuan menghadirkan keadilan bagi perempuan.

Di kongres ini saya menjumpai keragaman, mulai yang mengenakan kerudung, jilbab, cadar, hingga tanpa tudung. Mereka sama-sama berada di satu forum, saling berbincang terkait isu perempuan, KDRT, penyakit, dan lain sebagainya. Umi, peserta dari Aceh itu salah satu peserta yang membuat saya terkesan. Di balik cadarnya, ia adalah pribadi yang sangat bersahabat, jauh dari stigma negatif pengguna cadar sebagaimana sering saya dengar.

Sesaat setelah diwawancara, Umi menepuk pundak saya dan mendoakan, "Semoga sukses!". Sebuah doa yang langsung saya amini. Ketika akan pulang, saya sempat bertemu dengan Umi. Ia menghampiri saya dan menyodorkan tangannya di balik kain hijabnya. Aku pun langsung menyambut dan menyalami sembari mengecup tangannya, seperti budaya pedesaan pada umumnya.[]

Sumber: <http://linkis.com/blogspot.co.id/Gyhxcg>

KONGRES ULAMA PEREMPUAN: POLIGAMI BUKAN BERASAL DARI ISLAM

Rappler.com, 25 April 2017

Seminar Internasional Ulama Perempuan Indonesia menghadirkan sejumlah tokoh perempuan, baik dalam maupun luar negeri. Seminar yang digelar dalam Kongres Ulama Perempuan di Gedung Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Kota Cirebon hari ini mengambil tema "Women Ulama, Muslim Communities and State".

Banyak tema kontroversial yang dipaparkan para ulama perempuan, salah satu diskusi yang menarik adalah tentang poligami. Tema ini diangkat oleh Dosen IAIN Yogyakarta Siti Ruhaini Dzuhayatin. Menurut Siti Ruhaini, poligami bukan berasal dari ajaran Islam. Tradisi poligami, menurutnya, telah muncul jauh sebelum Islam hadir.

"Saya mengatakan, poligami bukan ajaran Islam. Poligami telah muncul jauh sebelum Islam. Apa yang Islam lakukan adalah memanusiakan poligami. Quran justru bertujuan pada monogami," katanya, Selasa 25 April 2017.

Poligami, menurut Siti Ruhaini, bukan saja masalah agama, tapi juga sosial. Ia mencontohkan ada tekanan untuk perempuan single yang hidupnya susah memilih poligami untuk keluar dari tekanan sosial. "Sekali lagi ini adalah masalah tekanan sosial, karena itu kita perlu bekerja di banyak dimensi untuk mengurangi praktik poligami," katanya.

Di Indonesia, lanjut Ruhaini, sebetulnya sudah ada Undang-undang No 1 tahun 1974 yang mengatur persyaratan untuk poligami. Persyaratan itu sangat sulit dilakukan oleh pria yang berniat poligami.

Sumber: <http://www.rappler.com/indonesia/berita/167935-kongres-ulama-perempuan-poligami-islam>

**ULAMA PEREMPUAN MALAYSIA:
INDONESIA CUKUP BAIK SOAL KESETARAAN**

Suara.com, 25 April 2017

Seorang aktivis feminis sekaligus ulama perempuan asal Malaysia, Zainah Anwar menilai Indonesia sudah bagus dalam hal kesetaraan terhadap perempuan. Dia mengatakan, sebenarnya Islam bukan agama yang diskriminasi terhadap kaum hawa.

Hal itu dinyatakan Zainah dalam Seminar Internasional Ulama Perempuan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat, Selasa (25/4/2017). Di sana Zainah berpidato dengan tema 'Reclaiming Space for Women Ulama Through Movement Building'.

"Bagi kami, peran ulama perempuan di tengah hubungan antara komunitas Muslim dan negara ingin membangun pengalaman yang baik bagaimana menginterpretasi ayat-ayat Al Quran dan menyelaraskannya dengan semangat kesetaraan," jelasnya.

Ulama Perempuan dunia ingin membangun kepercayaan perempuan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi, justru menjunjung tinggi peran perempuan. Mereka mendorong penerapan CEDAW di beberapa negara yg maaih memegang hukum syariah.

CEDAW atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan adalah suatu instrumen standar internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981.

"Yang kami lakukan di setiap kampanye CEDAW seperti di Nigeria dan Thailand, disana kami akan melakukan penelitian tematik ingin melihat bagaimana CEDAW bisa dipraktikkan di sana," jelasnya.

“Tantangan kesetaraan perempuan memang besar. Sebetulnya Indonesia sudah cukup baik dalam soal kesetaraan. Hanya saja Indonesia kurang menjual hal tersebut ke publik,” tutup dia.

Sumber: <http://www.suara.com/news/2017/04/25/135228/ulama-perempuan-malaysia-indonesia-cukup-baik-soal-kesetaraan>

ULAMA PEREMPUAN MALAYSIA INGINKAN CEDAW DITERAPKAN BERBAGAI NEGARA

Rmoljabar.com, 25 April 2017

Ulama perempuan yang juga merupakan feminis Malaysia, Zaenah Anwar menyatakan, ulama perempuan memiliki peran penting di tengah-tengah masyarakat.

Zaenah menginginkan, ulama perempuan berperan aktif dalam membangun pengalaman yang baik dalam menginterpretasi ayat-ayat Al-Quran dan menyelaraskannya dengan semangat kesetaraan.

"Kami ingin membangun kepercayaan perempuan, bahwa dalam Islam itu tidak ada diskriminasi. Justru menjunjung tinggi peran perempuan," ungkapinya dalam Seminar Internasional Ulama Perempuan yang digelar di gedung Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Selasa (25/4).

Zaenah menegaskan, pihaknya mendorong agar Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) diterapkan diberbagai negara yang masih menerapkan hukum syariah. Thailand dan Nigeria, sambungnya, kedua negara yang rutin ia datangi untuk kampanye CEDAW.

"Di sana (Thailand dan Nigeria, red) kami akan melakukan penelitian tematik. Tujuannya ingin melihat bagaimana CEDAW bisa dipraktikan di sana," ungkapinya.

Kendati demikian, Zaenah mengakui, memperjuangkan kesetaraan perempuan sering dihadang tantangan yang cukup besar. Namun, di mata Zaenah, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup baik dalam menerapkan kesetaraan terhadap perempuan.

"Hanya saja Indonesia kurang menjual hal tersebut ke publik," tandasnya. [nif]

Sumber: <http://www.rmoljabar.com/read/2017/04/25/41518/Ulama-Perempuan-Malaysia-Inginkan-CEDAW-Diterapkan-Berbagai-Negara->

TANTANGAN HAM BAGI PEREMPUAN DI NEGARA DALAM OKI

Sumutmantap.com, 25 April 2017

Komisioner Permanen Independen HAM Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Siti Ruhaeni Dzuhayatin mengungkapkan pengalamannya bekerja di organisasi yang membidangi persoalan HAM di berbagai negara tersebut.

Dia menyebutkan tantangan HAM di negara anggota OKI adalah persoalan penerapan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against of Women (CEDAW). Belum lagi beratnya persoalan LGBT yang hanya diakui satu orientasi seksual saja.

“Kami hingga kini di komisi OKI ini masih menghadapi isu yang keras demi berpindah dari kepentingan politik ke HAM,” katanya dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di IAIN Syekh Nurjati, Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat hari Selasa, (25/4/2017).

Selain harus membicarakan isu Israel dan Palestina, Siti mengutarakan agenda Komisi HAM OKI lebih banyak memberikan perhatian kepada peristiwa yang terjadi di luar negara-negara anggota OKI.

“Termasuk di dalamnya isu hak-hak perempuan dan anak, hak-hak minoritas, dan hak-hak warga beragama Islam di negara-negara di luar OKI seperti Rohingya dan Kashmir. Agendanya juga melingkupi isu hak pendidikan dan pembangunan,” sambungnya.

Siti menyampaikan di OKI, perlindungan terhadap hak-hak mereka sebagai warga negara menjadi persoalan yang penting. Bagaimanapun menurutnya, komisi HAM tersebut diberikan kewenangan untuk memberikan nasehat meskipun komisi ini didukung setengah hati oleh OKI.

Siti menyebutkan tiga tantangan persoalan perempuan di komisi HAM OKI.

“Pertama, hak asasi perempuan yang harus dimainstreamkan di negara-negara anggota OKI, karena tidak semua sepakat. Kedua, keseimbangan yakni bagaimana membangun HAM dalam Islam agar negara Barat bisa memahami ini. Karena pengetahuan tentang Islam di Barat adalah radikalisme,” jelasnya.

Ketiga, sebagai komisioner perempuan dia memperkenalkan kepemimpinan yang feminis untuk bisa membangun peradaban dan kedamaian.

Tema materi yang dibahas Siti Ruhaini Dzuhayatin yakni *challenges and Opportunities of Women Ulama* ini Engaging with OIC.

Dia menyampaikannya dalam Seminar Internasional KUPI itu. Narasumber seminar selain dari ulama perempuan Indonesia juga terlibat ulama perempuan dari Pakistan Mossarat Qadeem, Zainah Anwar dari Malaysia, Hatoon Al-Fasi dari Saudi Arabia, Sureya Roble-Hersi dari Kenya, Fatima Akilu dari Nigeria, dan duta besar Afghanistan di Indonesia.

Disebutkan acara ini merupakan rangkaian dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 April 2017. (nni)

Sumber: <http://sumutmantap.com/kabar/tantangan-ham-bagi-perempuan-di-negara-dalam-oki/>

KEBERADAAN ULAMA PEREMPUAN MASIH TERPINGGIRKAN DI RUANG PUBLIK

Radarcirebon.com, 25 April 2017

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon bekerja sama dengan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dan The Asian Muslim Action Network (AMAN) menggelar seminar internasional tentang ulama perempuan di Auditorium Pascasarjana, Selasa (25/4).

Sebanyak 1.270 peserta hadir dalam seminar tersebut. Di mana, peserta yang hadir didominasi kaum hawa.

Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee) Kongres Ulama Perempuan Indonesia Dra Hj Badriyah Fayumi Lc MA yang sekaligus Wakil Ketua Pengurus Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PPLKNU) mengatakan, tujuan kongres ini adalah bagaimana ulama perempuan tidak hanya memberikan kontribusinya untuk isu kebangsaan dan kemanusiaan, tetapi eksistensinya dihargai dan diakui.

Sebab menurutnya, dominasi budaya patriarkat berakibat pada tenggelam dan terpinggirkannya ulama perempuan dalam mengisi ruang-ruang publik.

“Padahal kita punya banyak akademisi dan intelektual dari kalangan perempuan. Begitu pun pesantren-pesantren yang memberikan ruang kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan,” kata Badriyah.

Kemudian, kata Badriyah, ulama perempuan adalah mereka yang memiliki perhatian pada perspektif untuk kesetaraan dalam memajukan peradaban Islam dan penguatan civil society.

“Saya berharap kongres ini memberikan kontribusi untuk kemajuan para perempuan dalam pencapaian kemanusiaan yang adil dan beradab,” ungkap Badriyah.

Narasumber seminar, selain dari ulama perempuan Indonesia juga dari luar negeri. Mereka adalah Mossarat Qadeem (Pakistan), Zainah Anwar

(Malaysia), Hatoon Al-Fasi (Saudi Arabia), Sureya Roble-Hersi (Kenya), Fatima Akilu (Nigeria), dan Roya Rahmani the Ambassador of Afghanistan in Indonesia).

Acara ini merupakan rangkaian Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 25-27 April 2017 di Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Cirebon Jawa Barat. (fazri)

Sumber: <http://www.radarcirebon.com/keberadaan-ulama-perempuan-masih-terpinggirkan-di-ruang-publik.html>

KESETARAAN GENDER DI INDONESIA CUKUP BAIK

Pikiran-rakyat.com, 25 April 2017

Ulama perempuan sekaligus feminis Malaysia Zaenah Anwar menilai, Indonesia sebetulnya sudah cukup baik dalam soal kesetaraan gender.

"Hanya saja Indonesia kurang menjual hal tersebut ke publik," kata Zaenah saat diwawancarai se usai Seminar Internasional Ulama Perempuan, di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, pada Selasa 25 April 2017.

Selain ulama perempuan Indonesia, sejumlah ulama perempuan dari negara lain seperti Mossarat Qadeem (Pakistan), Zainah Anwar (Malaysia), Hatoon Al-Fasi (Saudi Arabia), Sureya Roble-Hersi (Kenya), Fatima Akilu (Nigeria), dan Roya Rahmani the Ambassador of Afghanistan in Indonesia) juga menjadi narasumber.

Seminar nasional yang dibuka Kepala Balitbang dan Diklat Kementerian Agama, Abdurrahman Mas'ud, merupakan rangkaian dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang berlangsung di Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Selasa sampai Kamis 25-27 April 2017.

Zaenah mengakui, tantangan kesetaraan perempuan memang besar. "Bagi kami, peran ulama perempuan di tengah hubungan antara komunitas muslim dan negara, adalah membangun pengalaman yang baik bagaimana menginterpretasi ayat-ayat Alquran dan menyelaraskannya dengan semangat kesetaraan," katanya.

Menurutnya, dalam Islam tidak ada diskriminasi, justru menjunjung tinggi peran perempuan.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee) Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Badriyah Fayumi mengungkapkan, pelaksanaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia diharapkan memberikan

kontribusi. Khususnya untuk kemajuan para perempuan dalam pencapaian kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sebab, katanya, ulama perempuan adalah mereka yang memiliki perhatian. Yaitu perhatian pada perspektif kesetaraan perempuan memajukan peradaban Islam dan penguatan civil society.

"Sehingga, kongres ini diharapkan memberikan kontribusi untuk kemajuan para perempuan dalam pencapaian kemanusiaan yang adil dan beradab," paparnya.

Badriyah juga menegaskan, diantara tujuan kongres ini adalah bagaimana ulama perempuan tidak hanya memberikan kontribusinya untuk isu kebangsaan dan kemanusiaan. Tetapi eksistensinya dihargai dan diakui.

"Sebab, dominasi budaya patriaki berakibat pada tenggelam dan terpinggirkannya ulama perempuan dalam mengisi ruang-ruang publik," katanya.

Padahal, katanya, kita punya banyak akademisi dan intelektual dari kalangan perempuan. "Begitupun pesantren-pesantren yang memberikan ruang kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan," ujarnya. (Ani Nunung Aryani)

Sumber: <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/04/25/kesetaraan-gender-di-indonesia-cukup-baik-399779>

KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA RESMI DIBUKA DI CIREBON

Republika.co.id, 26 April 2017

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) resmi dibuka di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al Islamy, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Selasa (25/4) malam. Kegiatan itu diharapkan mampu menegaskan kembali peran ulama perempuan dalam meneguhkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan.

Pembukaan KUPI yang berlangsung semarak itu dilakukan dari peserta, oleh peserta, untuk peserta, dengan dipimpin delapan orang peserta. Kedelapan peserta itu mencerminkan keberagaman ulama dari lintas generasi, latar belakang pendidikan, organisasi keagamaan, dan bidang pengabdian dari berbagai wilayah di Indonesia.

Kedelapan peserta di antaranya perwakilan dari Papua yang memegang Alquran, generasi muda dari Ponpes Kebon Jambu Al Islamy yang memegang kumpulan hadis, dan perwakilan dari Jombang yang memegang kitab kuning. Selain itu, perwakilan dari Aceh yang memegang UUD 1945, perwakilan dari Kalimantan yang memegang tamanan segar, perwakilan dari Sulawesi Selatan membawa air dan tanah dan perwakilan dari Jakarta yang memegang kumpulan konvensi internasional yang sudah disepakati pemerintah Indonesia.

Hal tersebut menjadi tanda bahwa KUPI diselenggarakan dengan merujuk pada Alquran, hadis, kitab kuning, UUD 45, konvensi HAM Internasional, kehidupan nyata dan alam semesta, sebagaimana Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ketua Panitia KUPI yang juga Pengasuh Pesantren Mahasina Bekasi, Badriyah Fayyumi, mengatakan, bahwa ulama perempuan telah menunjukkan kiprahnya dalam kehidupan bangsa dan negara. "Peran mereka melekat dalam kesejarahan bangsa," tegas Badriyah.

Badriyah mengungkapkan, kongres ulama perempuan tersebut merupakan yang pertama di Indonesia dan dunia. Dia mengatakan, salah satu

tujuannya untuk mengafirmasi dan merekognisi keberadaan ulama perempuan. “Ulama perempuan menjadi pendidik terdepan, pembela ketidakadilan, dan pendamping yang melekat dengan korban-korban kekerasan,” kata Badriyah.

Dalam ajang KUPI, ratusan ulama perempuan itu akan mengadakan seminar internasional, seminar nasional, dan musyawarah fatwa tentang persoalan kebangsaan aktual di ruang publik dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk seminar internasional tentang ulama perempuan rencananya akan menghadirkan beberapa narasumber dari Indonesia dan sejumlah negara. Di antaranya, Pakistan, Afghanistan, Malaysia, Saudi Arabia dan Nigeria.

Sedangkan seminar nasional tentang ulama perempuan, akan diisi diskusi panel tentang sejarah, peran, tantangan, strategi dakwah dan metode studi Islam ulama perempuan dalam menjawab isu-isu kontemporer di Indonesia. KUPI akan berlangsung pada 25 - 27 April 2017 di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al Islamy. Rencananya, kegiatan itu akan ditutup oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.

Sumber: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/04/26/op01jo409-kongres-ulama-perempuan-indonesia-resmi-dibuka-di-cirebon>

KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA DIGELAR DI CIREBON

Jawapos.com, 26 April 2017

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) digelar di Cirebon, Jawa Barat. Sekitar 1.270 peserta, kemarin (25/4), mengikuti seminar internasional tentang ulama perempuan di Auditorium Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Para peserta didominasi perempuan.

Ketua Panitia Pengarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Badriyah Fayumi mengatakan, tujuan kongres adalah bagaimana ulama perempuan tidak hanya memberikan kontribusinya untuk isu kebangsaan dan kemanusiaan, tetapi eksistensinya dihargai dan diakui.

Sebab, menurut Wakil Ketua Pengurus Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PPLKNU), itu dominasi budaya patriarkat berakibat pada tenggelam dan terpinggirkannya ulama perempuan dalam mengisi ruang-ruang publik.

“Padahal kita punya banyak akademisi dan intelektual dari kalangan perempuan. Begitu pun pesantren-pesantren yang memberikan ruang kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan,” kata Badriyah diberitakan RadarCirebon.com (Jawa Pos Group).

Menurut Badriyah, ulama perempuan adalah mereka yang memiliki perhatian pada perspektif untuk kesetaraan dalam memajukan peradaban Islam dan penguatan civil society.

“Saya berharap kongres ini memberikan kontribusi untuk kemajuan para perempuan dalam pencapaian kemanusiaan yang adil dan beradab,” ungkap Badriyah.

Narasumber seminar, selain dari ulama perempuan Indonesia juga dari luar negeri. Mereka adalah Mossarat Qadeem (Pakistan), Zainah Anwar (Malaysia), Hatoun Al-Fasi (Saudi Arabia), Sureya Roble-Hersi (Kenya), Fatima

Akulu (Nigeria), dan Roya Rahmani the Ambassador of Afghanistan in Indonesia).

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) bekerjasama dengan The Asian Muslim Action Network (AMAN). Kongres digelar di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Cirebon, Jawa Barat, 25-27 April 2017. (fazri/yuz/JPG)

Sumber: <http://www.jawapos.com/read/2017/04/26/125933/kongres-ulama-perempuan-indonesia-digelar-di-cirebon>

CIREBON JADI TUAN RUMAH KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)

Matahationline.com, 26 April 2017

Forum Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) digelar di Cirebon, Jawa Barat. Acara konsolidasi ulama perempuan itu digelar selama tiga hari, 25-27 April 2017.

Salah satu delegasi dari Pondok Pesantren Mathla'ul Anwar Li Nahdlatul Ulama (Malnu) Pusat Menes, Kabupaten Pandeglang, E. Ervi Siti Zahroh yang juga putri dari KH. Zidni Ma'ani mengungkapkan, pertemuan ulama perempuan tersebut guna membahas isu-isu kesejahteraan dan perlindungan perempuan.

"Forum ini adalah forum pertama bagi konsolidasi ulama perempuan, kehadiran kami disini merupakan ikhtiar dalam menjawab isu-isu kesejahteraan, perlindungan perempuan dan isu-isu keislaman," ujar Ervi, Selasa 25 April 2017.

Cucu dari KH. TB. Ma'ani Rusjdi itu menegaskan bahwa keberadaan ulama perempuan itu adalah nyata dan selalu hadir dalam setiap problem keumatan.

"Dan inilah waktu dimana semua komponen bangsa harus mengakui sekaligus memberikan apresiasi atas setiap ikhtiyar dan langkah kongkrit yang telah ditampilkan," tegasnya.

Dengan kongres ulama perempuan, Ia berharap bahwa peran strategis ulama perempuan dapat menjalankan segala aktivitas dan khitahnya sebagai manusia untuk menyelesaikan masalah sosial agama di masyarakat.

"Dengan tanpa kehilangan jati diri dan kodratnya sebagai seorang ibu. Semoga ikhtiyar kami selalu mendapat ridlo dari Allah SWT," harapnya.

Sumber: <http://www.matahationline.com/berita-cirebon-jadi-tuan-rumah-kongres-ulama-perempuan-indonesia-kupi.html>

ULAMA PEREMPUAN SE-DUNIA BERKUMPUL DI CIREBON

Rakyat Cirebon, 26 April 2017

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama di Indonesia digelar di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Ciwaringin Cirebon yang dibuka pada Selasa (25/4) malam.

Kongres yang bertujuan mengangkat eksistensi ulama perempuan juga membahas isu-isu strategis. Ketua Panitia Pengarah (Steering Commite) KUPI, Dra. Hj. Badriyah Fayumi, Lc. MA yang sekaligus memberikan *keynote speech* Seminar Internasional Ulama Perempuan menjelaskan, selama ini kiprah ulama perempuan di dunia tidak kalah penting. Hanya saja, belum terangkat eksistensinya secara maksimal.

“Di antara tujuan kongres ini adalah bagaimana ulama perempuan tidak hanya memberikan kontribusinya untuk isu kebangsaan dan kemanusiaan, tetapi eksistensinya dihargai dan diakui. Sebab, dominasi budaya patriarkhi berakibat pada tenggelam dan terpinggirkannya ulama perempuan dalam mengisi ruang-ruang public,” ungkapnya.

Perempuan yang sekarang menjabat Wakil Ketua Pengurus Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama (PPLKNU) dan pernah menjadi Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu menjelaskan, konstruksi sosial dan budaya patriarkhi yang masih dominan di Indonesia membuat eksistensi ulama perempuan cenderung tereduksi.

Padahal, kata Badriyah Indonesia punya banyak akademisi dan intelektual dari kalangan perempuan. Begitupun pesantren-pesantren yang memberikan ruang kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan. “Sebab, ulama perempuan adalah mereka yang memiliki perhatian pada perspektif untuk kesetaraan perempuan dalam memajukan peradaban Islam dan penguatan civil society,” lanjutnya.

Sehingga, katanya, kongres tersebut diharapkan memberikan kontribusi untuk kemajuan para perempuan dalam pencapaian kemanusiaan yang adil dan beradab.

Senada, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, Prof. H. Abdurahman Mas'ud, Phd. yang memberikan sambutan atas nama Menteri Agama RI sekaligus membuka Internasional Seminar on Women Ulama itu menjelaskan perempuan memiliki peranan dan bahkan menentukan jalannya sejarah dalam setiap jaman.

“Pada masa Rasulullah, Khualafaur rasyidin dan masa-masa sesudahnya, perempuan mengisi beragam peran seperti ulama, cendikiawan, intelektual, ahli medis, tentara dan lainnya. Dalam konteks Indonesia, perempuan Indonesia telah memiliki peran strategis dalam masyarakat,” jelasnya.

Dia menjelaskan, abad ke-14 terdapat tiga Kerajaan Islam yaitu Sultan Khadijah, Sultan Maryam, dan Sultan Fatimah. Masa pejuang perempuan seperti Raden Ayu Ageng Serang, Tjut Nya' Dien, Tjut Meutia, Laksamana Mahalayati, Kartini, Rohana Kudus, Rangkoyo Rasuna Said, Rahmah el-Yunusiyah dan Dewi Sartika, Maftunah Yunus. “Mereka berjuang sesuai dengan perannya masing masing,” imbuhnya.

Sumber: Harian Rakyat Cirebon, 26 April 2017

**KUPI,
KEBANGKITAN ULAMA PEREMPUAN
DI CIREBON**

Tribunnews.com, 26 April 2017

Kongres Ulama Perempuan Indonesia di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al Islamy Babakan, Ciwaringin, Cirebon, bertema peran ulama perempuan dalam meneguhkan nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Dalam acara ini, yang jadi sejumlah bahasan utama adalah isu-isu yang selama ini dekat dengan perempuan, seperti pernikahan anak, kekerasan seksual dan perusakan alam di dunia khususnya di Indonesia.

Dibuka Selasa (25/4/2017), kongres akan berakhir esok hari, Kamis, 27 April 2017.

Peserta yang hadir pun tidak hanya dari dalam negeri saja, tetapi ada beberapa ulama perempuan yang datang dari sejumlah negara sahabat.

Sumber: <http://www.tribunnews.com/regional/2017/04/26/kupi-kebangkitan-ulama-perempuan-di-cirebon>

PONPES MALNU WAKILI BANTEN IKUTI KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA

Radarbanten.co.id, 26 April 2017

Ratusan ulama perempuan, aktivis dan akademisi pekan ini mengikuti Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama di Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin Cirebon. Agenda kongres para da'i perempuan tersebut telah berlangsung dari kemarin hingga besok (25-27/4).

Pertemuan ini disebut sebagai bentuk konsolidasi para ulama perempuan yang selama ini bekerja untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat sipil.

Dari Banten, E. Ervi Siti Zahroh, putri dari KH. Zidni Ma'ani menjadi salah satu peserta penuh, delegasi dari Ponpes Mathla'ul Anwar Li Nahdlotil Ulama (Malnu) Pusat Menes. "Forum ini adalah forum pertama bagi konsolidasi ulama perempuan, kehadiran kami disini merupakan ikhtiyar dalam menjawab isu-isu kesejahteraan, perlindungan perempuan dan isu-isu keislaman," ujarnya melalui siaran resmi yang diterima Radar Banten Online, Rabu (26/4).

Menurutnya, kongres ini tetap dalam koridor kebangsaan dan kemanusiaan, selama ini ulama perempuan telah banyak berkontribusi dan menyelesaikan persoalan, namun kiprahnya jarang terdengar.

"Melalui forum ini kita ingin nyatakan bahwa keberadaan ulama perempuan itu nyata, eksis, dan selalu hadir dalam setiap problem keummatan. Dan inilah waktu dimana semua komponen bangsa harus mengakui sekaligus memberikan apresiasi atas setiap ikhtiyar dan langkah kongkrit yang telah ditampilkan," ungkapnya.

Dalam laporan panitia, kongres ini akan membahas tiga isu utama yang dihadapi perempuan dan anak-anak, yaitu perkawinan anak, kekerasan seksual dan perusakan alam dalam konteks keadilan sosial, migrasi dan radikalisme.

"Semua tema ini berkaitan langsung dengan peri-kehidupan kaum perempuan, seperti perkawinan anak di mana Indonesia berada di urutan

kedua terbesar di Asia Tenggara setelah Kamboja, kekerasan seksual yang banyak terjadi, dan lain-lain. Jadi mesti ada solusi yang tidak hanya melibatkan perempuan, tetapi juga berbagai pihak,” jelas aktifis PP. Fatayat NU ini.

Ibu dua anak ini juga menyatakan, Indonesia sebenarnya banyak memiliki ulama perempuan sejak beberapa abad lalu, tetapi peran mereka tertimbun dalam kultur religio-sosiologis sejarah dunia. Saat ini, ulama perempuan di Indonesia banyak yang berperan dalam masyarakat, sebagai pemimpin pesantren, ataupun pemimpin institusi pendidikan, dan melakukan pemberdayaan di masyarakat akar rumput.

Dia berharap kongres ini dapat memperkuat peran ulama perempuan dalam menjalankan kerja dan khittahnya sebagai manusia untuk menyelesaikan masalah sosial dan agama di masyarakat, tanpa kehilangan jati diri dan kodratnya sebagai seorang ibu. “Semoga ikhtiyar kami selalu mendapat ridlo dari Allah,” katanya.

Sumber: <http://www.radarbanten.co.id/ponpes-malnu-wakili-banten-ikuti-kongres-ulama-perempuan-indonesia/>

**MALNU PUSAT KIRIM DELEGASI
DALAM FORUM
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA**

Radarbangsa.com, 26 April 2017

Pondok Pesantren Mathla'ul Anwar Li Nahdlatul Ulama (Malnu) Pusat Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten mengirim delegasi ke acara Forum Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Cirebon, Jawa Barat. Acara konsolidasi ulama perempuan itu digelar selama dua hari, 25-27 April 2017.

Salah satu delegasi dari Malnu Pusat, E. Ervi Siti Zahroh yang juga putri dari KH Zidni Ma'ani mengungkapkan, pertemuan ulama perempuan tersebut guna membahas isu-isu kesejahteraan dan perlindungan perempuan.

“forum ini adalah forum pertama bagi konsolidasi ulama perempuan, kehadiran kami disini merupakan ikhtiar dalam menjawab isu-isu kesejahteraan, perlindungan perempuan dan isu-isu keislaman,” ujar Ervi kepada Radarbangsa.com, Selasa 25 April 2017.

Cucu dari KH TB Ma'ani Rusjdi itu menegaskan bahwa keberadaan ulama perempuan itu adalah nyata dan selalu hadir dalam setiap problem keumatan.

“Dan inilah waktu dimana semua komponen bangsa harus mengakui sekaligus memberikan apresiasi atas setiap ikhtiyar dan langkah kongkrit yang telah ditampilkan,” tegasnya.

Dengan kongres ulama perempuan, Ia berharap bahwa peran strategis ulama perempuan dapat menjalankan segala aktivitas dan khithahnya sebagai manusia untuk menyelesaikan masalah sosial agama di masyarakat.

“Dengan tanpa kehilangan jati diri dan kodratnya sebagai seorang ibu. Semoga ikhtiyar kami selalu mendapat ridlo dari Allah SWT,” harapnya.

Sumber: <https://www.radarbangsa.com/news/2482/malnu-pusat-kirim-delegasi-dalam-forum-kongres-ulama-perempuan-indonesia>

KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA DIIKUTI PESERTA ASAL LUAR NEGERI

Ayocirebon.com, 26 April 2017

Sebanyak 780 Ulama Perempuan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dalam rangka Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang dilaksanakan pada 25 - 27 April 2017.

Sekretaris Umum Komite Pelaksana KUPI Ninik Rahayu menuturkan bahwa ulama perempuan mempunyai peran strategis dalam perkembangan peradaban Islam di Indonesia, namun catatan tentang peran perempuan tersebut tidak terlalu banyak karena konstruksi sejarah yang sepihak.

Lebih lanjut, Ninik mengatakan dibutuhkan upaya kultural dan struktural untuk memunculkan kembali kerja-kerja keulamaan perempuan dalam meneguhkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan.

"Atas dasar itulah muncul gagasan untuk menyelenggarakan KUPI dengan mengangkat tema "Peran Ulama Dalam Meneguhkan Nilai Keislaman, Kebangsaan dan Kemanusiaan yang dihadiri oleh 780 ulama yang terdiri dari 580 orang peserta dan 200 orang pengamat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan juga ada dari luar negeri," ujarnya, Selasa (25/4/2017).

Ninik menjelaskan dalam kegiatan kongres para ulama perempuan mengadakan seminar internasional, seminar nasional dan musyawarah fatwa mengenai persoalan bangsa dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ditambahkan pula bahwa sejumlah narasumber dari negara-negara lain seperti dari Afghanistan, Pakistan, Malaysia, Arab Saudi, Nigeria dan tentunya Indonesia akan menjadi narasumber pada seminar tersebut.

"Untuk seminar nasional tentang ulama perempuan akan diisi diskusi panel tentang sejarah, peran, tantangan, serta strategi dakwah dan metode studi Islam dalam menjawab isu-isu kontemporer di Indonesia," tambahnya.
(Faqih Rohman)

Sumber: <http://ayocirebon.com/read/20170426/122/199/kongres-ulama-perempuan-indonesia-diikuti-peserta-asal-luar-negeri>

IAIN CIREBON JADI BUKTI SEJARAH SEMINAR INTERNASIONAL ULAMA PEREMPUAN

Fajarnews.com, 26 April 2017

IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjadi tempat bersejarah diselenggarakannya seminar internasional ulama perempuan. Hal itu dengan menghadirkan pembicara para ulama perempuan dari berbagai Negara, bertempat di lantai III gedung Pascasarjana, Selasa (25/4).

Kegiatan seminar internasional ulama perempuan bertajuk “Amplifying Women Ulama's Voices, Asserting Values of Islam, Nationhood and Humanity” yang dibagi dalam dua sesi. Adapun pembicara yang dihadirkan antara lain Pengasuh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dan juga Pengasuh Ponpes Mahasina Bekasi, Badriyah Fayyumi.

Kemudian ada Kamarudin Amin, Eka Srimulyani dan Ruhaini Dzuhayatin dari Indonesia, Bushra Qadeem dari Pakistan, Hatoon al-Fassidari Saudi Arabia, Ulfat Hussein Masibo dari Kenya, Rafatu Abdulhamid dari Nigeria, Zainah Anwar dari Malaysia, dan Roya Rahmani dari Afganistan.

Ketua KUPI, Badriyah Fayyumi menuturkan, KUPI ini merupakan ruang pertemuan bagi seluruh ulama perempuan Indonesia dari berbagai latar belakang organisasi, institusi, daerah dan diikuti oleh ulama perempuan dari berbagai negara.

“Pertemuan mereka (KUPI, red) terdiri para korban, aktivis, pendamping korban, ulama perempuan internasional dan pemerintah selama tiga hari,” kata Badriyah saat ditemui fajarnews.com usai seminar internasional sesi pertama.

Ia mengaku, diadakannya KUPI bertujuan untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman dari berbagai ulama perempuan di berbagai negara. KUPI ini merupakan yang pertama di dunia yang hadir untuk penguatan dan peneguhan keislaman di Indonesia.

“Kita ingin melahirkan pandangan keagamaan Islam untuk membantu menyelesaikan masalah sosial di Indonesia bahkan dunia,” ucapnya.

Sementara itu Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, H Sumanta mengaku senang dan bangga karena seminar internasional diselenggarakan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Meski Cirebon kecil, akan tetapi disitulah api Islam menjalar ke Banten dan seantero Jabar.

“Dengan diadakannya KUPI di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, maka ini akan tercatat dalam sejarah Islam sebagai kampus pertama di Indonesia bahkan dunia yang mendukung penyelenggaraan KUPI,” terangnya.

Ia mengaku seminar internasional ini sangat luar biasa. Sebab, penyelenggaraan kongres ini adalah sebuah pencapaian kultural dan akademik umat Islam Indonesia yang mempertemukan ulama-ulama pengkaji Islam, baik laki-laki ataupun perempuan dan para aktivis pemberdayaan perempuan.

“Kita sering dengar bahwa perempuan memang dekat dengan agama, tetapi sayangnya agama justru tidak bersahabat kepada perempuan. Mari kita buktikan bahwa pernyataan ini salah, jika dikaitkan dengan Islam agama kita, yaitu mempraktikkan Islam yang memanusiakan perempuan dan memperlakukan mereka secara adil dan merata,” bebarnya.

Ia menegaskan, seminar internasional ini sebagai bagian dari KUPI adalah sebuah pencarian akademik, kultural, dan juga spiritual untuk menemukan kembali keislaman yang mendengar dan ramah kepada perempuan sebagai mana dulu dipraktikkan Rasulullah SAW.

“Melalui seminar ini kita semua akan belajar satu sama lain dan akan memperkuat satu sama lain untuk sebuah tatanan dunia yang lebih adil bagi laki-laki dan perempuan,” pungkasnya.

Sumber: <http://edukasi.fajarnews.com/read/2017/04/26/15072/iain.cirebon.jadi.bukti.sejarah.seminar.internasional.ulama.perempuan>

MENCARI EKSISTENSI KEULAMAAN PEREMPUAN

Sindo, 26 April 2017

Ulama perempuan sejatinya berkontribusi untuk agama, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Hanya, keberadaan mereka terpinggirkan selama berabad-abad akibat sejarah dikontribusi sepihak.

Sejarah Islam mencatat, ulama perempuan telah menjadi bagian dari setiap perkembangan peradaban Islam, termasuk di Indonesia. Tak ingin menafikkan eksistensi ulama perempuan, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) digelar di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Hal itu sebagai upaya kultural dan struktural yang menegaskan kembali kerja-kerja sosial keulamaan perempuan dalam meneguhkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan.

“KUPI merupakan sebuah perjumpaan 780 ulama perempuan yang selama ini berkiprah di masyarakat”, kata Sekretaris Umum Komite Pelaksana KUPI Ninik Rahayu, kemarin.

Bertema ‘Peran Ulama Perempuan Dalam Meneguhkan Nilai Keislaman, Kebangsaan, dan Kemanusiaan’, KUPI pertama ini diagendakan digelar selama tiga hari sejak Selasa (25/4) hingga Jumat (27/4). erika lia

Sumber: Harian Sindo, 26 April 2017

KUPI TEGUHKAN EKSISTENSI ULAMA PEREMPUAN

Fajarnews.com, 26 April 2017

Ulama dan keulamaan perempuan sebenarnya telah ada di Indonesia sejak berabad-abad lalu, namun mereka tidak tercatat dalam sejarah karena sejarah telah dikonstruksi secara sepihak.

Hal itu dikemukakan Ketua Panitia Pengarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Badriyah Fayyumi menjelaskan salah satu tujuan digelarnya KUPI saat konferensi pers seminar internasional ulama perempuan di Gedung Pascasarjana Lantai III IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Selasa (20/4).

"Kita punya banyak perempuan yang memiliki keilmuan yang sudah diakui dan berkontribusi kepada masyarakat, umat dan bangsa. Dan KUPI merupakan bagian dari kekayaan khazanah Islam Indonesia," kata Badriyah.

Menurutnya, selain pengakuan keberadaan ulama dan peran keulamaan perempuan, KUPI memberikan ruang kepada ulama perempuan untuk berbagai ilmu, pengetahuan, wawasan dan pengalaman terkait kerja pemberdayaan perempuan dan keadilan sosial dalam rangka membumikan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan.

"KUPI akan diisi berbagai kegiatan di antaranya sembilan diskusi paralel dan musyawarahkan keagamaan yang fokus pada tiga isu, yaitu perkawinan anak, kekerasan seksual dan pembangunan berkeadilan terhadap perempuan," katanya.

Output-nya lanjut Badriyah, KUPI menginginkan agar eksistensi dan kontribusi ulama perempuan dalam membangun peradaban umat manusia, mendapat penghargaan yang layak.

"Kita akan merumuskan fatwa dan pandangan ulama perempuan terhadap pemecahan isu-isu kontemporer yang menjadi rekomendasi baik untuk pemerintah, negara, masyarakat muslim, keluarga dan lain-lainnya. Kita

bersama-sama ingin bersinergi membangun dunia yang rahmat'alil alamin," imbuhnya.

Menurutnya, KUPI juga akan mengeksplorasi pengalaman-pengalaman keulamaan perempuan dari berbagai negara. Hal itu mejadi pening karena permasalahan perempuan setiap negara tentu berbeda-beda. Ia mencontohkan di Arab Saudi, perempuan tidak boleh menjadi sopir.

"Kemudian di Afganistan soal pergulatan politik, yaitu peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan. Melalui KUPI ini diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk memecahkan permasalahan sosial baik yang dihadapi perempuan ataupun kemanusiaannya," ujarnya.

Menurutnya, eksistensi ulama perempuan ditiadakan karena adanya konstruksi sejarah, kultural dan politik yang tak mendukung peran perempuan, sehingga peran mereka tidak terekam dalam catatan sejarah.

"Dalam proses perjalanan sejarah tentu mengalami fase pasang surut, makanya kami sharing ke berbagai negara terkait ulama perempuan dalam melakukan langkah-langkah berupa pemikiran, dan gerakan untuk peneguhan eksistensi ulama perempuan," terangnya.

Ia menginginkan melalui KUPI sejarah bisa lebih adil lagi kepada perempuan karena sejak dulu ulama perempuan telah memberikan kontribusi bagi khazanah keislaman, termasuk di Nusantara.

Salah seorang narasumber dalam seminar yang bertajuk "Amplifying Women Ulama's Voices, Asserting Values of Islam, Nationhood and Humanity" itu, ulama perempuan asal Malaysia, Zaenah Anwar, mengatakan, peran ulama perempuan adalah menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran dan menyelaraskannya dengan semangat kesetaraan.

"Kami ingin membangun kepercayaan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi, Alquran justru menjunjung tinggi peran perempuan," kata Zaenah.

Ia menilai, tantangan terhadap kesetaraan perempuan sejauh ini sangat besar. Meski begitu, Indonesia dinilainya sudah cukup baik dalam soal kesetaraan. "Hanya saja Indonesia kurang menjual (kesetaraan) tersebut ke publik," tuturnya.

Seorang narasumber lain, ulama perempuan Arab Saudi, Hatoonn Al-Fasi mengemukakan, di negaranya peran perempuan terlalu dimonopoli bahkan disudutkan. Padahal, selama ini perempuan Arab Saudi kerap dijadikan contoh bagi umat Islam negara lain.

"Menjadi hal yang kompleks ketika bicara perempuan Arab Saudi, kami harus memikul beban tradisi negara Islam yang sangat kaku dalam semua tantangan," kata Hatoonn.

Ia pun mendorong ulama perempuan untuk senantiasa menyebarkan Islam moderat yang menyampaikan pesan kesetaraan dan kemanusiaan.

"Menjadi seorang Alimat (ulama perempuan) di Arab Saudi bukanlah tugas mudah. Walau ada ribuan perempuan lulusan pendidikan Islam dan menghafal Alquran, tetapi kita tidak punya Alimat yang diakui sebagai imam yang bisa melakukan ijtihad dan diakui," pungkasnya.

Selain dihadiri oleh para ulama perempuan Indonesia dan dunia, turut hadir pula dalam acara tersebut perwakilan Kementerian Agama, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Duta Besar Afganistan, Roya Rahmina. (Winarno/Adhe Hamdan)

Sumber: <http://news.fajarnews.com/read/2017/04/26/15096/kupi.teguhkan.eksistensi.ulama.perempuan>

EKSISTENSI ULAMA PEREMPUAN PATUT DIHARGAI

Kabar-cirebon.com, 26 April 2017

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan para perempuan dalam pencapaian kemanusiaan yang adil dan beradab.

Ketua Panitia Pengarah KUPI Hj. Badriyah Fayumi dalam Seminar Internasional Ulama Perempuan mengatakan, di antara tujuan kongres ini adalah bagaimana ulama perempuan tidak hanya memberikan kontribusinya untuk isu kebangsaan dan kemanusiaan, tetapi eksistensinya dihargai dan diakui.

“Sebab, dominasi budaya patriarki berakibat pada tenggelam dan terpinggirkannya ulama perempuan dalam mengisi ruang-ruang publik,” ujarnya saat memberikan materi di Seminar Internasional Ulama Perempuan di Gedung Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Selasa (25/4/2017).

Badriyah juga mengatakan, Indonesia mempunyai banyak akademisi dan intelektual dari kalangan perempuan. Begitu pun pesantren-pesantren yang memberikan ruang kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan.

Sebab menurutnya, ulama perempuan adalah mereka yang memiliki perhatian pada perspektif untuk kesetaraan perempuan dalam memajukan peradaban Islam dan penguatan civil society.

“Sehingga, kongres ini diharapkan memberikan kontribusi untuk kemajuan para perempuan dalam pencapaian kemanusiaan yang adil dan beradab,” katanya.

Dalam Seminar Internasional Ulama Perempuan ini ada beberapa narasumber dari berbagai negara terlibat di dalamnya ulama perempuan dari Pakistan Mossarat Qadeem (Pakistan), Zainah Anwar (Malaysia), Hatoon Al-Fasi (Saudi Arabia), Sureya Roble-Hersi (Kenya), Fatima Akilu (Nigeria), dan

Roya Rahmanidari The Ambassador of Afghanistan in Indonesia. Acara ini merupakan rangkaian dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 25 – 27 April 2017 di Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Cirebon, Jawa Barat.

Menurutnya, KUPI yang pertama kalinya digelar ini adalah muara dari perjumpaan visi, pemikiran dan realitas di lapangan, yang menyimpulkan bahwa ulama perempuan itu ada dan nyata kontribusinya untuk agama, bangsa, negara dan kemanusiaan, namun demikian keberadaan mereka terpinggirkan selama berabad-abad karena sejarah dikonstruksi secara sepihak.

Sementara itu, ulama perempuan sekaligus feminis Malaysia Zaenah Anwar menilai peran ulama perempuan di tengah hubungan antara komunitas muslim dan negara ingin membangun pengalaman yang baik bagaimana menginterpretasi ayat-ayat Alquran dan menyelaraskannya dengan semangat kesetaraan.

“Kami ingin membangun kepercayaan perempuan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi, justru menjunjung tinggi peran perempuan. Tantangan kesetaraan perempuan memang besar. Sebetulnya Indonesia sudah cukup baik dalam soal kesetaraan. Hanya saja Indonesia kurang menjual hal tersebut ke publik,” imbuhnya. **(C-11)**

Sumber: <http://www.kabar-cirebon.com/2017/04/eksistensi-ulama-perempuan-patut-dihargai/>

MENOLAK EKISTENSI ULAMA PEREMPUAN ADALAH TINDAKAN TIDAK ADIL

Mediaindonesia.com, 26 April 2017

ULAMA perempuan tengah mendorong bagaimana mengembangkan konsep dakwah yang memuliakan perempuan dan laki-laki tanpa diskriminasi. Dakwah pemberdayaan dan pembebasan perempuan dari berbagai bentuk ketidakadilan, serta bentuk dakwah yang bertujuan mempengaruhi kebijakan atau strategi advokasi agar pemerintah atau negara memenuhi hak-hak perempuan.

Gagasan tersebut disampaikan Ketua Pengurus Pusat Aisyiah Siti Aisyah dalam Seminar Nasional bertajuk “Peran Ulama Perempuan dalam Meneguhkan Nilai Keislaman, Kebangsaan, dan Kemanusiaan” sebagai rangkaian Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Pesantren Pondok Jambu Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (26/4).

“Karena itu, ketika kita turun ke komunitas, maka dakwahnya atau ayat-ayat yang kita sampaikan harus tentang pemberdayaan dan pembebasan,” demikian Aisyah menuturkan pentingnya ulama perempuan untuk menghapus persoalan seperti nikah di bawah umur, nikah siri, keharusan pencatatan atas perceraian dan isu-isu lainnya agar jelas posisi pemihakan terhadap perempuan.

Sementara Dosen Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu al-Quran (PTIQ) Jakarta Dr. Nur Rofiah menegaskan bahwa ulama perempuan adalah ulama yang mempunyai kesadaran bahwa keadilan hakiki terhadap perempuan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Islam.

“Khalaqah-khalaqah yang selama ini dilakukan ulama perempuan adalah penegasan atas keadilan yang mempertimbangkan kondisi teologis sekaligus sosiologis perempuan. Jadi lebih pada perspektif perempuan, bukan hanya isunya,” ujar intelektual perempuan yang menjadi pengurus Alimat dan Rahima ini.

Untuk itulah Nur Rofiah di hadapan sekitar 300 peserta kongres yang mengikuti seminar ini mengajak agar perempuan mulai berpikir dan bertanya atas apa yang dihadapinya dengan cara mencari berbagai referensi keagamaan, sehingga tidak terjebak pada klaim kebenaran satu-satunya.

Lebih baik lagi, menurutnya, ketika perempuan sudah melakukan perjalanan intelektual dan dapat bersikap ketika tidak setuju pada sebuah pandangan. Karena kebenaran bukanlah otoritas orang tertentu, tetapi seberapa kuat argumentasinya.

Sumber: <http://mediaindonesia.com/news/read/102316/menolak-eksistensi-ulama-perempuan-adalah-tindakan-tidak-adil/2017-04-26>

BANGKITKAN KIPRAH ULAMA PEREMPUAN

Republika, 26 April 2017

Para ulama perempuan berperan besar dalam meneguhkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Namun sayang, catatan tentang kiprah ulama perempuan dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia sangat kecil akibat konstruksi sejarah yang sepihak.

“Padahal, ulama perempuan sama tugasnya dengan ulama laki-laki,” ujar Ketua Panitia Pengarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Badriyah Fayumi usai menjadi pembicara dalam Seminar Internasional Ulama Perempuan di Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat, Selasa (25/4).

Dijelaskan Badriyah, budaya patriarkhi yang berkembang selama ini telah mengakibatkan tenggelamnya ulama perempuan dalam mengisi ruang-ruang publik. Padahal, banyak akademisi dan intelektual dari kalangan perempuan.

Melalui seminar dan kongres ulama perempuan ini, menurut dia, para ulama perempuan berkesempatan untuk berbagi pengalaman guna melakukan langkah-langkah dalam meneguhkan eksistensi ulama perempuan.

Badriyah juga mengatakan, penyelenggaraan seminar dan kongres tersebut mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, tidak terkecuali para ulama laki-laki.

Selain Badriyah, Seminar Internasional Ulama Perempuan juga menghadirkan sejumlah ulama perempuan dari berbagai negara di antaranya Mossarat Qadeem (Pakistan), Zainah Anwar (Malaysia), Hatoun Al-Fasi (Arab Saudi), Sureya Roble-Hersi (Kenya), dan Fatima Akilu (Nigeria).

Seminar ini merupakan rangkaian dari penyelenggaraan KUPI di Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Cirebon pada 25-27 April 2017. Kongres bertema “Peran Ulama Perempuan dalam Meneguhkan Nilai keislaman, Kebangsaan, dan Kemanusiaan” itu dihadiri 780 ulama perempuan, terdiri dari

580 peserta dan 200 orang pengamat. Tidak hanya ulama perempuan dari Indonesia, hadir pula ulama-ulama perempuan dari berbagai negara.

Dalam kongres ini, para ulama perempuan itu mengadakan seminar internasional, seminar nasional, dan musyawarah fatwa tentang persoalan kebangsaan aktual dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan.

“ini (KUPI) adalah sebuah perjumpaan 780 ulama perempuan yang selama ini sudah berkiprah di masyarakat. Ini merupakan perjumpaan pertama,” ujar Sekretaris Umum Komite Pelaksana KUPI Ninik Rahayu, kepada *Republika*, Selasa (25/4)

Ia menjelaskan, dibutuhkan upaya-upaya kultural dan struktural untuk menegaskan kembali kerja-kerja sosial keulamaan perempuan dalam meneguhkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Atas dasar itulah, menurut Ninik, muncul gagasan untuk menyelenggarakan KUPI.

Dalam pandangan ulama perempuan dari Arab Saudi Hatoon Al-Fasi, ulama perempuan bertanggung jawab menyampaikan nilai-nilai Islam moderat, kesetaraan, dan kemanusiaan.

“Ketika kita bicara tentang Perempuan Arab Saudi, hal itu menjadi lebih kompleks karena perempuan harus memikul beban tradisi negara Islam yang menjadikannya sangat kaku dalam semua tingkatan, baik politik, ekonomi, maupun sosial,” kata Hatoon.

Sementara, ulama perempuan asal Pakistan Mossarat Qadeem mengungkapkan, peran perempuan di Pakistan saat ini sangat berat karena mereka tercerabut dari akarnya. Mereka yang seharusnya bertugas membina keluarga, kini harus merawat para korban perang. (Lilis Sri Handayani)

Sumber: Harian Republika, 26 April 2017

KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA DAPAT APRESIASI AKTIVIS PEREMPUAN DUNIA

Gomuslim.co.id, 26 April 2017

Islam hadir sebagai agama yang mengangkat derajat perempuan ke tempat yang lebih tinggi. Saat ini, perempuan tidak hanya berperan dalam hal mengurus rumah tangga. Lebih dari itu, perempuan dapat berkontribusi besar dalam pembangunan bangsa dan agama, salah satunya menjadi ulama.

Baru-baru ini, sejumlah ulama perempuan Indonesia berkumpul di Cirebon untuk menggelar Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Kongres yang diselenggarakan di Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon ini merupakan KUPI yang pertama.

Sebelumnya, dalam rangkaian KUPI, Kementerian Agama menyelenggarakan 'International Seminar on Womens Ulama' di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kegiatan ini diselenggarakan bekerjasama dengan Panitia Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), dan AMAN (The Asian Muslim Action Network).

Ratusan aktivis perempuan dari 15 Negara hadir dalam seminar ini. Mereka berasal dari Afghanistan, Amerika Serikat, Australia, Bangladesh, Belanda, Filipina, India, Malaysia, Nigeria, Kanada, Kenya, Pakistan, Saudi Arabia, Singapura, Thailand, serta para pengasuh pondok dan akademisi dalam negeri.

Tampil sebagai narasumber, Kepala Balitbang dan Diklat Kemenag Abdurrahman Masud (mewakili Menag), Rektor IAIN Syekh Nurjati Sumanta, serta sejumlah aktivis perempuan dari berbagai Negara. Mereka adalah Zainah Anwar (Malaysia), Bushra Qadeem (Pakistan), Hatoon Al-Fasi (Saudi Arabia), Roya Rahmani (Afghanistan), Ulfat Hussein Masibo (Kenya), Rafatu Abdul Hamid (Nigeria), serta Badriyah Fayumi, Siti Ruhaini Dzuhayatin, dan Eka Srimulyani (Indonesia).

Para pembicara umumnya memberikan apresiasi atas penyelenggaraan KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) ini. “Ini merupakan langkah mulia dalam membangun peradaban keumatan dan kemanusiaan yang asasi,” papar Zainah Anwar di Cirebon, Selasa (25/04/2017).

Aktivis perempuan asal Malaysia ini memuji keberhasilan Indonesia dalam menyeleraskan sejumlah kebijakan dan akses yang terbuka bagi kalangan perempuan. Dia menilai, tidak ada perlakuan kebijakan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Ini perlu diapresiasi setinggi-tingginya, ujarnya.

Bahkan, meski persoalan radikalisasi agama masih ditemukan di Indonesia, namun Zainah Anwar menilai kokohnya Islam Indonesia yang moderat akan mampu meredam masalah itu.

Hal senada disampaikan pembicara lainnya. Secara umum, mereka mengakui keunggulan Indonesia, pada saat di negara mereka masing-masing masih menghadapi sejumlah kendala akses dan ketimpangan baik secara kultural maupun kebijakan-negara antara perempuan dan laki-laki. Mereka berharap ada kesempatan bagi para ulama perempuan di negaranya untuk belajar kepada ulama-ulama perempuan di Indonesia.

Mereka juga berharap semangat atau spirit Islam Indonesia yang memberi ruang terhadap perempuan dan moderasi Islam ala Indonesia dapat dipromosikan dan dikembangkan ke seluruh dunia yang lebih luas. KUPI pertama ini akan berlangsung sampai 27 April mendatang.

Beberapa waktu lalu, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi program-program dari KUPI. Menurutnya, adanya KUPI yang konsen terhadap bagaimana perempuan diletakkan sesuai kodratnya, walau dalam konteks Indonesia masih banyak persoalan. (njs/kemenag/dbs)

Sumber: <http://www.gomuslim.co.id/read/news/2017/04/26/3916/kongres-ulama-perempuan-indonesia-dapat-apresiasi-aktivis-perempuan-dunia.html>, 26 Apr 2017

ULAMA PEREMPUAN INDONESIA DIPERHITUNGAN DALAM SEJARAH

Nu.or.id, 26 April 2017

KH. Husein Muhammad menyebutkan sejumlah ulama perempuan Indonesia yang populer seperti Rahmah el-Yunusiyah (Padang Panjang, Sumatera Barat), Nyai Khoiriyah Hasyim (Jombang), Teungku Fakinah (Aceh), Sultanah Safiatudin (Aceh), Fatimah (Banjarmasin).

Bahkan sejumlah penelitian belakangan menunjukkan ratusan bahkan ribuan perempuan Indonesia dengan kemampuan ilmiah yang setara dengan laki-laki. Mereka bekerja dalam dunia ilmiah, majelis ta'lim dan pesantren, maupun modern, pendidikan tinggi dan pusat-pusat riset sosial keagamaan.

"Mereka adalah ulama," kata Kiai Husein pada makalahnya saat menjadi pembicara seminar pada acara Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Pesantren Kebon Jambu al-Islamy Ciwaringin, Cirebon, Rabu (26/4).

Ia mengatakan, saat ini dunia sangat membutuhkan lahirnya banyak ulama perempuan dengan seluruh makna keulamaannya. Peran perempuan harus dimaksimalkan dalam segala aspek kehidupan di ruang domestik maupun publik.

"Mereka (perempuan) dibutuhkan bersama kaum laki-laki membangun negara dan bangsa ini demi terwujudnya cita-cita bersama, keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan," kata Kiai Husein.

"Mereka dibutuhkan untuk memberi makna-makna baru atas kehidupan yang berkeadilan dan berkemanusiaan," tambahnya.

Pada seminar itu juga menghadirkan pembicara lain, Dosen Pasca Sarjana PTIQ Nur Rafiah, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiah Yogyakarta Siti Aisyah, dan Guru Besar UIN Suna Kalijaga Yogyakarta Machasin.

Sumber: <http://www.nu.or.id/post/read/77401/ulama-perempuan-indonesia-diperhitungkan-dalam-sejarah>

MENANTI KONTRIBUSI ALIMAT

Pikiran Rakyat, 26 April 2017

Kongres ulama perempuan yang baru pertama kali digelar di Indonesia, bahkan di dunia, di buka kemarin malam. Kongres mengangkat tema “Peran Ulama Perempuan dalam meneguhkan nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan”.

Sebanyak 780 ulama perempuan, terdiri atas 580 orang peserta dan 200 pengamat hadir dalam acara tersebut. Mereka datang ke Cirebon dari berbagai daerah di Indonesia dan Negara.

Ketua panitia pengarah (Steering Commite) Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Badriyah Fayumi mengungkapkan, pelaksanaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia diharapkan memberikan kontribusi untuk kemajuan para perempuan dalam mencapai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Itu karena, kata Badriyah, ulama perempuan adalah mereka yang memiliki perhatian pada perspektif untuk kesetaraan perempuan dalam memajukan peradaban islam dan pengetahuan masyarakat madani.

“Dengan demikian, kongres ini diharapkan memberikan kontribusi untuk kemajuan para perempuan dalam pencapaian kemanusiaan yang adil dan beradab,” kata Badriyah Fayumi, dalam konferensi pers se-usai menjadi *keynote speech* Seminar Internasional Ulama Perempuan di IAIN Syekh Nurjati, Selasa (25/4/2017).

Seminar Internasional yang dibuka Kepala Balitbang dan Diklat Kementerian Agama Abdurahman Mas’ud, merupakan rangkaian dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).

Selain ulama perempuan Indonesia, sejumlah ulama perempuan dari Negara lain seperti Mossarat Qadeem (Pakistan), Zainah Anwar (Malaysia), Hatoon Al-Fasi (Arab Saudi), Sureya Roble-Hersi (Kenya), Fatimah Akilu (Nigeria), dan Roya Rahmani, Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia, juga menjadi narasumber.

Islam Moderat

Sementara itu, ulama perempuan sekaligus feminis Malaysia Zaenah Anwar menilai, Indonesia sebetulnya sudah cukup baik dalam soal kesetaraan gender. "Hanya Indonesia kurang menjual hal tersebut ke publik," kata Zaenah.

Zaenah mengakui, tantangan kesetaraan perempuan memang besar, "Bagi kami, peran ulama perempuan di tengah hubungan antara komunitas muslim dan Negara, adalah membangun pengalaman yang baik bagaimana menginterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan menyelaraskannya dengan semangat kesetaraan," katanya.

Menurut Zaenah, dalam Islam tidak ada diskriminasi. Justru Islam menjunjung tinggi peran perempuan.

Sementara itu, Hatoon Al-Fasi, ulama dari Arab Saudi dalam penyampaian tema "*facing resistance: Personal Insight and Strategies of Women Ulama*" mengungkapkan, ulama perempuan bertanggung jawab menyampaikan Islam moderat, kesetaraan, dan kemanusiaan.

"Menjadi seorang alimat di kawasan kami (Arab Saudi) bukanlah tugas yang mudah. Walaupun ada ribuan perempuan lulusan pendidikan Islam, penghafal Al-Qur'an, tetapi kita tidak punya alimat yang diakui sebagai imam yang bisa melakukan ijtihad dan diakui," katanya.

Sumber: Harian Pikiran Rakyat, 26 April 2017

ULAMA PEREMPUAN MENYERUKAN ISLAM MODERAT

Mediaindonesia.com, 26 April 2017

ULAMA perempuan bertanggung jawab menyampaikan Islam moderat, kesetaraan, serta kemanusiaan. Mereka para pendidik yang juga memiliki kemampuan untuk memberikan fatwa dan ijtihad di lingkungan muslimat.

Menurut Hatoon Al Fasi, perwakilan dari Arab Saudi, peran sebagai pendidik sekaligus pemberi fatwa itu dimiliki ulama perempuan atau alimat di negaranya.

“Sayangnya di dunia Arab, para alimat ini tidak banyak,” ungkap Hatoon dalam Seminar Internasional Ulama Perempuan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat, kemarin.

Ia membawakan presentasi dengan judul *Facing Resistance: Personal Insight and Strategies of Women Ulama*.

Hatoon mengakui ketika berbicara tentang perempuan Arab Saudi, masalahnya cukup kompleks. Hal itu karena mereka harus memikul beban tradisi negara Islam yang menjadikannya sangat kaku dalam semua tingkatan, baik politik, ekonomi, maupun sosial.

Ia pun mengetahui banyak pemimpin yang memonopoli pandangan yang akhirnya menyudutkan perempuan. Itu merupakan tantangan yang dihadapi perempuan muslim di banyak tempat.

Meski begitu, di wilayah lainnya seperti di Maroko dan Mesir, alimat mampu berkiprah lebih banyak karena dukungan negara.

Hatoon memaparkan, jika merujuk pada pusat studi pembangunan di Mesir, metode mereka ialah untuk menjembatani organisasi-organisasi perempuan untuk memfokuskan pemenuhan hak-hak perempuan oleh negara. Seperti di kampus Al-Azhar, yang berhasil membuahkan banyak karya.

Ulama perempuan asal Pakistan, Mossarat Qadeem, mengungkapkan peran perempuan di Pakistan saat ini sangat berat karena mereka tercabut dari akar. Mereka yang seharusnya bisa mengembangkan keluarganya, kini harus merawat para korban perang.

Para perempuan Pakistan seringkali juga mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dan menjadi korban bom bunuh diri.

Sumber: <http://mediaindonesia.com/news/read/102262/perempuan-menyerukan-islam-moderat>

PERAN ULAMA PEREMPUAN DI ARAB SAUDI DAN PAKISTAN

Ayocirebon.com, 26 April 2017

Ulama Arab Saudi dan Pakistan menegaskan bahwa ulama perempuan mempunyai peran untuk menyebar pesan-pesan dari Islam moderat.

Ulama dari Arab Saudi, Hatoon Al Fasi, menjelaskan jika ulama perempuan mempunyai tanggung jawab besar dalam menyampaikan Islam moderat serta pesan mengenai kesetaraan dan kemanusiaan pada publik umum.

Disamping itu banyak ulama perempuan mempunyai keahlian dalam studi agama untuk memberikan fatwa dan juga ijtihad, mereka juga merupakan para pendidik bagi kaum perempuan.

"Mereka memiliki pengetahuan tentang Islam, dapat memberikan spirit kesetaraan dan keadilan, namun di dunia Arab para Alimat atau Ulama perempuan tidak terlalu banyak," ujarnya di IAIN Syekh Nurjati Kota Cirebon, Selasa (7/25/4/2017) dalam acara Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).

Hatoon menambahkan jika berbicara mengenai budaya perempuan di Arab Saudi, itu akan menjadi lebih kompleks lantaran tradisi negara Islam yang menjadikan sangat kaku dalam semua aspek kehidupan ekonomi, politik, dan sosial.

Sementara itu ulama perempuan asal Pakistan, Mossarat Qadeem, menjelaskan bahwa peran perempuan di Pakistan saat ini sangat berat karena mereka sudah tercerabut dari akarnya. Ditambah lagi dengan perlakuan yang mereka dapatkan dari lingkungan sosial yang terkadang menjerumuskan mereka menjadi korban bom bunuh diri.

Dalam situasi kebingungan ini mereka terinsfiltrasi oleh maulananya dengan paham-paham radikal.

"Karenanya para ibu diminta untuk bisa menjadi agen perubahan yang positif, sehingga anak-anak tidak terlibat dalam paham radikalisme," katanya.

Sumber: <http://ayocirebon.com/read/20170426/122/200/peran-ulama-perempuan-di-arab-saudi-dan-pakistan>

**DI CIREBON,
KONGRES ULAMA PEREMPUAN
RUMUSKAN FATWA SOAL ISU KONTEMPORER**

Islamindonesia.id, 26 April 2017

Setidaknya 1.200 peserta dari 15 negara termasuk Indonesia menghadiri Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang digelar selama beberapa hari ke depan di Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Ketua KUPI Hj. Badriyah Fayyauumi mengungkapkan, ada tiga tujuan utama digelarnya acara yang baru pertama kali di Indonesia bahkan dunia itu.

Pertama adalah mengakui dan mengukuhkan keberadaan dan peran ulama perempuan dalam sejarah Islam dan Indonesia.

“Kedua adalah membuka ruang ulama perempuan tanah air dan dunia untuk berbagi pengalaman tentang kerja pemberdayaan perempuan dan keadilan sosial dalam rangka membumikan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan,” jelas Badriyah seperti dilaporkan *detik.com* di acara prekongres KUPI di Kampus Pascasarjana IAIN Gunun Jati, Kota Cirebon, 25/4.

Tujuan terakhir, adalah membangun pengetahuan mengenai ulama perempuan dan kontribusinya bagi kemajuan dan peradaban umat manusia. “Sekaligus merumuskan fatwa dan pandangan keagamaan ulama perempuan Indonesia tentang isu-isu kontemporer dalam perspektif Islam rahmatan lil alamin,” ucapnya.

Selain tiga poin utama itu, KUPI juga akan mengeluarkan sebuah rekomendasi dalam menjawab permasalahan kekerasan seksual, pernikahan anak, perusakan alam, ketimpangan sosial, migrasi, hingga radikalisme.

Selama ini, kata Badriyah, peran ulama perempuan seolah tenggelam dan terpinggirkan. Padahal selama ini banyak kaum akademisi dan intelektual perempuan yang berkontribusi cukup besar untuk Islam dan negaranya.

Badriyah mengungkapkan, ulama sendiri dalam Al Quran dan Hadist merupakan bentuk jamak dari kata 'alim' bermakna orang yang tahu atau sangat berilmu. Sehingga tidak menunjukkan batasan disiplin ilmu tertentu atau gender.

Dalam rangkaian KUPI, Kementerian Agama menyelenggarakan *'International Seminar on Womens Ulama'* di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kegiatan ini diselenggarakan bekerjasama dengan Panitia Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), dan AMAN (The Asian Muslim Action Network), dilansir portal *kemenag.go.id*.

Tampil sebagai narasumber, Kepala Balitbang dan Diklat Kemenag Abdurrahman Masud (mewakili Menag), Rektor IAIN Syekh Nurjati Sumanta, serta sejumlah aktivis perempuan dari berbagai Negara. Mereka adalah Zainah Anwar (Malaysia), Bushra Qadeem (Pakistan), Hatoon Al-Fasi (Saudi Arabia), Roya Rahmani (Afghanistan), Ulfat Hussein Masibo (Kenya), Rafatu Abdul Hamid (Nigeria), serta Badriyah Fayumi, Siti Ruhaini Dzuhayatin, dan Eka Srimulyani (Indonesia).

Para pembicara umumnya memberikan apresiasi atas penyelenggaraan KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) ini. Ini merupakan langkah mulia dalam membangun peradaban keumatan dan kemanusiaan yang asasi, papar Zainah Anwar di Cirebon, Selasa (25/04).

Aktivis perempuan asal Malaysia ini memuji keberhasilan Indonesia dalam menyeleraskan sejumlah kebijakan dan akses yang terbuka bagi kalangan perempuan. Dia menilai, tidak ada perlakuan kebijakan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Ini perlu diapresiasi setinggi-tingginya, ujarnya.

Bahkan, meski persoalan radikalisasi agama masih ditemukan di Indonesia, namun Zainah Anwar menilai kokohnya Islam Indonesia yang moderat akan mampu meredam masalah itu.[]

Sumber: <https://islamindonesia.id/berita/di-cirebon-kongres-ulama-perempuan-rumuskan-fatwa-soal-isu-kontemporer.htm>

KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA UNGKAP SOAL PEMINGGIRAN WANITA

Tempo.co, 26 April 2017

Peradaban Islam di dunia sudah memperlihatkan dan menggambarkan posisi, peran dan aktivitas kaum perempuan Islam. Adanya kebijakan negara justru meminggirkan perempuan dari ruang publik.

Ketua Yayasan Fahmina Cirebon, KH Husein Muhammad menjelaskan jika pusat-pusat peradaban Islam, paling tidak di 3 tempat yaitu Damaskus, Suriah; Baghdad, Irak; dan Andalusia, Spanyol, telah memperlihatkan dan menggambarkan secara jelas fakta perempuan Islam di atas panggung sejarah Islam awal.

Saat itu banyak perempuan yang menjadi ulama, cendekia dan intelektual profesional dengan beragam keahlian dan dengan kapasitas intelektual yang relatif, bahkan mengungguli ulama laki-laki,” kata Husein dalam seminar dengan tema Peran Ulama Perempuan dalam Meneguhkan Nilai Keislaman, Kebangsaan dan Kemanusiaan pada Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Ponpes Kebon Jambu Al Islamy, Babakan Ciwaringin, Cirebon, Rabu, 26 April 2017.

Banyaknya ulama perempuan ini, menurut Husein, karena memang Islam hadir untuk kemanusiaan. “Islam memang hadir untuk sebuah cita-cita kemanusiaan,” kata Husein. Yaitu membebaskan penindasan, diskriminasi, dan kebodohan, menuju perwujudan kehidupan yang setara, berkeadilan dan berilmu pengetahuan untuk semua manusia. “Untuk semua manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan,” kata Husein.

Nama-nama perempuan ulama maupun intelektual tersebut, menurut Husein, terekam dalam banyak buku. Di antaranya buku *Al Ishabah Fi Tamyiz al Shahabah* yang dikarang oleh Ibnu Hajar. Dalam buku tersebut menyebutkan adanya 500 perempuan ahli hadis. Para ulama perempuan tersebut telah mengambil peran-perannya sebagai tokoh spiritual dan pribadi-pribadi dengan

moralitas terpuji. Aktivitas mereka tidak hanya dari dan dalam ruang domestik (rumah), tetapi juga dalam ruang publik politik dalam arti yang lebih luas.

Sayangnya, lanjut Husein, sejarah kaum muslimin sesudah itu justru memasukkan kembali kaum perempuan ke dalam kerangkeng rumahnya. Aktivitas intelektual dibatasi, kerja sosial, politik dan kebudayaan mereka juga dipasung. "Mereka dilupakan dan dipinggirkan," kata Husein.

Hal itu konon dilakukan atas nama kasih sayang, perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan. Menurut Husein, ada dua frase sakti yang membelenggu aktualisasi diri kaum perempuan yaitu jargon "menjaga melindungi" dan "menjaga kesucian moral". Dunia, lanjut Husein, telah kehilangan cara bagaimana melindungi tanpa membatasi.

Kondisi ini bahkan diperparah dengan adanya kebijakan negara untuk pembekuan aktivitas intelektual dan kebebasan berpikir terhadap terhadap kaum perempuan. Akibatnya, terjadi peminggiran kaum perempuan dari ruang publik dan dalam dunia ilmu pengetahuan secara khusus. Namun sejak awal abad 20 hingga kini, menurut Husein, sudah dilakukan berbagai upaya baru yang menggugat keterpinggiran perempuan. Dimulai dari Rifa'ah Rafi 'al-Thahthawi, orang pertama yang mengkritik pandangan konservatif yang merendahkan dan memarjinalkan kaum perempuan.

"Ia mengkampanyekan kesetaraan dan keadilan gender, serta menyerukan dibukanya akses pendidikan yang sama bagi kaum perempuan," kata Husein. Dari mereka kemudian lahirnya para ulama dan aktivitas perempuan di banyak negara muslim yang tampil kembali ke panggung sejarah.

Ketua Pengurus Pusat Aisyiah, Siti Aisyah, mengungkapkan jika di era abad 21 ini tantangan dakwah ulama perempuan justru semakin kompleks. "Seiring banyaknya persoalan yang dihadapi perempuan, tantangan dakwah ulama perempuan justru semakin kompleks," katanya.

Sumber: <https://m.tempo.co/read/news/2017/04/26/173869805/kongres-ulama-perempuan-indonesia-ungkap-soal-peminggiran-wanita>

**KUPI PERKENALKAN
METODOLOGI STUDI ISLAM BERKEADILAN
BAGI PEREMPUAN**

Cirebontrust.com, 26 April 2017

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) diisi kegiatan seminar nasional Peran Ulama Perempuan dalam Meneguhkan Nilai Keislaman, Kebangsaan, dan Kemanusiaan.

Seminar menghadirkan empat narasumber antara lain, KH. Husein Muhammad (Ketua Yayasan Fahmina), Dr. Nur Rofiah Bil Uzm (Dosen Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran, Jakarta), Prof. Dr. Machasin (Guru Besar UIN Sunan Kalijaga) dan Siti Aisyah (Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah).

Nur Rofiah menyampaikan topik Metodologi Studi Islam Perspektif Ulama Perempuan, dalam paparannya memperkenalkan metode baru studi Islam yang lebih berkeadilan terhadap perempuan.

Menurutnya, konstruksi dan metodologi studi Islam yang selama ini dominan belum sepenuhnya memberikan keadilan perempuan, karena bias tafsir keagamaan yang hegemonik dan patriarkhis.

“Akibatnya, teks-teks orsinal keagamaan Islam yang termuat dalam Al Quran dan Al Hadis mengalami reduksi sistematis dan berkelanjutan, sehingga dianggap sebagai kebenaran absolut. Padahal Al Qur’an dan Al Hadis telah memuliakan perempuan,” katanya.

Nur Rofiah mencontohkan bagaimana konstruksi teks dimaknai sebagai instrumen penundukkan terhadap perempuan. Dia mengistilahkan apakah mungkin perempuan masuk surga, karena ketidakpatuhannya pada laki-laki?

Nur Rofiah yang juga Pengurus Alimat dan Rahima ini menegaskan bahwa makna Perempuan bukan hamba laki-laki, sebab keduanya sama-sama hamba Allah, keduanya sama-sama pemimpin (khalifah) di muka bumi.

Perspektif baru yang diperkenalkan, Nur Rofiah adalah memastikan bahwa kombinasi iman dan prinsip kesetaraan, harus menjadi landasan studi-studi Islam.

Sehingga menghasilkan keadilan substantif, sebuah keadilan atas dasar kesetaraan substantif yang mempertimbangkan hakekat perempuan dengan kondisi khusus mereka secara biologis karena organ, fungsi dan masa reproduksinya.

Sumber: <http://www.cirebontrust.com/kupi-perkenalkan-metodologi-studi-islam-berkeadilan-bagi-perempuan.html>

KONGRES ULAMA PEREMPUAN BAHAS STUDI ISLAM YANG ADIL BAGI WANITA

Hetanews.com, 26 April 2017

Dosen Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran, Jakarta, Nur Rofiah Bil Uzm mengatakan Al Quran dan hadis sudah memuliakan perempuan. Namun metodologi studi Islam yang selama ini dominan belum sepenuhnya memberi keadilan bagi kaum perempuan. Penyebabnya, kata dia, adanya bias tafsir keagamaan yang hegemonik dan patriarkis. Akibatnya, teks-teks orisinal keagamaan Islam yang termuat dalam Al Quran dan hadis mengalami reduksi sistematis dan berkelanjutan.

“Ini yang akhirnya dianggap sebagai kebenaran absolut,” kata Nur Rofiah, dalam seminar nasional Peran Ulama Perempuan Dalam Meneguhkan Nilai Keislaman, Kebangsaan dan Kemanusiaan di Ponpes Kebon Jambu Al Islamy, Babakan Ciwaringin, Rabu, 26 April 2017.

Nur Rofiah mencontohkan konstruksi teks yang dimaknai sebagai instrumen penundukan perempuan. “Laki-laki maupun perempuan sama-sama pemimpin (khilafah) di muka bumi,” kata Nur Rofiah.

Nur Rofiah juga memperkenalkan metode baru studi Islam yang lebih berkeadilan pada perempuan. Perspektif baru yang diperkenalkannya itu adalah memastikan kombinasi iman dan prinsip kesetaraan harus menjadi landasan studi-studi Islam, sehingga menghasilkan keadilan. Keadilan itu atas dasar kesetaraan substantif yang mempertimbangkan hakekat perempuan dengan kondisi khusus mereka secara biologis dan sosial. Nur Rofiah menuturkan, secara biologis karena organ, fungsi dan masa reproduksinya. Sedangkan secara sosial karena ketimpangan relasi dengan laki-laki yang menyejarah selama berabad-abad.

Sementara itu Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Machasin, mengungkapkan berperannya ulama perempuan dalam ruang publik yang

sudah didominasi laki-laki, tidak berarti ulama perempuan tersebut mesti bersaing.

“Namun mengisi apa yang belum terisi, meluruskan yang menyimpang dan memberikan kelembutan, cinta, keteguhan, ketahanan, kecermatan dan keindahan pada ajaran dan praktek-praktek agama yang selama ini mengedepankan hal yang dianggap macho,” katanya.

Machasin melanjutkan, setidaknya ada tiga kekuatan ulama perempuan yang jarang, bahkan tidak dimiliki oleh ulama laki-laki. Antara lain, ilmu agama yang peka terhadap adanya ketidakadilan dan penindasan, kelembutan, serta kepemimpinan yang melindungi dan mencintai umat.

Sumber: tempo.co

Sumber: <http://www.hetanews.com/article/90475/kongres-ulama-perempuan-bahas-studi-islam-yang-adil-bagi-wanita>

ULAMA PEREMPUAN TANGKAL RADIKALISME

Sejuk.org, 26 April 2017

Upaya-upaya yang didorong ulama perempuan adalah pengembangan konsep dakwah yang memuliakan perempuan dan laki-laki tanpa diskriminasi, dakwah pemberdayaan dan pembebasan perempuan dari berbagai bentuk ketidakadilan, serta model dakwah yang bertujuan mempengaruhi kebijakan ataupun strategi advokasi agar negara memenuhi hak-hak perempuan.

Gagasan tersebut disampaikan Ketua Pengurus Pusat Aisyiah Siti Aisyah dalam Seminar Nasional bertajuk “Peran Ulama Perempuan dalam Meneguhkan Nilai Keislaman, Kebangsaan, dan Kemanusiaan” sebagai rangkaian Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Rabu (26/4/2017) di Pesantren Pondok Jambu, Babakan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat.

“Karena itu, ketika kita turun ke komunitas, maka dakwahnya atau ayat-ayat yang kita sampaikan harus tentang pemberdayaan dan pembebasan,” demikian Aisyah menuturkan pentingnya ulama perempuan untuk menghapus persoalan seperti nikah di bawah umur, nikah siri, keharusan pencatatan atas perceraian dan isu-isu lainnya agar jelas posisi pemihakan terhadap perempuan.

Sementara Dosen Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu al-Quran (PTIQ) Jakarta Dr. Nur Rofiah menegaskan bahwa ulama perempuan adalah ulama yang mempunyai kesadaran bahwa keadilan hakiki terhadap perempuan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Islam.

“Khalaqah-khalaqah yang selama ini dilakukan ulama perempuan adalah penegasan atas keadilan yang mempertimbangkan kondisi teologis sekaligus sosiologis perempuan. Jadi lebih pada perspektif perempuan, bukan hanya isunya,” ujar intelektual perempuan yang menjadi pengurus Alimat dan Rahima ini.

Untuk itulah Nur Rofiah di hadapan sekitar 300 peserta kongres yang mengikuti seminar ini mengajak agar perempuan mulai berpikir dan bertanya atas apa yang dihadapinya dengan cara mencari berbagai referensi keagamaan, sehingga tidak terjebak pada klaim kebenaran satu-satunya. Lebih baik lagi, menurutnya, ketika perempuan sudah melakukan perjalanan intelektual dan dapat bersikap ketika tidak setuju pada sebuah pandangan. Karena kebenaran bukanlah otoritas orang tertentu, tetapi seberapa kuat argumentasinya.

Sebagaimana juga gagasan manusia adalah *khalifatu fil ardl*, maka tugas perempuan dan ulama perempuan pun menegakkan kemanusiaan dengan menebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya di dunia ini.

“Sebab, ideologi ulama perempuan adalah menguatkan perempuan atas dasar keimanan,” tegasnya.

Di tengah merebaknya intoleransi di mana masyarakat kita mudah menerima ajaran radikalisme yang dibungkus agama, maka menurut Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Machasin, ulama perempuan lebih punya kesempatan di keluarga dan masyarakat untuk meluruskan situasi tersebut.

“Ulama perempuan perlu memberikan pemahaman terhadap perempuan-perempuan dan masyarakat bahwa tidak semua yang dibungkus agama itu baik dan benar. Sehingga jangan mudah diterima begitu saja. Jangan melihat segala sesuatu dari bungkusnya atau tampilan luarnya saja,” kata Machasin.

KH. Husein Muhammad mengingatkan pentingnya peran ulama perempuan yang selama ini mengamalkan agama untuk membebaskan manusia dari *dzulumat*, penindasan, penzaliman dan kebodohan menuju cahaya, *ila nur*. Itulah konsep *al-ulama waratsatul anbiya*, ulama mewarisi perjuangan para nabi.

“Aku tidak mengutus engkau Muhammad selain membawa kasih kepada manusia. Sehingga kehadiran Islam harus menciptakan hubungan saling mengasihi antar manusia,” tutur Ketua Yayasan Fahmina Cirebon ini.

Sebagaimana Nabi meluruskan budi pekerti agar menjadi luhur, maka konsep Akhlakul Karimah itu sama dengan penegakan HAM. “Jadi kita menegakkan akhlak dalam rangka menghidupkan HAM, nilai-nilai kemanusiaan melalui intelektualitas, moralitas dan spiritualitas,” sambung kyai yang pernah menjadi Komisioner di Komnas Perempuan ini.

Yang menurutnya terpenting: keadilan adalah kebajikan tertinggi. Keadilan adalah esensi dan pilar tegaknya kehidupan semesta ini. Karena itu Kyai Husein mengajak semua pihak agar mau melihat dengan jujur bahwa perempuan memiliki potensi besar untuk mengubah dunia.

“Jika kita masih terus mengabaikan bahkan mengingkari fakta bahwa perempuan itu setara dengan laki-laki, baik secara intelektual maupun spiritual, dan bila kita menutup mata dan menolak eksistensi ulama perempuan, maka sesungguhnya kita sedang melakukan ketidakadilan,” Kyai Husein Muhammad menutup paparannya. (Rifah Zainani-SEJUK)

Sumber: <http://sejuk.org/2017/04/26/ulama-perempuan-tangkal-radikalisme/>

BANGUN JEJARING LAWAN RADIKALISME

KOMPAS, 26 April 2017

Islam mengajarkan keadilan dan kesetaraan di antara sesama manusia dalam kehidupan berbangsa. Akan tetapi, banyak ketiakadilan terjadi atas nama agama, dan menempatkan perempuan sebagai korban. Perempuan bahkan dieksploitasi dan menjadi bagian dari kelompok radikal.

Perempuan sangat rentan dieksploitasi sehingga mudah terlibat dalam radikalisme. Hal itu sudah terjadi di banyak negara. Oleh karena itu, jadi kebutuhan mendesak untuk membangun jejaring gerakan perempuan antarnegara guna memperjuangkan kesetaraan sekaligus mencegah radikalisme.

Demikian antara lain pemikiran yang mengemuka dalam Seminar Internasional Ulama Perempuan bertema "Memperkuat Suara Ulama Perempuan, Menegaskan Nilai-nilai Islam, Kebangsaan, dan Kemanusiaan" di Cirebon, Jawa Barat, Selasa (25/4). Seminar yang menghadirkan pembicara dari Indonesia, Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, Nigeria, Kenya, dan Afghanistan itu menjadi bagian dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, dan Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin, Cirebon, 25-27 April 2017. KUPI diikuti oleh lebih dari 500 peserta dari 15 negara.

Pengalaman paling ekstrem tentang perempuan sebagai korban radikalisme diceritakan Bushra Qadhim Hyder dari PAIMAN, Alumni Trust Pakistan. Ia mengatakan, banyak kaum perempuan di Pakistan dieksploitasi atas nama agama, lalu disuruh berperang oleh kelompok radikal. "Kaum perempuan sering dipaksa menjadi pelaku bom bunuh diri dan diperlakukan tidak manusiawi. Mereka menangkap pandangan jihad yang tidak tepat, kemudian masuk ke gerakan ekstrem," katanya.

Ekstremisme kerap memutarbalikkan ajaran agama dengan mengutip ayat-ayat kitab suci untuk kepentingan gerakannya, dan memanfaatkan perempuan. Seperti dikatakan peneliti senior Universitas Qatar asal Arab Saudi, Hatoon al-Fasi, pemikiran-pemikiran radikal muncul dan dimonopoli laki-laki, yang kemudian menyudutkan para pemikir perempuan. Padahal, hal-hal yang dibicarakan itu menyangkut kepentingan perempuan.

Hal senada dikatakan Direktur Musawah Malaysia Zainah Anwar. Menurut Zainah, tidak ada keadilan tanpa kesetaraan, dan saat ini terlalu banyak ketidakadilan, kekejaman, dan kekerasan dilancarkan atas nama agama. Perempuan menanggung beban penderitaan atas nama agama.

Sementara itu, mantan komisioner HAM Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan pengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Siti Rohaini Dzuhayatin, menegaskan, saat ini umat Islam sedang berperang melawan fundamentalisme. Sementara itu, perempuan berjuang pada isu-isu substantif, kepemimpinan, dan budaya. Artinya, tugas kita semua memang berat.

Ruang Perjumpaan

Ketua Panitia Pengarah KUPI Badriyah Fayumi mengatakan, KUPI menjadi ruang perjumpaan para perempuan ulama tidak hanya di Indonesia, tetapi juga dunia untuk memikirkan persoalan kebangsaan dan kemanusiaan. Ulama tidak hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Kata ulama adalah bentuk jamak atau majemuk dari alim atau orang yang berilmu. Ulama secara terminologis adalah orang yang berilmu mendalam, yang memiliki rasa takut kepada Allah (berintegritas), berkepribadian mulia, mengamalkan, menyampaikan, menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan kepada semesta.

Perempuan ulama di dunia sejak dulu telah berjuang dan menjadi bagian dari setiap perkembangan peradaban Islam. Keberadaan perempuan ulama di sepanjang zaman di Indonesia merupakan ciri sekaligus pembeda nyata dari wajah Islam Indonesia dibandingkan dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam lain. Perempuan berperan penting dalam dua organisasi keislaman besar, yakni NU dan Muhammadiyah. Hal ini memastikan Islam Indonesia yang moderat, yang telah berlangsung sejak era kolonialisme.

Ulfat Hussein Masibo, pegiat gerakan perempuan dari Kenya, menuturkan, perempuan ulama di negaranya turut serta di parlemen untuk menolak kekerasan yang dilakukan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) serta turut menegakkan kebangsaan.

Hatoon al-Fasi menekankan, banyak perempuan ulama di Arab Saudi dan dunia Arab yang memiliki ilmu pengetahuan luas. Mereka ahli dalam studi agama dan berkemampuan memberikan fatwa serta berijtihad. Mereka mampu

memberikan pandangan mengenai halal dan haram, baik dan buruk, melalui ilmu yang juga dipelajari oleh laki-laki.

"Perempuan ulama ini memiliki kekuatan untuk menggerakkan. Harus ada gerakan untuk melawan ekstremisme. Ini memang tugas berat istri, ibu, dan perempuan. Oleh karena itu perlu untuk membangun hubungan sesama perempuan, sesama komunitas, antar tokoh agama. Kita membangun dialog-dialog perdamaian," ujar Hatton.

Duta Besar Afganistan untuk Indonesia Roya Rahmani mengajak semua perempuan dan gerakan perempuan dari semua negara untuk saling mendukung satu sama lain. KUPI menjadi satu alternatif wadah untuk berjejaring. "Kita perlu mencari suara alternatif karena masalah radikalisme, kekerasan seksual, dan hal lain yang merugikan perempuan itu mengglobal. Kita harus bertukar strategi dan bersatu dengan negara lain," ujarnya. (IVV/IKI)

Sumber: Harian KOMPAS, 26 April 2017

KONGRES ULAMA PEREMPUAN: "POLIGAMI BUKAN TRADISI ISLAM"

Newsjs.com, 26 April 2017

Masalah poligami menjadi pembahasan dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia di Pesantren Kebon Jambu al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon, dan disebut sebagai salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Para ulama perempuan menyebutkan poligami merupakan praktek yang sudah ada sejak sebelum masa Nabi Muhammad SAW.

Dosen Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran, Jakarta, Dr. Nur Rofiah Bil Uzm mengatakan pada masa itu para laki-laki boleh menikahi perempuan dengan jumlah yang tidak terbatas, lalu ayat (dalam surat An-Nisa) ini membatasi empat.

"Poligami bukan tradisi dari Islam, dalam Al-Qur'an itu mengatur, sebagai problem lalu diatasi, sama seperti misalnya pencatatan perkawinan, itu kan ada problem kalau perkawinan tidak dicatat lalu orang sesuka hati cerai begitu, lalu diatasi," jelas Nur.

Dia mengatakan dalam berpoligami, Rasul memberikan contoh bagaimana memperlakukan keluarga dengan adil.

"Mengapa Rasulullah poligami? Karena perlu contoh riil ketika poligami tidak atau belum mungkin dihapuskan, kan orang perlu dicontohkan bagaimana memperlakukan keluarga manusiawi dengan seperti itu," kata Nur.

Dia mengatakan inti ajaran Islam adalah keadilan dalam keluarga, bukan mengenai jumlahnya seperti yang dipahami selama ini.

Ayat yang sering digunakan untuk membenarkan poligami ada dalam Surat An-Nisa (4) ayat 3 : "... Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.

Tetapi menurut Nur, dalam ayat tersebut juga terdapat pesan monogami.

"Dalam Al-Quran di ayat yang sama, yang dipahami membolehkan poligami itu ada pesan monogami yang juga kuat, di ujung ayat dan di ayat yang sama, itu mengatakan kalau khawatir tidak bisa berbuat adil, berarti ini sudah mengingatkan ada potensi ketidakadilan yang tinggi, maka satu saja," kata dia.

Di Indonesia yang merupakan negara demokrasi, menurut Nur, menganut monogami seperti dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatur syarat yang sulit untuk berpoligami.

Dalam Pasal 3 ayat 1 disebutkan, "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami".

Nur mengatakan ayat untuk monogami tidak banyak dimunculkan karena ulama perempuan masih sedikit.

Sejumlah kalangan menyebutkan poligami merupakan salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT. Selain itu KDRT juga meliputi kekerasan fisik, psikologis dan ekonomi.

Ketua Pengurus Pusat Aisyiah Siti Aisyah mengatakan banyak perempuan yang enggan mengungkapkan dirinya menjadi korban KDRT, karena seringkali tindakan itu menggunakan legitimasi agama.

"Sebenarnya mereka memahami Al-Qur'an hanya tekstual saja, kebanyakan mengacu pada fiqih-fiqih, seolah-olah tak berani untuk mengubah padahal mereka tak tahu kalau itu sebenarnya paham, paham kan bisa berbeda," kata Siti.

Siti mengatakan untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan ini dilakukan melalui dakwah yang dilakukan ulama perempuan.

Justifikasi Agama

Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuni Chuzaifah mengatakan dalam temuan Komnas Perempuan kasus kekerasan terhadap perempuan banyak yang menggunakan justifikasi agama.

"Kekerasan banyak menggunakan justifikasi agama seperti perkawinan lebih dari satu, meskipun tidak selalu dalam tradisi Islam, tafsir agama itu sering kali didominasi ulama-ulama yang tidak selalu ramah terhadap perempuan," kata Yuni.

Dia berharap kongres ulama perempuan ini dapat menyadarkan para ulama patriarkal, dan memberikan ruang pada ulama perempuan untuk menjawab persoalan di masyarakat.

Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang pertama kali digelar ini akan menghasilkan fatwa keagamaan mengenai sejumlah masalah utama yaitu perkawinan anak, kekerasan seksual dan perusakan alam.

Sumber: <http://www.newsjs.com/url.php?p=http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39716791>

**KOMISIONER HAM OKI:
ISU HAK PEREMPUAN
JADI TUGAS BERSAMA MUSLIMAH**

Liputan6.com, 26 April 2017

Komisioner bidang Hak Asasi Manusia (HAM) untuk Organisasi Kerjasama Islam, Siti Ruhaini Dzuharyatin, menjelaskan bahwa isu hak perempuan dalam perspektif Islam merupakan isu penting bagi para muslimah.

Hal tersebut disampaikan Siti pada pidato Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang diselenggarakan di Cirebon, Jawa Barat, pada Selasa, 25 April 2017.

Dosen Universitas Sunan Kalijaga tersebut juga menjelaskan bahwa, sebagai organisasi Islam internasional, OKI memiliki tugas yang berat agar dapat terbebas dari kepentingan politik dan dapat sepenuhnya memusatkan diri untuk perjuangan HAM serta hak perempuan.

"Selain harus membicarakan isu Israel dan Palestina, kita harus banyak memberikan perhatian kepada isu HAM yang terjadi di luar negara-negara anggota OKI," kata Siti saat pidato kongres.

Pada pidatonya, sang komisioner juga menambahkan bahwa ada tiga tantangan isu perempuan yang harus ditangani oleh Komisi HAM OKI.

Pertama, mempopulerkan isu hak perempuan di negara anggota OKI. Kedua, menyeimbangkan isu hak perempuan yang identik dengan Barat agar sesuai dengan perspektif Islam.

"Ada posisi binari dalam diskursus tentang kedua isu tersebut, tujuannya adalah untuk membangun HAM dalam Islam agar negara Barat bisa memahami kondisi tersebut, jelas, pengetahuan Barat tentang Islam hanya soal radikalisme-nya saja, padahal itu bukan wajah utama dalam Islam," tambah ibu dua anak itu.

Untuk itu, Siti menganjurkan agar Komisi HAM OKI dapat bekerjasama dengan Barat agar Islam dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan prinsip hak asasi manusia.

Tantangan ketiga, Komisi HAM OKI harus mampu memperkenalkan kepemimpinan yang feminis untuk membangun peradaban dan kedamaian. Sehingga, isu hak perempuan dan anak, hak minoritas, dan hak-hak warga beragama Islam di negara-negara di luar OKI seperti Rohingya dan Kashmir menjadi bagian dari agenda perjuangan Komisioner HAM.

Pada isi pidatonya yang lain, Siti juga menjelaskan mengenai usaha OKI untuk menerapkan Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan hak kelompok LGBT sebagai bagian dari isu HAM.

"Kami sampaikan di OKI soal penting dan wajibnya perlindungan terhadap hak mereka sebagai warga negara. HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan Forum Umat Islam pernah bertanya kepada saya, apakah OKI punya komisi HAM? Bagi saya komisi ini sangat penting untuk menyampaikan kepada mereka atau para hard-liner bahwa HAM adalah bagian dari Islam," tutup Siti.

Pada kesempatan yang berbeda, ulama perempuan dan feminis asal Malaysia, Zaenah Anwar, menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara mayoritas muslim yang cukup baik dalam menerapkan kesetaraan terhadap perempuan.

Hal tersebut disampaikan sang ulama kepada **Liputan6.com** pada Seminar Internasional Ulama Perempuan yang digelar di gedung Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Selasa (25/4/2017).

Menurut Zaenah, ulama perempuan memiliki peran penting di tengah-tengah masyarakat. Zaenah menginginkan, ulama perempuan berperan aktif dalam membangun pengalaman yang baik dalam menginterpretasi ayat-ayat Al-Quran dan menyelaraskannya dengan semangat kesetaraan.

"Hanya saja Indonesia kurang menjual hal tersebut ke publik," kata dia.

Saat ini, menurut Zaenah, tugas berat bagi kelompok perempuan muslim feminis adalah memperjuangkan kesetaraan perempuan dan CEDAW di negara yang masih menerapkan hukum syariah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Zaenah menegaskan bahwa dirinya sedang rutin melakukan sejumlah kampanye CEDAW di negara dengan kelompok perempuan muslim yang cukup banyak.

"Di sana (Thailand dan Nigeria) kami akan melakukan penelitian tematik. Tujuannya ingin melihat bagaimana CEDAW bisa dipraktikkan di sana," tutupnya.

Sumber: <http://global.liputan6.com/read/2932655/komisioner-ham-ok-i-isu-hak-perempuan-jadi-tugas-bersama-muslimah>

INDEKS KETIDAKSETARAAN GENDER INDONESIA TINGGI

Fajarnews.com, 26 April 2017

Indonesia tercatat sebagai salahsatu negara dengan Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG) yang tinggi jika dibandingkan negara ASEAN lainnya. Salah satu masalah krusial yang dihadapi perempuan Indonesia adalah tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, Prof. H. Abdurahman Mas'ud, Ph.D, saat memberikan pemaparannya terkait pentingnya peran ulama dan keulamaan perempuan, dalam seminar Internasional Ulama Perempuan Indonesia di aula IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Selasa (25/4).

“Meski perempuan Indonesia telah banyak berperan dalam melaksanakan berbagai program kesetaraan gender, Indonesia termasuk salahsatu negara dengan Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG) yang tinggi dibanding negara Asean lainnya, isu krusialnya adalah tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” kata Abdurahman.

Menurutnya, data pada Komnas Perempuan menunjukkan tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga pada tahun 2015 secara nasional tercatat mencapai 321.752 kasus.

“Tentunya dengan adanya permasalahan tersebut, Ulama perempuan itu dituntut untuk lebih banyak berperan, dari mulai keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan. Seperti mendorong para santri untuk senantiasa mencintai negaranya, menangani masalah penggunaan narkoba, perdagangan manusia dan banyak lagi yang lainnya,” katanya.

Ia mengaku sangat mengapresiasi diselenggarakannya Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang semangatnya memberikan kontribusi kepada bangsa dan kemanusiaan. Menurutnya, kesadaran individu perempuan telah melahirkan keinginan untuk bersatu dalam sebuah organisasi.

Tercatat ada beberapa organisasi perempuan pada masa perjuangan diantaranya Putri Mahardika, Kautamaan Isteri, Sopa Trisno, Organisasi Muslimat NU, Aisyah Muhammadiyah dan banyak lagi yang lainnya.

“Dalam organisasi perempuan tersebut terjadi pengumpulan termasuk ideologi dan pembangunan di masa orde baru. Ulama perempuan hari ini memiliki peran yang beragam dari mulai keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengarah KUPI, Hj. Badriyah Fayumi mengatakan, tujuan kongres tersebut salah satunya adalah bagaimana ulama perempuan tidak hanya memberikan kontribusinya untuk isu kebangsaan dan kemanusiaan, tetapi juga eksistensinya dihargai dan diakui.

“Sebab dominasi budaya patriarkhi berakibat pada tenggelam dan terpinggirkannya ulama perempuan dalam mengisi ruang-ruang publik, padahal kita punya banyak akademisi dan intelektual dari kalangan perempuan,” katanya.

Kongres ini, kata dia, diharapkan agar dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan para perempuan dalam pencapaian nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta memiliki perhatian pada perspektif untuk kesetaraan perempuan dalam memajukan peradaban Islam dan penguatan *civil society*.

(Vian)

Sumber: <http://news.fajarnews.com/read/2017/04/26/15098/indeks.ketid-aksetaraan.gender.indonesia.tinggi>

KISAH BUSHRA HYDER, PEREMPUAN PEMBAWA MISI DAMAI DI PAKISTAN

Liputan6.com, 26 April 2017

Dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), peserta dari luar negeri turut berbagi pengalaman mereka berjuang menyelamatkan perempuan dan anak-anak agar tidak terdoktrin kelompok ekstrimis mengatasnamakan jihad.

Salah satunya Bushra Hyder, aktivis perempuan asal Pakistan yang selama 12 tahun berjuang bersama PAIMAN Alumni Trust Pakistan. Organisasi ini mulai bergerilya memberikan penyadaran kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak agar tidak ikut gerakan jihad berkedok agama.

"Sekitar 10-12 tahun lalu saat maraknya bom dan naiknya ekstremis di Pakistan kami saat itu juga berjuang menyadarkan perempuan Pakistan untuk tidak mendorong anak-anak mereka ikut berjihad," sebut Hyyder kepada **Liputan6.com**, Rabu (26/4/2017).

Dia bersama organisasi lain yang memiliki kesamaan visi misi kedamaian, terus berjuang memerangi doktrin-doktrin agama yang dianggap menyimpang. Menjadi ekstremis, kata dia, bukan tujuan utama masyarakat Pakistan dalam kehidupan sehari-harinya.

Gerakan PAIMAN Alumni Trust Pakistan mencegah doktrinasi ekstremis Islam cukup panjang dan membutuhkan proses. Khususnya, masyarakat Pakistan di daerah terpencil, dia mengatakan, kebanyakan orang terutama perempuan kurang mendapat pendidikan formal maupun Islam secara utuh.

"Banyak ulama yang keliru menafsirkan kitab suci dan menyebarkan lewat radio yang mendorong orang lain untuk jihad," lanjut Hyder.

Kesalahan para militan menafsirkan Islam dan Alquran diperkuat dengan gencarnya doktrin di berbagai media, membuat kaum perempuan mendorong

anak laki-laki mereka untuk ikut berjihad. Tidak sedikit kaum perempuan yang sudah terkena doktrin membantu para ekstremis mengumpulkan dana sebagai upaya mendukung perlawanan.

Pendekatan Personal

Bushra bersama aktivis lain di Pakistan mengaku selalu bergerilya melawan doktrin jihad dengan pendekatan personal. Membawa pesan damai dan toleransi antar umat beragama, perempuan Pakistan diberi pelatihan dan diskusi mengenai pentingnya keberagaman dan alasan yang tepat jika ingin berjihad.

"Hampir semua warga Pakistan membaca Alquran tapi tidak paham arti dan maknanya. Kami bekerja di semua wilayah Pakistan, khususnya di perbatasan antara Afganistan dan Pakistan," bebarnya.

Hyder mengungkapkan, dalam upaya mencetak ekstremis baru, mereka menyamar menjadi tokoh agama atau ulama. Namun, memberi doktrin provokatif baik personal maupun lewat radio sehingga mendorong untuk berjihad.

Upaya tersebut, mendapat perhatian serius organisasi pembawa perdamaian di Pakistan. Bersama aktivis lain yang, Bushra melakukan pendekatan personal kepada masyarakat khususnya kaum perempuan. "Kami lihat-lihat mana perempuan yang bisa kami dekati kami ajak dialog dan meluruskan pemahaman yang keliru tentang jihad karena yang utama adalah anak-anak mereka agar tidak ikut Jihad. Perempuan yang berhasil kami rangkul kebanyakan mereka juga membentuk gerakan lagi dengan misi yang sama meluruskan pemahaman yang keliru soal Islam dan Jihad," ungap dia.

Anak-anak yang berpotensi menjadi ekstremis baru adalah berusia 14 sampai 25 tahun. Dia menjelaskan, di usia 14-25 tahun, militan lebih mudah mendoktrin dan mencuci otak mereka untuk dijadikan pemberontak baru atas nama jihad.

Sementara itu, gerakan damai yang dibawa aktivis Pakistan bukan hanya di tingkatan masyarakat. Para aktivis juga mendorong pesan damai dan keberagaman di tingkat universitas dan sekolah formal. "Sudah lebih dari 1000 anak dan ibu-ibu kami berikan pelatihan atau training tentang Islam, kesetaraan dan pesan damai. Hampir 3.000 mahasiswa di Pakistan juga kami diberi pelatihan yang sama agar minimal mereka tidak menjadi jihadis baru," tutur Hyder.

Pesan damai yang digalakan aktivis dan organisasi di Pakistan juga berhasil masuk ke sekolah. Para guru sekolah diberikan pelatihan dan pemahaman tentang keberagaman dan kedamaian untuk disampaikan kepada anak-anak. "Pesan kedamaian juga menjadi bagian dari kurikulum belajar

mengajar di sekolah Pakistan. Kami berharap perjuangan panjang kami tidak sia-sia," harap dia.

Sejauh ini, kata dia, organisasi kedamaian di Pakistan selalu berkoordinasi dan menggelar pertemuan. Pertemuan tersebut untuk membangun dialog interaktif dengan berbagai tokoh lintas agama yang ada di Pakistan maupun di luar Pakistan. "Saya juga akan membawa hasil kongres ini ke Pakistan untuk bertemu dengan tokoh lintas agama membawa pesan keberagaman dan kedamaian untuk Pakistan," ujar dia.

Sumber: <http://global.liputan6.com/read/2932734/kisah-bushra-hyder-perempuan-pembawa-misi-damai-di-pakistan>

AKTIVIS PEREMPUAN DUNIA APRESIASI KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA

Kemenag.go.id, 26 April 2017

Sejumlah ulama perempuan Indonesia berkumpul di Cirebon untuk menggelar Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Kongres yang diselenggarakan di Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon ini merupakan KUPI yang pertama.

Sebelumnya, dalam rangkaian KUPI, Kementerian Agama menyelenggarakan 'International Seminar on Womens Ulama' di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kegiatan ini diselenggarakan bekerjasama dengan Panitia Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), dan AMAN (The Asian Muslim Action Network).

Ratusan aktivis perempuan dari 15 Negara hadir dalam seminar ini. Mereka berasal dari Afghanistan, Amerika Serikat, Australia, Bangladesh, Belanda, Filipina, India, Malaysia, Nigeria, Kanada, Kenya, Pakistan, Saudi Arabia, Singapura, Thailand, serta para pengasuh pondok dan akademisi dalam negeri.

Tampil sebagai narasumber, Kepala Balitbang dan Diklat Kemenag Abdurrahman Masud (mewakili Menag), Rektor IAIN Syekh Nurjati Sumanta, serta sejumlah aktivis perempuan dari berbagai Negara. Mereka adalah Zainah Anwar (Malaysia), Bushra Qadeem (Pakistan), Hatoon Al-Fasi (Saudi Arabia), Roya Rahmani (Afghanistan), Ulfat Hussein Masibo (Kenya), Rafatu Abdul Hamid (Nigeria), serta Badriyah Fayumi, Siti Ruhaini Dzuhayatin, dan Eka Srimulyani (Indonesia).

Para pembicara umumnya memberikan apresiasi atas penyelenggaraan KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) ini. Ini merupakan langkah mulia dalam membangun peradaban keumatan dan kemanusiaan yang asasi, papar Zainah Anwar di Cirebon, Selasa (25/04).

Aktivis perempuan asal Malaysia ini memuji keberhasilan Indonesia dalam menyelaraskan sejumlah kebijakan dan akses yang terbuka bagi kalangan perempuan. Dia menilai, tidak ada perlakuan kebijakan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Ini perlu diapresiasi setinggi-tingginya, ujarnya.

Bahkan, meski persoalan radikalisasi agama masih ditemukan di Indonesia, namun Zainah Anwar menilai kekokohan Islam Indonesia yang moderat akan mampu meredam masalah itu.

Hal senada disampaikan pembicara lainnya. Secara umum, mereka mengakui keunggulan Indonesia, pada saat di negara mereka masing-masing masih menghadapi sejumlah kendala akses dan ketimpangan baik secara kultural maupun kebijakan-negara antara perempuan dan laki-laki. Mereka berharap ada kesempatan bagi para ulama perempuan di negaranya untuk belajar kepada ulama-ulama perempuan di Indonesia.

Mereka juga berharap semangat atau spirit Islam Indonesia yang memberi ruang terhadap perempuan dan moderasi Islam ala Indonesia dapat dipromosikan dan dikembangkan ke seluruh dunia yang lebih luas.

Sumber: <https://www.kemenag.go.id/berita/494471/aktivis-perempuan-dunia-apresiasi-kongres-ulama-perempuan-indonesia>

KONGRES NASIONAL KUATKAN PERAN ULAMA PEREMPUAN

Republika, 27 April 2017

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) resmi dibuka di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, Babakan, Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Selasa (25/4) malam. Kegiatan itu diharapkan mampu menegaskan kembali peran ulama perempuan dalam meneguhkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Machasin menyatakan, peran ulama perempuan dalam ruang publik yang sudah didominasi laki-laki tidak mesti berupa persaingan. "Tapi mengisi apa yang belum terisi, meluruskan yang menyimpang, dan memberikan kelembutan, cinta, keteguhan, ketahanan, kecermatan, dan keindahan pada ajaran dan praktik-praktik agama," kata Machasin dalam seminar nasional yang menjadi rangkaian kegiatan KUPI di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, Rabu (26/4).

Ia menyebutkan, setidaknya ada tiga kekuatan ulama perempuan yang jarang dimiliki oleh ulama laki-laki, yakni ilmu agama yang peka terhadap ketidakadilan dan penindasan, kelembutan serta kepemimpinan yang melindungi, dan mencintai umat yang dipimpinnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Fahmina Cirebon, Husein Muhammad, menyebutkan, peradaban Islam di Damaskus, Baghdad, dan Andalusia pada masa lalu telah menunjukkan posisi, peran, dan aktivitas kaum perempuan Islam di atas panggung sejarah. Di ketiga tempat itu, banyak perempuan yang menjadi ulama, cendekia, intelektual, dan profesional dengan beragam keahlian dan dengan kapasitas intelektual yang relatif sama, bahkan sebagian mengungguli ulama laki-laki.

Menurut Husein, fakta-fakta historis itu telah menggugat anggapan banyak orang bahwa akal, intelektualitas, dan moralitas perempuan lebih rendah dari akal, intelektualitas, dan moralitas laki-laki.

Pembukaan KUPI pada Selasa (25/4) malam, berlangsung semarak dipimpin delapan peserta. Kedelapan peserta itu mencerminkan keberagaman ulama dari lintas

generasi, latar belakang pendidikan, organisasi keagamaan, dan bidang pengabdian dari berbagai wilayah di Indonesia. Sebanyak 780 ulama perempuan itu terdiri atas 580 orang peserta dan 200 orang pengamat. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dan beberapa negara.

Ketua panitia KUPI yang juga Pengasuh Pesantren Mahasina Bekasi, Badriyah Fayumi mengatakan, kongres ulama perempuan tersebut merupakan yang pertama di Indonesia dan dunia. "ulama perempuan menjadi pendidik terdepan, pembela ketidakadilan, dan pendamping yang melekat dengan korban-korban kekerasan," kata Badriyah.

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jabar, Netty Prasetyani Heryawan, yang hadir dalam pembukaaan itu berharap kongres bisa terus membangun tradisi keilmuan. Sebab, tradisi keilmuan, tradisi menuntut dan mencari ilmu, adalah tradisi keislaman.

Netty juga berharap, karena seorang ibu adalah pendidik, maka seorang pendidik harus memiliki ilmu yang mumpuni dan memadai. Hal itu juga untuk membangun ketahanan keluarga masing-masing.

Dalam ajang KUPI, ratusan ulama perempuan itu akan mengadakan seminar internasional, seminar nasional, dan musyawarah fatwa tentang persoalan kebangsaan aktual di ruang publik dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan.

Seminar internasional tentang ulama perempuan rencananya akan menghadirkan beberapa narasumber dari Indonesia dan sejumlah negara. Di antaranya, Pakistan, Afghanistan, Malaysia, Arab Saudi, dan Nigeria.

Sedangkan seminar nasional tentang ulama perempuan, akan diisi diskusi panel tentang sejarah, peran, tantangan, strategi dakwah, dan metode studi Islam ulama perempuan dalam menjawab isu-isu kontemporer di Indonesia.

KUPI berlangsung pada 15-27 April 2017 di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al Islamy. Rencananya, kegiatan itu akan ditutup oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.

Dosen pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran, Jakarta, Nur Rofiah Bil Uzm mengatakan, konstruksi dan metodologi studi Islam yang selama ini dominan belum sepenuhnya memberi keadilan bagi perempuan, karena bias tafsir keagamaan yang hegemonik dan patriarki. Akibatnya, teks-teks orisinal keagamaan Islam yang termuat dalam Alquran dan hadis mengalami reduksi sistematis dan berkelanjutan, sehingga dianggap sebagai kebenaran absolut.

"Padahal Al Quran dan Hadis telah memuliakan perempuan," kata Nur Rofiah menegaskan, saat menjadi pembicara dalam salah satu seminar nasional yang jadi bagian kongres ulama perempuan, kemarin. (Lilis Handayani)

Sumber: Harian Republika, 27 April 2017

MENANTI FATWA PEREMPUAN ULAMA

Suaramerdeka.com, 27 April 2017

Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang diklaim sebagai yang pertama di dunia, membahas berbagai isu terkait perempuan di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat, 25-27 April 2017.

Tiga isu utama yang dibahas adalah kekerasan seksual, pernikahan anak, serta perusakan alam dalam konteks ketimpangan sosial, migrasi, dan radikalisme.

Kongres diharapkan menghasilkan rekomendasi, fatwa, dan ikrar keulamaan perempuan Indonesia. Perempuan ulama di dunia sejak dulu telah berjuang dan menjadi bagian setiap perkembangan peradaban Islam.

Keberadaan perempuan ulama di Indonesia merupakan ciri sekaligus pembeda nyata wajah Islam daripada negara-negara berpenduduk mayoritas Islam lain. Perempuan berperan penting dalam dua organisasi keislaman besar, yakni NU dan Muhammadiyah.

Hal ini memastikan Islam Indonesia yang moderat, yang telah berlangsung sejak era kolonial. Ajaran Islam terpola kepada ajaran dasar dan nondasar. Ajaran dasar ialah ajaran yang termaktub dalam Al Quran dan Sunnah mutawatir yang diyakini datang dari Allah Swt dan Rasul-Nya.

Sebaliknya, ajaran nondasar ialah ajaran berupa hasil ijtihad manusia dalam bentuk tafsir, interpretasi atau pemikiran ulama yang menjelaskan tentang ajaran dasar dan implementasinya dalam kehidupan nyata.

Ajaran dasar selalu bersifat absolut, abadi, dan tidak berubah. Sebaliknya, ajaran kedua bersifat ijtihadi, relatif, tidak abadi dan bisa berubah seiring dinamika masyarakat, serta perkembangan sains dan teknologi.

Menarik dicatat, sebagian besar ajaran Islam yang menyinggung relasi gender, seperti perkawinan, pewarisan, hubungan keluarga, etika berbusana, kepemimpinan, masuk kategori kedua, ajaran nondasar, sehingga lebih banyak bersifat ijtihadi.

Untuk itu, diperlukan pembacaan ulang dan upaya-upaya rekonstruksi atas hasil ijtihad atau penafsiran lama yang dinilai bias gender dan nilai-nilai patriarki.

Penafsiran baru teks-teks keislaman mendesak dilakukan untuk menemukan kembali pesan-pesan moral yang hakiki dan universal, seperti persamaan, persaudaraan, kebebasan, kesetaraan dan keadilan, termasuk di dalamnya kesetaraan keadilan gender.

Selama ini persoalan di atas lebih banyak dibincangkan ulama laki-laki, ulama perempuan nyaris belum pernah membincangkannya. Saatnya ulama perempuan membincangkannya.

Di samping pembacaan ulang penting disebutkan bahwa kesetaraan keadilan gender juga harus didukung instrumen-instrumen internasional dan nasional seperti dalam bidang perundang-undangan.

Harus diketahui, kesetaraan keadilan gender bukanlah kemauan orang perorang, kesepakatan publik, tetapi rakyat dari pelbagai negara yang dirumuskan dalam pelbagai dokumen penting.

Seperti Deklarasi Universal HAM 1947 yang diresmikan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Lalu Convention on Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang disepakati PBB.

CEDAW diberlakukan 3 September 1981. Sampai tahun 1998 sudah 97 negara yang menandatangani dan 161 meratifikasi. 41 negara yang menandatangani dan meratifikasi adalah negara muslim, termasuk Indonesia.

Instrumen Nasional

Dukungan terhadap kesetaraan keadilan gender tak hanya datang dari ajaran keagamaan dan instrumen internasional, tetapi juga oleh instrumen nasional. Jika kita lihat UUD negara kita, tidak ada pasal atau pembahasan yang mendiskriminasi laki-laki dan perempuan.

Di bawah UUD, Indonesia juga memiliki serangkaian peraturan yang mendukung kesetaraan laki-laki dan perempuan. CEDAW sudah menjadi UU sejak 1986. Kita juga memiliki UU PKDRT sejak 2003.

Berpijak pada argumen di atas, posisi ulama begitu kuat dalam merumuskan pendapat hukum dalam tradisi masyarakat muslim.

Otoritas fatwa akan selalu diserahkan kepada ulama karena merekalah yang dipandang memiliki kapasitas melakukan ijtihad. Produk intelektual ulama di bidang hukum telah dijadikan sebagai legitimasi oleh masyarakat dalam menyikapi hubungan antaragama di Indonesia.

Tak berlebihan jika organisasi massa Islam, seperti NU memiliki Bahtsul Masa'il dan Muhammadiyah memiliki Majelis Tarjih yang melahirkan pendapat hukum dalam persoalan-persoalan aktual. Kini ulama perempuan Indonesia hadir, dan akan ikut memberikan fatwa dalam hubungan antaragama.

Sumber: <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/menanti-fatwa-perempuan-ulama/>

KONSOLIDASI DAN PERLUASAN PERAN

Pressreader.com, 27 April 2017

Kongres Ulama Perempuan Indonesia memunculkan harapan hadirnya peran yang lebih strategis bagi mereka dalam berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan kongres menyadarkan kembali bahwa perempuan dalam Islam tidak hanya dapat berperan di sektor domestik rumah tangga.

Perempuan Islam, seperti telah ditulis dalam sejarah Indonesia, bisa memimpin pasukan saat melawan penjajah dan menjadi pahlawan nasional seperti ditunjukkan Cut Nyak Dhien. Di tengah situasi kebangsaan yang menonjolkan identitas keagamaan dan kecenderungan budaya yang patrilineal, penyelenggaraan kongres itu seperti sebuah oase.

Banyak yang bertanya, apa yang bisa diperbuat perempuan bagi bangsa dan negara kalaupun mereka menguasai secara fasih ilmu agama? Melihat masalah aktual yang dibahas, kongres ulama perempuan ini seolah ingin menjawab pertanyaan di atas. Apalagi mereka yakin bahwa selama ini persoalan itu telah banyak dibahas di antara mereka dan bahkan diselesaikan. Namun, selama ini jauh dari publikasi.

Ketua Tim Pengarah KUPI Badriyah Fayumi menyatakan, kongres bertujuan melakukan konsolidasi untuk makin menguatkan peran dan kiprah mereka di tengah masyarakat. Kongres membahas tiga isu utama yang biasa dihadapi perempuan dan anak-anak: perkawinan anak, kekerasan seksual, serta perusakan alam dalam konteks keadilan sosial, migrasi, dan radikalisme.

Dalam soal perkawinan anak, Indonesia berada di urutan kedua terbesar di Asia Tenggara setelah Kamboja. Kongres yang juga dihadiri sejumlah perempuan ulama dari beberapa negara dan perempuan aktivis ini akan mengeluarkan rekomendasi meliputi tingkat keluarga, masyarakat, tokoh agama, perempuan ulama, pemerintah, dan negara. "Masalah di negeri ini tak mungkin diselesaikan oleh hanya satu pihak," ujar Badriyah.

Kita menjunjung tinggi peran perempuan, baik di sektor domestik maupun publik, yang sangat menentukan masa depan negeri ini. Bukankah mereka yang pertama kali mendidik anak-anak kita sejak dalam kandungan! Dalam sejarah Islam, perempuanlah yang pertama kali beriman dan yang mati membela agamanya (syuhada). Ini menunjukkan betapa perempuan yang sering dianggap lemah dan kurang akal, kenyataannya lebih berani bersikap meski nyawa sebagai taruhannya.

Kita berharap kongres melahirkan rekomendasi yang aplikatif dalam menyelesaikan masalah berbangsa dan bernegara, seperti ditunjukkan perempuan ulama selama ini. Namun, peran itu harus semakin diperluas selaras dengan makin kompleksnya persoalan yang akan dihadapi masyarakat, baik di tingkat keluarga maupun negara.

Sumber: <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170427/281616715259140>

**PEREMPUAN AKTIVIS
DAN ULAMA DARI 17 NEGARA
BAHAS SOAL RADIKALISME**

Liputan6.com, 27 April 2017

Sejumlah ulama hingga aktivis perempuan dari Indonesia dan 16 negara lain di dunia, berkumpul membahas bersama isu aktual dan hangat yang menjadi tantangan kaum hawa. Pembahasan dilakukan dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).

Salah satu pembahasan yang menarik dalam kongres yang diadakan di Pondok Pesantren (Ponpes) Kebon Jambu Babakan Ciwaringin, Cirebon, itu adalah diskusi paralel bertema "Peran Perempuan Dalam Menghadapi Radikalisme Agama".

Perwakilan Asian Muslim Acton Network (AMAN) Indonesia, Dwi Rubiyanti Kholifah mengatakan, kehadiran Umi Khumairah yang merupakan istri teroris terpidana seumur hidup dalam diskusi tersebut, dapat dijadikan contoh penanganan radikalisme berlatar agama.

Menurutnya, pemerintah belum mampu berbuat sesuatu yang cukup signifikan terhadap istri para pelaku teroris.

"Bagaimana perasaan istri dari teroris yang mendapat stigmatisasi dan *bullying* serta perlakuan diskriminatif dari masyarakat dan tetangga itu harusnya diproteksi oleh pemerintah. Karena mereka juga warga negara dan memiliki hak," sebut dia.

Persoalan tersebut diyakini disebabkan karena pemisahan yang dinilai sudah melekat di tengah kekuatan radikalisme, sehingga membuat orang sulit untuk melepaskan diri.

Masih dalam konteks istri teroris, Dwi mengatakan, wajar apabila isteri tersangka teroris tidak diproteksi pemerintah, maka mereka akan dijauhi tetangga.

Jika sudah dijauhi, lanjut Dwi, otomatis istri teroris akan kembali kepada kelompok radikal yang sudah lama dikenalnya bersama suami. "Baliknya ke mana? Kelompok radikal lagi kan? Karena di sana sudah solid dan sudah *ready* terstruktur," sebut dia.

Dalam kelas diskusi yang diadakan 26 April 2017 itu, peserta kongres juga mengupas tentang radikalisme dalam konteks kebangsaan yang dianggap berada di level kritis.

Kondisi itu dinilai dari banyaknya suara bernada menentang NKRI yang terkonsolidasi dan sudah menempatkan diri.

Menurut dia, diskusi tersebut menjadi bagian dari wacana yang dibangun KUPI di mana ulama perempuan menyatakan posisi mereka terkait isu perempuan maupun isu kebangsaan.

"Kita juga sudah tahu ada hal lain, misalnya ada diskriminasi terhadap Syiah, Ahmadiyah, dan ini juga penting untuk dikaji dan disikapi di kalangan perempuan," ujar dia.

Ketua Yayasan Fahmina Cirebon Hussein Muhammad mengatakan, sebelum mengarah ke tindakan terorisme, ada beberapa persoalan penting yang perlu menjadi kajian dan pertimbangan, yakni fundamentalisme, konservatisme, radikalisme dan terorisme itu sendiri.

Empat hal itu menjadi penting dan posisi negara harus hadir menunjukkan kontribusi kepada masyarakat.

Hussein mengatakan bahwa semua persoalan perlu dibahas, namun tetap akan ada prioritas dari berbagai macam persoalan yang sangat kompleks.

"Ada 9 kelas diskusi paralel yang membahas isu berbeda dan hasil diskusi nanti akan dikeluarkan 3 isu besar saja yang menjadi keputusan fatwa, yaitu perkawinan anak perempuan dibawah usia 18 tahun, kekerasan seksual, dan kerusakan lingkungan," sebut Hussein.

Kendati demikian, persoalan radikalisme agama merupakan salah satu pokok bahasan yang sangat penting. Dalam persoalan radikalisme Islam, KUPI mencari jawaban melalui diskusi maupun musyawarah. "Kita sudah menjawab radikalisme bukan karakter Islam, agama kita tidak mengenal dan menolak radikalisme," sebut dia.

Di tempat terpisah, salah seorang isteri teroris asal Pati, Umi Khumairah, berharap keberadaan KUPI mampu menjelaskan Islam yang benar. Terutama peran seorang ulama perempuan dalam mengatasi berbagai persoalan di Indonesia.

"Ulama perempuan yang sudah merumuskan hasil kongres ini diharapkan mampu menunjukkan eksistensi diri dan membawa keterwakilan perempuan umumnya yang ada di Indonesia. Bisa lebih mengena kalau peran perempuan

benar-benar diakui dalam setiap permasalahan yang ada di Indonesia," sebut dia.

Dia mengakui hasil pembahasan dari diskusi tersebut perlu ada tindak lanjut kepada pemerintah, terutama dalam memproteksi para istri teroris untuk mengatasi stigma negatif dari masyarakat.

Sumber: <http://global.liputan6.com/read/2934051/perempuan-aktivis-dan-ulama-dari-17-negara-bahas-soal-radikalisme>

ISU RADIKALISME AGAMA PALING DIMINATI PESERTA KUPI

Fajarnews.com, Kamis, 27 April 2017

Memasuki hari kedua pelaksanaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), panitia menggelar seminar nasional tentang peran ulama perempuan dalam meneguhkan nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan, Rabu (26/4).

Seminar itu bertujuan penyamaan perspektif keulamaan perempuan dalam konteks ke Indonesiaan. Seminar juga membahas tentang peranan ulama perempuan dalam kehidupan sehari-hari di tingkat akar rumput.

Sebelum seminar dimulai dilakukan testimoni ulama perempuan asal Aceh, Umi Hanisah.

Dalam pemaparannya, Umi Hanisah menguraikan eksistensi, tantangan, peran dan kiprahnya di komunitas. Menurutnya, Aceh merupakan wilayah yang unik dan istimewa, karena sejak zaman prakemerdekaan banyak perempuan yang menjadi pimpinan dan ulama di tingkat komunitas.

Namun pascapenerapan otonomi daerah dan pemberlakuan berbagai peraturan daerah yang disebut Qonun Aceh, kiprah keulamaan perempuan sudah tidak terdengar lagi.

Ia mengkhawatirkan perempuan justru mendapatkan kriminalisasi dari penerapan qonun tersebut, atas nama Syariat Islam.

Selain membahas hal tersebut, seminar juga menarasikan proses dan metodologi kajian tafsir, hadis dan fikih yang berperspektif keadilan substantif bagi perempuan dan laki-laki.

Metodologi tersebut diharapkan menjadi terobosan baru dalam perumusan hukum Syariat Islam yang berkeadilan, dengan tidak menyalahkan kaum perempuan.

Untuk lebih mendalami materi yang telah diseminarkan, panitia menggelar sembilan diskusi panel yang dilaksanakan secara paralel di lokasi kongres, di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.

Sembilan tema yang diangkat dalam diskusi panel tersebut yakni, peluang dan tantangan pendidikan ulama perempuan di Indonesia, respon pesantren terhadap keulamaan perempuan, penghentian kekerasan seksual dalam perspektif ulama perempuan, perlindungan anak dari pernikahan dalam perspektif ulama perempuan, dan perlindungan buruh migran dalam perspektif ulama perempuan.

Selanjutnya, pembangunan berkeadilan berbasis desa dalam perspektif ulama perempuan, peran perempuan dalam menghadapi radikalisme agama meneguhkan nilai kebangsaan dan mewujudkan perdamaian dunia, peran dan tantangan serta strategi ulama perempuan dalam menjawab krisis dan konflik kemanusiaan, dan peran ulama perempuan dalam penyelesaian ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan.

Salah seorang panelis yang dihadirkan, KH. Husein Muhammad mengatakan, meski KUPI akan membahas banyak hal, namun ada isu-isu besar yang akan menjadi prioritas bahasan.

Ulama yang aktif dalam perjuangan perdamaian dan keadilan gender itu menuturkan, sedikitnya akan ada tiga rekomendasi yang dihasilkan dalam KUPI tersebut.

“Dari berbagai macam persoalan itu, besok (hari ini, red) akan dikeluarkan tiga isu besar yang menjadi fatwa dari sembilan isu yang dibahas yakni perkawinan anak di bawah umur kurang dari 18 tahun, kekerasan seksual dan perusakan lingkungan,” kata Kang Husein, panggilan akrabnya.

Pantauan [fajarnews.com](http://news.fajarnews.com), dari sembilan diskusi paralel, yang paling banyak mendapat perhatian peserta baik dari Indonesia maupun negara-negara sahabat, yakni tema peran perempuan dalam menghadapi radikalisme agama dan tema peran ulama perempuan dalam perlindungan buruh migran.

Sumber: <http://news.fajarnews.com/read/2017/04/27/15132/isu.radikalis.me.agama.paling.diminati.peserta.kupi>

KUPI KELUARKAN HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN

Mediaindonesia.com, 27 April 2017

KONGRES Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) mengeluarkan hasil musyawarah keagamaan. KUPI menjamin hasil musyawarah tersebut sesuai dengan metodologi ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KUPI yang pertama kali digelar di Indonesia, bahkan di dunia, dimulai dari 25 April hingga hari ini di Cirebon, Jawa Barat, telah mengeluarkan sejumlah hasil musyawarah keagamaan.

Hasil musyawarah keagamaan tersebut dibacakan dalam upacara penutupan oleh ulama perempuan dari Banjarmasin, Batam, dan Makassar.

Hasil musyawarah tersebut meliputi tiga, yaitu pernikahan usia anak, kekerasan seksual, serta kerusakan alam dalam konteks ketimpangan sosial.

Dalam konteks pernikahan usia anak, setiap orang berwenang wajib hukumnya untuk mencegah pernikahan anak. Baik itu orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Selanjutnya, korban pernikahan anak pun berhak untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagaimana hak anak-anak pada umumnya.

Dalam konteks pernikahan usia anak ini pula, KUPI merekomendasikan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama terkait umur minimal anak perempuan yang akan menikah. Dari sebelumnya 16 tahun dinaikkan menjadi 18 tahun.

Sedangkan bagi aparat yang berwenang juga diminta untuk tidak terlibat dalam pernikahan anak, tidak melegalkan pernikahan anak, serta membatasi isbat nikah atau dispensasi pernikahan anak.

Kementerian Informasi dan Komunikasi wajib untuk menutup konten yang mengandung pornografi yang bisa diakses oleh anak-anak. Juga disebutkan

agar anak korban perkawinan di usia muda agar tetap bisa bersekolah dan sekolah dilarang untuk menolaknya.

Bahkan, jika ada anak yang hamil di luar nikah, orangtua juga diminta untuk tidak memaksakan menikahkan anaknya seperti solusi yang selama ini dilakukan sebagian besar orangtua.

Sumber: <http://mediaindonesia.com/news/read/102474/kupi-keluarkan-hasil-musyawah-keagamaan/2017-04-27>

KUPI HASILKAN TIGA FATWA

RMOLJabar, 27 April 2017

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang digelar di Cirebon dari Selasa sampai Kamis (25-27/4) menghasilkan tiga fatwa, yakni tentang kekerasan seksual, pernikahan anak, dan kerusakan lingkungan.

Hal itu diungkapkan Ketua Panitia KUPI, Hj Badriyah Fayumi usai acara penutupan KUPI yang digelar di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamiy Cirebon, Kamis (26/4). Badriyah mengatakan, ketiga fatwa tersebut merupakan hasil dari proses musyawarah yang panjang sejumlah ulama perempuan yang ada di Indonesia.

"Kami menyebutkan dengan hasil musyawarah KUPI. Dengan pemikiran yang panjang dan dengan berbagai metodologi dan sudut pandang keagamaan. Dan, sebetulnya esensinya ya melalui proses pemikiran itu kita bisa sebut sebagai fatwa, tetapi istilahnya bisa macam-macam," Katanya.

Dikatakan Badriyah, hasil musyawarah pertama mengenai kekerasan seksual. Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik itu diluar nikah maupun sudah menikah hukumnya haram. KUPI pun mendorong agar pemerintah kedepan dengan regulasinya untuk mencegah kekerasan seksual.

Kemudian, sambungnya, Badriyah mengatakan, pencegahan terhadap pernikahan anak atau pernikahan dini yang menimbulkan kemudharatan hukumnya wajib. Dan, yang terakhir, sambungnya, mengenai kerusakan lingkungan dalam konteks ketimpangan sosial.

"Kita meminta agar negara menghentikan segala bentuk pembangunan yang menimbulkan kerusakan ekosistem dan sosial. Negara juga harus memberi sanksi tegas terhadap perusak lingkungan," ucap Ketua Pengurus Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (PPLKNU) itu.

Dikatakannya, negara harus memandang bahwa lingkungan merupakan bagian daripada unsur kehidupan. Sehingga, alam atau lingkungan bukanlah obyek yang harus dieksploitasi.

"Jadi kita menghasilkan ukhuwah islamiyah, wathaniyah, basyariyah, dan makhluqiyah. Kemudian, kita juga menghasilkan rekomendasi umum tentang penguatan keulamaan perempuan dalam menyikapi radikalisme," ungkap mantan Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu.

Dalam acara itu hadir pula Menteri Agama (menag) RI, Lukman Hakim Saefudin dan Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. [bon/ Sudirman Wamad]

Sumber: <http://m.rmoljabar.com/news.php?id=41715>

INI TIGA FATWA HASIL KONGRES ULAMA PEREMPUAN DI CIREBON

Suaraislam, 27 April 2017

Kongres Ulama Perempuan Indonesia diikuti oleh ratusan ulama, akademisi dan aktivis perempuan dari berbagai daerah dan negara. (Sumber: bbc.com)

Selama tiga hari, sejak Selasa 25 April hingga Kamis 27 April 2017, sejumlah ulama perempuan dari Indonesia dan 15 negara sahabat mengikuti Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon.

Ketua SC KUPI 2017 Badriyah Fayumi menjelaskan, selama tiga hari berlangsung kongres tersebut telah menghasilkan beberapa fatwa yang meliputi kondisi alam, kekerasan seksual, hingga pernikahan anak.

“Kami menyebutnya hasil musyawarah keagamaan KUPI. Sebetulnya esensinya semua pemikiran keagamaan itu bisa disebut fatwa,” ujar Badriyah, Kamis (27/4/2017) petang.

Fatwa pertama mengenai ‘Perusakan Lingkungan dalam Konteks Ketimpangan Sosial’ adalah hukum bagi pelaku perusakan alam atas nama pembangunan yang berakibat pada ketimpangan sosial ekonomi adalah haram secara mutlak. Namun pembangunan dimungkinkan dengan pemanfaatan dan pengelolaan alam demi kemaslahatan berlandaskan *maqasid syariah*.

Agama Islam pun telah mengatur dengan tegas mengenai larangan merusak alam dan memiliki perhatian besar dalam menjaga dan melestarikan alam. Tidak hanya itu, negara juga wajib melindungi alam dari segala kerusakan dan memberi sanksi tegas kepada pelaku perusakan baik individu atau korporasi.

Fatwa kedua adalah mengenai 'Kekerasan Seksual'. Dalam fatwa ini disebutkan kekerasan seksual dalam bentuk di luar atau dalam pernikahan adalah haram karena melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam Islam.

Disebutkan pula jika perkosaan tidak sama dengan perzinahan baik secara pengertian dan pembuktian hingga pada hukuman. Sehingga korban perkosaan tidak bisa dihukum, dikucilkan, dan direndahkan martabat kemanusiaannya. Sehingga korban perkosaan berhak mendapatkan pemulihan secara psikis, fisik, sosial, hingga kompensasi.

Negara dalam kasus kekerasan seksual wajib hadir untuk menjamin pemenuhan hak-hak warga negara, termasuk korban. Jika negara melakukan pengabaian, mempersulit, dan menyia-nyaiakan hak warga negara khususnya korban kekerasan seksual maka negara telah dzalim dan melanggar konstitusi. Tidak hanya itu, bahkan negara atau pihak berwenang melakukan kekerasan seksual maka sepatutnya dihukum lebih berat (taqlidu al uqubah).

Fatwa ketiga atau terakhir adalah mengenai "Pernikahan Anak". Fatwa tersebut menyebutkan agama mewajibkan pencegahan segala bentuk kemadharatan. Menurut fatwa tersebut pernikahan anak terbukti membawa kemadharatan sehingga wajib hukumnya mencegah.

Ada pun pihak yang mempunyai tanggung jawab melakukan pencegahan pernikahan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Bagi korban pernikahan anak tetap mendapatkan haknya mulai dari pendidikan, kesehatan, pengasuhan juga perlindungan.

Untuk itu KUPI merekomendasikan agar pemerintah mengubah UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan terkait dengan batas minimal seorang perempuan boleh menikah dari semula 16 tahun menjadi 18 tahun. Selain itu Kemenkominfo diharapkan mampu memberantas konten-konten pornografi yang berpotensi meningkatnya hubungan seksual di luar nikah atau hubungan seksual anak di bawah umur.

"Metodelogi, proses, dan substansinya (fatwa) bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah islam yang mempertemukan pandangan keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan," pungkas Badriyah.

Sumber: <http://www.suaraislam.co/ini-tiga-fatwa-hasil-kongres-ulama-perempuan-di-cirebon/>

KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) HASILKAN SEJUMLAH REKOMENDASI

Radarbangsa.com, 27 April 2017

Ulama perempuan yang tergabung dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) meminta pemerintah Indonesia mencegah dan menghapus perkawinan di bawah umur karena terbukti membawa keburukan dalam pernikahan. Penghapusan perkawinan di bawah umur masuk dalam rekomendasi KUPI yang digelar di Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Kamis 27 April 2017.

Selain itu, KUPI juga menyampaikan bahwa pencegahan dan penghapusan perkawinan pada usia anak dapat dilakukan antara lain dengan menaikkan batas usia minimal untuk menikah dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Bahkan, Menurut badan PBB yang menangani masalah anak, UNICEF, kategori anak-anak adalah mereka yang di bawah usia 18 tahun.

KUPI juga merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan peraturan yang memperketat pemberian dispensasi bagi anak yang akan menikah di bawah umur. Ketua Tim Pengarah KUPI Badriyah Fayumi mengatakan dalam musyawarah keagamaan ditemukan bahwa perkawinan usia anak banyak membawa kemudharatan (keburukan).

“Pernikahan anak menimbulkan kemudharatan. Wajib hukumnya bagi semua pihak untuk melakukan hal-hal yang bisa meminimalkan kemudharatan tersebut,” kata Badriyah seperti dikutip dari BBC.com.

Menanggapi rekomendasi KUPI, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan akan menindaklanjutinya. “Karena pemerintah juga punya hak untuk melakukan review, maka saya akan coba bawa rekomendasi kongres ini, diharapkan kongres ini bisa merumuskan rekomendasinya menjadi lebih teknis,” jelas Lukman dalam pidato penutupannya.

Selain mengeluarkan rekomendasi tentang perkawinan anak, kongres ulama perempuan juga menghasilkan musyawarah keagamaan dan rekomendasi mengenai kekerasan seksual dan perusakan alam.

“Kekerasan seksual dinyatakan bahwa kekerasan seksual di dalam dan di luar perkawinan itu hukumnya haram,” jelas Badriyah.

Kekerasan seksual menjadi penting dibahas karena seringkali tafsir agama digunakan sebagai pembenaran dalam kekerasan seksual terutama dalam rumah tangga. Selain itu, para ulama perempuan juga mengeluarkan rekomendasi agar negara menghentikan segala perusakan alam yang dapat menimbulkan ketimpangan sosial di masyarakat.

Rekomendasi kongres ulama ini akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait.(Rah)

Sumber: <https://www.radarbangsa.com/news/2690/kongres-ulama-perempuan-indonesia-kupi-hasilkan-sejumlah-rekomendasi>

ULAMA PEREMPUAN REKOMENDASIKAN PERNIKAHAN ANAK DIHAPUSKAN

Bbc.com, 27 April 2017

Penghapusan perkawinan di bawah umur masuk dalam rekomendasi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang digelar di Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Kamis (27/04).

KUPI juga menyampaikan bahwa pencegahan dan penghapusan perkawinan pada usia anak dapat dilakukan antara lain dengan menaikkan batas usia minimal untuk menikah dari 16 tahun menjadi 18 tahun.

Menurut badan PBB yang antara lain menangani masalah anak, UNICEF, kategori anak-anak adalah mereka yang di bawah usia 18 tahun.

Dalam kongres juga disampaikan 'fatwa' yang mewajibkan semua pihak untuk mencegah praktik perkawinan usia anak.

Ketua Tim Pengarah KUPI, Badriyah Fayumi mengatakan wajib hukumnya bagi semua pihak untuk melakukan hal-hal yang bisa meminimalkan kemudharatan tersebut.

"Kami melihat bahwa persoalan kawin anak ini ada faktor ekonomi, budaya, pandangan keagamaan juga, akses pendidikan, bukan semata-mata pandangan keagamaan, tapi pandangan keagamaan ini mendukung segala upaya untuk mencegah pernikahan anak ini yang membawa kemudharatan, karena faktanya memang membawa kemudharatan," jelas Badriyah.

Selain itu, KUPI juga merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan peraturan yang memperketat pemberian dispensasi bagi anak yang akan menikah di bawah umur.

Menanggapi rekomendasi KUPI, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan akan menindaklanjuti.

"Karena pemerintah juga punya hak untuk melakukan *review*, maka saya akan coba bawa rekomendasi kongres ini, diharapkan kongres ini bisa

merumuskan rekomendasinya menjadi lebih teknis," jelas Lukman dalam pidato di penutupan kongres ulama perempuan.

Dia mengatakan upaya uji materi UU Perkawinan ini ditolak karena menurut hakim Mahkamah Konstitusi perubahan itu merupakan kewenangan legislatif.

Pada Juni 2015, MK menolak uji materi UU Perkawinan terutama untuk menaikkan batas usia minimal untuk perempuan bisa menikah yaitu 16 tahun menjadi 18 tahun.

Dalam putusannya, hakim MK mengatakan tidak ada jaminan peningkatan batas usia menikah dari 16 tahun menjadi 18 tahun untuk perempuan, akan dapat mengurangi masalah perceraian, kesehatan serta masalah sosial.

Selain itu, MK juga menyebutkan ada kemungkinan di masa mendatang, batas minimal usia 18 tahun bagi perempuan untuk menikah bisa jadi bukanlah yang ideal.

Sumber: <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39731862>

**KONGRES ULAMA PEREMPUAN
USUL UMUR MINIMAL PEREMPUAN
NIKAH 18 TAHUN**

Detik.com, 27 April 2017

Selama tiga hari, sejak Selasa 25 April hingga Kamis 27 April 2017, sejumlah ulama perempuan dari Indonesia dan 15 negara sahabat mengikuti Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon.

Ketua SC KUPI 2017 Badriyah Fayumi menjelaskan, selama tiga hari berlangsung kongres tersebut telah menghasilkan beberapa fatwa yang meliputi kondisi alam, kekerasan seksual, hingga pernikahan anak.

"Kami menyebutnya hasil musyawarah keagamaan KUPI. Sebetulnya esensinya semua pemikiran keagamaan itu bisa disebut fatwa," ujar Badriyah, Kamis (27/4/2017) petang.

Fatwa pertama mengenai 'Perusakan Lingkungan dalam Konteks Ketimpangan Sosial' adalah hukum bagi pelaku perusakan alam atas nama pembangunan yang berakibat pada ketimpangan sosial ekonomi adalah haram secara mutlak. Namun pembangunan dimungkinkan dengan pemanfaatan dan pengelolaan alam demi kemaslahatan berlandaskan maqasid syariah.

Agama Islam pun telah mengatur dengan tegas mengenai larangan merusak alam dan memiliki perhatian besar dalam menjaga dan melestarikan alam. Tidak hanya itu, negara juga wajib melindungi alam dari segala kerusakan dan memberi sanksi tegas kepada pelaku perusakan baik individu atau korporasi.

Fatwa kedua adalah mengenai 'Kekerasan Seksual'. Dalam fatwa ini disebutkan kekerasan seksual dalam bentuk di luar atau dalam pernikahan adalah haram karena melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam Islam.

Disebutkan pula jika perkosaan tidak sama dengan perzinahan baik secara pengertian dan pembuktian hingga pada hukuman. Sehingga korban perkosaan tidak bisa dihukum, dikucilkan, dan direndahkan martabat kemanusiaannya. Sehingga korban perkosaan berhak mendapatkan pemulihan secara psikis, fisik, sosial, hingga kompensasi.

Negara dalam kasus kekerasan seksual wajib hadir untuk menjamin pemenuhan hak-hak warga negara, termasuk korban. Jika negara melakukan pengabaian, mempersulit, dan menyalahgunakan hak warga negara khususnya korban kekerasan seksual maka negara telah dzalim dan melanggar konstitusi. Tidak hanya itu, bahkan negara atau pihak berwenang melakukan kekerasan seksual maka sepatutnya dihukum lebih berat (taqlidu al uqubah).

Fatwa ketiga atau terakhir adalah mengenai 'Pernikahan Anak'. Fatwa tersebut menyebutkan agama mewajibkan pencegahan segala bentuk kemadharatan. Menurut fatwa tersebut pernikahan anak terbukti membawa kemadharatan sehingga wajib hukumnya mencegah.

Ada pun pihak yang mempunyai tanggung jawab melakukan pencegahan pernikahan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Bagi korban pernikahan anak tetap mendapatkan haknya mulai dari pendidikan, kesehatan, pengasuhan juga perlindungan.

Untuk itu KUPI merekomendasikan agar pemerintah mengubah UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan terkait dengan batas minimal seorang perempuan boleh menikah dari semula 16 tahun menjadi 18 tahun. Selain itu Kemenkominfo diharapkan mampu memberantas konten-konten pornografi yang berpotensi meningkatnya hubungan seksual di luar nikah atau hubungan seksual anak di bawah umur.

"Metodelogi, proses, dan substansinya (fatwa) bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah islam yang mempertemukan pandangan keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan," pungkas Badriyah. (ern/ern)

Sumber: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3486057/kongres-ulama-perempuan-usul-umur-minimal-perempuan-nikah-18-tahun>

KUPI DORONG ADANYA PERUBAHAN BATAS USIA MENIKAH PEREMPUAN

RMOLJabar, 27 April 2017

Satu diantara tiga fatwa yang dihasilkan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menjadi sorotan Menteri Agama (Menag), yakni terkait dengan pernikahan anak.

Dalam fatwa tersebut mendorong agar adanya adendum tentang syarat menikah untuk perempuan, dari usia 16 menjadi 18 tahun. Ketua Panitia Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Hj Badriyah Fayumi menjelaskan, permasalahan mengenai syarat pernikahan tersebut dipandang dari berbagai faktor. Yakni, faktor pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan.

"Jadi, ini bukan semata-mata soal pandangan keagamaan saja. Ini merupakan upaya yang mendukung pencegahan pernikahan anak yang banyak menimbulkan kemudharatan.

Mantan Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu berharap, fatwa soal usia ideal untuk perempuan yang menikah dapat menjadi pertimbangan pemerintah.

"Pencegahan perkawinan anak yang menimbulkan kemudharatan kita nyatakan hukumnya wajib dan semua pihak wajib melakukan segala hal yang mengarah kepada upaya minimalisasi kemudharatan tersebut," ujarnya.

Badriyah juga mengatakan, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan pernikahan anak, yakni orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, aparat, dan negara. KUPI juga mendorong agar negara membuat regulasi yang memikat terkait pencegahan pernikahan anak.

"Negara dan pemerintah harus mampu memastikan tak ada oknum pejabat atau aparat yang mendukung pemalsuan identitas, dengan tujuan memuluskan praktek pernikahan anak," tegasnya. (bon/Sudirman Wamad)

Sumber: <http://m.rmoljabar.com/news.php?id=41723>

MENTERI AGAMA AKAN MENUTUP KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA

Rappler.com, 27 April 2017

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2017 yang digelar sejak 25 April 2017 akan berakhir hari ini, Kamis 27 April 2017. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dijadwalkan menutup kongres yang digelar di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al Islamiy Babakan Ciwaring Cirebon.

Kongres yang baru pertama kalinya digelar di Indonesia dan dunia ini dihadiri lebih dari 500 peserta yang datang dari berbagai kalangan dan profesi. Peserta berasal dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan datang dari mancanegara, seperti Arab Saudi, Malaysia, Pakistan, dan India.

Di hari kedua KUPI yang berlangsung Rabu 26 April 2017, dibahas sejumlah isu-isu perempuan yang masih menjadi polemik saat ini. Ada sembilan topik yang didiskusikan secara paralel, antara lain Penghentian Kekerasan Seksual dalam Perspektif Ulama Perempuan, Metode Penelitian Perkawinan Anak dalam Perspektif Ulama Perempuan, dan Peran, Tantangan, dan Strategi Ulama Perempuan dalam Menyelesaikan Ketimpangan Sosial dan Kerusakan Lingkungan.

Sejumlah ulama perempuan dan pakar di bidangnya hadir untuk memberikan pemikirannya dalam diskusi tersebut, seperti Prof. Kathryn Robinson, peneliti isu perempuan di Indonesia dari Australia, Siti Maemunah dari Sayogyo Institute Bogor, dan Mia Siscawati, Direktur Pascasarjana Kajian Wanita Universitas Indonesia. Selain ulama perempuan, ulama laki-laki juga turut berkontribusi menyumbangkan pemikirannya, antara lain Kyai Mukti Ali, Gus Jamaluddin Muhammad, Riland Gunawan, dan Ahmad Hilmi.

Hasil diskusi akan dimusyawarahkan pada Kamis pagi ini. Musyawarah akan menghasilkan keputusan dalam bentuk fatwa keagamaan, manifesto kongres, dan rekomendasi kongres yang akan dibacakan saat penutupan nanti.

—**Rappler.com**

Sumber: <http://www.rappler.com/indonesia/berita/168097-menteri-agama-kongres-ulama-perempuan>

MENAG TUTUP KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA 2017

Mediaindonesia.com, 27 April 2017

MENTERI Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menutup Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2017 yang berlangsung di Pesantren Pondok Jambu Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat, 27 April 2017.

Dalam sambutannya, Menag Lukman merasa kongres ini luar biasa tidak hanya substansi yang dikaji, tetapi juga prosesnya.

"Karena ini sepenuhnya merupakan inisiatif masyarakat dari kaum perempuan. Lalu mereka berupaya untuk membuat satu kongres (ulama perempuan) pertama di dunia, di Cirebon ini," kata Lukman dalam keterangan resmi, Kamis (27/4).

Menurut Menag, dari kongres ini ia mencatat 3 hal makna strategisnya. Pertama, kongres ini berhasil memperjuangkan keadilan dalam relasi laki-laki dan perempuan, karena akan memiliki tingkat urgensi yang cukup tinggi. Seringkali ayat-ayat suci, karena pemahaman yang terbatas, langsung maupun tidak langsung mempengaruhi aspek (keadilan gender) ini.

"Kedua, kongres ini mampu melakukan tidak hanya pengakuan tetapi juga revitalisasi peran ulama perempuan," tuturnya.

Ketiga, lanjut Lukman, kongres berhasil meneguhkan dan menegaskan bahwa moderasi Islam harus senantiasa dikedepankan. Islam yang tidak menyudutkan posisi perempuan.

"Dan, sekali lagi, isu ini kini semakin relevan, sehingga (KUPI) berdampak pada kemaslahatan bersama untuk peradaban dunia, di mana Islam dapat memberikan kontribusi bagi peradaban dunia," tambahnya.

Menag Lukman pun memberikan respons mengenai rekomendasi KUPI mengenai regulasi UU Perkawinan. Judicial Review tentang batasan usia menikah dari 16 tahun menjadi 18 ditolak karena menurut para hakim ini

adalah kewenangan legislatif. Mereka (para hakim) khawatir ketika ada kebutuhan meningkatkan usia, karena sudah masuk judicial review maka tidak bisa dinaikkan lagi.

"Karena pemerintah juga punya hak untuk melakukan review, saya akan coba bawa rekomendasi kongres ini (kepada pemerintah). Diharapkan kongres ini bisa merumuskan rekomendasinya menjadi lebih teknis," tuturnya.

Sumber: <http://mediaindonesia.com/news/read/102475/menag-tutup-kongres-ulama-perempuan-indonesia-2017/2017-04-27>,

MENAG TUTUP KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA

Republika.co.id, 27 April 2017

Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, menutup secara resmi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al Islamy, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Kamis (27/4) sore. Kegiatan itu menghasilkan sejumlah hasil musyawarah keagamaan maupun penyampaian rekomendasi dari para ulama perempuan terhadap sejumlah masalah.

"Dengan mengucapkan hamdallah, Alhamdulillahirobbilalamin, kongres ini saya tutup secara resmi," tutur Lukman.

Lukman pun memberikan apresiasi yang besar terhadap terselenggaranya KUPI. Dia menilai, kongres ulama perempuan yang pertama kali di Indonesia dan dunia tersebut sangat luar biasa.

Lukman menilai, kongres itu tak hanya luar biasa dari isu-isu yang dibahasnya saja, namun juga dari rekomendasi yang dihasilkan. Termasuk juga proses hingga berlangsungnya KUPI.

"Sebagai Menag, saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator, pemrakarsa, panitia dan seluruh peserta yang menghasilkan rumusan yang mudah-mudahan meningkatkan perempuan dan peradaban Indonesia dan dunia," kata Lukman.

Lukman pun mencatat, kongres itu telah berhasil memperjuangkan keadilan mengenai relasi hubungan laki-laki dan perempuan. Dia menilai, hal itu adalah isu yang semakin memiliki urgensi dan tingkat relevansi yang tinggi.

Tak hanya itu, kongres tersebut telah mampu menghasilkan recognisi dan revitalisasi peran ulama perempuan. Para ulama perempuan yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia juga mampu membangun jaringan yang lebih luas.

"Kongres ini juga telah berhasil meneguhkan dan menegaskan bahwa moderasi Islam harus senantiasa dikedepankan. Islam sebagai rahmatan lil alamin, yang moderat, tidak menyudutkan posisi perempuan," tegas Lukman.

Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, yang juga hadir dalam acara itu mengaku bangga dan mengapresiasi KUPI. Dia berharap, maklumat dan rekomendasi yang dihasilkan KUPI dapat diimplementasikan oleh pemerintah dan disukseskan oleh ulama perempuan dan santri.

"Hari ini statement (rekomendasi KUPI) sangat menyejukkan hati karena akan melahirkan anak bangsa yang luar biasa, yang akan menyelamatkan kita dari masalah saat ini," kata Hemas.

Hemas menambahkan, kongres itu sudah menghasilkan hal-hal yang muncul dari partisipasi yang cukup baik untuk keindonesiaan, kebangsaan dan keislaman. 'Acara ini memberikan gema yang besar untuk bangsa ini di mana ulama perempuan telah membuktikan tekad yang luar biasa," tutur Hemas.

Sekretaris Umum Komite Pelaksana KUPI, Ninik Rahayu, mengungkapkan, kongres yang dimulai sejak 25 - 27 April 2017 itu berjalan dengan tumaninah. "Dalam kongres ini tidak ada yang marah-marah apalagi sampai lempar-lempar kursi," tegas Ninik.

Ninik menjelaskan, kongres itu diawali dengan seminar internasional yang menghadirkan pembicara dari Indonesia dan sejumlah negara. Selain itu, adapula seminar nasional yang menjadi ajang perjumpaan ulama perempuan dari berbagai daerah di Indonesia.

"Dalam seminar itu terjadi dialog hangat dan mencerahkan," ujar Ninik. Dalam KUPI, dihasilkan musyawarah keagamaan serta pemberian rekomendasi yang menyangkut tiga masalah. Yakni pernikahan anak, kerusakan lingkungan dan kekerasan seksual. Selain itu, adapula rekomendasi KUPI terhadap berbagai hal.

Ninik berharap, KUPI tidak berhenti pada pertemuan di antara ulama perempuan semata. Namun, seluruh peserta KUPI berharap agar hasil yang dirumuskan dapat diperjuangkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terkait.

Ninik menambahkan, pelaksanaan KUPI mendapat sambutan luas dari berbagai pihak. Hal itu di antaranya terlihat dari banyaknya calon peserta yang mendaftar hingga mencapai 1.275 orang. Namun, akibat keterbatasan sarana, calon peserta yang bisa mengikuti kongres yang dilaksanakan pertama kali di Indonesia dan dunia itu hanya 574 orang peserta dan 185 orang pengamat.

Selain dari Indonesia, kegiatan itu juga diikuti para ulama perempuan dari 15 negara lainnya dari seluruh benua. Adapun ulama perempuan dunia yang hadir dalam kongres itu di antaranya, Mossarat Qadeem (Pakistan), Zainah Anwar (Malaysia), Hatoun Al-Fasi (Saudi Arabia), Sureya Roble-Hersi (Kenya), Fatima Akilu (Nigeria), dan Roya Rahmani (the Ambassador of Afghanistan in Indonesia).

Sumber: <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/04/27/op2hv8396-menag-tutup-kongres-ulama-perempuan-indonesia>

**MENTERI AGAMA
TUTUP KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA
DI CIREBON**

Detik.com, 27 April 2017

Rangkaian acara Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2017 yang digelar sejak Selasa 25 April lalu berakhir di Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, pada hari ini Jumat (27/4/2017) petang.

Acara resmi ditutup oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Wakil Ketua DPD RI. Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Sebelum ditutup, sejumlah ulama perempuan naik ke atas panggung untuk menyampaikan hasil kongres yang beberapa di antaranya menyangkut soal pernikahan, kesetaraan, hingga isu lingkungan.

Dalam pidatonya, Kanjeng Ratu Hemas berharap Kementerian Agama (Kemenag) bisa menyerap dan mengimplementasikan hasil kongres.

"Rekomendasi (KUPI) ini sangat menyejukkan hati karena akan melahirkan anak bangsa luar biasa yang akan menyelamatkan kita dari masalah saat ini," sebut Hemas.

KUPI, kata Hemas, sudah berjalan sangat baik hingga diakhiri dengan sebuah rekomendasi bukan hanya menyangkut keislaman tapi juga berkaitan dengan kondisi kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia.

"Acara ini memberikan gema yang besar untuk bangsa ini, di mana ulama perempuan telah membuktikan tekad yang luar biasa," ucapnya.

Sementara itu Menteri Lukman menilai ada tiga makna strategis yang didapat dari KUPI. Pertama adalah kongres yang diikuti oleh beberapa ulama perempuan di Indonesia dan dunia itu telah berhasil memperjuangkan keadilan gender.

Kedua, KUPI tidak hanya mampu menunjukkan eksistensi dan pengukuhan ulama perempuan tapi juga berhasil merevitalisasi peran ulama perempuan di Indonesia.

"Terakhir, KUPI berhasil meneguhkan dan menegaskan bahwa moderasi Islam harus senantiasa dikedepankan. Islam yang tidak menyudutkan posisi perempuan," katanya.

Usai acara Menteri Lukman, Ratu Hemas, dan para ulama perempuan melepas sejumlah burung merpati sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan. Acara pun diakhiri dengan pemberian bibit pohon sebagai salah satu ajaran Nabi Muhammad SAW yang selalu menanam pohon dan tidak menebang pohon.

Seperti diketahui KUPI berlangsung sejak Selasa di Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Dalam acara yang baru pertama kali digelar di Indonesia bahkan dunia itu turut hadir sejumlah ulama se-Nusantara dan 15 negara sahabat seperti Pakistan, Malaysia, Saudi Arabia, Kenya, dan Nigeria.

Sumber: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3485968/menteri-agama-tutup-kongres-ulama-perempuan-indonesia-di-cirebon>

**TUTUP KUPI,
MENAG SEBUT TIGA HAL STRATEGIS
KONGRES ULAMA PEREMPUAN**

Kemenag.go.id, 27 April 2017

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menutup Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Kongres yang kali pertama digelar di dunia ini berlangsung dari 25-27 April 2017 di Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin, Cirebon.

"Sejujurnya saya merasa kongres ini luar biasa. Tidak hanya karena substansi yang dikaji, hasil dan rekomendasi yang dilahirkan, tapi karena juga prosesnya yang sepenuhnya berasal dari inisiatif kaum perempuan," terang Menag di Cirebon, Kamis (27/04).

Menurutnya, ada tiga makna strategis dari KUPI, yaitu terkait relasi, revitalisasi, dan moderasi. Makna pertama, kongres telah berhasil memperjuangkan keadilan melalui kesadaran peran dan relasi hubungan laki-laki dan perempuan. Menag menilai isu relasi gender saat ini dan mendatang akan semakin urgen dan relevan.

"Kongres ini memiliki peran penting agar keadilan relasi terus diperjuangkan," tegasnya disambut tepuk tangan hadirin.

Kedua, lanjut Menag, kongres telah merekognisi dan merevitalisasi peran ulama perempuan yang sudah berlangsung bahkan sejak zaman Siti Aisyah, istri Rasulullah, hingga tokoh perempuan Indonesia. "Selain rekognisi dan revitalisasi, yang tidak kalah penting adalah membangun jaringan ulama perempuan," ujarnya.

Makna ketiga, menurut Menag kongres telah berhasil meneguhkan dan menegaskan bahwa moderasi Islam harus senantiasa dikedepankan. Kata Menag, Islam yang moderat, rahmatan lil alamin, tidak menyudutkan posisi kedudukan perempuan, dan menebarkan kemaslahatan bagi sesama harus terus dikembangkan.

"Isu ini sangat relevan dan perempuan telah mengambil peran strategis melalui kongres ini dengan menghadirkan isu moderasi Islam sehingga bisa berkontribusi bagi pembangunan peradaban dunia," ujarnya.

Sebelumnya, sekretaris panitia Ninik Rahayu melaporkan bahwa ide penyelenggaraan kongres sudah dibahas sejak lama. KUPI pada akhirnya menjadi oase ulama perempuan tentang pentingnya peran perempuan dalam meneguhkan nilai Keislaman, Kebangsaan, dan Kemanusiaan.

Menurut Ninik, dalam tiga hari penyelenggaraan, KUPI telah membahas dan menghasilkan rekomendasi terkait tiga isu besar, yaitu kekerasan seksual, perkawinan usia anak, serta kerusakan lingkungan.

KUPI diikuti oleh 574 peserta dari 1.275 yang mendaftar. Selain itu, KUPI juga dihadiri 185 pengawas. KUPI kali pertama ini mengangkat tema 'Peran Ulama Perempuan dalam Meneguhkan nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan.'

Tampak hadir dalam penutupan sejumlah pengasuh pesantren Babakan Ciwaringin, Nyai Hj Masriyah selaku tuan rumah, Kakanwil Kemenag Jabar, Seditjen Pendidikan Islam, Wakil Ketua DPD RI. Seremonial penutupan diawali dengan tawassul atau pengiriman hadiah pembacaan Surat Al Fatihah yang dipandu Nyai Hj. Masturah Hanna.

Sumber: https://googleweblight.com/?lite_url=https://www.kemenag.go.id/berita/495849/tutup-kupi-menag-sebut-tiga-hal-strategis-kongres-ulama-perempuan&ei=NFMtk5Af&lc=id-ID&s=1&m=342&host=www.google.co.id&ts=1493297440&sig=AJsQQ1BsbLOk8RswenfrYsTpcxqdpnvxMA

MENAG HARI INI RESMIKAN MASJID MAN 2 CIREBON DAN TUTUP KUPI

Kemenag.go.id, 27 April 2017

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dijadwalkan hari ini, Kamis (27/04), meresmikan Masjid An Nur MAN 2 Cirebon. Setelah itu, Menag akan menutup Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin.

Kepala MAN 2 Cirebon Muhaimin mengatakan bahwa peresmian masjid An Nur oleh Menag dijadwalkan akan dilakukan pada jam 10.00 WIB.

"Ini masjid baru yang dibangun atas prakarsa alumni sejak tahun 2014," ujarnya di Cirebon, Kamis (27/04).

Menurutnya, masjid dua lantai ini dibangun dengan dana Rp3,3 miliar yang bersumber dari donasi wali murid, alumni, dan masyarakat. Luas masing-masing lantai masjid ini sekitar 510 meter persegi.

"Lantai satu untuk koperasi siswa, kantor sekretariat alumni, kantor dakwah siswa, dan tempat wudlu. Lantai dua untuk tempat salat dengan kapasitas 900 orang," kata Muhaimin.

Masjid An Nur, lanjut Muhaimin, digunakan untuk tempat praktik ibadah, Tahfidzul Qur'an, dan program shalat dluha bagi siswa, serta tempat kajian keagamaan bagi guru.

Sejak satu tahun terakhir, MAN 2 Cirebon memiliki program menghafal Al Qur'an bagi siswa yang mengambil jurusan keagamaan. Setiap hari pada jam pertama (07.00 - 07.45), para siswa secara rutin menghafal 8-9 ayat. Targetnya, saat lulus, mereka sudah menghafal 5 - 6 juz.

MAN 2 Cirebon saat ini memiliki 1790 siswa yang terbagi dalam 41 kelas. Pada istirahat jam pertama, mereka diminta untuk melakukan shalat Dhuha di Masjid An Nur.

Program lainnya adalah kajian Ramadhan bagi para guru. Selama bulan puasa, sementara para siswa sedang membaca dan menghafal Al Qur'an pada jam pertama, para guru melakukan kajian tematik. Setiap guru secara bergilir diberi kesempatan menyajikan satu topik kajian untuk dibahas bersama.

"Selama ini, kajian dilakukan di aula. Ke depan akan kami pindah ke masjid," terang Muhaimin.

"Ke depan, kami berharap masjid ini bisa menjadi pusat kajian Islam di seluruh pesantren Babakan yang lebih dari 50 pesantren," tambahnya.

Adapun penutupan KUPI, dijadwalkan akan berlangsung jam 2 siang nanti. KUPI berlangsung di Pesantren Kebon Jambu sejak 25 April lalu. Kongres ini membahas sejumlah isu, antara lain: tantangan dan peluang pendidikan keluamaan perempuan di Indonesia, dan penghentian kekerasan seksual dalam perspektif ulama perempuan.

Sumber: <https://www.kemenag.go.id/berita/495310/menag-hari-ini-resmikan-masjid-man-2-cirebon-dan-tutup-kupi>

INI TANGGAPAN MENAG SOAL REKOMENDASI KUPI

Republika.co.id, 27 April 2017

Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin menyambut positif rekomendasi yang disampaikan para ulama perempuan dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) mengenai berbagai isu. Dia pun memberikan respons terhadap sejumlah rekomendasi tersebut.

Adapun rekomendasi yang diresponnya itu menyangkut regulasi UU Perkawinan. Dia menyatakan, *judicial review* tentang batasan usia minimal untuk menikah dari 16 tahun menjadi 18 tahun ditolak Mahkamah Konstitusi. Dia menjelaskan, berdasarkan penjelasan para hakim, hal itu adalah kewenangan legislatif dan bukan yudikatif.

"Mereka (para hakim) khawatir, karena sudah masuk *judicial review*, maka ketika ada kebutuhan meningkatkan usia (menikah), nanti tidak bisa dinaikkan lagi," kata Lukman, saat menutup KUPI di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al Islamy, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Kamis (27/4).

Lukman menyatakan, karena pemerintah juga punya hak untuk melakukan *review*, maka dirinya akan secepatnya berkomunikasi dengan menteri terkait tentang hal tersebut. Dia pun akan membawa rekomendasi KUPI itu sehingga KUPI diminta bisa merumuskan rekomendasinya menjadi lebih teknis.

Sementara itu, terkait rekomendasi Ma'had Ali untuk perempuan, Lukman menegaskan, Kemenag membuka diri untuk membuka Ma'had Ali khusus perempuan guna mencetak lebih banyak ulama perempuan. Saat ini, ada 13 Ma'had Ali yang tersebar di berbagai daerah.

"Kami akan mempersiapkan kurikulum dan segala sesuatu yang terkait ma'had ali untuk memperbanyak ulama perempuan," tegas Lukman.

Seperti diketahui, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang berlangsung di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al Islamy, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, 25 - 27 April 2017, telah melahirkan hasil musyawarah dan

rekomendasi terkait tiga isu. Yakni pernikahan anak, kerusakan lingkungan dan kekerasan seksual.

Selain itu, dalam kesempatan itu juga lahir rekomendasi umum KUPI mengenai berbagai isu sosial. Yakni pendidikan keulamaan perempuan di Indonesia, respon pesantren terhadap keulamaan perempuan, dan penghentian kekerasan seksual. Selain itu, perlindungan anak dari pernikahan anak, perlindungan buruh migran, pembangunan berkeadilan berbasis desa, peran perempuan dalam menghadapi radikalisme agama, peran dan strategi ulama perempuan merespon krisis dan konflik kemanusiaan serta peran ulama dalam penyelesaian ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan. (Lilis Handayani)

Sumber: <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/04/27/op2iud396-ini-tanggapan-menag-soal-rekomendasi-kupi>

UNICEF SAMBUT REKOMENDASI ULAMA PEREMPUAN UNTUK MENGHINDARI PERKAWINAN USIA ANAK

Unicef.org, 28 April 2017

Kongres mendesak usia minimum perkawinan anak perempuan dinaikkan dari 16 ke 18

UNICEF menyambut rekomendasi yang dikeluarkan Kongres Ulama Perempuan Indonesia untuk mengakhiri perkawinan usia anak dan menaikkan batas minimal seorang perempuan boleh menikah dari 16 ke 18 tahun.

Kongres ulama perempuan pertama di Indonesia yang bertempat di Cirebon, Jawa Barat, itu mendesak diubahnya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, yang menyatakan perempuan boleh dinikahi jika telah berusia 16 tahun. Rekomendasi itu menyerukan agar orang tua, pendidik, masyarakat dan pemerintah berbagi tanggung jawab untuk menghentikan praktik “riskan” perkawinan usia anak, karena membatasi pendidikan, kesehatan, peluang pendapatan dan keselamatan remaja perempuan. Oleh karena itu, mencegah anak-anak perempuan menikah sebelum tumbuh dewasa harus menjadi sesuatu yang “bersifat wajib.”

Undang-Undang Perkawinan menentukan batas usia minimal pernikahan adalah 21 tahun. Namun, dengan izin orang tua, anak lelaki diperbolehkan menikah di usia 19 tahun, sedangkan anak perempuan dapat menikah di umur 16. Orang tua bahkan dapat meminta keringanan dari pengadilan agama atau pengadilan negeri agar anak perempuan mereka bisa menikah lebih awal, tanpa batas usia minimal.

“Ini adalah momen yang sangat penting bagi upaya mengakhiri perkawinan usia anak di Indonesia, dimana rata-rata lebih dari 3.500 anak perempuan dikawinkan setiap hari,” kata Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia Gunilla Olsson. “Anak perempuan yang menikah dibawah usia 18 menghadapi berbagai risiko yang berbahaya bagi kesehatan mereka, karena kehamilan dini.

Dan sebagian besar dari mereka putus sekolah. Anak perempuan yang sehat dan berpendidikan adalah dasar untuk mencapai masyarakat makmur.”

Sekitar 1 dari 4 perkawinan melibatkan pengantin anak. Menurut data termutakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS), 1.348.886 anak perempuan menikah sebelum usia 18 pada tahun 2012. Dari jumlah tersebut, 292.663 anak perempuan menikah sebelum usia 16 dan 110.198 sebelum usia 15. Undang-Undang Perkawinan 1974 bertentangan dengan Undang-Undang Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang melarang perkawinan dibawah usia 18 tahun.

Pengantin anak memiliki kecenderungan tidak menyelesaikan pendidikan menengah enam kali lebih besar dibandingkan mereka yang menikah di usia kemudian, membatasi peluang karier dan keterampilan mereka serta meningkatkan risiko terhadap kekerasan rumah tangga dan perlakuan yang salah. Memastikan anak perempuan dapat menyelesaikan pendidikan 12 tahun telah terbukti efektif untuk menunda perkawinan.

Di penghujung kongres, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan akan membawa rekomendasi para ulama untuk menaikkan batas usia perkawinan dari 16 ke 18 ke Pemerintah.

Ibu Gunilla menyambut hangat dan mengatakan reformasi legal sangat vital untuk mengakhiri praktik ini. “Ini merupakan konfirmasi bahwa Indonesia memimpin implementasi agenda 2030,” ujarnya.

Indonesia berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030, yang salah satu targetnya adalah SDG 5.3 untuk menghapus semua praktik yang riskan bagi anak perempuan dan perempuan dewasa, termasuk perkawinan usia anak. Indonesia akan mempresentasikan kemajuan SDGs pada Forum Tingkat Tinggi PBB 2017 di New York pada bulan Juli.

“Dukungan dari pemuka agama sangat penting untuk mencapai target-target itu. UNICEF menyambut undangan untuk membahas hal ini lebih lanjut. Ketika seorang anak perempuan diberdayakan, semua orang memperoleh manfaatnya.” ungkap Ibu Gunilla.

Sumber: https://www.unicef.org/indonesia/id/media_26375.html

RESMI DITUTUP, INI REKOMENDASI KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA 2017

Rappler.com, 28 April 2017

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2017 menghasilkan sebuah Ikrar Keulamaan Perempuan yang menegaskan kesetaraan antara ulama perempuan dan lelaki. Ikrar itu dibacakan oleh perwakilan ulama perempuan saat penutupan KUPI 2017 yang berlangsung di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al Islamiy, Babakan Ciwaringin Cirebon, Kamis 27 April.

“Kami dengan keyakinan sepenuh hati menyatakan bahwa: Perempuan adalah manusia yang memiliki seluruh potensi kemanusiaan sebagaimana laki-laki melalui akal budi dan jiwa raga. Semua ini adalah anugerah Allah SWT yang diberikan kepada setiap manusia yang tidak boleh dikurangi oleh siapa pun atas nama apa pun,” demikian kutipan dari ikrar tersebut.

Dalam ikrar yang dibacakan oleh perwakilan ulama perempuan di hadapan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, dan ratusan peserta KUPI itu, dinyatakan pula pengakuan terhadap eksistensi ulama perempuan yang telah hadir sejak masa Rasulullah SAW, namun keberadaan dan perannya terpinggirkan oleh sejarah yang dibangun secara sepihak selama berabad-abad.

“Dan eksistensi ulama perempuan juga kurang teraktualisasikan karena faktor budaya dan situasi sosial politik yang menghambatnya,” ujar Dewan Pengarah KUPI 2017, Badriyah Fayumi saat diwawancara menjelang acara Penutupan KUPI 2017, Kamis.

Ikrar tersebut, menurut Badriyah, merupakan rekognisi eksistensi ulama perempuan, baik dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Karena seperti halnya ulama lelaki, ulama perempuan juga memiliki hak dan kewajiban yang sama.

“Sebagaimana ulama laki-laki, ulama perempuan bertanggung jawab melaksanakan misi kenabian untuk menghapus segala bentuk kezaliman

sesama makhluk atas dasar apapun, termasuk agama, ras, bangsa, golongan, dan jenis kelamin. Sebagai pengemban tanggung jawab ini, ulama perempuan berhak menafsirkan teks-teks Islam, melahirkan dan menyebarkan pandangan-pandangan keagamaan yang relevan,” demikian kutipan ikrar tersebut.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memuji terselenggaranya kongres ulama perempuan yang pertama di dunia ini. Lukman mencatat ada tiga makna strategis dari pelaksanaan kongres yang diikuti lebih dari 500 peserta ini.

Pertama, kata Lukman, kongres ini berhasil memperjuangkan keadilan melalui kesadaran peran dan relasi laki-laki dan perempuan. Isu ini, menurut dia, ke depannya akan semakin memiliki relevansi dan urgensi yang semakin tinggi dengan memperjuangkan keadilan melalui kesadaran peran dan relasi perempuan dan laki-laki.

“Terkadang bahkan seringkali, ayat-ayat suci karena pemahaman kita yang terbatas langsung maupun tidak langsung, ikut mempengaruhi aspek (keadilan gender) ini. Karenanya, kongres ini memiliki peran yang sangat penting, untuk bagaimana keadilan relasi mesti senantiasa diperjuangkan,” ujar Lukman ketika memberi sambutan.

Kedua, lanjut Lukman, kongres ini telah mampu melakukan tidak hanya pengakuan tetapi juga revitalisasi peran ulama perempuan sejak zaman Siti Aisyah hingga kini.

Makna yang *ketiga*, Lukman mengatakan, KUPI berhasil meneguhkan dan menegaskan bahwa moderasi Islam harus senantiasa dikedepankan, yakni Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin, dan Islam yang tidak menyudutkan posisi perempuan.

KUPI 2017 adalah kongres pertama yang dihadiri lebih dari 500 orang yang tidak hanya dari Indonesia saja, tetapi juga 15 negara lainnya dari seluruh benua. Selain ulama perempuan dalam negeri, hadir pula ulama perempuan dunia, di antaranya Mossarat Qadeem (Pakistan), Zainah Anwar (Malaysia), Hatoon Al-Fasi (Arab Saudi), Sureya Roble-Hersi (Kenya), Fatima Akilu (Nigeria), dan Roya Rahmani (the Ambassador of Afghanistan in Indonesia). Kongres ini digelar selama tiga hari pada 25 hingga 27 April. – (Yuli Saputra)

Sumber: <http://www.rappler.com/indonesia/berita/168188-rekomendasi-kongres-ulama-perempuan-indonesia-2017>

INI CATATAN MENTERI LUKMAN HAKIM SOAL KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA

Radarcirebon.com, 28 April 2017

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Ponpes Kebon Jambu Al Islamy, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, ditutup Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Mewakili pemerintah, Lukman menyatakan apresiasinya terhadap gelaran KUPI.

“Saya merasa kongres ini luar biasa tidak hanya substansi yang dikaji, tetapi juga prosesnya. Karena ini sepenuhnya merupakan inisiatif masyarakat dari kaum perempuan. Lalu mereka berupaya untuk membuat satu kongres (ulama perempuan) pertama di dunia, di Cirebon ini,” tutur Lukman.

Setidaknya Lukman mencatat tiga makna strategis KUPI. Pertama, menurut Lukman, KUPI berhasil memperjuangkan keadilan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Karena akan memiliki tingkat urgensi yang cukup tinggi.

“Seringkali ayat-ayat suci, karena pemahaman yang terbatas, langsung maupun tidak langsung memengaruhi aspek (keadilan gender) ini,” kata Lukman.

Kedua, tidak hanya pengakuan tetapi KUPI juga mampu melakukan revitalisasi peran ulama perempuan. Ketiga, KUPI berhasil meneguhkan dan menegaskan bahwa moderasi Islam harus senantiasa dikedepankan. Islam yang tidak menyudutkan posisi perempuan.

“Dan, sekali lagi, isu ini kini semakin relevan. Sehingga (KUPI) berdampak pada kemaslahatan bersama untuk peradaban, di mana Islam dapat memberikan kontribusi bagi peradaban dunia,” ujar Lukman.

KUPI 2017 merupakan kongres pertama yang mendapatkan perhatian lebih. Peserta yang hadir lebih dari seribu orang.

Selain itu peserta yang datang tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari 15 negara lainnya. Di antaranya Mossarat Qadeem (Pakistan), Zainah Anwar (Malaysia).

Kemudian Hatoon Al-Fasi (Saudi Arabia), Sureya Roble-Hersi (Kenya), Fatima Akilu (Nigeria). Dan, Roya Rahmani (the Ambassador of Afghanistan in Indonesia). **(cecep)**

Sumber: <https://www.radarcirebon.com/ini-catatan-menteri-lukman-hakim-soal-kongres-ulama-perempuan-indonesia.html>

PEREMPUAN ULAMA PUNYA PERAN BESAR

KOMPAS, 28 April 2017

Kongres Ulama Perempuan Indonesia di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Ciwaringin, Cirebon, 25-27 April 2017, membuahkann ikrar keulamaan perempuan dan sejumlah rekomendasi. Kongres yang diikuti sekitar 500 peserta dari 15 negara itu juga menghasilkan pandangan keagamaan menyangkut tiga persoalan, yakni pernikahan anak, kekerasan seksual, dan kerusakan lingkungan.

Ikrar, rekomendasi, dan pandangan keagamaan itu jadi ikhtiar perempuan ulama bagi kemaslahatan umat. Hasil-hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dibacakan secara bergantian oleh perwakilan ulama dari beberapa daerah pada penutupan KUPI, kemarin, yang dihadiri Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan GKR Hemas dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Panitia pengarah yang diwakili komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu, melaporkan, KUPI berjalan lancar.

Ikrar Ulama Perempuan menyatakan, perempuan adalah manusia yang memiliki seluruh potensi kemanusiaan sebagaimana laki-laki melalui akal budi dan jiwa raga. Semua ini adalah anugerah Allah SWT yang diberikan kepada setiap manusia yang tidak boleh dikurangi oleh siapa pun atas nama apa pun. Sepanjang sejarah Islam, perempuan ulama telah ada dan berperan nyata dalam pembentukan peradaban.

Kehadiran perempuan ulama pada hakikatnya adalah keterpanggilan iman dan keniscayaan sejarah. Sebagaimana laki-laki ulama, perempuan ulama juga bertanggung jawab melaksanakan misi kenabian untuk menghapus segala bentuk kezaliman atas dasar apa pun, termasuk agama, ras, bangsa, golongan, dan jenis kelamin. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, perempuan ulama juga berhak dan wajib mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara.

Pandangan Keagamaan

Tiga persoalan dibahas intensif dalam KUPI, yakni pernikahan anak, kekerasan seksual, dan kerusakan lingkungan. Pandangan keagamaan pun dirumuskan setelah digodok dalam diskusi kelompok dan kemudian musyawarah. Para ulama yang terlibat aktif di antaranya pengasuh Ponpes Kebon Jambu, Masriyah Amva; pengajar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Badriyah Fayyumi; pengasuh Ponpes Arjawinangun, Husein Muhammad; dan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Machasin.

Pernikahan anak terbukti membawa kemudaratatan sehingga mencegah pernikahan anak hukumnya wajib. Kemaslahatan keluarga sakinah tak bisa terwujud jika dalam pernikahan terjadi banyak kemudaratatan.

Pernikahan anak terbukti merugikan perempuan. Berdasarkan hasil musyawarah keagamaan KUPI, lebih dari 50 persen pernikahan anak berakhir dengan perceraian sebelum setahun usia nikah. Pernikahan usia muda juga rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual.

Terkait hal itu, KUPI merekomendasikan, antara lain, agar negara memastikan ada kebijakan yang mengikat di tingkat nasional terkait dengan pencegahan, penanganan, dan penghapusan pernikahan anak. Caranya, antara lain, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan batas minimal seorang perempuan boleh menikah dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Terkait ini, Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan, uji materi (judicial review) terhadap UU Perkawinan telah ditolak Mahkamah Konstitusi karena seharusnya legislative review.

Kekerasan Seksual

Para ulama juga menyatakan, kekerasan seksual dengan segala bentuknya adalah haram, baik dilakukan di luar maupun di dalam pernikahan. Kekerasan seksual melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh Islam, di antaranya hak dan kebebasan untuk hidup. Hak bereproduksi dan membangun keluarga juga dilanggar.

Dalam pandangan Islam, negara wajib menjamin pemenuhan hak seluruh warga negara, terutama hak-hak korban. Jika negara dan/atau aparat penegak hukum melakukan pengabaian, mempersulit dan menyalahgunakan hak-hak korban kekerasan seksual, berarti negara zalim serta melanggar konstitusi.

Perusakan alam atas nama pembangunan yang berakibat pada ketimpangan sosial-ekonomi juga haram secara mutlak. Namun, pembangunan dimungkinkan dengan pemanfaatan dan pengelolaan alam demi kemaslahatan. Landasannya adalah maqasid syariah, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga keturunan.

Islam melarang merusak alam dan memiliki perhatian dalam menjaga dan melestarikan alam. Oleh karena itu, manusia wajib merawat dan menjaga keseimbangan ekosistem di muka bumi. Negara wajib melindungi alam dari segala kerusakan dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku perusakan.

Menteri Agama berharap hasil-hasil KUPI bisa meningkatkan harkat perempuan serta peradaban di Indonesia dan dunia. Kongres juga berhasil meneguhkan dan menegaskan bahwa moderasi Islam harus senantiasa dikedepankan. Islam moderat, Islam yang tidak menyudutkan kedudukan perempuan, dan Islam yang menebarkan kemaslahatan sesama. (IVV/IKI)

Sumber: Harian KOMPAS, 28 April 2017

KEBANGKITAN PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK

Media Indonesia, 28 April 2017

Kongres ulama perempuan Indonesia (KUPI) telah berakhir kemarin. Acara yang dihelat di pesantren Kebon Jambu, Ciwaringin, Cirebon, itu menjadi penanda baru kebangkitan kaum hawa. Ribuan ulama perempuan, aktivis, dan akademisi dari lintas agama turut hadir. Tiga agenda besar diusung, antara lain meneguhkan peran ulama perempuan di kancah syi'ar Islam, membuka ruang ulama perempuan untuk kerja pemberdayaan dan keadilan sosial, serta membangun basis pengetahuan mengenai ulama perempuan dan kontribusinya untuk keadaban.

Kehadiran ulama perempuan di ruang kekinian memiliki peran penting dalam membangun kesetaraan sekaligus meneguhkan eksistensi. Perempuan tidak lagi dianggap sebagai makhluk tak berdaya yang harus tunduk pada kultur patriarki. Sejarah membuktikan betapa ketidakhadiran suara perempuan dalam perumusan fikih justru semakin memperkuat superioritas laki-laki atas perempuan.

Salah satu teks yang dipandang oleh ahli fikih sebagai dasar eksplisit ketinggian laki-laki satu tingkat di atas perempuan ialah surah An-nisa' ayat 34 yang menyatakan bahwa laki laki sebagai pemimpin atas perempuan. Adapun kaidah fikih yang digunakan ialah kaidah mafhum aulawi, yang kemudian disimpulkan: "apabila urusan rumah tangga/domestik saja perempuan dipimpin laki-laki, apalagi persoalan publik yang mencakup wilayah dan tanggung jawab besar."

Hirarki dan superioritas laki-laki atas perempuan tersebut akhirnya semakin dikukuhkan dalam soal-soal fikih yang lebih menguntungkan kaum laki-laki ketimbang perempuan, seperti perkara kewarisan, persaksian, imamah, hingga persoalan yang bersifat pribadi, yakni penguasaan laki laki atas reproduksi dan seksualitas perempuan.

Karena itu, diselenggarakannya kongres ulama perempuan Indonesia sejatinya sebagai interupsi bagi kita bahwa perempuan memiliki kekuatan besar yang perlu diberikan ruang. Apalagi, menyangkut pembahasan persoalan-persoalan keperempuanan masa kini seperti masih kuatnya dominasi kultur patriarkhi, kasus pemerkosaan, kepemimpinan dan labelisasi perempuan hanya urusan privat.

Kasus Pemerkosaan

Kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual, misalnya hingga kini masih menggurita dan mengukuhkan praktik pamarjinalan kaum perempuan dari gelanggang kesetaraan. Tipologi kekerasan seksual juga tidak sekedar bersifat individu (hubungan orang tua terhadap anak), atau pula tidak memiliki relasi intim antara pelaku dan korban.

Berdasarkan data komisi Nasional Antikekerasan terhadap perempuan tercatat sejak 1998 hingga 2010 terdapat 295.836 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 91.311 di antaranya kasus kekerasan seksual. Peristiwa pelecehan seksual tersebut mencerminkan perempuan masih dipandang makhluk lemah yang harus menuruti dorongan birahi laki- laki.

Banyak faktor yang menyebabkan kasus pemerkosaan masih merabak. Pertama, lemahnya fungsi aparat hukum dalam menjalankan tugas profesi. Hal ini dipengaruhi cara pandang penegak hukum dalam menjalankan tugas profesi. Hal ini dipengaruhi cara pandang penegak hukum yang bias gender. Nasib perempuan sudah dianggap sebagai takdir yang secara kodrati dianggap di bawah kekuasaan laki-laki. Padahal, aparat hukum berperan besar dalam memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga tanpa membeda bedakan jenis kelamin. Pasal 28 (g) UUD 1945 menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Kedua, penafsiran terhadap *nash* yang tidak mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi setara. Hal ini menyebabkan struktur, organisasi, dan paham keagamaan tak berlaku adil terhadap kaum perempuan sejak dalam pikiran.

Padahal agama memiliki visi egalitarianism. Karena itu, kongres ulama perempuan perdana di Cirebon menjadi penting agar posisi agama dan cara pandang ulama terhadap perempuan memiliki pengaruh besar dalam meruntuhkan kultur patriarkhi sehingga dalam jangka panjang, perempuan menjadi makhluk yang harus dihargai, yang kelak juga memimpin dunia, sama seperti kaum laki-laki.

Peran Yang Terbuka

Aminah wadud (1994) memiliki pandangan menarik dan lebih adil bahwa setiap penghargaan dan dinamika di bidang politik, ekonomi, dan sosial selalu dikaitkan dengan laki-laki, dan tidak pula semua pekerjaan yang membosankan harus dibebankan kepada perempuan. Fenomena perempuan berkarir yang kini merebak bersamaan dengan pergeseran peran perempuan, tidak selalu dikonotasikan sebagai perempuan jelek manakala selalu berorientasi pada satu semangat, yakni semangat berpacu dalam kebaikan. Semua manusia punya kesempatan yang sama mengembangkan dirinya tanpa dibatasi perbedaan kelamin.

Dalam perkembangan dunia yang semakin modern, perempuanpun telah menjadi sosok yang tidak lagi terbatas pada urusan sumur, Kasur, dan dapur. Namun, juga telah merengsek pada bidang-bidang penting dan strategis dalam bernegara. Di Indonesia keterlibatan kaum perempuan bisa dibilang cukup menggembirakan. Di lingkungan eksekutif, misalnya, keterwakilan perempuan dalam kabinet Joko Widodo cukup memadai. Srikandi tersebut, antara lain Marsudi, Susi Pujiastuti, Khofifah Indar Parawansa, Yohana Yambise, Siti Nurbaya, Rini Soemarno, dan Puan Maharani.

Namun demikian, kondisi tersebut tidak terjadi di lembaga yudikatif. Berdasarkan data Internasional Labour Organization, jumlah hakim perempuan di Indonesia masih rendah. Di Pengadilan Negeri, hakim perempuan hanya sekitar 16,2%, sedangkan di Mahkamah Agung, persentasenya lebih kecil lagi, yakni 16,6%. Hal ini disebabkan kultur patriarkhi di Indonesia masih sangat kuat. Semua jabatan penting dipersepsikan hanya cocok dipegang kaum laki-laki. Padahal dari segi kemampuan, daya sensitivitas dan kualifikasi lainnya, perempuan tidak kalah saing.

Di tingkat dunia, perempuan juga punya catatan sejarah gemilang dalam dunia politik. Merujuk pada Negara yang dipimpin perempuan, di Brazil ada Dilma Roussef yang menggantikan Luiz Inacio Lula da Silva, Laura Chinchilla menjabat presiden Kosta Rika, Cristina Fernandez de Kirchner sebagai pemimpin Argentina, serta Helle Thorning sebagai penguasa di Denmark. Keberhasilan perempuan mengubah stereotype manusia tidak berdaya tersebut tidak luput dari keberanian mendobrak kultur patriarkhi.

Akhirulkalam, saya sependapat dengan Rosmary Mahoney, penulis nonfiksi Amerika Serikat, dalam sebuah kolomnya, *Serahkan Kekuasaan Kepada Wanita, niscaya mengubah dunia.*

Sumber: Harian Media Indonesia, 28 April 2017

TANTANGAN ULAMA PEREMPUAN DI NEGARANYA

Republika, 28 April 2017

Lazim diketahui, ruang gerak perempuan di Arab Saudi tak sebebaskan negara-negara lain, termasuk Indonesia. Menurut masyarakat Arab, hal itu merupakan bentuk perlindungan dan penghormatan kaum hawa. Bicara perempuan Arab Saudi semakin kompleks lantaran minimnya keterlibatan di sektor politik, ekonomi dan sosial. Maka dari itu, “sebagai ulama perempuan, kita memiliki tanggung jawab menyebarkan Islam moderat yang menyampaikan kesetaraan dan kemanusiaan,” tutur seorang ulama perempuan asal Arab Saudi, Hatoon Al-Fasi, saat hadir dalam kongres ulama perempuan Indonesia (KUPI) di pondok pesantren Kebon Jambu Al Islamy, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kemarin.

Di Arab Saudi, ulama perempuan atau alimat adalah para pendidik perempuan. Mereka ahli dalam studi agama yang memiliki kemampuan memberikam fatwa dan ijtihad. Mereka juga memiliki pengetahuan tentang Islam yang dapat memberikan semangat kesetaraan dan keadilan. Sayangnya banyak pimpinan yang memonopoli pandangan yang akhirnya menyudutkan perempuan.

Itu adalah kasus dan tantangan yang dimiliki perempuan muslim di banyak tempat. “Untungnya, Arab Saudi memberikan keistimewaan terhadap saya sekaligus menjadi perhatian ketika saya yang perempuan di Arab Saudi berbicara Islam. Di dunia Arab, para alimat tidak banyak,” kata Hatoon.

Ia mengakui menjadi seorang alimat di Arab Saudi bukanlah tugas yang mudah. Walaupun ada ribuan perempuan lulusan pendidikan Islam dan menghafal al-qur’an, tetapi tidak ada alimat yang diakui sebagai imam yang bisa melakukan ijtihad dan diakui. Merujuk pada kehidupan perempuan Arab Saudi hari ini, tambah Hatoon, mereka memiliki kisah yang berbeda dari sebelumnya. Mereka mencoba untuk menghadapi realita dan melakukan interpretasi terhadap realita itu.

Meski sulit, satu persatu mereka menjadi vokal. Hal itu yang telah diajarkan oleh ulama (laki-laki), baik di sekolah maupun institusi keagamaan, bukanlah satu-satunya kebenaran.

Di Maroko dan Mesir, ijtihad yang dilakukan alimat untuk memberikan perspektif perempuan pada Islam di harapkan bisa memberikan harapan bagi dunia muslim. Beberapa strategi digunakan, merujuk pada pusat studi pembangunan di Mesir. Metode mereka adalah menjembatani organisasi-organisasi perempuan untuk memfokuskan pemenuhan hak-hak perempuan oleh Negara. Seperti di kampus Al-Azhar yang berhasil membuahkan banyak karya.

Menurut Hatoon, organisasi itu telah memimpin dan mengambil peran yang sangat penting bagi Negara-negara Arab melalui bangunan pengetahuan dengan mendiseminasi karya dan terjemahan karya-karya mereka. Pengetahuan itu sangat penting untuk memberikan bacaan alternatif.

Seorang ulama perempuan asal Pakistan, Mossarat Qadem, menuturkan, peran perempuan saat ini di Pakistan sangat berat karena mereka tercabut dari akarnya, mereka yang seharusnya bisa mengembangkan keluarganya kini harus merawat korban perang.

Para perempuan Pakistan pun sering kali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan menjadi korban bom bunuh diri. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, mereka jadi bingung dan kebanyakan dari mereka bertanya kepada maulananya.

Namun, tidak jarang maulananya justru menginfiltrasi mereka dengan paham-paham radikal. "maka dari itu, kami minta agar para ibu menjadi agen perubahan yang positif sehingga anak-anak tidak terlibat radikalisme," ujar Mossarat.

Ulama perempuan pun membangun pandangan yang melawan kebiasaan masyarakat seperti dengan meningkatkan kapasitas dari guru agar bisa membangun toleransi. "kami melakukan kegiatan kreatif sehingga mereka bisa belajar dan diakui. Namun, pekerjaan kami mengandung resiko karena kami ingin mengubah pola pikir di masyarakat," kata Mossarat.

Sumber: Harian Republika, 28 April 2017

PEREMPUAN DISYARATKAN MENIKAH MINIMAL USIA 18 TAHUN

SINDO, 28 April 2017

Perempuan disyaratkan menikah minimal pada usia 18 tahun. Syarat ini menjadi salah satu dari tiga fatwa yang dihasilkan dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, yang ditutup kemarin.

Ketua pengarah KUPI Badriyah Fayumi mengatakan, persoalan syarat pernikahan tersebut dilihat dari berbagai faktor. Faktor itu di antaranya ekonomi, budaya, pandangan keagamaan, hingga sulitnya perempuan mendapat akses pendidikan. "Persoalan ini bukan semata-mata soal pandangan keagamaan, melainkan pula upaya mendukung pencegahan perkawinan anak yang menimbulkan kemudharatan," jelasnya.

Sekalipun syarat usia pernikahan masih menjadi kontroversi, KUPI menganggap fatwa tersebut sudah melalui pemikiran panjang para ulama perempuan. Dia berharap, fatwa soal usia ideal untuk perempuan yang menikah dipertimbangkan pemerintah. Fatwa itu pun bagian dari hasil keputusan musyawarah keagamaan, khususnya kekerasan seksual, baik di dalam maupun di luar perkawinan, hukumnya haram.

Fatwa lain hasil kongres itu berupa ikrar keulamaan perempuan yang mengakui merekognisi eksistensi dan kontribusi ulama perempuan, baik dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Esensi dari fatwa tersebut terkait peran keulamaan perempuan yang mengakui kesamaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk Allah. "Perempuan juga makhluk Allah yang memiliki potensi akal budi dan jiwa raga yang sama," tegasnya.

Selain itu, fatwa lain berupa perusakan alam dalam konteks ketimpangan sosial di mana KUPI meminta negara menghentikan segala praktik pemanfaatan sumber daya alam atas nama pembangunan ketika mengganggu ekosistem kehidupan kemanusiaan, khususnya perempuan.

Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin saat menutup kegiatan ini berjanji akan mengkaji lebih dalam rekomendasi dan fatwa yang dihasilkan melalui kongres, khususnya terkait batasan minimal usia menikah pada perempuan. Dirinya akan berkomunikasi dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana setelah menerima data rinci hasil kongres.

“Soal batas minimal menikah pada perempuan, domainnya ada pada Ibu Yohana. Saya akan komunikasikan kepada beliau,” janjinya.

Menurutnya, tank menutup kemungkinan pemerintah akan menindaklanjuti fatwa tersebut dengan merevisi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Rekomendasi keputusan itu sendiri dinilainya sudah baik. Hanya, dia mengingatkan, pernikahan pun tanggung jawab orang tua maupun masyarakat pada umumnya.

“Jangan sampai anak-anak yang belum masuk usia menikah, karena situasi dan kondisi, kemudian dipaksa memasuki jenjang rumah tangga yang mengharuskannya menanggung tanggungjawab rumah tangga di mana dia sebenarnya belum siap memikul atau mengembannya,” paparnya.

KUPI 2017 merupakan kongres pertama yang dihadiri lebih dari seribu orang tak hanya dari Indonesia saja melainkan pula dari 15 negara lain yang digelar sejak 25 April 2017. Ulama perempuan dunia yang hadir dalam kongres itu di antaranya Mossarat Qadeem (Pakistan), Zainah Anwar (Malaysia), Hatoon Al-Fasi (Saudi Arabia), Sureya Roble-Hersi (Kenya), Fatima Akilu (Nigeria), dan Roya Rahmani (*The Ambassador of Afghanistan in Indonesia*). erika lia

Sumber: Harian SINDO, 28 April 2017

REKOMENDASI KUPI, USIA MINIMAL PEREMPUAN MENIKAH 18 TAHUN

Fajarnews.com, 28 April 2017

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang berlangsung selama tiga hari di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, resmi ditutup Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kamis (27/4).

Selama tiga hari Selasa-Kamis (25-27/4) tersebut, 574 peserta kongres membahas berbagai isu krusial yang dirumuskan menjadi tiga rekomendasi KUPI yakni kekerasan seksual, perkawinan anak, dan perusakan lingkungan dalam perspektif ketimpangan sosial.

Terkait perkawinan anak, rekomendasi yang diberikan kepada negara adalah mengubah (mengganti) pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar usia pernikahan minimal untuk perempuan dari semula 16 tahun naik menjadi 18 tahun.

Dalam penjelasannya, ulama perempuan berpendapat, mencegah perkawinan dini dilakukan karena pernikahan dini membawa kemudarotan lebih besar, sementara mencegah perkawinan anak usia dini hukumnya wajib.

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pelaksanaan KUPI luar biasa tidak hanya pada substansi yang dikaji, tetapi juga prosesnya yang sepenuhnya merupakan inisiatif kaum perempuan. Menurut Lukman, ada tiga makna strategis yang didapat dari KUPI.

"Pertama kongres itu telah berhasil memperjuangkan keadilan mengenai relasi hubungan laki-laki dan perempuan," kata Lukman.

Kedua, lanjut Lukman, KUPI tidak hanya mampu menunjukkan eksistensi dan pengukuhan ulama perempuan tapi juga berhasil merevitalisasi peran ulama perempuan di Indonesia.

"Terakhir, KUPI berhasil meneguhkan dan menegaskan bahwa moderasi Islam harus senantiasa dikedepankan. Islam sebagai rahmatan lil alamin, yang moderat, tidak menyudutkan posisi perempuan," katanya.

Menurutnya, KUPI jug berhasil merumuskan isu kekinian dan relevan, sehingga berdampak pada kemaslahatan bersama untuk peradaban dunia.

Terkait rekomendasi KUPI tentang UU Perkawinan, Lukman berjanji akan memperjuangkan hal tersebut. Menurutnya, judicial review mengenai batasan usia minimal untuk perempuan, pernah diajukan beberapa waktu lalu.

Namun hal tersebut ditolak, karena hakim Mahkamah Agung berpendapat hal itu merupakan kewenangan legislatif. Karena pernah diajukan judicial review, maka masalah yang sama tidak bisa diajukan kembali.

"Saya akan coba bawa rekomendasi kongres ini (kepada pemerintah). Diharapkan kongres ini bisa merumuskan rekomendasinya menjadi lebih teknis," katanya.

Terkait rekomendasi ma'had ali untuk perempuan, menurut Lukman, saat ini sudah ada 13 ma'had ali. Ia berjanji akan menyiapkan kurikulum dan segala sesuatu yang terkait ma'had ali untuk memperbanyak ulama perempuan.

"Ini cukup bagus karena ada ulama perempuan dunia juga hadir dalam kongres ini," ujarnya.

Sementara Wakil Pimpinan DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas berharap, maklumat dan rekomendasi KUPI dapat diimplementasikan oleh Kemenag.

"Rekomendasi KUPI sangat menyejukkan hati karena akan melahirkan anak bangsa yang luar biasa, yang akan menyelamatkan kita dari masalah saat ini," kata Hemas.

Menurutnya acara itu memberikan gema yang cukup besar dan menghasilkan hal-hal baik menyangkut keindonesiaan, kebangsaan dan keislaman.

"Ulama perempuan Indonesia telah membuktikan tekad yang luar biasa dalam menyikapi isu-isu yang saat ini berkembang," tandasnya.

Pelaksanaan KUPI mendapat sambutan luas dari berbagai pihak. Hal itu di antaranya terlihat dari banyaknya calon peserta yang mendaftar hingga mencapai 1.275 orang. Namun, akibat keterbatasan sarana, calon peserta yang bisa mengikuti kongres yang dilaksanakan pertama kali di Indonesia dan dunia itu hanya 574 orang peserta dan 185 orang pengamat.

Selain dari Indonesia, kegiatan itu juga diikuti para ulama perempuan dari 15 negara lainnya dari seluruh benua. Adapun ulama perempuan dunia yang hadir dalam kongres itu di antaranya, Mossarat Qadeem (Pakistan), Zainah Anwar (Malaysia), Hattoon Al-Fasi (Saudi Arabia), Sureya Roble-Hersi (Kenya), Fatima Akilu (Nigeria), dan Roya Rahmani (the Ambassador of Afghanistan in Indonesia). (**Adhe Hamdan**)

Sumber: <http://news.fajarnews.com/read/2017/04/28/15151/rekomendasi.kupi.usia.minimal.perempuan.menikah.18.tahun>

KONGRES ULAMA PEREMPUAN: POLIGAMI BUKAN TRADISI ISLAM

Tribunnews.com, 28 April 2017

Ratusan perempuan ulama, aktivis dan akademisi akan hadir dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia KUPI pertama yang digelar di Pesantren Kebon Jambu, Babakan Ciwaringin Cirebon pada 25-27 April.

Pertemuan ini disebut sebagai bentuk konsolidasi para ulama perempuan yang selama ini bekerja untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat sipil.

Masalah poligami menjadi pembahasan dalam kongres dan disebut sebagai salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Para ulama perempuan menyebutkan poligami merupakan praktik yang sudah ada sejak sebelum masa Nabi Muhammad SAW.

Dosen Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran, Jakarta, Dr. Nur Rofiah Bil Uzm mengatakan pada masa itu para laki-laki boleh menikahi perempuan dengan jumlah yang tidak terbatas, lalu ayat (dalam surat An-Nisa) ini membatasi empat.

"Poligami bukan tradisi dari Islam, dalam Al-Qur'an itu mengatur, sebagai problem lalu diatasi, sama seperti misalnya pencatatan perkawinan, itu kan ada problem kalau perkawinan tidak dicatat lalu orang sesuka hati cerai begitu, lalu diatasi," jelas Nur.

Dia mengatakan dalam berpoligami, Rasul memberikan contoh bagaimana memperlakukan keluarga dengan adil.

"Mengapa Rasulullah poligami? Karena perlu contoh riil ketika poligami tidak atau belum mungkin dihapuskan, kan orang perlu dicontohkan bagaimana memperlakukan keluarga manusiawi dengan seperti itu," kata Nur.

Dia mengatakan inti ajaran Islam adalah keadilan dalam keluarga, bukan mengenai jumlahnya seperti yang dipahami selama ini.

Ayat yang sering digunakan untuk membenarkan poligami ada dalam Surat An-Nisa (4) ayat 3 : "... Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.

Sumber: <http://medan.tribunnews.com/2017/04/28/kongres-ulama-perempuan-poligami-bukan-tradisi-islam>

MENAG SANGGUPI UPAYA MENCETAK ULAMA PEREMPUAN

Republika, 28 April 2017

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) selesai dilaksanakan di pondok pesantren Kebon Jambu Al-Islamiy, Babakan, Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Kamis (27/04). Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjanjikan tindaklanjuti dari sejumlah rekomendasi dalam kongres tersebut. Utamanya, menambahkan ulama perempuan melalui lembaga pendidikan tinggi.

Salah satu rekomendasi dalam KUPI yang baru pertama kalinya digelar tersebut adalah mencetak lebih banyak ulama perempuan melalui *ma'had aly* alias perguruan tinggi agama berbasis pesantren. Kongres menginginkan, pemerintah membentuk *Ma'had Aly* khusus perempuan. Saat ini, Kemenag telah membuka sebanyak 13 *Ma'had Aly* di berbagai daerah.

Lukman menegaskan, Kemenag membuka diri untuk membuka *Ma'had Aly* khusus perempuan, guna mencetak lebih banyak ulama perempuan, "Kami akan mempersiapkan kurikulum dan segala sesuatu yang terkait *Ma'had Aly* untuk memperbanyak ulama perempuan," kata Lukman selepas menutup KUPI di pondok Pesantren Kebon Jambu Al Islamiy, kemarin.

Pelaksanaan KUPI beberapa hari belakangan melahirkan hasil musyawarah dan rekomendasi terkait tiga isu, yaitu pernikahan anak, kerusakan lingkungan, dan kekerasan seksual. Selain itu, dalam kesempatan itu juga lahir rekomendasi umum KUPI mengenai berbagai isu sosial, yakni pendidikan ke-ulamaan perempuan di Indonesia, respon pesantren terhadap ke-ulamaan perempuan, dan penghentian kekerasan seksual.

Selain itu, disepakati juga rekomendasi perlindungan anak dari pernikahan anak, perlindungan buruh migran, pembangunan berkeadilan berbasis desa, peran perempuan dalam menghadapi radikalisme agama, peran dan strategi ulama perempuan merespon krisis dan konflik kemanusiaan, serta peran ulama perempuan dalam penyelesaian ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan.

Dalam sambutan penutupnya Lukman memberikan apresiasi terhadap terselenggaranya KUPI. Lukman menilai, kongres itu tidak hanya luar biasa dari isu-isu yang dibahasnya, tetapi dari rekomendasi yang dihasilkan. Termasuk proses dan hingga berlangsungnya KUPI. “mudah mudahan meningkatkan perempuan dan peradaban Indonesia dan dunia,” kata Lukman.

Lukman mencatat, kongres itu telah berhasil memperjuangkan keadilan mengenai relasi hubungan laki-laki dan perempuan. Dia menilai, hal itu adalah isu yang semakin memiliki urgensi dan tingkatan relevansi yang tinggi.

Tidak hanya itu, kongres tersebut telah menghasilkan pengenalan kembali dan revitalisasi peran ulama perempuan. Para ulama perempuan yang hadir dari berbagai daerah Indonesia juga mampu membangun jaringan yang lebih luas. “kongres ini juga berhasil meneguhkan dan menegaskan bahwa moderasi Islam harus senantiasa di kedepankan. Islam sebagai rahmatan lil alamin yang moderat, tidak menyudutkan posisi perempuan,” kata Lukman.

Menag juga menyoroti rekomendasi KUPI soal dinaikannya usia legal pernikahan bagi perempuan. Menag menyatakan, uji materi tentang batas usia minimal untuk menikah dari 16 tahun menjadi 18 tahun telah ditolak Mahkamah Konstitusi.

Dia menjelaskan, berdasarkan penjelasan para hakim, hal itu adalah kewenangan legislatif. Namun, Lukman menyatakan, karena pemerintah juga punya hak untuk melakukan review, maka dia akan secepatnya berkomunikasi dengan menteri terkait sehubungan hal tersebut. Dia akan membawa rekomendasi KUPI itu, sehingga KUPI diminta bisa merumuskan rekomendasinya menjadi lebih teknis.

Sekretaris umum komite pelaksanaan KUPI, Ninik Rahayu mengungkapkan, kongres yang dimulai sejak 25 – 27 April 2017 itu berjalan dengan tuma’nah. “Dalam kongres ini tidak ada yang marah-marah apalagi sampai lempar-lempar kursi,” kata dia.

Ninik menjelaskan, kongres itu diawali dengan Seminar Internasional yang menghadirkan pembicara dari Indonesia dan sejumlah Negara, selain itu, ada pula Seminar Nasional yang menjadi ajang perjumpaan ulama perempuan dari berbagai daerah di Indonesia.

Ninik berharap, KUPI tidak berhenti pada pertemuan diantara ulama perempuan semata. Namun, seluruh peserta KUPI berharap agar hasil yang dirumuskan dapat diperjuangkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terkait.

Ninik menambahkan pelaksanaan KUPI mendapat sambutan luas dari berbagai pihak. Hal itu di antaranya terlihat dari banyaknya calon peserta yang mendaftar hingga mencapai 1.275 orang. Namun, akibat keterbatasan sarana, calon peserta yang bisa mengikuti kongres yang dilaksanakan pertama kali di Indonesia dan dunia itu hanya 574 orang peserta dan 185 orang pengamat.

Selain dari Indonesia, kegiatan itu juga diikuti para ulama perempuan dari 15 negara lainya dari seluruh benua. Adapun ulama perempuan dunia yang hadir dalam kongres itu, Antara lain, Mossarat Qadeem (Pakistan), Hatoon Al-Fasi (Arab Saudi), Sureya Roble-Hersi (Kenya), Fatima Akilu (Nigeria), dan Roya Rahmani (The Ambassador of Afghanistan in Indonesia).

Sumber: Harian Republika, 28 April 2017

UNICEF PUJI SIKAP ULAMA PEREMPUAN INDONESIA

Jawa Pos, 29 April 2017

Usia minimum Perkawinan Anak Perempuan Harus Dinaikkan

Perjuangan untuk melindungi anak dari jerat pernikahan dini semakin kukuh. Setelah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menyepakati agar usia pernikahan bagi perempuan dinaikkan, Unicef juga mendukung keputusan tersebut.

Kepala Perwakilan Unicef Indonesia Gunilla Olsson menyampaikan, dukungan dari pemuka agama itu sangat penting untuk mencapai target penghentian perkawinan usia anak di Indonesia. "Unicef menyambut undangan untuk membahas hal ini lebih lanjut. Ketika seorang anak perempuan diberdayakan, semua orang memperoleh manfaatnya," ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan, salah satu keputusan kongres KUPI di Cirebon yang berakhir dua hari lalu adalah mendesak perubahan Undang-Undang Perkawinan 1974 soal batas minimal pernikahan anak perempuan. Para ulama perempuan Indonesia sepakat bahwa usia minimal seorang perempuan boleh menikah adalah 18 tahun, bukan 16 tahun sebagaimana yang tertera di dalam Undang-Undang Perkawinan. Sebab, perempuan berumur 16 tahun masih sangat riskan untuk menikah.

Menurut Gunilla, pernikahan usia anak memang sangat berisiko. Terlebih bagi anak perempuan di bawah usia 18 tahun. Mereka terancam masalah kesehatan karena kehamilan dini.

Belum lagi, lanjut dia, sebagian besar di antara mereka harus putus sekolah. Padahal, esensinya, anak perempuan yang sehat dan berpendidikan merupakan dasar untuk mencapai masyarakat makmur.

"Pengantin anak memiliki kecenderungan tidak menyelesaikan pendidikan menengah enam kali lebih besar jika dibandingkan dengan mereka

yang menikah pada usia matang. Itu tentu akan membatasi peluang karir," ujarnya.

Gunilla menuturkan, ada beberapa cara untuk mengakhiri pernikahan usia anak ini. Di antaranya, memastikan anak perempuan bisa menyelesaikan pendidikan 12 tahun dan reformasi legal. Menurut dia, Undang-Undang Perkawinan 1974 mendesak untuk direvisi. Sebab, isinya bertentangan dengan UU Perlindungan Anak 2002.

Dalam UU Perkawinan ditentukan, batas usia minimal pernikahan adalah 21 tahun. Namun, dengan izin orang tua, anak lelaki diperbolehkan menikah pada usia 19 tahun, sedangkan anak perempuan dapat menikah pada umur 16 tahun. Aturan tersebut kontradiktif dengan UU Perlindungan Anak yang melarang perkawinan di bawah usia 18 tahun.

"Di akhir kongres, menteri agama menuturkan akan membawa masalah itu ke pemerintah. Ini merupakan konfirmasi bahwa Indonesia memimpin implementasi agenda 2030," ujarnya.

Pernikahan usia anak di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. Rata-rata lebih dari 3.500 anak perempuan dinikahkan setiap hari. Badan Pusat Statistik (BPS) pun mencatat, ada 1.348.886 anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun pada 2012. Di antara jumlah tersebut, 292.663 anak perempuan menikah sebelum usia 16 tahun dan 110.198 sebelum usia 15 tahun.

Indonesia berkomitmen mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada 2030. Salah satu targetnya adalah SDG 5.3 untuk menghapus semua praktik yang riskan bagi anak perempuan dan perempuan dewasa, termasuk perkawinan usia anak. Indonesia akan mempresentasikan kemajuan SDGs itu dalam Forum Tingkat Tinggi PBB 2017 di New York pada Juli mendatang. (mia/c5)

Sumber: Koran Harian Jawa Pos, 29 April 2017

TIGA FATWA NAMPOL SOAL KEKERASAN SEKSUAL DARI ULAMA PEREMPUAN

Sobatask.net, 03 Mei 2017

Beberapa waktu lalu, ulama-ulama perempuan dari seluruh Indonesia berkumpul di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamiy di Babakan Ciwaringin Cirebon untuk momen yang bersejarah: Kongres Ulama Perempuan Indonesia alias KUPI!

Kongres ini adalah ajang pertemuan dan merapatkan barisan buat ulama-ulama perempuan Indonesia yang sudah lama ikut menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat mulai dari kekerasan seksual, pernikahan usia anak, hingga perusakan alam dan radikalisme.

Salah satu momen paling keren dari kongres ini adalah saat para peserta kongres menyatakan bahwa ulama perempuan setara dengan ulama laki-laki, dan deklarasi itu dibacakan di depan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.

Tapi, kongres ini juga menghasilkan tiga fatwa yang nampol banget. Salah satunya adalah fatwa nomor dua tentang kekerasan seksual.

Kekerasan Seksual = Haram!

Bagian pertama dari fatwa KUPI tentang kekerasan seksual secara tegas menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan yang haram. Alasannya?

“Kekerasan seksual dalam bentuk di luar atau dalam pernikahan adalah haram karena melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam Islam.”

Korban kekerasan seksual harus dilindungi.

Banyak banget kasus di mana korban kekerasan seksual kemudian dijauhi oleh masyarakat dan diperlakukan secara tidak adil oleh aparat. Bahkan korban kekerasan seksual kerap dituduh “mengundang” kekerasan seksual karena perilaku atau pakaian mereka yang dianggap merangsang birahi sang pelaku. Aneh, kan.

Menanggapi ini, KUPI menyatakan bahwa:

“...perkosaan tidak sama dengan perzinahan baik secara pengertian dan pembuktian hingga pada hukuman.”

Otomatis, fatwa ini seperti menampar pandangan masyarakat maupun aparat hukum yang menuduh korban pemerkosaan ikut melakukan zina, salah satunya seperti yang terjadi di Aceh.

“...korban perkosaan tidak bisa dihukum, dikucilkan, dan direndahkan martabat kemanusiaannya. Sehingga korban perkosaan berhak mendapatkan pemulihan secara psikis, fisik, sosial, hingga kompensasi.”

Keren ya!

Negara wajib memenuhi hak korban.

Fatwa tersebut enggak cuma menghimbau masyarakat untuk berlaku adil kepada korban kekerasan seksual. KUPI juga mendorong negara untuk memenuhi hak korban dan melindungi korban agar masa depannya tetap terjamin dan ia bisa membangun hidup yang layak.

“Negara dalam kasus kekerasan seksual wajib hadir untuk menjamin pemenuhan hak-hak warga negara, termasuk korban.”

Lebih jauh lagi, fatwa tersebut mengancam perilaku aparat negara yang mempersulit proses hukum bagi korban kekerasan seksual, apalagi aparat yang malah mendiskriminasi korban dan bahkan menjadi pelaku kekerasan seksual.

“Jika negara melakukan pengabaian, mempersulit, dan menyalahgunakan hak warga negara khususnya korban kekerasan seksual maka negara telah dzalim dan melanggar konstitusi. Tidak hanya itu, bahkan negara atau pihak berwenang melakukan kekerasan seksual maka sepatutnya dihukum lebih berat (taqlidu al uqubah).”

Fatwa kedua dari KUPI ini begitu masuk akal dan melindungi korban. Sekadar info, kongres tersebut dihadiri lebih dari 500 peserta dari berbagai latar belakang dan berlangsung pada 25-27 April 2017 lalu di Cirebon, Jawa Barat. Disaksikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, para ulama perempuan yang hadir di kongres bersejarah ini enggak mau tinggal diam melihat perempuan didiskriminasi, dipinggirkan, dan dianggap masyarakat kelas dua.

Salut!

Sumber: <https://www.sobatask.net/2017/05/3-fatwa-nampol-soal-kekerasan-seksual-dari-ulama-perempuan/>

TIGA FATWA SOAL PERNIKAHAN ANAK DARI ULAMA PEREMPUAN

Sobatask.net, 03 Mei 2017

Beberapa waktu lalu, ulama-ulama perempuan dari seluruh Indonesia berkumpul di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamiy di Babakan Ciwaringin Cirebon untuk momen yang bersejarah: Kongres Ulama Perempuan Indonesia alias KUPI! Kongres ini adalah ajang pertemuan dan merapatkan barisan buat ulama-ulama perempuan Indonesia yang sudah lama ikut menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat—mulai dari kekerasan seksual, pernikahan usia anak, hingga perusakan alam dan radikalisme.

Salah satu fatwa yang dihasilkan dalam kongres ini adalah fatwa soal pernikahan usia anak. Berikut isinya!

Pernikahan anak wajib dicegah.

Selama ini, masalah pernikahan anak memang jadi isu yang kontroversial di tengah masyarakat. Banyak banget yang menentang terjadinya pernikahan anak, namun faktanya praktik tersebut masih terjadi pada perempuan di Indonesia. Malah, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2014, sekitar 11,75% perempuan berusia 15-19 tahun sudah menikah atau pernah menikah.

Jelas, menikah di usia muda itu ada banyak risikonya, mulai dari segi kesehatan fisik, hingga psikis. Maka, fatwa dari KUPI secara terang-terangan mewajibkan kita semua mencegah pernikahan anak.

“...pernikahan anak terbukti membawa kemadharatan sehingga wajib hukumnya mencegah. Ada pun pihak yang mempunyai tanggung jawab melakukan pencegahan pernikahan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.”

Korban pernikahan anak wajib dilindungi secara hukum.

Ada dua hal yang rancu di Indonesia. Menurut UU No. 1 tahun 1974, batas minimal seorang perempuan boleh menikah adalah saat ia berusia 16 tahun. Padahal, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebut bahwa anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk masih dalam kandungan.” Artinya?

Secara teknis, Indonesia memperbolehkan pernikahan anak.

Nah, kenyataan hukum yang rancu inilah yang dibantai habis-habisan oleh fatwa dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Mereka menyatakan secara tegas bahwa:

“...korban pernikahan anak tetap mendapatkan haknya mulai dari pendidikan, kesehatan, pengasuhan juga perlindungan. Untuk itu KUPI merekomendasikan agar pemerintah mengubah UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan terkait dengan batas minimal seorang perempuan boleh menikah dari semula 16 tahun menjadi 18 tahun.”

Masuk akal dong, kalau usia minimal untuk pernikahan dinaikkan jadi 18 tahun? Selain karena di usia tersebut seseorang lebih siap secara psikis dan fisik untuk menikah (walau belum sepenuhnya), secara hukum seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah itu masih dianggap anak-anak. Bagi KUPI, kalau kita serius ingin mencegah pernikahan usia anak dan melindungi anak-anak, undang-undang yang ketinggalan zaman itu harus direvisi segera.

Membatasi konten pornografi.

Selain menaikkan usia minimal pernikahan serta melakukan pencegahan terhadap pernikahan anak melalui instrumen negara maupun masyarakat, KUPI juga punya permintaan khusus: agar pemerintah serius memberantas konten yang berbau pornografi.

“Kemenkominfo diharapkan mampu memberantas konten-konten pornografi yang berpotensi meningkatnya hubungan seksual di luar nikah atau hubungan seksual anak di bawah umur.”

Bagi KUPI, jika konten pornografi dibatasi atau bahkan diberantas sepenuhnya, risiko terjadinya perilaku seksual berisiko dan pernikahan anak bakal berkurang. Bagaimana menurut kalian?

Kongres tersebut dihadiri lebih dari 500 peserta dari berbagai latar belakang dan berlangsung pada 25-27 April 2017 lalu di Cirebon, Jawa Barat. Disaksikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, para ulama perempuan yang hadir di kongres bersejarah ini enggak mau tinggal diam melihat perempuan didiskriminasi, dipinggirkan, dan dianggap masyarakat kelas dua.

Sumber: <https://www.sobatask.net/2017/05/3-fatwa-soal-pernikahan-anak-dari-ulama-perempuan/>

SALAM DARI KEBON JAMBU

KOMPAS, 05 Mei 2017

Suguhan happening art sederhana membuka Kongres Ulama Perempuan Indonesia di Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Selasa (25/4). Tujuh perempuan masing-masing membawa Al Quran, kumpulan hadis, kitab kuning, teks UUD 1945, kumpulan Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional, tanaman segar, serta air dan tanah.

Masing-masing berseru, "Nama saya Rahmatan dari Papua. Di tangan saya terenggam Al Quran, hidayah Allah yang maha pengasih dan penyayang " KUPI diselenggarakan dengan merujuk tujuh hal itu. Tanaman, air, dan tanah menjadi simbol alam raya dan kehidupan nyata sebagaimana Islam hadir sebagai rahmat seluruh alam. Suguhan itu tidak hanya menggugah rasa, tetapi juga meneguhkan komitmen keislaman dan kebangsaan. Perempuan ulama yang berkongres di Kebon Jambu berikhtiar menyelesaikan dan menggaungkan berbagai persoalan yang kerap menempatkan perempuan sebagai korban. Tujuannya adalah kemaslahatan umat. Mengapa Kebon Jambu? Pesantren itu didirikan pada 1993 oleh Masriyah Amva dan suaminya, Muhammad, ulama yang masyhur sebagai pendidik andal sejak mengasuh Pesantren Kebon Melati. Pesantren Kebon Jambu dibangun di lahan perkebunan jambu biji milik ayah Masriyah. Ketika Muhammad meninggal pada 2007, banyak orangtua meminta anaknya pulang dan itu sungguh memukul mental Masriyah. Namun, Masriyah yakin, pesantrennya akan kembali bersinar. Kepercayaan dan keimanan penuh pada Allah membuatnya mampu memperjuangkan kesetaraan. Baginya, perempuan diharamkan bersandar kepada kekuatan laki-laki. Para perempuan harus hanya bersandar pada Allah SWT agar mereka memiliki kesetaraan. Pesantrennya kembali didatangi santri seiring nama Masriyah yang semakin dikenal luas sebagai feminis. Kini, Pesantren Kebon Jambu memiliki lembaga formal tsanawiyah dan aliyah dengan jumlah santri mencapai 1.400 orang. "Kesetaraan gender bukan untuk merusak agama, melainkan justru menguatkan. Laki-laki tidak perlu khawatir," kata Masriyah. Pesantren Kebon Jambu pun menjadi simbol perjuangan perempuan ulama. Tepat jika selama

tiga hari berbagai persoalan perempuan dibahas di pesantren ini, dihadiri lebih dari 500 peserta dari 15 negara, di antaranya Malaysia, Pakistan, Afganistan, Arab Saudi, Nigeria, dan Kenya. Sembilan tema dikaji dengan intensif, yakni tema pendidikan keulamaan perempuan, respons pesantren terhadap keulamaan perempuan, kekerasan seksual, pernikahan anak, dan buruh migran. Tema lain adalah pembangunan keadilan berbasis desa, radikalisme agama, krisis dan konflik kemanusiaan, ketimpangan sosial, serta kerusakan lingkungan.

Peran Perempuan Ulama

Pengasuh Pesantren Arjawinangun, Cirebon, Husein Muhammad, mengutip Umar Ridha Kahalah yang menulis buku *Ulama Perempuan di Dunia Islam dan Arab*. Banyak tokoh perempuan yang berkontribusi besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan, cerdas, baik, zuhud, dan bersih. Sukainah binti al-Husain, cicit Nabi Muhammad, adalah ulama terkemuka pada zamannya, guru penyair Arab Jarir al-Tamimy dan Farazdaq. Ayahnya, Imam Husain bin Ali, menyebut putrinya itu "seseorang yang hari-harinya sering berkontemplasi". Sayang, sejarah kaum Muslimin lantas memasukkan kembali perempuan ke dalam kerangkeng rumah. Aktivitas intelektual dibatasi. Perempuan Islam tenggelam dalam timbunan pergumulan sejarah. Mereka dilupakan dan sistem sosial patriarkis menjadi dominan. Fajar baru datang pada awal abad ke-20 ketika banyak perempuan Islam menggugat. Indonesia memiliki sejumlah perempuan ulama, di antaranya Rahmah el-Yunusiyah, pendiri Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang. Lalu, ada Nyai Khoiriyah Hasyim dari Jombang yang menguasai kitab kuning dan piawai dalam manajemen pendidikan. Ada pula Tengku Fakinah dan Sultanah Safiatudin dari Aceh yang menguasai beberapa bahasa asing. Ketua PP Aisyiah, Siti Aisyah, mengatakan, para perempuan Indonesia berdakwah dengan caranya masing-masing. Ia menyebut nama Siti Aisyah Wetin We Tenrille dari Sulawesi Selatan, penulis epos *La-Galigo*. Raden Ajeng Kartini adalah murid Kiai Sholeh Darat dari Semarang yang menafsirkan Al Quran Surat Al-Baqoroh Ayat 257 menjadi habis gelap terbitlah terang. "Dunia pesantren juga menempati peran strategis dalam transformasi ilmu-ilmu Islam, pemelihara tradisi Islam, dan reproduksi perempuan ulama," katanya. KUPI menjadi wadah berjejaring perempuan ulama serta aktivis dan perempuan cendekiawan. Pengajar Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran, Nur Rofiah, mengatakan, perempuan ulama memahami nash atau teks (seperti Al Quran dan hadis), sedangkan perempuan aktivis memahami realitas. Pemahaman nash dan realitas itu bisa diintegrasikan dalam menegakkan keadilan hakiki bagi perempuan.

Melibatkan santri

Apresiasi pada KUPI tidak hanya tertuju pada pengkajian tema yang bermuara pada perumusan ikrar perempuan ulama, rekomendasi, dan pandangan keagamaan atau semacam fatwa (Kompas, 28/4). Apresiasi juga tertuju pada penyelenggaraan KUPI yang melibatkan ratusan santri Pesantren Kebon Jambu. Anak-anak muda itu tidak hanya membantu kepanitiaan dengan ikhlas, tetapi juga turut mendengarkan dan belajar untuk kemudian memetik hikmah. Para santri membantu hingga hal yang sangat detail, seperti menata sandal dan sepatu peserta KUPI yang berkunjung ke rumah Nyai Masriyah, mengambil piring-piring bekas makan peserta, serta memunguti sampah yang tercecer. Sebagian santri yang tidak terlibat kepanitiaan "diungsikan" ke pesantren lain di kawasan Babakan Ciwaringin. Sebab, banyak peserta memilih tidur di pesantren. Tidak ada yang lebih hebat dari kepanitiaan yang didasari keikhlasan dan ketulusan tanpa dibayar. Barisan santri sigap menata tempat parkir, membagikan makalah seminar, hingga mencuci piring dan gelas kotor yang menumpuk. Detail-detail tampak misalnya pada pilihan konsumsi yang variatif dan sangat enak selama tiga hari. "Kami menyediakan 1.500 porsi (setiap kali makan) untuk konsumsi, jaga-jaga kalau kurang," kata seorang panitia. Di Pesantren Kebon Jambu, peserta KUPI merasakan suasana desa yang asri. Seminar dan diskusi dilakukan di ruang terbuka dan ruang-ruang kelas yang panas. Suasana ini membuat KUPI terasa merakyat sekaligus membuktikan bahwa seminar tidak selalu elitis di hotel-hotel seperti kritik-kritik yang kerap muncul. Kata Islam berakar dari salama. Selain Islam, bentukan kata lain bisa salamah yang berarti 'keselamatan' dan assalam yang bermakna 'kedamaian'. Salam damai dari perempuan ulama di Kebon Jambu.(Susi Ivvaty/Abdullah Fikri Ashari)

Sumber: Harian Kompas, 05 Mei 2017

ULAMA PEREMPUAN MELAWAN RADIKALISME

Gatra, 10 Mei 2017

Kongres Ulama Perempuan Indonesia menolak keras paham radikalisme. Muncul sebagai respons muslim terhadap sekularisme Barat.

Momen Idul Fitri tahun 2004 merupakan peristiwa yang tidak bisa dilupakan Umi Khumairoh hingga kini. Ketika itu, ia dan keluarga sedang berlebaran di rumah orang tuanya di Pati, Jawa Tengah. Tiba-tiba aparat kepolisian mengeledah kediamannya di Semarang. “Rumah saya diacak-acak oleh aparat. Katanya suami saya berkaitan dengan dokter Azhari (terduga teroris asal Malaysia), padahal setahu saya tidak,” kata Umi, menuturkan kisahnya dalam diskusi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pada 25-27 April lalu di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamiy, Cirebon.

Suami Umi ketika itu dituding menjadi donatur aksi teror yang dilakukan kelompok dr. Azhari. Namun, Umi menepis semua tuduhan itu. Ia tidak percaya suaminya dikatakan sebagai “pemodal”. Pasalnya, ia tahu persis kondisi keuangan keluarganya.

Kehidupannya tidak berlimpah harta. Selama menikah, Umi hanya menjadi ibu rumah tangga. Satu-satunya sumber pendapatan keluarganya hanya dari sang suami yang menjadi penceramah. “Menjadi penceramah pun kerjanya paling seminggu hanya tiga kali. Makanya, uang tidak ada,” Umi mengungkapkan. Namun, aparat keamanan berpendapat lain. Suaminya ditetapkan sebagai tersangka, dan diseret ke pengadilan hingga divonis penjara seumur hidup.

Kasus Umi menjadi salah satu topik bahasan KUPI. Umi dianggap contoh dari perempuan yang terpaksa menanggung beban dari aktivitas suaminya yang dituding terlibat aksi terorisme. “Cara pandang beragama suami saya yang radikal merugikan perempuan juga,” kata Ketua Tim Pengarah KUPI 2017, Badriyah Fayumi, kepada Gatra.

Radikalisme khususnya bagi perempuan yang terdampak menjadi satu dari sembilan tema besar yang dibahas dalam KUPI. Badriyah menuturkan, melalui kongres ini para ulama perempuan diharapkan bisa berkontribusi aktif dalam menyikapi fenomena radikalisme yang kian menghangat. “yang kerap luput dari perhatian adalah bagaimana para perempuan terdampak radikalisme,” katanya kepada Gatra.

Peneliti dari Pusat Riset Ilmu Kepolisian (PRIK) Universitas Indonesia, Any Rufaedah, pernah melakukan riset bagaimana para perempuan terkoneksi dengan jaringan radikal. Pada akhir 2015 ia pernah mendampingi 39 perempuan dari keluarga terpidana teroris –kebanyakan istri terpidana, tapi ada juga yang berstatus anak. “Suaminya ini terlibat macam-macam. Bom Bali, senjata ilegal, ikut kegiatan militer di Poso atau Aceh. Ada juga karena menyembunyikan buronan terorisme. Rentang hukuman suaminya itu empat tahun sampai seumur hidup,” Any menuturkan.

Ia lantas membuat kategorisasi para perempuan ini dalam memproduksi paham radikal. Hasilnya, aktor penghubung radikalisme perempuan adalah suami, keluarga, pondok pesantren, organisasi, orang tua, dan media sosial. Namun, yang menarik lagi, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui keluarganya terlibat jaringan teroris.

Meski begitu, dampak yang mereka alami sangat besar. Mulai dari mendapat stigma negatif hingga penolakan dari masyarakat. Umi, misalnya. Ia yang awalnya ibu rumah tangga tiba-tiba harus jadi tulang punggung keluarga akibat suaminya dipenjara. Bahkan, sampai diasingkan dari pergaulan. Keempat anaknya pun juga susah. Di sekolah mereka dicemooh sebagai anak teroris. “Ini harus diperhatikan bagaimana kita memperlakukan mereka karena kebanyakan tidak tahu apa yang dilakukan suaminya,” kata Any.

Tak jauh berbeda dari Any, peneliti Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), Nava Nuraniyah, dalam diskusi juga membeberkan bagaimana perempuan menjadi pelaku terorisme. Melalui penelitiannya yang berjudul “*The Ever Changing Role of Women in Indonesian Extremist Groups*”, Nava menggambarkan ada pergeseran paradigma di kalangan ekstrimis soal peran perempuan dalam aktivitas kelompok.

Pada 2014 lalu, di Poso, para perempuan ikut ‘bergerilya’ di hutan memegang senjata. Salah satu alasannya karena kelompok radikal di sana mulai melemah. Mereka mengerahkan segala sisa tenaga yang dipunya, termasuk memberdayakan para perempuan.

Media sosial digunakan untuk merekrut perempuan menjadi pelaku radikalisme. Para perempuan yang terlibat jihad, membuat jaringan sendiri dengan memanfaatkan sosial media, seperti WhatsApp dan Telegram. Dalam penelitiannya, Nava menemukan bahwa banyak tenaga kerja wanita yang berhasil dijaring meski kuantitasnya tidak banyak. “Ini bisa dilihat dari kasus deportasi. Dulu, mereka yang dipulangkan ke negaranya kebanyakan adalah

jihadis yang tertangkap di Turki saat akan berangkat ke Suriah, sekarang justru para deportan adalah para TKW yang diduga terlibat radikalisme,” Nava memaparkan.

Tiga bulan belakangan ini, tercatat banyak TKW yang dideportasi dari kalangan buruh migran. Ada yang dari Jepang, Hong Kong, dan Singapura. Kontribusi mereka macam-macam. Ada yang menyerahkan semua tabungannya untuk Palestina, membiayai ikhwan jihadis ke Suriah, dan ada juga yang rutin berdonasi untuk kelompok jihadis.

Menurut Nava, mereka yang awalnya merasa termarginalkan kini merasa jadi bagian dari umat global. Jadi terangkat harga dirinya. “Jadi radikal itu tidak hanya ideologi tapi juga *sense of belonging*-nya,” katanya. Ia mencontohkan kasus Jannah yang baru dipulangkan dari Singapura. Jannah sebetulnya hidup bahagia dan punya majikan yang baik. Dia bebas memegang telepon genggam selama 24 jam. Ia pun belajar agama ketika ada jeda. Jannah pun mencari konten-konten Islami. Celakanya, kebanyakan konten yang muncul di mesin pencari justru produk dari kaum fundamentalis. Akibatnya, Jannah terpapar paham radikalisme.

Pemimpin Pondok Pesantren Darut Tauhid Arjawinangun, Cirebon, KH Husein Muhammad, menilai masalah radikalisme menjadi isu transnasional. Dalam sejarah Islam, fenomena ini muncul ketika terjadi perang saudara pertama antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Lalu berkembang lagi pada masa Ahmad bin Hambal, Ibnu Taimiyah, dan lainnya. “Semua cirinya sama, cara pandangnyanya sangat tekstualis,” kata Husein.

Menurut Husein, radikalisme adalah tahap ketiga dari empat proses pengembangan pemahaman keagamaan: konservatisme, fundamentalisme, radikalisme, terorisme. Jadi akarnya ada pada konservatisme. “Tesis saya adalah konstruksi atau sistem pemikiran religius kita adalah konstruksi Islam abad pertengahan di Arabiyah. Dan ini terus disosialisasikan dan tidak ada perubahan,” ujar Husein yang juga aktif mempromosikan perdamaian dan keadilan gender.

Hampir di seluruh dunia, radikalisme Islam selalu berbicara tentang dua hal. Pertama, protes melawan kerusakan moral internal. Kedua, serangan eksternal terhadap dunia Islam. Analisis kontemporer lain melihat radikalisme sebagai respons muslim terhadap sekularisme Barat. “Bukan komunis, bukan agama-agama lain. Tapi ada serangan sekularisme Barat dan dominasi mereka atas dunia Islam,” kata Husein, yang juga ketua Yayasan Fahmina tersebut.

Menangkal radikalisme, menurut Husein, diperlukan interpretasi ulang terma-terma besar mengenai kafir, muslim, musyrik, dan jihad serta batasan muslim dan kafir. Baginya, istilah-istilah tersebut mengalami reduksi besar-besaran yang jauh dari pemaknaan jernih. Kata jihad, misalnya. Al-Qur’an menyatakan itu tidak selalu berarti perang fisik. Perang fisik ada makna sendiri, *alqital*.

Badriyah Fayumi pun berharap, kongres pertama ini bisa menghasilkan rujukan yang bersandar pada ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. KUPI pun menolak radikalisme. Pembahasan tersebut menjadi peneguhan ulama perempuan mengintegrasikan nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. “Koridor kami keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Bagi kami NKRI, empat pilar itu final,” katanya.

Sumber: Gatra, edisi 4, 10 Mei 2017, hal. 30

MENUNGGU KIPRAH ULAMA PEREMPUAN

Fiqhislam.com, 11 Mei 2017

Para aktivis Islam menggelar Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pekan lalu di Cirebon, Jawa Barat. Publikasi yang mengiringi hajat mereka memang tak sehingar-bingar kongres partai. Gema kegiatan itu juga tak terlalu keras menggaung.

Meski begitu, bukan berarti tak ada makna di balik acara tersebut. Itulah kali pertama ulama perempuan Indonesia menggelar kongres secara formal. Peristiwa itu sekaligus menjadi penanda sejarah adanya upaya ulama perempuan Indonesia untuk bisa berkiprah lebih dalam bidang pemikiran Islam.

Dalam memenuhi ruang publik terhadap kebutuhan informasi dan semangat keagamaan, sejatinya telah banyak ulama perempuan di negeri ini. Pada masa lalu tentu kita semua mengenal almarhumah Prof Dr. Zakiah Darajat yang keteduhan wajahnya begitu dikenal masyarakat di televisi. Selain dakwah berkeliling dan di media massa, Zakiah juga bergelut di bidang pemikiran Islam.

Ada pula almarhumah Dr. Tuty Awaliyah yang berlatar belakang pesantren. Tuty merupakan aktivis ulama perempuan tulen yang juga dibesarkan dalam kancah dakwah. Dia bahkan menjadi pelopor pendirian Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) yang kini kegiatannya bisa dilihat di setiap sudut ibu kota Jakarta.

Belakangan kita juga bisa melihat kiprah ulama perempuan di lapangan. Ada nama almarhumah Yoyoh Yusroh yang kemudian sempat aktif di pentas politik, Irena Handono, Tan Mei Hwa, dan Dedeh Rosidah yang lebih dikenal dengan nama Mamah Dedeh.

Memang tak semua ulama yang berkiprah di lapangan juga aktif dalam bidang pemikiran atau organisasi Islam (pergerakan). Di kalangan ulama pria pun begitu. Almarhum Zainuddin MZ. adalah salah satu contohnya. Dia begitu

populer dan mendapat julukan dai sejuta umat. Setiap ceramahnya senantiasa dibanjiri massa. Namun, Zainuddin tak terlihat aktif di organisasi ulama.

Walau begitu, banyak pula ulama yang aktif di bidang dakwah, tetapi juga sangat berperan di bidang pemikiran atau pergerakan. Sebut saja almarhum Prof. Dr. Hamka. Ulama yang juga sastrawan itu tidak hanya rajin berdakwah, tetapi juga aktif di pergerakan serta pemikiran Islam.

Kembali ke masalah ulama perempuan, memadukan aktivitas di lapangan dengan di pergerakan/pemikiran memang tak bisa dipaksakan. Hal yang lebih penting adalah terpenuhinya keterwakilan dari unsur-unsur yang ada dari organisasi keagamaan di negeri ini.

Tak bisa dinafikan, dua ormas keagamaan (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) harus menjadi unsur utama yang tak boleh tertinggal dalam kongres ulama perempuan. Melalui Muslimat/Fatayat NU dan Aisyiyah (Muhammadiyah), kongres ulama bisa semakin berwarna dan memiliki bobot yang akan dipandang serta dihormati banyak kalangan. Sudah pasti kalangan akademisi dan aktivis Islam lainnya juga perlu ada dan terlibat dalam kongres ulama perempuan.

Semangat dan misi utama menggelar kongres ulama perempuan memang layak mendapat apresiasi. Kaum ulama perempuan ini punya hasrat yang kuat untuk lebih terlibat atau dilibatkan dalam mengisi ruang publik di bidang keagamaan.

Penghargaan dan pengakuan atas eksistensi ulama perempuan ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Sebagian ulama perempuan berpandangan, selama ini dominasi pria dalam pemikiran Islam begitu kuat dan nyaris meniadakan pemikiran-pemikiran yang datang dari kaum perempuan. Pandangan perempuan tenggelam oleh hegemoni pria dalam menafsirkan nilai-nilai keagamaan.

Munculnya pemikiran dari kalangan ulama perempuan kini tak bisa lagi dihindari. Ini sebagai suatu konsekuensi logis dari mobilitas sosial ke atas kaum perempuan. Selama jenjang menempuh pendidikan tidak ada pembeda dan pembatasan antara laki-laki dan perempuan, maka kian lama akan semakin banyak kalangan pemikir Islam yang hadir dari kelompok perempuan yang memenuhi sudut-sudut keberagaman dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, misalnya saat memberi contoh tentang surga, ibaratnya tak ada lagi hanya sekadar menjelaskan bahwa di surga akan dilayani oleh bidadari-bidadari cantik. Pertanyaan yang menggantung selama ini, lantas siapa yang melayani para wanita atau perempuan di surga?

Munculnya pemikiran dari ulama perempuan atas tafsir agama hendaknya tidak berdiri sendiri dan seolah terpisah dari pandangan kaum laki-laki. Justru yang diharapkan adalah pemikiran dari ulama perempuan dan laki-laki

haruslah saling mengisi dan sinkron sehingga bukan malah membuat bingung umat.

Apabila yang muncul adalah pemikiran dari ulama perempuan yang intinya merupakan upaya melepas belenggu dominasi pria dalam memahami nilai-nilai kegamaan yang ada selama ini, maka akan sangat mungkin terjadi disharmoni di kalangan umat. Ini bisa saja malah menimbulkan penolakan yang kuat dari sebagian kalangan atau masyarakat.

Kongres ulama perempuan harus mampu membuktikan bobot serta kualitas mereka dengan merangkul semua potensi dan unsur yang ada di nusantara. Jika keterwakilan, bobot, dan kualitas itu telah terpenuhi, maka mereka bisa duduk bersama dengan organisasi ulama yang selama ini didominasi pria untuk mengembangkan pemikiran islam yang lebih berkeadilan dan benar-benar memenuhi prinsip *rahmatan lil 'alamin*.

Source: <http://www.fiqhislam.com/islam-indonesia/fiqhislam/islam-indonesia/menunggu-kiprah-ulama-perempuan>

**ANTARA ULAMA,
PEREMPUAN & PEREMPUAN ULAMA**

Majalah Noor, Vol. XXIII 2017

Untuk pertama kalinya, para ulama perempuan Indonesia menggelar kongres yang tidak hanya menjadi ajang silaturahmi tapi sekaligus membawa misi besar untuk kaum perempuan di Indonesia.

Menutup bulan April ini, para ulama perempuan di Indonesia berkumpul menyatukan sikap dan pandangan tentang berbagai isu perempuan yang terjadi belakangan ini. Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang berlangsung pada Selasa hingga Kamis (25 – 27 April 2017) di Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon, Jawa Barat ini menurut salah seorang pengagasnya, Dr. Nur Rofiah merupakan kongres ulama perempuan yang pertama digelar di Indonesia.

"Kalau keulamaan perempuan dalam arti keulamaan yang mengintegrasikan keadilan substansif pada perempuan dalam ajaran Islam, bisa jadi ini yang pertama kali dilakukan di Indonesia, bahkan mungkin dunia. Namun jika kongres ulama perempuan dalam arti umum yakni perempuan-perempuan berilmu, tentu saja sudah banyak, kata dosen program Pasca Sarjana PTIQ Jakarta ini.

Tema besar yang menjadi bahasan dalam kongres yang diikuti ulama perempuan dari seluruh Indonesia dan beberapa negara itu adalah peran ulama perempuan dalam meneguhkan nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Kongres ini juga akan mengeluarkan sikap keagamaan tentang kekerasan seksual, pernikahan anak dan perusakan alam dalam konteks ketimpangan sosial.

Pelaksanaan KUPI juga berlatarbelakang dari peran besar ulama perempuan dalam setiap perkembangan peradaban Islam. Apalagi Rasulullah saw juga merupakan sosok yang sangat memuliakan perempuan dan memberi jalan kebebasan pada perempuan.

Namun tradisi keulamaan perempuan di dunia Islam, termasuk di Indonesia, juga berhadapan dengan konteks geo-politik, budaya dan proses asimilasi Islam dengan budaya lokal.

Ulama, Perempuan & Ulama Perempuan

Pelaksanaan kongres ini juga menegaskan peran ulama dalam menyampaikan pesan-pesan tentang keadilan hakiki perempuan. “Jadi, ada istilah perempuan ulama dan ulama perempuan. Perempuan ulama adalah seorang perempuan yang memiliki kapasitas keulamaan. Jadi kata perempuan di sini bermakna biologis. Sedangkan istilah ulama perempuan dimaksudkan sebagai ulama (baik laki-laki maupun perempuan) yang mempunyai kesadaran bahwa keadilan hakiki bagi perempuan sebagai bagian tak terpisahkan dari Islam. Apa itu keadilan hakiki perempuan? Adalah keadilan yang mempertimbangkan kondisi khusus perempuan secara biologis karena organ, fungsi, dan masa reproduksinya yang berbeda dengan laki-laki, dan kondisi khusus perempuan secara sosial karena ketimpangan relasi dengan laki-laki yang menyedjarah. Yang harus diketahui, ulama perempuan itu tidak harus seorang perempuan. Dia bisa jadi ulama yang secara biologis laki-laki tapi punya kesadaran seperti ini,” Nur Rofiah menambahkan.

Animo yang ingin mengikuti kongres ini juga sangat luar biasa. Lebih 1000 orang sudah mendaftar padahal kapasitas peserta hanya 500 orang. Itu pula sebabnya kami harus menyisir kembali jumlah peserta yang sudah mendaftar hingga bisa merata mewakili wilayah berbeda di Indonesia,” kata Nur Rofiah.

Selain ulama perempuan yang hampir semuanya datang secara swadaya, ada juga mitra ulama perempuan yang punya visi sama tapi tidak memiliki latar belakang keilmuan studi Islam. Sedangkan pengamat ada tempatnya sendiri.

“ Akan banyak forum yang diselenggarakan dengan berbagai seminar, antara lain, seminar internasional, seminar nasional, diskusi paralel, dan musyawarah keagamaan, yang membahas tiga topik yaitu kekerasan seksual, perkawinan anak, dan perusakan alam dalam konteks ketimpangan sosial. Pada diskusi paralel akan ada sembilan kelompok dengan berbagai topik bahasan, antara lain topik radikalisme Islam. Di samping forum serius ini, ada juga malam budaya dengan berbagai pertunjukan tentang pergerakan dan perjuangan perempuan.

Tanpa Target Kepemimpinan

Lebih lanjut Nur Rofiah memaparkan bahwa para peserta kongres berasal dari pesantren, majelis taklim, peserta pengkaderan ulama, dosen dan pimpinan perguruan tinggi, peneliti, dan lain-lain. “ Kita usahakan beberapa elemen tersebut akan terwakili karena kongres ini adalah forum silaturahmi dan tidak akan menjadi lembaga tetap. Yang pasti, tidak akan ada pelegalan

dalam bentuk lembaga atau badan apapun karena kongres ini terselenggara tanpa ada target kepemimpinan. Kongres adalah forum perjumpaan, silaturahmi, dan konsolidasi perempuan (dan juga laki-laki) yang melakukan peran keulamaan perempuan di berbagai konteks di Indonesia sehingga terjadi pertukaran pengalaman dan pengetahuan untuk memahami kondisi faktual dan memahaminya dalam konteks keadilan hakiki bagi perempuan.

Lewat kongres ini pula diharapkan akan keluar sikap keagamaan tentang isu-isu strategis. Hasilnya kita sebut sebagai hasil musyawarah keagamaan yang diharapkan menjadi pertimbangan umat dan para pengambil kebijakan. Tentu saja hasil musyawarah ini posisinya adalah rekomendasi yang sebagaimana hasil musyawarah-musyawarah serupa, tidak akan mengikat sampai ia dijadikan hukum positif di Indonesia. Validitasnya tentu saja berada di tangan umat yakni sejauhmana bisa memberi petunjuk bagi mereka dalam mengatasi masalah dalam kehidupan nyata.

Harapan kita hasil musyawarah KUPI bisa menjadi pertimbangan oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan yang ramah perempuan dan oleh masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi isu tentang perempuan.” (ade I)

Sumber: Majalah Noor, Vol. XXIII 2017, hal. 74

TIGA FATWA HASIL KUPI 2017

Majalah Noor, Vol. XXIII 2017

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) akhirnya mengeluarkan tiga fatwa, yaitu:

1. Fatwa Tentang Perusakan Lingkungan Dalam Konteks Ketimpangan Sosial bahwa hukum bagi pelaku perusakan alam atas nama pembangunan yang berakibat pada ketimpangan sosial ekonomi adalah haram secara mutlak. Namun pembangunan dimungkinkan dengan pemanfaatan dan pengelolaan alam demi kemaslahatan berlandaskan *maqasid syari'ah*.

Agama Islam pun telah mengatur dengan tegas mengenai larangan merusak alam dan memiliki perhatian besar dalam menjaga dan melestarikan alam. Tidak hanya itu, negara juga wajib melindungi alam dari segala kerusakan dan memberi sanksi tegas kepada pelaku perusakan baik individu atau korporasi.

2. Fatwa mengenai Kekerasan Seksual baik yang dilakukan di luar maupun di dalam pernikahan adalah haram karena melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam Islam.

Dalam konteks ini, perkosaan tidak sama dengan perzinahan baik secara pengertian dan pembuktian hingga pada hukuman. Sehingga korban perkosaan tidak bisa dihukum, dikucilkan, dan direndahkan martabat kemanusiaannya. Korban perkosaan berhak mendapatkan pemulihan secara psikis, fisik, sosial, hingga kompensasi.

Peran negara dalam kasus kekerasan seksual wajib hadir untuk menjamin pemenuhan hak hak warga negara, termasuk korban. Apabila negara melakukan pengabaian, mempersulit, dan menyia-nyiakan hak warga negara khususnya korban kekerasan seksual maka negara telah zalim dan melanggar konstitusi.

Tak hanya itu, bahkan negara atau pihak berwenang yang melakukan kekerasan seksual maka sepatutnya dihukum lebih berat (*taqlidu al uqubah*)

3. Fatwa mengenai 'Pernikahan Anak' dimana agama mewajibkan pencegahan segala bentuk kemudharatan. Karena pernikahan anak terbukti membawa kemudharatan maka wajib hukumnya mencegah.

Berkenaan dengan hal tersebut, pihak pihak yang berperan besar dan mempunyai tanggung jawab melakukan pencegahan pernikahan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Bagi korban pernikahan anak tetap mendapat haknya mulai dari pendidikan, kesehatan, pengasuhan dan juga perlindungan.

Karena itu, KUPI merekomendasikan agar pemerintah mengubah UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan terkait dengan batas minimal seorang perempuan boleh menikah dari semula 16 tahun menjadi 18 tahun.

Source: Majalah Noor, Vol. XXIII 2017, hal. 76



Bagian Kedua

Liputan Media

Kongres Ulama Perempuan Indonesia Berbahasa Inggris



**INTERNATIONAL SEMINAR ON WOMEN ULAMA
“AMPLIFYING WOMEN ULAMA’S VOICES,
ASSERTING VALUES OF ISLAM,
NATIONHOOD AND HUMANITY”**

Amanindonesia.org, March 17, 2017

The term “ulama” is often associated with male. In fact, “ulama” can be applied to both female and male, which are characterized by: a) holding strong knowledge on Islamic studies; b) understanding and implementing prophetic roles in expanding universal values of religion as *rahmatan lil alamin* (Blessing for the whole universe), c) care of social issues, d) promote critical thinking in tradition, e) being agent of changes with more constructive and evaluative way.

In Indonesia, the role of female ulama has been institutionalized as formal organization, that serve millions members such as Muhammadiyah and Nahdatul Ulama. The organization like Aisyiah and Nasyiatul Aisyiah, have been engaging women from Muhammadiyah basis in women empowerment. Like Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, claimed as traditionalist, is also active in promoting women empowerment and social changes under the leadership of two organizations called Fatayat and Muslimat. Other minority organization like Persistri, as wing organization of Persis (United Islam), is trying to respond to the need of women in gaining more knowledge and participating in social life (*tafaqquh fid-dien*)., *Lajnah Ima’illah*, an Ahmadi women-led organization and *Muslimah Ahlul Bait Indonesia (Muslimah Abi)*, a syiah based organization, also show strong passion in carrying out prophetic roles towards promoting public awareness on education, health, economic empowerment etc. In the context of nation state, Indonesia female ulama developed productive collaboration with male ulama and practitioners during the fights for independence of Indonesia, and promote unity of the country, as well as preserving nationhood principles.

The institutionalization of the role of female ulama in global level shows different patterns but contributes to social justice. Some networks like Women Living under Muslim Laws and Musawwah are well-known in producing and

disseminating new approach to Islamic text, which is more women-friendly. They bring together female ulama and practitioners to do collective action to promote Islam from gender perspective. Other networks such as Muslim Women Network, Jewish Muslim Women Network, African Muslim Environment Network, are engaging directly with women confronting violence against women, environmental degradation, education, health, radicalism and terrorism etc in the form of collective action. The Asian Muslim Action Network (AMAN), a network among progressive Muslim in Asia, also engages female ulama in responding to crisis during conflict and disaster.

There are four objectives we would like to achieve:

- Develop common knowledge about “ulama” from the perspective of history, socio political cultural context, roles and concrete contribution of women ulama in the advancement of women and human civilization
- Facilitate a forum for women ulama overseas to share their experiences and analysis in promoting Islamic teaching in the field of women empowerment and social justice covering strategy, obstacle, and challenge in mobilizing community for social change
- Build strong analysis on critical issues relating to violence against women, child marriage, migration, and preventing violence extremism from perspective of acadimia, ulama and practitioners of women empowerment
- Identify strategies to further develop the knowledge base and sharpen analysis on these issues, to be used by advocates to influence policy and practice in the region
- Contribute to the formulation of religious fatwa about contemporary issues on women and Islam on the basis of lived experience of women, Islamic texts, national and global instruments

The International forum will be held on, April 25, 2017 in IAIN Syekh Nurjati, Jl. Perjuangan Cirebon West Java-Indonesia.

There will be no registration fee. Participants of International Forum on Women Ulama are requested to download application from at www.kupi-cirebon.net or participants can also use online application that is available on the website. Submission of application can be sent to registration@kupi-cirebon.net.

Participants who need visa should send application not more than MARCH 31st, 2017. However, if you are free-visa participants, your application should be received by the organizer on April 7th, 2017

Sumber: <http://amanindonesia.org/international-forum-on-women-ulama-amplifying-women-ulamas-voices-asserting-values-of-islam-nationhood-and-humanity/>

FEMALE CLERICS STAGE NATIONAL CONGRESS IN CIREBON

Thejakartapost.com, April 25, 2017

Indonesia's first female clerics' congress kicked off on Tuesday with around 700 participants – which included academics – from across the nation and several Muslim-majority countries.

The congress aims to boost the role of female clerics in disseminating Islamic teachings in line with social values and nationalism.

Organizers said they had to turn down 500 applicants due to capacity restrictions, but many still turned up to the venue at Pondok Pesantren Kebon Jambu Al Islamy, an Islamic boarding school in Cirebon, West Java.

“Many residents and other nearby *pesantren* [Islamic boarding schools] have prepared to accommodate visitors,” said organizer Ninik Rahayu, formerly of the National Commission for Women against Violence (Komnas Perempuan).

The congress, which ends Thursday, is held by three Islamic civil organization, comprising Fahmina Foundation, an affiliation of Wahid Institute, Islamic study center Rahima and family rights group Alimat.

The event's theme can "be narrowed down to three major issues: child marriage, sexual violence against women as well as environmental damage" contributing to social inequality, said Ninik, a commissioner of the Indonesian Ombudsman.

These are issues that participating clerics believe are most relevant in their respective communities, she added. (Nurul Fitri Ramadhani)

Source: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/04/25/female-clerics-stage-national-congress-in-cirebon.html>

GETTING IN SAME BOAT ON GENDER SENSITIVITY

Pressreader.com, April 25, 2017

Implementing religion in our daily lives is challenging because different people have different values. Many religious authorities in Indonesia promote peace. However, some religious groups have used religion as justification for violence.

The same can be seen with regard to women's rights. On the one hand, religion is used to protect women's rights in many Muslim countries, while in countries like Afghanistan or Saudi Arabia, women's rights are restricted using religious justifications.

Do these religious policies for women reflect women's voices? To find out it is necessary for women to raise their voices and weigh in on issues of women's rights and religious jurisprudence.

Indonesia's first Congress of Women Ulema should continue the spirit advocating women's rights in Indonesia. Last month, a women's long march was held in Jakarta along with similar marches in other nations.

Following Kartini Day on April 21, which commemorates a national heroine for women's rights, the first Congress of Women Ulema is to be held in Cirebon, West Java on April 25 to 27. It is to reflect the strong desire of many gender practitioners and scholars to fight injustice and stand for equality.

The congress would be crucial to solve many problems that women face. Just take the reports in mid-April on Aghnia Adzkie, an Indonesian student who had graduated from the University of London who was ordered by Italian immigration officials in an airport to take off her hijab.

Some said there is nothing wrong with proving that the woman was a regular passenger and not a terrorist, but this policy, particularly the way it has been implemented by many Western countries, has become a sensitive issue

because the hijab is seen as an individual right for women. No one should force a woman to take off her head scarf.

Facing that assault by a sovereign state is a dilemma for many Muslim women in Indonesia and abroad.

How should women deal with that kind of situation? Is it justifiable to take off their head scarves under certain conditions? Who is eligible to recommend a solution?

We need an authority that could recognize the procedure to follow and provide a justification for women's actions — the voice of women ulema is one such necessary source.

A recent survey by the United Nations Population Fund (UNFPA) in Indonesia found that onethird of Indonesian women have faced physical or sexual violence. Indonesia was ranked 88th out of 144 countries in the world in the gender gap index, which is worrying as it is the world's fourthmost populated country.

This means Indonesia measured poorly for women's economic participation, education and political empowerment. There are about 111 million Muslim women in Indonesia out of a total population of 260 million, according to the 2016 data of the Indonesian Demographic Profile.

This shows that in building solidarity with many women organizations and helping women to be empowered, women ulema could help half of the country. Their recommendations could help empower women, especially those isolated by government, private companies, or communities.

Recently, 91 bylaws were issued with a "sharia nuance" that restrict women's involvement in public or private spheres, adding to previous bylaws.

These policies, such as curfews, dress rules, virginity tests, and marriage constraints for religious minorities, must be followed by the citizens under their jurisdiction.

For those citizens, their first question must be what *ijma* or *qiyas* (Islamic jurisprudence) did local governments refer to when they created these policies? Local governments shouldn't be creating sharia for women on an *ad hoc* basis and with opaque decision-making processes.

The restriction of women in public and private spheres using religious justifications must be discussed critically on a national level. It is hard to understand the impact of these policies on women's rights without the religious oversight of a national body like that of the women ulema.

Institutionally, a forum of women ulema could initiate the dialogue and cooperate with government, such as the Women's Empowerment and Child Protection Ministry and local governments. This dialogue is necessary to develop mutual understanding and create rules based on gender sensitivity.

Through a gender sensitivity framework, a forum or body of women ulema is needed to encourage the reconciliation of Islam with human rights. Islam and the human rights discourse don't negate each other.

This can be seen in the pro-human rights stance of international Islamic organizations such as the Organization of Islamic Cooperation (OIC).

Ruhaini Dzuhayatin, the Indonesian member of the OIC's Independent Permanent Human Rights Commission, explained that she encountered doubts from Islamic fundamentalist groups about a human rights approach in Indonesian law.

Before the commission was formed, some fundamentalists didn't recognize human rights in Islam. The Commission, however, has been successful in convincing fundamentalists that Islam acknowledges human rights.

The upcoming congress of the women ulema must be an impartial body for all Indonesian Islamic communities. We hope this initiative will make a great impact on women's lives and make women's issues a focal point, not only in Indonesia, but also worldwide.

The writer is a research and program associate of the Study Center for Religion and Democracy (PUSAD) Paramadina in Jakarta. (Fini Rubianti)

Source: <https://www.pressreader.com/indonesia/the-jakarta-post/20170425/281728384404484>

**INDONESIA'S FIRST FEMALE CLERICS
CONGRESS TO FEATURE
INTERNATIONAL SPEAKERS**

Thejakartapost.com, April 25, 2017

Afghan Ambassador to Indonesia Roya Rahmani will share her experience on “engaging female *ulema* [Muslim scholar] in promoting women’s rights and peace,” while Kenyan speaker Ulfat H. Masibo of the Supreme Council of Kenya Muslims will speak on “strengthening community resilience” and “engaging women *ulema* in responding to ISIS [the Islamic State].”

Pakistani Bushra Qadeem will share his experience on challenging religious extremism at the community level. Nigerian Rafatu Abdul Hamid will talk about the fate of hundreds of girls abducted by extremist group Boko Haram in his presentation on “Islamism, politics and women’s security in Nigeria.”

During the three-day congress, Indonesian female clerics will discuss and issue *fatwas* (an Islamic ruling) regarding crucial issues directly affecting millions of Indonesian women, such as child marriage, sexual violence and environmental damage.

In addition to clerics, academics will also address the congress, held at the Kebon Jambu Al Islamy Islamic boarding school led by noted female cleric Masriyah Amva. (Nurul Fitri Ramadhani/ary)

Source: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/04/25/indonesias-first-female-clerics-congress-to-feature-international-speakers.html>

**INDONESIA'S FIRST FEMALE MUSLIM
CLERICS CONGRESS AIMS TO STRENGTHEN
WOMEN'S ROLES**

Thejakartapost.com, April 26, 2017

The first National Congress of Female Muslim Clerics (Ulema) marked the conclusion of its opening session on Tuesday with the reading of a pledge by seven female clerics representing seven regions across the country.

The three-day congress is expected to come up with recommendations on Thursday, its final day, on the roles female Muslim clerics can play in tackling women's issues, according to an organizer of the event.

Congress organizer Ninik Rahayu said Tuesday's pledge aimed to show that the recommendations would be based on not only Quran and Hadist as the main reference of Islamic teachings, but also on the Indonesian constitution as the country's highest legal text, as well as international legal references.

Several well-known figures attended Tuesday's closing, held at the Kebon Jambu Islamic boarding school in Cirebon, West Java, including Netty Prasetyani, the wife of West Java Governor Ahmad Heryawan; Cirebon Regent Sunjaya Purwadi Sastra; and chairwoman of the Nahdlatul Ulama's women's wing Fatayat, Anggia Ermarini.

"I hope the results of the congress will be able to push Muslim women to be better educators for children and help reduce the number of sexual violence against women," Netty said. (Nurul Fitri Ramadhani /dan)

Source: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/04/26/indonesias-first-female-muslim-clerics-congress-aims-to-strengthen-womens-roles.html>

**ROLE OF WOMEN
SEEN AS VITAL
TO RESISTING ISLAMIC EXTREMISM**

Thejakartapost, April 26, 2017

The role of women in negotiating with and educating communities on peaceful Islamic teachings has proven to have had some effect in stemming the influence of violent extremist groups and healing affected communities, speakers at an international seminar said on Tuesday.

Several female clerics, scholars and activists from Muslim-majority countries, including Nigeria, Afghanistan, Pakistan and Indonesia, shared their experiences in the one-day discussion on female ulema. The discussion was part of the first congress of female ulema, which officially opened in the evening at the Kebon Jambu Al-Islamy boarding school.

In Nigeria, a country that is threatened by the Islamic militants Boko Haram, female ulema have started to get directly involved in education in a bid to spread tolerant Islamic teachings, the scholar Rafatu Abdulhamid said.

“Muslim women can play better roles than men in teaching and education. We can teach people and children that Islam is not what Boko Haram adopts, that Islam is tolerant and upholds peace,” Abdulhamid told The Jakarta Post after the discussion at the Syekh Nurjadi Islamic Institute.

Many of the female Muslim scholars, ulema and activists, she said, established educational programs for women and children about moderate Islamic teachings. Many also provided psychological support and trauma healing for female survivors of Islamic radicalism, including former followers of Boko Haram.

The counseling and education programs are crucial to healing communities that stigmatize girls and women who have been abducted, raped and impregnated, she said.

“Can [the mothers] throw their children into the dustbin?” Abdulhamid asked rhetorically.

Abdulhamid said radical Islamism, particularly in Nigeria, was caused by ignorance and the misuse of Islamic knowledge. People are made to believe that causing violence or killing is an act of worship, she said.

“Women are abducted and molested arbitrarily. Many women were forced to join the group instead of becoming the next victim,” she said.

Afghanistan Ambassador to Indonesia Roya Rahmani said Muslim women could introduce a narrative of “dynamic Muslims.” She said Muslim women should be recognized as good negotiators because they could embrace people more effectively and tenderly than men.

From Pakistan, Bashra Qadeem shared her experiences promoting respect for different faiths and cultures in high schools in Peshawar, where communities often see teenage boys recruited into becoming suicide bombers.

Through “a very subtle approach,” Qadeem and her fellow activists communicate with mothers who have lost their sons to extremism and who have even “stitched suicide jackets” and promoted martyrdom.

Through dialogue, in which the mothers are eventually convinced that such “martyrdom” is wrong and not Islamic, the women could become “agents of change,” Qadeem said, and stop seeking out nephews and other teenage boys to be suicide bombers.

Speakers said the challenge was that even for women that were highly knowledgeable about Islam, too few were recognized as being on par with male ulema.

In Aceh, for example, Indonesia’s only province authorized to adopt sharia, the concept of female ulema still faces resistance, said researcher Eka Srimulyani.

Malaysian activist Zainah Anwar said the journey toward an Islam that upholds equality and justice remains a long and challenging one.

“But for us, there is no choice. We don’t want to emigrate. We must stay and fight for the country we want to live in,” Anwar said. (Nurul Fitri Ramadhani and Ati Nurbaiti)

Source: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/04/26/role-of-women-seen-as-vital-to-resisting-islamic-extremism-in-indonesia.html>

FEMALE MUSLIM CLERICS IN INDONESIA ISSUE RARE FATWAS

Thefrontierpost.com, April 27, 2017

Female Islamic clerics in Indonesia declared a series of fatwas Thursday, including one to tackle child marriage, a rare example of women taking a leading religious role in the Muslim-majority country.

The fatwas were issued at the end of a three-day congress of female clerics in the country with the world's biggest Muslim population. The meeting in Cirebon on Java island, billed as the world's first major gathering of female Muslim clerics, attracted hundreds of participants. Most were Indonesian but there were also clerics from Pakistan, India and Saudi Arabia.

They issued a series of fatwas at the end of the gathering, the most eye-catching of which was aimed at tackling child marriage. It urged the government to raise the minimum legal age for women to marry to 18 from the current age of 16. The United Nations childrens' agency UNICEF defines child marriage as a formal marriage or informal union before age 18, and says women are most affected.

The problem is widespread in Indonesia, with one in four women marrying before 18, according to the agency. Religious Affairs Minister Lukman Hakim Saifuddin, who attended the meeting, suggested authorities would examine the proposal: "I will take this commendation to the government." He also praised the gathering: "This congress succeeded in fighting for justice in the relationship between men and women."

Among the other fatwas issued was one against women being sexually abused; and one against environmental destruction, in a country that struggles every year with huge fires that are started illegally and devastate vast swathes of rainforest. Fatwas are regularly issued in Indonesia but it is usually the male-dominated Indonesian Ulema Council—the country's highest Islamic authority—that declares them. About 90 percent of Indonesia's population of 255 million people are Muslim.

Source: <https://www.thefrontierpost.com/article/82575/female-muslim-clerics-indonesia-issue-rare-fatwas>

FEMALE MUSLIM CLERICS IN INDONESIA ISSUE FATWAS ON CHILD MARRIAGE, WOMEN SEXUAL ABUSE

Pakistaninewspapers.info, April 27, 2017

Female Islamic clerics in Indonesia declared a series of fatwas on Thursday, including one to tackle child marriage, a rare example of women taking a leading religious role in the Muslim-majority country.

The fatwas – religious edicts that have no legal force but are influential – were issued at the end of a three-day congress of female clerics in the country with the world’s biggest Muslim population.

The meeting in Cirebon on Java island, billed as the world’s first major gathering of female Muslim clerics, attracted hundreds of participants. Most were Indonesian but there were also clerics from Pakistan, India and Saudi Arabia.

They issued a series of fatwas at the end of the gathering, the most eye-catching of which was aimed at tackling child marriage. It urged the government to raise the minimum legal age for women to marry to 18 from the current age of 16.

‘Women should be given equal rights’

The United Nations children’s agency Unicef defines child marriage as a formal marriage or informal union before age 18, and says women are most affected.

The problem is widespread in Indonesia, with one in four women marrying before 18, according to the agency.

Religious Affairs Minister Lukman Hakim Saifuddin, who attended the meeting, suggested authorities would examine the proposal: “I will take this recommendation to the government.”

He also praised the gathering: “This congress succeeded in fighting for justice in the relationship between men and women.”

Women Entrepreneurs: Subcommittee formed to resolve issues

Among the other fatwas issued was one against women being sexually abused; and one against environmental destruction, in a country that struggles every year with huge fires that are started illegally and devastate vast swathes of rainforest.

Fatwas are regularly issued in Indonesia but it is usually the male-dominated Indonesian Ulema Council – the country’s highest Islamic authority – that declares them.

While the Ulema Council has issued rulings on environmental protection in the past, it tends to focus on religious topics such as edicts against blasphemy. It has rarely dealt with any issues affecting women.

About 90% of Indonesia’s population of 255 million people are Muslim.

The post Female Muslim clerics in Indonesia issue fatwas on child marriage, women sexual abuse appeared first on The Express Tribune.

Source: <http://www.pakistaninewspapers.info/archive/04/female-muslim-clerics-in-indonesia-issue-fatwas-on-child-marriage-women-sexual-abuse/>

PATRIARCHY BLAMED FOR DOMESTIC VIOLENCE

Pressreader.com, April 27, 2017

After having been married for almost two years, Andriani, not her real name, said her husband began to change, becoming more aggressive and prone to violence.

“Several times after work, he scolded me. I was just trying to ask him what I had done wrong, but he slapped me. I was shocked. He was not the same man I knew before,” the 25-year-old said about the man she had earlier dated for five years.

The idea of reporting him to the police or a support group, or telling her parents, was never on her mind, because he told her that such harsh treatment was allowed under Islam. In addition, she believed her husband did not mean to hurt her.

“After scolding or assaulting me he usually apologizes and gently approaches me, telling me that it was my mistake that made him angry and that the Quran doesn’t prohibit husbands from hitting wives. And I have to obey him, because now he is my husband,” she told The Jakarta Post.

Andriani’s experience is still common, inspired by misinterpreted or abused Islamic teachings widely blamed for patriarchy. At the national seminar of women ulema on Wednesday in Cirebon, Muslim scholar Nur Rofiah of the College of Quranic Teachings in Jakarta said Islam urged men to treat women with respect.

Patriarchy or *al abawi* was a social, not a religious, practice, she said, in which males had the highest, even total, authority, while women were marginalized “or even considered non-existent,” she said.

In her presentation on the methodology of Islamic study based on justice for women, Nur Rofiah cited the commonly abused instruction that women must obey their husbands.

“The Quran never states that women should obey their husbands,” she said, adding that the verses on the obligation of women to “obey” referred to God.

Indonesia, Nur said, is now fairly open to discussing the emancipation of women. “However this space could close if [conservative] views with no perspective of justice become stronger,” she said.

The National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) revealed last year that there were 10,205 reports of domestic violence, but this is suspected to be only the tip of the iceberg of unreported cases such as the above case of the young wife.

Around 57 percent of them, or almost 5,800 reports, were violence by husbands against their wives. Physical abuse dominated in terms of type of violence, accounting for about 42 percent, followed by sexual abuse with 34 percent and mental including verbal, abuse with 14 percent. The figure was only slightly lower than the previous year, where there were over 11,200 reports including dating violence, which contributed 24 percent.

Komnas Perempuan commissioner Masruchah told the Post that patriarchy and ignorance about Islamic teachings continued to preserve the belief that women must obey men.

“Many victims and perpetrators learned [to accept these beliefs and domestic violence] from how their fathers treated their mothers,” Masruchah said.

Following the international seminar on women ulema on Tuesday, the speakers concluded that “Women are entitled to take the lead and have the right and authority to define what Islam means because women suffer in the name of Islam.” The statement added, “This is why women are at the forefront of demanding justice as the core principle of Islam, even if change and challenging patriarchy in religion is not easy and requires courage.”

Machasin, a scholar from Sunan Kalijaga Islamic State University in Yogyakarta, said women must be more strongly encouraged to speak their minds.

“They should be there to step forward and voice their opinions, although there will still be many objections [from conservatives],” Machasin said. (Nurul Fitri Ramadhani)

Source: <https://www.pressreader.com/indonesia/the-jakarta-post/20170427/281569470618871>

**POLYGAMY
NOT PART OF ISLAMIC TEACHINGS:
MUSLIM CLERICS**

Thejakartapost.com, April 27, 2017

Responding to the long-standing controversy over polygamy, Indonesia's women Muslim clerics are emphasizing that the practice is not part of Islamic teachings.

According to Siti Ruhaini Dzuhayatin, who represents Indonesia in the Organization of Islamic Cooperation's (OIC), Islam never introduced the concept of having multiple spouses at once.

"Polygamy has existed since the *jahiliyyah* era. At that time, men were allowed to have an unlimited number wives," Siti said, referring to the era of "ignorance" in Middle Eastern history prior to the advent of Islam.

"When Islam came, it humanized the practice by limiting the number [of wives a man could take]," she added.

Many conservative Muslims still claim that polygamy is allowed in Islamic teaching. The government, however, upholds the principle of monogamy with Article 3 of the law, which stipulates that a man is only allowed to have one wife.

The law allows men take a second wife under certain conditions, such as cases in which his first wife suffers from a serious illness or is unable to bear a child.

"We should learn that the Quran itself pushes for monogamy; it says that if men are not able to treat women fairly, then they must only have one wife.

So, the requirement [for taking a second wife] is strict and that's because the practice can lead to violence against women," said cleric Nur Rofiah of the Jakarta Quranic College. (Nurul Fitri Ramadhani)

Source: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/04/27/polygamy-not-part-of-islamic-teachings-muslim-clerics.html>

SEXUAL VIOLENCE BETWEEN MARRIED COUPLES HARAM, CLERICS SAY

Thejakartapost.com, April 27, 2017

Female Muslim clerics attending an Indonesian women's *ulema* congress in Cirebon, West Java, issued on Thursday a *fatwa* that says sexual violence *isharam* (forbidden under Islamic law), even if it occurs between married couples.

“All forms of sexual violence are *haram* for both married and unmarried couples. Islam and the Constitution have guaranteed that all people must be protected from sexual violence,” said Priyati, a female cleric from Jakarta, on Thursday.

According to the fatwa, sexual violence is against the people's *hifd an nafs* (right to life), *hifd al irdhu* (rights of freedom and being respected) and *hifd an nasl* (rights to reproduce), all of which are the rights that are guaranteed under Islamic law, which is in line with the 1945 Constitution.

The fatwa also declares that *zina* (adultery or a sexual act outside a marriage) is different than rape. *Zina* occurs when both men and women are willing to have sexual intercourse. Meanwhile, rape is a situation when someone is forced to have sex, in which their refusal does not need to be explained in a statement, it says.

“Thus, rape victims must not receive punishment,” Priyati said.

The National Commission of Violence Against Women revealed 16,217 cases of sexual violence across Indonesia throughout 2016, sharply increasing from 11,207 cases in 2015.

Female cleric Ninik Rahayu said they are hopeful that women sexually assaulted by their husbands would now report the violence to the police following the implementation of the fatwa.

“All this time they have remained silent because they considered it not to be sexual violence if it was treatment they received from their own husbands,” she said. (Nurul Fitri Ramadhani)

Source: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/04/27/sexual-violence-between-married-couples-haram-clerics-say.html>

FEMALE CLERICS DECLARE FATWA ON CHILD MARRIAGE IN INDONESIA

Freemalaysiatoday.com, April 28, 2017

Female clerics on Thursday issued an unprecedented fatwa against child marriage in Indonesia in a bid to stop young girls becoming brides in the world's most populous Muslim country.

The fatwa – which is influential among Muslims but not legally binding – came at the end of an extraordinary three-day conference of female Islamic clerics: a rare example of women assuming a lead role in religious affairs in this mostly-Muslim country.

“Maternal mortality is very high in Indonesia. We as female clerics can play a role on the issue of child marriage,” conference organiser Ninik Rahayu told the Thomson Reuters Foundation.

“Female clerics know the issues and obstacles women face, we can take action and not just wait for the government to protect these children,” she said by phone from Cirebon in the West Java province, where the congress was held.

Indonesia has one of the worst records for under-age marriage – its high number of child brides puts it among the top 10 countries worldwide and it is common for girls to marry before they turn 18.

Thursday's fatwa, or religious edict, called underage marriage “harmful” and said its prevention was mandatory.

Fallout of early wedlock

One in six Indonesian girls marry before they turn 18, equal to 340,000 girls a year, according to the United Nations children's agency UNICEF. About 50,000 wed before they turn 15.

A government report last year showed almost a quarter of married women aged 20-24 had entered wedlock when they were under 18.

The Southeast Asian nation has a population of 250 million.

Under Indonesian laws, the minimum age of marriage for girls is 16, and 19 for boys.

In issuing the fatwa, the women clerics cited studies saying many Indonesian child brides could not continue their studies once wed and half their marriages ended in divorce.

They urged the government to raise the minimum marriage age for girls to 18, a demand activists have sought for years.

Early marriage not only makes it more likely that girls will quit school, campaigners say it also increases the risks of exploitation, sexual violence, domestic abuse and death in childbirth.

About 300 participants took part in the congress, which included Indonesian women clerics and women leaders from Afghanistan, Pakistan and Malaysia.

Organisers billed the three-day conference as the first meeting of its kind in the world.

The congress also issued two other fatwa against environmental destruction and sexual violence, which the clerics said are against Islamic teaching and fundamental human rights.

Source: <http://www.freemalaysiatoday.com/category/highlight/2017/04/28/female-clerics-declare-fatwa-on-child-marriage-in-indonesia/>

FEMALE ISLAMIC CLERICS IN INDONESIA ISSUE RARE CHILD MARRIAGE FATWA

Bbc.com, April 28, 2017

Female Islamic clerics in Indonesia have issued an unprecedented fatwa against child marriage.

The fatwa, which is not legally binding but will be influential, was issued after a three-day congress of female clerics in the country.

The clerics urged the government to raise the minimum legal age for women to marry to 18 from the current 16.

Indonesia is a majority Muslim country and has among the highest number of child brides in the world.

According to the UN's children office Unicef, one in four women in Indonesia marries before the age of 18.

Fatwas are issued regularly in Indonesia, but usually by the Indonesian Ulema Council - the highest Islamic authority in the country which is made up almost entirely of men.

Who are Indonesia's female clerics?

Hundreds of women descended on Cirebon, on Java Island, for the Indonesian KUPI Women's Ulema Congress.

Most of the clerics - experts in Islamic sacred law and theology - were from Indonesia, but speakers travelled from as far away as Kenya, Pakistan and Saudi Arabia to take part in the conference, said to be the first major gathering of female Muslim clerics.

Female clerics, or "ulema", have existed in Indonesia for hundreds of years, but their role has been played down previously. Nowadays, they help empower

their communities and lead educational institutes, organisers say. It is hoped the congress will highlight the vital role they play.

Steering committee chairman Badriyah Fayumi told the BBC: "Through this conference, we want to state that female clerics exist, and have been proven to contribute, and this is the time to acknowledge their existence, and to give an appreciation for the... contribution of the female clergy."

The committee will now present its recommendations to the relevant groups - including the government - which will then decide on whether or not to take them any further.

The fatwa called underage marriage "harmful" and said preventing it was mandatory.

"Female clerics know the issues and obstacles women face, we can take action and do not just wait for the government to protect these children," Ninik Rahayu, the conference organiser, told Reuters.

The female clerics cited studies which highlight that many Indonesian child brides are not allowed to continue their education and half the marriages end in divorce.

The child marriage fatwa was one of a series issued during the congress. There were also edicts against women being sexually abused, and environmental destruction.

Source: <http://www.bbc.com/news/world-asia-39741891>

AVOIDING CHILD MARRIAGE 'MANDATORY'

Thejakartapost.com, April 28, 2017

An 11-year-old girl was raped years ago by her own grandfather, who also played the role of muezzin (caller to prayer) in his community.

When the girl became pregnant, her grandmother approached a midwife for an abortion. The midwife refused, fearing she would commit a sin. The grandmother then sought the help of a local female cleric in Bondowoso, East Java, Ruqoyyah, who accompanied them on another visit to the midwife.

An abortion was conducted after Ruqoyyah convinced the midwife that an abortion of a pregnancy caused by rape was not sinful; "besides the girl could not marry her grandfather, as incest, being haram, is a sin."

Ruqoyyah added that the girl's future should be considered.

Child marriage remains rampant in Bondowoso, second only to Madura in East Java, said Ruqoyyah — who was forced to marry at the age of 14, and who also survived domestic violence in her second marriage.

After educating the community through prayer groups and other functions, "Alhamdulillah [Thank God]", she said, child marriage had decreased and fewer parents were taking their daughters out of school to marry them off once they were considered physically mature.

The first Indonesian Women's Ulema Congress ruled on Thursday that "avoiding child marriage is mandatory", to cheers and applause at the Kebon Jambu Al Islamy Islamic boarding school in Babakan Ciwaringin, Cirebon.

In the first of three rulings, read out by scholar Habib Djunaidi of Banjarmasin, South Kalimantan, the congress urged the increase of girls' legal marrying age from 16 to 18.

As the Constitutional Court has thwarted a judicial review attempt to change the minimum marrying age for girls in the 1974 Marriage Law, citing fears of sin, among others, Religious Affairs Minister Lukman Hakim Saifuddin

told the audience he would immediately convey the recommendation to Women's Empowerment and Child Protection Minister Yohanna Yembise so the government could draft an amendment to the law.

Habib read out the reasons for the ruling, "First, religion obliges all people to avoid and fight every factor that can cause mudharat [harm] and child marriage contains many mudharat such as maternal death."

"Second, prevention [of child marriage] is the responsibility of parents, educators, society and the state, central and local government."

"Third, victims of child marriage must receive formal education and health care just like any other child, as well as protection from all kinds of violence and discrimination. Their parents are obliged to continue to take care of them."

The ruling added that schools must continue to ensure victims of child marriage could continue their studies, "including when a girl becomes pregnant."

During Wednesday's discussion group on child marriage, researcher Mukti Ali raised the issue of using Islamic sources, including Quranic verses, to justify child marriage. This is implied in Surah Al Thalaq, despite Surah Al Rum mentioning Allah's creation of couples "so that you can feel blissful toward him/her". The aim of blissful families cannot be achieved through child marriage, Ruqqoyah, said.

The congress results were far too late for one deaf girl who was raped and forced to marry her rapist. This was the family's decision, a participant said, as her voice cracked. "So I had to prepare her [dress and do her makeup], but I feel I've sinned."

The second congress ruling was also groundbreaking: that sexual violence is haram within and outside a marriage. The third was that development that caused damage to the environment was also haram.

The congress rulings, while non-binding, are to serve as a reference for matters considered urgent by over 1,000 congress participants. (Nurul Fitri Ramadhani and Ati Nurbaiti)

Source: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/04/28/avoiding-child-marriage-mandatory.html>

**FEMININE ISLAMIC CLERICS
IN INDONESIA CHALLENGE UNCOMMON
BABY MARRIAGE FATWA**

Currentnewsbulletin.com, April 28, 2017

The congress has introduced collectively feminine Islamic leaders from a number of international locations.

Feminine Islamic clerics in Indonesia have issued an unprecedented fatwa towards baby marriage.

The fatwa, which isn't legally binding however will probably be influential, was issued after a three-day congress of feminine clerics within the nation.

The clerics urged the federal government to boost the minimal authorized age for girls to marry to 18 from the present 16.

Indonesia is a majority Muslim nation and has among the many highest variety of baby brides on the earth.

Based on the UN's kids workplace Unicef, one in 4 ladies in Indonesia marry earlier than the age of 18.

The congress, held in Cirebon on Java island, is being known as the primary main gathering of feminine Muslim clerics.

Fatwas are commonly issued in Indonesia, however normally by the Indonesian Ulema Council – the best Islamic authority within the nation which is made up nearly completely of males.

“Feminine clerics know the problems and obstacles ladies face, we are able to take motion and don't simply look forward to the federal government to guard these kids,” Ninik Rahayu, the convention organiser, informed Reuters.

The feminine clerics cited research which spotlight that many Indonesian baby brides will not be allowed to proceed their schooling and half the marriages finish in divorce.

You may learn extra protection of the convention from the BBC's Indonesian language web site.

Source: <http://www.currentnewsbulletin.com/feminine-islamic-clerics-in-indonesia-challenge-uncommon-baby-marriage-fatwa/>

**INDONESIA: FEMALE CLERICS
ISSUE FATWAS AGAINST CHILD MARRIAGE,
MARITAL RAPE**

Asiancorrespondent.com, April 28, 2017

UNDERAGE marriage, marital rape, and destruction of the environment were targeted by religious edicts issued by a group of prominent female clerics in Muslim-majority Indonesia this week.

The first fatwa from the inaugural Indonesian Women's Ulama Congress (KUPI2017) was to declare marital rape haram or "forbidden" according to Islam. The religious edicts or fatwas were debated and issued at the conclusion of the event in Cirebon, West Java, which ran from Monday to Thursday.

Sexual violence, including within marriage, is a significant problem in Indonesia.

A recent nationwide survey by the country's government statistics body Statistics Indonesia (BPS) found that a quarter of married women had experienced violence at the hands of their husbands.

Netty Prasetyani the wife of West Java's governor said: "I hope the results of the congress will be able to push Muslim women to be better educators for children and help reduce the prevalence of sexual violence against women."

Fatwas are rulings on Islamic law and are not legally binding in the country although they can have significant moral influence on the Muslim community.

Another fatwa of the congress condemned child marriage and urged the Indonesian government to raise the minimum age for marriage from 16 to 18.

It is estimated that one in seven girls is married before the age of 18 in Indonesia, with some studies indicating rates of child marriage as high as 35 percent in some regions.

Indonesia's Religious Affairs Minister Lukman Hakim Saifuddin, who was in attendance, said, "I will take this recommendation to the government."

A final fatwa declared exploitation and destruction of the environment haram, particularly in the context of Indonesia's stark social inequality.

The country has one of the highest rates of deforestation in the world, and peatland burning by oil palm producers caused major toxic smog across Southeast Asia in 2015.

The event's stated purpose was to "emphasise the importance of women's clerical positions, to acknowledge their work, and to discuss their opportunities and challenges."

"Female clerics, like male clerics, carry the mission of the Prophets to side with and defend the *dhu'afa* and *mustadh'afin* (weak and weakened)," says the congress website.

"In carrying out this prophetic mission, female [Islamic] scholars often experience various challenges, such as exclusion, exclusion, even violence," it adds.

The event, attended by delegates from Pakistan, Saudi Arabia and India, attracted numerous influential figures, including Anggia Ermarini, the chairman of Fatayat – the women's wing of Nahdlatul Ulama (NU) – the largest Islamic organisation on the planet.

At its conclusion, minister Lukman stated that, "This congress succeeded in fighting for justice in the relationship between men and women." (Nurul Fitri Ramadhani)

Source: <https://asiancorrespondent.com/2017/04/indonesia-female-clerics-issue-fatwas-child-marriage-marital-rape/#BeCLtWrTWl3LKfHm.97>

FEMALE ISLAMIC CLERICS ISSUE RARE FATWA

Bbctv.co.ke, April 28, 2017

Female Islamic clerics in Indonesia have issued an unprecedented fatwa against child marriage.

The fatwa, which is not legally binding but will be influential, was issued after a three-day congress of female clerics in the country.

The clerics urged the government to raise the minimum legal age for women to marry to 18 from the current 16.

Indonesia is a majority Muslim country and has among the highest number of child brides in the world.

According to the UN's children office Unicef, one in four women in Indonesia marry before the age of 18.

The congress, held in Cirebon on Java island, is being called the first major gathering of female Muslim clerics.

Fatwas are regularly issued in Indonesia, but usually by the Indonesian Ulema Council – the highest Islamic authority in the country which is made up almost entirely of men.

“Female clerics know the issues and obstacles women face, we can take action and do not just wait for the government to protect these children,” Ninik Rahayu, the conference organiser, told Reuters.

The female clerics cited studies which highlight that many Indonesian child brides are not allowed to continue their education and half the marriages end in divorce.

Source: <http://www.kbctv.co.ke/blog/2017/04/28/female-islamic-clerics-issue-rare-fatwa/>

WOMEN ULEMA STRUGGLE AMID CONSERVATISM

The Jakarta Post, May 6, 2017

“I am often mocked and ignored. Many husbands prohibit their wives from coming to my [Quran] recitations because they think I teach their wives to rebel,” said Shinto Nabilah Asrori, a nyai (female cleric) from Magelang, Central Java. Male clerics in the area have said she is too modern, she told the first ever Congress of Indonesian Women Ulema.

The leader of the Al Hidayat pesantren (Islamic boarding school) was citing the challenges she faced as a female ulema spreading her understanding of the Quran that teaches females are on a par with men.

In her testimony, which drew laughter from the audience, Shinto said one woman once asked whether she had sinned as she had repeatedly refused her husband’s demand for sex, “even while she was frying tempe [soybean cake].”

Meeting his demand was impossible, she said, even as he threatened her with physical abuse, for he had repeatedly announced their “divorce.” In Islam the verbal announcement, stated at least three times, is as valid as a divorce confirmed in court.

Presented with such a dilemma, as the husband was unemployed and would have nowhere to live in the event of a separation, nyai Shinto told the woman to say special prayers for three days, while she would help seek a solution. Women keep coming to her sessions called the “S3”

for santri sampun sepuh (elderly Islamic students), she said. Other speakers at the Congress in Cirebon, West Java, held from April 25-27, said that around 1,000 years ago, female ulema played crucial roles as religious figures, intellectuals and policy makers. The commissioner of the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) Hussein Muhammad cited among them Sukainah bint al-Husain, the great granddaughter of the Prophet Muhammad.

However, he said, women began to be marginalized following the rise of patriarchy, which restricted women from activities outside the home in the name of “protecting women from slander.”

This situation prevails to this day, speakers said, despite many female ulema putting forward new Islamic ideas, including criticism of conservative views.

Heroines like Kartini were unexpectedly cited as among Indonesia’s early female ulema, for the speakers said they had sought out Islamic teachings to understand the acute discrimination they confronted as women.

Siti Aisyah, chairperson of Aisyiyah, the women’s wing of the Muhammadiyah, one of Indonesia’s largest Islamic organizations, said today’s female ulema face even more complex challenges, with the increasing influence of conservative and radical Islamic teachings.

The most formidable challenge comes from fellow women with more conservative views. Groups such as the Family Love Alliance (AILA) easily attract middle class followers with their advocacy of improving family harmony and morality, while female preachers often repeat interpretations that reinforce male superiority. The often-cited obligation of women to “obey” their men, the ulema Nur Rofiah said, is actually based on verses that meant “obeying God, not husbands.”

However female ulema have strengths comparable to their male counterparts, said Machasin, a professor at Islamic State University (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta: religious knowledge that is more sensitive to issues of inequality, a generally more gentle approach to teaching and lovebased leadership. (Nurul Fitri Ramadhani)

Source: The Jakarta Post, May 06, 2017

FEMALE ULAMA VOICE A VISION FOR INDONESIA'S FUTURE

Newmandala.org, May 30, 2017

Islam, the religion of the vast majority of Indonesian citizens, is a site of contestation in envisioning Indonesia's future. Gender equity as a democratic value has been a strong claim since the fall of Suharto. Recent international focus has been on the Jakarta gubernatorial elections and the campaign against Chinese background Christian governor Ahok by hard-line Islamists, ending in his blasphemy trial and conviction (and electoral loss). While his Islamist opponents—apparently allied with crony capitalists—have seized media attention, their vision of Indonesia's future under sharia law is not uncontested.

In April, Indonesian religious scholars and activists hosted a world first: a convention of female religious authorities (*ulama*). The conference title, KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia), played with a dual meaning: female religious authorities, and scholars (male and female) whose interpretations of the Qur'an and Hadith proclaim gender equity (*kesetaraan jender*) as a fundamental principle of Islam. Over three days, speakers and delegates discussed the history of female religious authority in Indonesia—a claim that is highly contentious to hard line groups who argue that male authority, as prayer leaders and hence as political leaders, is a fundamental Islamic principle. They also discussed the more abstract concepts of social justice and human rights, as fundamental Islamic values focusing on issues like sexual and domestic violence and child marriage.

Day one was an international seminar (*pictured above*) where female speakers from other majority Muslim nations, including Saudi Arabia, Pakistan, The Sudan and Kenya (which has a substantial Muslim minority) joined leading Indonesian female *ulama*. Many of the international speakers commented that it would be unthinkable to have such a convention in their countries, and in particular they would not get official support, as this convention did. A representative of the Minister of Religious Affairs (which regulates Islamic

affairs including education and marriage) and the local district head (*bupati*) both spoke at the opening ceremony, and the Minister of Religious Affairs, Lukman Hakim Saifuddin, closed the conference on the third day. The first day ended in a pageant where seven women *ulama* from across the country enacted the sources that would be used in developing the *fatwa* that would outline the main findings of the conference: these included the Qur'an; Hadith (Prophet traditions); Kitab Kuning ('Yellow Books'—the books of religious instruction used in Islamic schools [*pesantren*]); the Indonesian Constitution and international instruments like the UN Declaration on Human Rights.

The mention of the constitution as a source of principles for Indonesia's Muslims is a direct challenge to the Islamist desire to have sharia law as the basis of Indonesia's legal system. Further, the emphasis on international instruments challenges the attack by hardliners on what they see as 'alien' and 'liberal' values. The women also held up small trees representing the environment, indicating the role of Islamic values in stopping rapacious destruction of the environment as another key issue.

The international speakers outlined that while gender equity is a struggle in all the countries represented, in many places they face struggles already won by women in Indonesia. For example, the speaker from Saudi Arabia discussed the campaign 'I am my own *wali*' (guardian): Saudi women need their male guardians' permission to marry (and travel abroad or have medical treatment) whereas for Indonesian women, the issue is the discrepancy in the minimum age of free choice of marriage for female Indonesian citizens between different legal instruments. The speakers from Pakistan, The Sudan and Nigeria discussed the sensitive issue of how women educators combat radicalism through working with young people and with mothers of radicalised youth.

Siti Ruhaini Dzuhayatin, a notable Indonesian female cleric who currently heads the Independent Human Rights Commission of Organization of Islamic Co-operation (IOC) was another international speaker. She argued for Islamic values protecting human rights and that the Qur'an basically pushes for monogamy, accommodating and humanising polygamy which was a pre-Islamic practice and not part of Islamic teaching. Another instance of international co-operation in promoting women-friendly Islamic values was reported by Zainah Anwar, a founder of Sisters in Islam in 1998 which has now developed an international organization Musawah, a 'global movement for justice and equity in the Muslim family'. She praised Indonesia's record on gender equity, while acknowledging the challenges still to be faced.

The congress attracted nearly 2000 registrants—more women than men, and a mix of scholars and activists, of all ages. There were delegates from all over Indonesia. It was held at the State Islamic Institute and also on the campus of the *pesantren* (religious boarding school) Kebon Jambu Al-Islamy in Cirebon, West Java, which is headed by a woman scholar, Nyai Hj. Masriyah Amva. The congress site had a carnivalesque atmosphere, with small stalls selling clothes

and food, banners lining the entrance road, a tent erected for the opening ceremony and some plenary discussions, and cultural and music performances, including many performances of Shalawat Keadilan, or joyous songs in praise of the Prophet with a theme of equity. These popular renderings of Islamic values have been promoted by the groups that organised the congress as a way of bringing their interpretation to a wide audience.

Violence against women and women's rights within marriage and the family were key issues. The Cirebon cleric Kiyai Haji Hussein Muhammad, who has been a pioneer of interpretations of the Qur'an that promote gender equity, and who has served in the National Commission on Violence against women (Komnas Perempuan), is well known for problematising polygamy as an Islamic practice. Hussein has been a leading figure arguing against textualism (interpretations of the Qur'an and Hadith that do not take account of social and cultural context), which is seen as a source of hard line Islam.

The Kiyai received a rousing cheer from the audience when the session chair identified him from the podium. Polygyny (*poligami*) has long been contentious in Indonesia, with the 1974 marriage law restricting it and putting it under the authority of the religious courts with strict rules for approval. One judicial challenge to the polygamy restriction on the grounds that it is a restriction on religious freedom was unsuccessful, but another is in preparation.

The second day of the conference began with the women *ulamameeting* to discuss the doctrinal issues related to the three core issues of the congress: sexual violence against women, child marriage and environmental protection as a gender issue. These topics were picked up in workshops in the afternoon, to discuss the religious textual foundation, social research, and action to combat the identified problems.

I attended the workshop on child marriage, another issue that has recently been highlighted through the practices of emerging hardline groups. Supporters of legal reform challenge to the minimum age of marriage for girls in the marriage law (16) had mounted a judicial challenge in the Constitutional Court. They argued that it was at variance with the age of marriage specified in the UN Declaration on the Rights of the Child to which Indonesia is a signatory. The Constitutional Court rejected the appeal, and used Islamic texts in its decision. The workshop, led by several young male *kiyai*, reviewed the textual justifications for banning child marriage, arguing the focus of the Court decision had been too narrow. From the textual basis they moved to report on research on practices and impact of child marriage while working on strategies, including a further legal challenge that would present a broader set of texts, and the research results.

The vision of Indonesia's Islamic future that the convention presented was that associated with Indonesia's major mass organisation, NU (Nahdlatul

Ulama). This promotes the view of Indonesian Islam as tolerant, fundamentally democratic and supportive of religious harmony; and promotes what Islamic scholar Azumadi Azra calls Indonesia's 'colourful' Islam as variable and adaptive to local cultures. The movement for women-friendly interpretation of Islam has been occurring since the 1990s, especially associated with Kiyai Hussein and the groups Rahima and Fahmina, that were instrumental in organising this congress. It was supported by women's organisations of the major Islamic movements in Indonesia, NU and Muhammadiyah, both of whose members number in the millions. By contrast, the women's wings of the emergent Islamist groups, such as Hizbut Tahrir, oppose gender equity on the grounds that it is a Western, liberal, agenda and support the regulation of gender relations through conservative application of sharia.

The congress ended with a declaration of three *fatwa*, reinforcing the value of female religious authority. The first *fatwa* argued for a minimum age of marriage of 18; the second, that sexual violence against women, including within marriage, is *haram* (forbidden). The third *fatwa* picked up the theme of environmental protection: environmental destruction is *haram* as it can trigger social and economic imbalances and place burdens on women. The congress called on the government to stop allowing the destruction of natural resources for 'development'. Congress attendees have strong links into the community, and the organisers hold significant institutional positions, respect and support from government. This movement has been slowly building for a long time and is a significant voice in defining the future of Indonesia. **(Kathryn Robinson)***

Kathryn Robinson is Emeritus Professor in the School of Culture, History & Language, ANU College of Asia and the Pacific.

Source: <http://www.newmandala.org/female-ulama-voice-vision-indonesias-future/>

**IN INDONESIA,
FEMALE CLERICS SEEK
RECOGNITION AND RIGHTS FOR WOMEN**

Newsdeeply.com, May 31, 2017

Women “ulama” – Muslim clerics – recently held their first ever national gathering in West Java. The goal was twofold: to gain recognition for women religious scholars, and to advance women’s rights by sharing their interpretation of Islamic texts.

“WHY IS THERE nothing written in the Quran or the [Book of] Hadith about husbands who do not satisfy their wives sexually? Are there any punishments for men like there are for women who refuse sex?”

The question drew loud applause, as the woman asking it, wearing a colorful hijab like all the 800 or so women in the audience, sat back down.

This was the first gathering of the national congregation of Muslim women “ulama” (clerics) from across Indonesia. They met for three days in late April in Cirebon, West Java, to assert themselves as scholars and preachers of Islam on par with men.

At the gathering, referred to as Kongress Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), a wide range of socio-political issues were discussed and fatwas were issued, all of them informed by the clerics’ study of Islam and their experiences as women.

The idea for the gathering was born five years ago. The Indonesian Ulama Council (MUI) refused to recognize women as ulama, a position conferred based on a person’s knowledge of the Quran and the Book of Hadith. In response, various women’s groups from different Muslim organizations came together and discussed the need for a space that would empower women ulama to assert their own positions, issue fatwas and question the state.

“Women have been ulama since the beginning of Islam, but women’s names have disappeared from any references thanks to a patriarchal interpretation of Islam and political history”

Attendees included women working at the community level as well as those immersing themselves in Islamic study at universities. KUPI also invited ulama and scholars from Nigeria, Kenya, Pakistan and Saudi Arabia to share their experiences. A number of non-clerics were also present, notably secular activists who believed it was important to engage with religion in this Muslim-majority country. This included Kamala Chandrakirana, who founded the country’s National Commission on Violence Against Women and who took part in planning KUPI.

“Women have been ulama since the beginning of Islam, but women’s names have disappeared from any references thanks to a patriarchal interpretation of Islam and political history,” Chandrakirana says.

Prior to the conference, as the organizing committee discussed the three-day program’s structure via WhatsApp groups, she says she realized that many women did not describe themselves as ulama. She says this shying away from owning their religious erudition explains the absence of documentation on the number of female ulamas in Indonesia.

“Women ulama have created spaces in their communities for conversations that enable women to speak up and question whether Islam permits husbands to beat wives”

“Women ulama have created spaces in their communities for conversations that enable women to speak up and question whether Islam permits husbands to beat wives,” Dwi Rubiyanti Kholifah, Indonesia country director of the Asian Muslim Action Network says. “The ulama is able to respond from the perspective of classical texts as well as feminism.”

The gathering’s location was symbolic. It took place in the expansive courtyard of the Kebon Jambu al-Islamy Pesantren, an Islamic boarding school led by a woman, Nyai Masriyah.

In her speech at the gathering’s opening ceremony, during which several male ulama and male students were present, she said, “I have been crowned a feminist. But what does ‘feminist’ mean? It is forbidden for a woman to conform to man or any other creature, except God. She does not need a man, except as a comrade and a friend. So ladies and gentlemen, do not worry. The KUPI movement is very affectionate to men – we will treat them with the highest respect, as much as any other creature created by God.”

Anthropologist Kathryn Robinson of the Australian National University, who has extensively researched Islam in Indonesia, was present at the opening ceremony.

She remarked, “They held up the Quran, the Kitab Kuning [the Indonesian “Yellow Book” of Hadith], the constitution, and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, as they proclaimed these as the basis of their [discussions] and of their fatwas.

“They have immense pride in upholding the values that each of the documents represent, and that is essentially what secular Islam in Indonesia looks like.”

The conference included several parallel sessions in which pressing issues were discussed, including sexual violence, polygamy, radicalism, peace and security, and education. Three fatwas were issued: against sexual violence, against child marriage and against environmental degradation. Even though not legally binding, fatwas can be tremendously influential

During the three days of the gathering, attendees could also get free pap smears at a designated room inside the compound.

Nenny Agustina Adamuka, a graduate student of international studies, thought she had signed up for a religious meeting, but was surprised to see that issues pertaining to women were also being discussed. “I never knew that my religion has never allowed women to be subjugated. I was also surprised when some women were so progressive that they said that Muslims can marry non-Muslims – I am still not sure about this,” she said.

“We will need to use the energy created to engage in advocacy, lest this first gathering be just a bubble with no action”

A visit from the Minister of Religious Affairs, Lukman Hakim Saifuddin, was seen as a clear message that women ulama were recognized as legitimate. At the closing ceremony, many women were in tears, hugging each other, ecstatic over this newfound acknowledgment of their role as torchbearers of Islam and defenders of women’s rights.

As the dust settled in the Pesantren and the residents of Cirebon returned home, Chandrakirana said she felt that history had been created: “Such a communal spirit is true to the spirit of Islam.”

Even after KUPI had concluded, the WhatsApp groups kept buzzing with activity, with the 200-plus core organizers sharing photos and texts. But Kholifah says the work is far from over: “We will need to use the energy created to engage in advocacy, lest this first gathering be just a bubble with no action.” (Written By Priyanka Borpujari)

Source: <https://www.newsdeeply.com/womenandgirls/articles/2017/05/31/in-indonesia-female-clerics-seek-recognition-and-rights-for-women>

INDONESIAN MUSLIM WOMEN ENGAGE WITH FEMINISM

Theconversation.com, June 1, 2017

Can a Muslim be a feminist? Many Muslim women and men have fought for liberation, justice and freedom, but some still question if feminism and Islam are aligned.

The practice of Muslim women wearing headscarves is often taken as a sign that they are objectified through religious practices. Genital mutilation, child marriage, domestic violence and polygamy in Muslim majority societies are practices said to be based on Islamic teachings.

This leads to the argument that being a Muslim means one lacks “agency” as one must submit to certain teachings.

Western feminism understands agency as a self-realisation and freedom for everyone to exercise their free will. Therefore, they should not be subject to tradition, culture or social coercion.

Indonesia’s First Feminist

Stories of Indonesia’s early feminist, Kartini, and the recent world-first female Muslim clerics congress in Indonesia both offer insights in this discussion. They highlight the struggle of Muslim women for equality, justice and freedom.

A national hero, Kartini was a young woman fighting against feudalistic and patriarchal Javanese culture founded on diverse foreign values, including Hinduism, Islam and Western colonialism. In her time (she was born in 1879), education was not for girls. Society’s expectation was only for girls to become a wife, give birth and look after children.

Her story, which has recently been made into a feature film in Indonesia, suggests her ideas about equality were influenced by her Dutch friends. But it

was also Kartini's encounter with Islamic teachings that allowed her to learn that the Quran guaranteed equality for men and women.

Tragically, although she campaigned against polygamy, her ailing father's request forced Kartini to accept marriage to a man who already had three wives.

Female Clerics Taking Over

As if in the steps of Kartini, the gathering of almost 500 female religious scholars in Cirebon, West Java, is a milestone in Muslim women's fight for equality.

The well-versed clerics are leaders of Islamic boarding schools and preachers. They believe gender equality is guaranteed in Islam and that the Quran, the source of Islamic teachings, is not misogynistic. The subjugation of women has instead been influenced by the male domination of Quranic interpretation.

Since the time of the Prophet, the authority to read and interpret the Quran has always been in the hands of men. In the congress, female religious scholars from the Middle East and the region passionately discussed strategies to take over this space and gain authority.

Malaysian Zainah Anwar, the founder of Sisters in Islam, delivered a passionate speech about fighting male domination in Quranic interpretation.

She told congress participants Islam gives women the right to define what Islam is. It is important for women to initiate reform and participate in public policy within the framework of Islam, the Indonesian constitution and universal human rights and women's rights, she said.

The clerics believed complex issues like child marriage, domestic violence, polygamy and women's role in combating the rise of radicalism could only be challenged if women took the lead in the interpretation of Islamic teachings.

Polygamy was one of the prominent themes in the congress. Ruhaini Dzuhayatin, a former human rights official at the Organisation of Islamic Cooperation, told the audience she always had to argue against her male colleagues in various meetings on women's rights, and on polygamy in particular.

She said: "I told them it [polygamy] is not the teaching of Islam and I use verses in the Quran to support my argument."

The audience responded with a big round of applause.

Nur Rofiah, a professor in Quranic studies, explored how men have exploited particular verses to justify taking additional wives. According to Nur, Islam says every human being has to elevate the status of humankind, and polygamy does not.

At the congress, the female clerics released a fatwa to lift the minimum age for girls to marry to 18. The Indonesian Marriage Law stipulates 16 as the minimum marrying age for girls.

Although a fatwa does not have legal force in Indonesia, by issuing it the female clerics have taken a bold stand. Fatwa-making is traditionally a male-dominated field.

By taking this approach, the female clerics are attempting to open Muslim women's minds to the idea that they should not only listen to male clerics on questions affecting their identity as Muslim women.

Muslim Women's Agency

The idea that Muslim women lack agency is hard to reconcile with this vibrant new network of intellectual women. They no longer accept becoming victims of male domination and they use Islamic teachings to challenge patriarchal practices. They take advantage of any available public avenue to express their need for independence, to be seen and heard.

Does this make them feminists? If they look upon their faith as one source of inspiration that motivates and helps them to achieve strength and independence, then Indonesia has millions. (By Dina Afrianty (Postdoctoral Research Fellow, Australian Catholic University)

Source: <http://theconversation.com/indonesian-muslim-women-engage-with-feminism-78424>

FEMALE ULEMA SPEAK UP DESPITE OBSTACLES

The Jakarta Post, June 16, 2017

*Hope and despair fills the first half of 2017 in efforts to protect the rights of women and girls. In late April the first ever Indonesian Women Ulema Congress issued a fatwa on preventing child marriage and ending sexual violence. Yet, child marriage remains legal, and deliberation on a sexual violence bill has stalled. The Jakarta Post reporters **Nurul Fitri Ramadhani** and **Ati Nurbaiti** led these reports following the congress in Cirebon, West Java.*

In the highlands of North Sumatra province, preacher Nani Ayum Panggabean was invited to speak at a celebration of Isra' Mi'raj (Ascension Day of Prophet Muhammad). Her sermon dwelled on a popular theme: how to build harmonious relationships within the family.

The leading preacher quoted relevant Quran verses, such as one stating "that men and women are equal; that men must treat their wives well and be the family breadwinners." When delivered in cities like Medan, the provincial capital, the message should stir "no problem."

"But the next day the village chief's wife came to me, saying, 'Please don't say such things [...], we're ashamed; we're quite fine. Just preach on Isra' Mi'raj."

So Nani questions how messages of the first ever recent women ulema congress could, with the support of local authorities, reach villages to help change such views.

Around the beautiful Lake Toba, the preacher said, men do not exactly abuse their wives. "But there women usually work on the farms while men sit around at coffee shops," she said. Her remarks were met by grins from the men.

Nani was among some 1,200 participants at the congress and a preceding international seminar focusing on "the role of women ulema in strengthening values of Islam, nationhood and humanity."

The collective voice of local and foreign women clerics and *pesantren* (Islamic boarding school) leaders shattered chronic neglect of urgent issues at the grassroots level, including the victimization of women and girls.

From the main venue at Kebon Jambu Al Islamy *pesantren* in the village of Babakan Ciwaringin, Cirebon, the women ulema issued three historic fatwa to loud applause. The first stated that “preventing child marriage is mandatory,” and therefore it is the responsibility of the government, parents, teachers, religious figures and informal leaders to prevent child marriages.

In response, Religious Affairs Minister Lukman Hakim Saifuddin said when closing the congress that he would take up the fatwa with other government offices. This would mean a commitment to overcome the fact that the legal age for marriage is 21, but with parental consent girls can marry at 16 and boys at 19 or younger — in line with the 1974 marriage law upheld by the Constitutional Court. A famous cleric, for example, wed his son at 17 last year, despite criticism.

The second fatwa, which states “all forms of sexual violence is haram,” both within and outside marriage, goes against longstanding views that a woman faces hell if she refuses her husband’s sexual advances.

The third fatwa ruled that “development which exploits the environment is haram,” as discussions at the congress had revealed increasingly difficult access to resources amid reckless development across villages.

Daily experiences of these female religious leaders and conditions of women and communities eventually led to the urgency of strengthening the role of female ulema. But many women religious figures are also beholden to patriarchal views, “especially if they benefit from the system,” said lecturer Nur Rofiah. As a result, the congress led to the concept of “women’s ulema,” meaning female and also male “pro-women” ulema “who possess and incorporate gender perspective in their actions.”

In practical terms, the congress raised the need for more special training of female ulema, especially through sharia faculties in Islamic higher education. But regardless of formal education the women encouraged each other that “it’s never too late to learn,” said *Nyai* Masriyah Amva, the host of the Cirebon congress.

While such leaders cited family and community members who held them back, they also credited mothers, fathers or fathers-in-law who encouraged them to learn; while other relatives would resent a clever woman in their midst “who was allowed freedom to sit and study,” *Nyai* Ruqoyyah, a *pesantren* leader from Bondowoso in East Java, was cited as saying.

With personal experiences including forced child marriage, abuse and widowhood, the women leaders eventually drive independence and courage in other women and youth in their *pesantren* and communities.

“*Nyai* (Masriyah) told us that we will have to study to become independent,” said a graduate of the Al Islamy school, Hilyatul Aulia. In her village in East Cirebon she was the only unmarried 18-year-old. The belief is that girls would be old maids if they are not engaged by 15, said Hilyatul, now a student at a nearby institute.

Another graduate, promising young female ulema Neng Yanti Khozana, echoed the challenge of a small recruitment pool for female religious leaders. Once a girl is considered mature enough, she said, they are taken out of school to be married off, often preferably to relatives, such as in Cirebon.

Pesantren owners seek males to lead their schools, so *kyai* who have no sons wed off daughters as the son-in-law will inherit the *pesantren* leadership. For poor families, it is a matter of status and pride when someone asks for the hand of their daughter, especially if she has studied at a *pesantren*.

Like other women, the first challenge of a *Nyai* is their own marriage; despite their mastery of religion they can “get drowned” in a life dominated by the *kyai*.

After each trip Indonesians expect *oleh-oleh* (gifts); and one preacher said hers was very special.

“The *oleh-oleh* that I take from here is [a lesson from] *Nyai* Masriyah that one only needs to lean on Allah,” said a participant from Surakarta, Central Java. With this she said she was sure she could spread heretical sounding things from the congress, such as the idea that a woman is not automatically and totally subordinate to a man.

“This understanding is still taught across *pesantren* in Surakarta,” she said, declining to give her name. She added a lengthy “process” was required to teach new notions, such as that negotiation is possible and necessary between husband and wife.

Source: *The Jakarta Post*, June 16, 2017, Hal 8

TRAUMA EMBOLDENS FEMALE CLERICS

The Jakarta Post, June 16, 2017

At the recent first-ever congress of female clerics in Cirebon, West Java, participants expressed different opinions on gender relations between husbands and wives.

While several interviewees said women and men were equal, some said wives should be totally submissive to their spouses to earn a place in heaven; as wives were akin to “Adam’s most crooked rib.”

However, survivors of child marriage and domestic abuse do not spread such messages – especially when they become religious leaders.

Ruqoyyah of Bondowoso, East Java, recited her experience of forced marriage at the age of 14.

After being divorced, she wed a man who would often hit her.

“I was told to be patient,” she said. He eventually became a lawmaker, and once, after she had confronted him with her suspicion that he had taken another wife, the man placed a sickle around her neck, threatening murder. Ruqoyyah was eventually sheltered by activists.

Ruqoyyah said such experiences had strengthened her commitment to help women. Today she is a *nyai* (a title for female religious leaders in Java), leads a *pesantren* (Islamic boarding school) and educates the surrounding community on ending domestic abuse and child marriage, which is prevalent in the area.

She dismissed the view that girls were ripe for marriage once they began menstruating.

“How can *keluarga sakinah* [a harmonious family] be achieved with child brides?”

Responding to a tearful woman who said she had been forced to prepare her own deaf niece to marry her rapist, who had impregnated her, Ruqoyyah said victims should not be forced to marry their rapists.

She recalled how she had accompanied a girl for an abortion following a rape by the girl's own grandfather. She said the midwife had earlier refused the grandmother's request for an abortion, fearing sin, but Ruqoyyah had convinced her that abortion of a pregnancy caused by rape was not sinful.

Extreme cases of objectification of women amounted to the "disappearance of true Islamic justice for women," said lecturer Nur Rofi ah, one of the speakers at the congress. *Dakwah*, or religious propagation, by these female clerics was their main strategy to end the injustice.

And some *nyai* have their own ways to reach that goal. *Nyai* Shinto Nabilah Asrori of Magelang, Central Java, for instance, reaches out to students and community members through her composition of Javanese *tembang* songs.

One song about relations in marriage says: "A man of dignity/does not bark at his wife/ together they discuss/..."

The host of the international event, *Nyai* Masriyah Amva, 56, candidly shared her struggles to prove the worth of a female religious leader.

Following a divorce and the death of her second husband, the charismatic leader of the Kebon Jambu Al-Islamy Islamic boarding school said she had finally stopped "looking for a man to lean on."

"I've found him — it is Allah," she had told her students. Typically *santri* (students) leave when they feel the *pesantren* leaders leave — and Masriyah said she had been panicked.

But eventually she proved that a woman could do it "even better" with the Kebon Jambu Al-Islamy school expanding both in size and student numbers under her leadership.

Masriyah has shared her stories in almost 20 books, one of which, titled *Bangkit dari terpuruk* (Rising after a fall), was sold out at the event. In her books, she comments on discrimination of female religious leaders.

"While *kyai* are expected to take many wives, a religious female leader must be angelic; thus the status of a divorced widow, and then a widow by death, is utterly painful," she said.

Masriyah also shared how the credibility and integrity of herself and the boarding school were at risk when rumors were spread that she had a crush on a man around her son's age.

Even though the role of female *pesantren* leaders is still debatable, speakers at the congress believed that female clerics were often more directly engaged with the grassroots than male clerics and intellectuals, making their

voices the most valid against patriarchal views. However, there are too few of them, especially those with a solid educational background.

Neng Dara Affiah, for instance, is probably the only female *pesantren* leader that is also a former member of the National Commission of Violence against Women and a PhD graduate of political and social sciences at the University of Indonesia.

While a *pesantren* leader must solve all problems at the school and community level, the challenges for women are even greater, more so for those considered rebellious.

“Loneliness” is the greatest challenge of a *nyai*, Neng Dara believes.

Source: *The Jakarta Post*, June 16, 2017, Hal 8

**A FATWA AGAINST SEXUAL VIOLENCE:
THE STORY OF A HISTORIC CONGRESS
OF FEMALE ISLAMIC SCHOLARS**

Opendemocracy.net, June 26, 2017

Can women interpret Islamic law? Scholars who think so recently gathered in Indonesia, where fatwas were also issued against child marriage and environmental degradation.

Can women interpret Islamic law? This question would have been a ‘no-brainer’ to a Muslim from Damascus in the 12th century, when women served as renowned teachers of the Islamic tradition, and the opinions of women jurists on questions of Islamic law carried weight comparable to that of male jurists.

Yet, if one asks a Muslim today: have you ever asked a woman for an interpretation of Islamic law?, the answer from Dakar to Dhaka, from Sarajevo to Cape Town, from Jakarta to Ann Arbor will usually be “no”.

Women are not asked to interpret Islamic law, and few expect them to do so. Very often, this is because women are not sufficiently trained for this work. If they are, they tend to be consulted only on so-called ‘women’s issues’ such as child rearing, a wife’s duties towards her husband and towards others in the family, household organisation, and hygiene.

In recent years, however, Muslims in different parts of the world have started to address gender imbalances in juristic expertise. In India, Turkey and Morocco, programs have been set up to train women as *muftis* (jurists who can issue fatwas or expert legal opinions). Judicial bureaucracies in Malaysia and the Palestinian Authority have begun to hire female judges in their sharia courts.

Recently, Indonesian organisations also joined forces to convene the Muslim world’s first congress of *ulama perempuan*: women Islamic scholars.

This historic event, held in late April in Cirebon, West Java, was nothing short of a breakthrough in terms of re-establishing the long-lost juristic authority of women to produce Islamic legal recommendations and rulings. It concluded with the issuance of three historic fatwas – against sexual violence, child marriage, and environmental degradation exacerbating gender inequality.

Between us, we have studied Islamic authority and gender for decades. We interviewed several of the women scholars, as well as some of the male attendees, involved in the event to learn more about it and the deliberations process. We have also been able to analyse some of the copious explanatory material issued by the congress.

“It was nothing short of a breakthrough in terms of re-establishing women's juristic authority”

Women's juristic authority was squarely on the agenda. Such authority can manifest itself in Islam in several ways including by leading prayer, reciting the Qur'an, delivering a sermon, transmitting a hadith (a saying of the prophet). The pinnacle of this authority is the ability to interpret Islamic sources to make recommendations of behaviour in the here and now.

In most contemporary Muslim societies, this is exercised in two main ways. The first is by issuing fatwas. These are legal recommendations based typically on interpretations of the Qur'an and hadith. (Different sects in Islam regard different hadiths as authentic, and therefore the specific source material differs from sect to sect.)

A person trained to issue a fatwa is called a *mufti*, with the feminine form in Arabic *muftiya*. Fatwas are only recommendations and they are not binding. But they can carry great weight. In some countries, policy makers take fatwas of leading Islamic authorities into account when, for example, considering reforms to family law, inheritance, Islamic finance or food and medicines regulations.

The second way this authority is exercised is by serving as a judge in an Islamic court. This requires deep engagement and expertise interpreting religious sources, and the needed erudition and experience can take decades of study and training to acquire.

In Indonesia, for instance, family courts for the Muslim majority apply Islamic law (non-Muslims are subject to civil family law). Since the 1950s, judges for these courts have been trained in the country's Islamic state institutes.

Although female judges of Islamic law were unheard of at the time – and remain a minority – admission to these institutes was not restricted to men. And so women also completed this advanced training and, from the 1960s, some have been appointed judges in Indonesia's Islamic courts.

In 1970, Sudan also appointed women as judges in courts applying what's known as "non-codified" Islamic law (under which judges must interpret original sources, as there is no codified text issued by the state, like a statute or book of law).

However, it would take another 35 years before women would be appointed to Islamic courts in other countries. Malaysia did so in 2005, the Palestinian Authority in 2009, and Israel just a few months ago appointed the first woman judge to its Islamic courts.

The congress in Indonesia aimed to raise awareness about these developments and strengthen local initiatives to promote women's juristic authority in Islam. Importantly, it showed that it's not only women who stand behind this struggle. Male scholars, while a minority, were also among the speakers and attendees.

"It's not only women who stand behind this struggle. Male scholars were also at the congress."

At the congress's core was "*musyawarah keagamaan*" (religious deliberation) to formulate fatwas. In many Muslim countries fatwas are associated with individual Islamic leaders, but Indonesia has a long tradition of fatwas issued by Islamic institutions' 'fatwa commissions.'

The women *ulama* at the congress issued three fatwas. This in itself was historic as fatwa issuing has long been monopolised by male clerics. (There are, for example, only seven women *ulama* out of 67 members of the fatwa commission of Majelis Ulama Indonesia (MUI) – a prominent Islamic organisation, set up by the government in the 1970s).

The first fatwa issued focused on sexual violence. It emphasises that such violence including within marriage (marital rape) is forbidden under Islamic law (*haram*). It also distinguishes *zina* (adultery and fornication) from rape. It emphasises that victims must receive psychological, physical and social support – not punishment.

The second fatwa concerns child marriage. It says these practices bring harm (*mudarat*) to society. The *ulama*'s accompanying commentary calls for raising the Indonesian legal marriage age for girls from 16 to 18 years. Importantly, as most child marriages are not registered with the state in the first place, the fatwa also tells ordinary Muslims and imams that it is obligatory (*wajib*) to prevent them.

The third fatwa links environmental destruction and social inequality. It describes environmental degradation for economic gain as *haram* and says it has in recent decades in Indonesia exacerbated economic disparity with women the most affected. It notes how drought, for example, adds to the burdens of rural women typically responsible for preparing food and fetching water.

Participants told us that deliberations on this fatwa also touched on issues of land and forest governance, and how deforestation affects women in particular. It demanded that the Indonesian government should impose strict punishments on perpetrators of environmental destruction. Among other things, the discussion noted illegal deforestation campaigns in Indonesia to make space for vast palm oil plantations.

“Like the best judges in any society, the women *ulama* are also experts in diverse contemporary issues”.

The women *ulama* based their religious interpretations on four sources: the verses of the Qur’an, hadith, *aqwal ‘ulama* (views of religious scholars), and the Indonesian constitution. They used a methodology called “unrestricted reasoning” (*istidlal*), with stated aims to maximise *maslaha* (public interest) and reduce *mudarat* (harm) to arrive at rulings.

The three fatwas show that women *ulama* also have the ability and the expertise in Islamic sources to formulate these recommendations. They also show that the *ulama perempuan* do not restrict themselves to the Qur’an, hadith, other classical Islamic texts, and talking about the past. Like the best judges in any society, they are also experts in diverse contemporary issues.

Indeed, Nur Rofi’ah, an expert in Qur’anic and gender studies who took part in the congress, told us that it produced more than fatwas, which usually consist of only a few pages of argumentation. The congress considered a larger range of sources during its deliberations, including evidence of conditions and challenges faced by women. It also produced far longer and more in-depth textual explanations.

Some Indonesian gender rights activists, and Indonesian fatwa committees themselves, use the term *sikap keagamaan* (religious views) for recommendations that come out of this more complex deliberation process and outcome.

But whether one calls these fatwas or *sikap keagamaan*, their significance was clear: This congress was a historic step towards reestablishing the long-lost juristic authority of women to produce Islamic legal recommendations and rulings. (Mirjam Künkler and Eva Nisa).

Source: <https://www.opendemocracy.net/5050/mirjam-k-nkler-eva-nisa/fatwa-sexual-violence-women-Islamic-scholars>

H. Jusuf Kalla

Wakil Presiden Republik Indonesia

"Kongres ini menandakan bahwa perempuan di Indonesia itu karyanya tidak terbatas, apakah dia ulama, guru, cendekiawan, profesional, menteri, juga presiden, itu terbuka di Indonesia.

Beda di banyak negara, apalagi di negara-negara Islam. Karena itulah, kepeloporan untuk membuka kesempatan atau membikin suatu pertemuan seperti ini tentu sangat penting dan pemerintah sangat mendukung acaranya."

Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia

"Mudah-mudahan kongres ini melahirkan keputusan-keputusan yang membanggakan dan memberikan pengaruh positif tak hanya bagi kegiatan dan perkembangan perempuan Indonesia, tapi juga perkembangan perempuan-perempuan di dunia."

Dr. KH. Said Agil Siroj

Ketua Umum PBNU

"Mabruk atas terselenggaranya Mu'tamar 'Alimat. Mudah-mudahan ini merupakan langkah pertama yang bermanfaat luas untuk kita semua.... Mari kita sebarakan (Islam yang moderat dan toleran) ke 'alimat ajnabiyat, luar negeri, Internasional, agar kita mampu menularkan cara ber-Islam Indonesia ke seluruh dunia yaitu Islam Nusantara: Islam yang menghormati budaya, Islam yang menjadikan budaya sebagai infrastruktur dari agama."

Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA **Imam Besar Masjid Istiqlal**

"Kongres Ulama Perempuan Indonesia ini menunjukkan kemandirian Muslimah karena dengan Kongres ini perempuan mempunyai forum untuk membahas sikap keagamaan dalam perspektif mereka. Hal ini penting untuk mengimbangi forum-forum keagamaan lainnya yang sampai saat ini lebih banyak diwarnai oleh perspektif laki-laki."

Hatoon Al-Fassi

Pengamat KUPI dari Saudi Arabia

"I think this congress is a starting point for to join efforts of muslim 'ulamas, female scholars from all over the muslim world in order to present, create a platform so that women could interchange, could exchange actually, their knowledge, their experiences and not to go and re-build or re-create the will but by continue from where the previous scholars have started."

Prof. Dr. Dien Samsuddin

Tokoh Muhammadiyah

"Kongres ini dapat dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi dan silaturfikri di antara tokoh perempuan muslimah Indonesia terutama untuk membahas peran kaum perempuan muslim dalam memajukan kehidupan bangsa, dan oleh karena itu kongres ini diharapkan bisa menghasilkan keputusan, rekomendasi-rekomendasi terbaik dan terutama untuk membangkitkan kaum perempuan Indonesia."

Alissa Wahid

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian

"Indonesia dan dunia membutuhkan kehadiran kiprah para ulama perempuan. Semoga langkah KUPI di Cirebon menjadi langkah pertama kita untuk ikut berkontribusi menyembuhkan dunia. Dan semoga berbuah berkah Allah SWT."

Drs. H. Lukman Syaefuddin

Menteri Agama Republik Indonesia

"Saya mencatat tiga makna strategis Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Pertama, ia telah berhasil memperjuangkan keadilan melalui kesadaran peran dan relasi hubungan laki-laki dan perempuan. Kedua, ia telah mampu melakukan tidak hanya rekognisi, tapi juga revitalisasi terhadap peran ulama-ulama perempuan sejak zaman Siti 'Aisyah istri Rasulullah sampai terus di Indonesia ini. Ketiga, Kongres ini telah berhasil meneguhkan sekaligus menegaskan bahwa moderasi Islam itu harus senantiasa kita kedepankan. Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil 'aalamiin, Islam yang tidak menyudutkan posisi kedudukan perempuan, Islam yang menebarkan kemaslahatan bagi sesama."